

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/346225401>

Langkah Mewujudkan Insan Cita

Chapter · November 2020

CITATIONS

0

READS

1,231

2 authors:



Beche Mamma

Bosowa University

8 PUBLICATIONS 3 CITATIONS

SEE PROFILE



Ismail Suardi Wekke

Institut Agama Islam Negeri Sorong

758 PUBLICATIONS 1,414 CITATIONS

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:



Indek Partisipasi Masyarakat Dalam Mengenal Program di Direktorat PSPKKM Kemensos RI [View project](#)



Desain Penelitian Kuantitatif [View project](#)

REFERENSI

Langkah Mewujudkan Insan Cita

Pandangan Lintas Disiplin

**Bahtiar Maddatuang
Zakir Sabara
Ismail Suardi Wekke
Abd Karim**

Langkah Mewujudkan Insan Cita

Pandangan Lintas Disiplin

Bahtiar Maddatuang
Zakir Sabara
Ismail Suardi Wekke
Abd Karim

**Langkah Mewujudkan Insan Cita
Pandangan Lintas Disiplin**

CV. PENERBIT QIARA MEDIA

349 hlm: 15,5 x 23 cm

Copyright @2020 Bahtiar Maddatuang, Zakir Sabara, Ismail Suardi Wekke,
Abd Karim

ISBN: 978-623-680-707-1

Penerbit IKAPI No. 237/JTI/2019

Penulis:

Bahtiar Maddatuang

Zakir Sabara

Ismail Suardi Wekke

Abd Karim

Editor: Tim Qiara Media

Layout: Nur Fahmi Hariyanto

Desainer Sampul: Dema Nurvita Loka

Gambar diperoleh dari www.google.com

Cetakan Pertama, 2020

Diterbitkan oleh:

CV. Penerbit Qiara Media - Pasuruan, Jawa Timur

Email: qiaramediapartner@gmail.com

Web: qiaramedia.wordpress.com

Blog: qiaramediapartner.blogspot.com

Instagram: [qiara_media](https://www.instagram.com/qiara_media)

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip dan/atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis penerbit.

Dicetak Oleh CV. Penerbit Qiara Media

Isi diluar tanggung Jawab Percetakan

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA**

**PASAL 72
KETENTUAN PIDANA
SANKSI PELANGGARAN**

- a. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dengan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah).
- b. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, atas segala curahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga selalu diberikan kesehatan dalam menjalankan setiap aktivitas kita semua.

Himpunan Mahasiswa Islam (HmI) berdiri pada 5 Februari 1947. Ketika itu Belanda mulai mengancam kembali kedaulatan Republik. Bersama Kartono Zarkasy (Ambarawa), Dahlan Husein (Palembang), Siti Zainah (Palembang), Maisaroh Hilal (cucu pendiri Muhammadiyah KH.Ahmad Dahlan, Singapura), Soewali (Jember), Yusdi Gozali (Semarang, juga pendiri PII), M. Anwar (Malang), Hasan Basri (Surakarta), Marwan (Bengkulu), Tayeb Razak (Jakarta), Toha Mashudi (Malang), Bidron Hadi (Kauman-Yogyakarta), Sulkarnaen (Bengkulu) dan Mansyur, Lafran Pane mendirikan organisasi mahasiswa Islam ini di ibukota perjuangan Republik Indonesia di Yogyakarta.

Mereka mendirikan HMI karena organisasi Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta (PMY) mereka anggap tidak menyalurkan aspirasi keagamaan. Ketika itu Soetan Sjahrir masih memimpin kabinet sehingga tidak heran jika PMY dipengaruhi semangat

sosialisme. Perdana Menteri Syahrir adalah tokoh Partai Sosialis Indonesia (PSI).

Saat ini HMI memiliki 156 Cabang dan 14 Badko seluruh Indonesia, dengan jumlah anggota yang tak bisa lagi terhitung jumlah. Ada yang beranggapan bahwa jumlah anggotanya sebanyak 1/3 (sepetiga) populasi jumlah penduduk Indonesia saat ini. Bukan tanpa dasar jumlah anggota sebanyak itu karena dirasiokan dengan jumlah Cabang seluruh Indonesia yang berjumlah 156 Cabang dari 134 jumlah Provinsi se-Indonesia.

HMI yang sudah berusia 73 Tahun telah banyak berkontribusi terhadap pembangunan bangsa, mulai dari jenjang pemerintahan terkecil (desa), hingga pada jenjang pemerintahan tingkatan pusat. HMI telah berkontribusi dalam memberikan gagasan dan tindakan pada peningkatan gerak pembangunan bangsa dalam mendorong kualitas sumber daya manusia. Selain semua itu, HMI juga telah mampu memberikan corak tersendiri bagi seluruh organisasi ekstra kampus yang selalu beradaptasi pada situasi secara kontemporer.

Insan Cita Community merupakan wadah pada semua kader HMI yang pernah berproses pada HMI Cabang Makassar, Gowa Raya dan Makassar Timur. Berawal dari ketiga HMI Cabang ini, banyak idea concept yang sudah mulai berjalan di Kawasan Timur Indonesia. Hal paling nyata adalah peningkatan kualitas SDM melalui lembaga institusi perguruan tinggi. Dimana para

anggota wadah Insan Cita Community menjalankan aktivitas sebagai implementasi wujud dari kualitas insan cita HMI pada aspek Pengabdian.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 20 April 2020

**Bahtiar Maddatuang
Zakir Sabara
Ismail Suardi Wekke
Abd Karim**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
1. Perguruan Tinggi Sebagai Lokomotif Penggerak Ekonomi Masyarakat Desa - Bahtiar Maddatuang	1
2. Ekologi Dalam Cengkraman Kapitalisme Global - Natsar Desi	20
3. Alih Fungsi Lahan, Bencana Banjir, Dan Adaptasi Lingkungan Masyarakat Pinggiran Kota Makassar - Zakir Sabara.....	32
4. Perilaku Beragama Dan Fungsi Masjid Kampus Sebagai Sarana Ibadah Dan Laboratorium Intelektual di Universitas Muhammadiyah Makassar - Abdul Aziz Muslimin	46
5. Problematika Komunikasi Bencana Di Indonesia: Covid 19 Dari Agenda Setting Media Ke Resepsi Khalayak - Nahrul Hayat.....	60
6. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja - Andi Irwan	77
7. Era Industri 4.0 dan Bisnis Star Up - Sofyan Hamid Indar	93
8. Emansipatoris Akuntansi Sosial Keindonesiaan: Studi Kritis Hegemoni Gramsci - Antong.....	122

9. Negara, Energi, dan Kesejahteraan Rakyat - Burhanuddin.....	141
10. Kearifan Lokal To Wani To Lotang dan Peranannya terhadap Penguatan Nilai-nilai Kebhinnekaan di Indonesia - Rustan Efendy	164
11. Lembaga Pendidikan Islam di Minoritas Muslim Kota Sorong - Ismail Suardi Wekke, Siarni, Nuryantika	195
12. Keywords Memahami Filsafat, Matematika Dan Komputer Adalah Logika - Ilham Djufri	211
13. Pengembangan Kawasan Pertanian Pedesaan Berbasis Potensi Ekonomi Lokal - Abdul Karim.....	239
14. Rancangan Model Percepatan Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan Berbasis Dana Desa - Amrullah.....	259
15. Realisasi Pendidikan Menyongsong Revolusi Industri 4.0 dan Bonus Demografi - Muh. Arman	278
16. ASEAN dan Prinsip Non-Intervensi - Beche Bt Mamma ..	293
17. Upgrading Batubara Peringkat Rendah Melalui Metode Blending Dengan Bio-Massa Tempurung Kelapa Hasil Pirolisis - Al Gazali	306
DAFTAR PUSTAKA	323

Perguruan Tinggi Sebagai Lokomotif Penggerak Ekonomi Masyarakat Desa

Bahtiar Maddatuang

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMKOP, Makassar, Sulawesi Selatan

Email: bahtiar_maddatuang25@gmail.com

Pendahuluan

Dewasa ini perekonomian semakin erat kaitannya dengan sains, teknologi, dan inovasi. Ketiga faktor itu tentu sangat memerlukan entitas yang kuat dalam riset dan pengembangan. Perguruan tinggi di berbagai negara sudah diakui sebagai tempat berkembangnya faktor-faktor penggerak ekonomi modern, sehingga tidak salah bila perusahaan-perusahaan berbasis inovasi dan pengetahuan terhadap kampus-kampus besar. Keadaan ini akhirnya menjadi simbiosis mutualisme yang sangat baik untuk ekosistem pendidikan tinggi.

Perkembangan informasi pada era 4.0 saat ini, tentunya harus dituntut oleh semua pihak untuk dapat memberikan kontribusinya terhadap laju perkembangan informasi. Perguruan Tinggi sebagai lokomotif dalam pembangunan seyogyanya harus menjadikan desa sebagai ranah dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan. Perguruan Tinggi juga perlu menerapkan *e-learning*, yang bukan saja ditujukan kepada mahasiswa

sendiri, melainkan lebih penting lagi kepada seluruh masyarakat desa. Platform Akademi Desa 4.0 akademi.desa.kemendesa.go.id bisa digunakan sebagai ekosistem pendidikan daring untuk menjangkau warga desa-desa di seluruh Indonesia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa sebagai pengejewantahan pertumbuhan secara nasional.

Kampus yang saat ini hanya dijadikan sebagai mencetak lulusan sarjana dan siap memasuki dunia kerja diperkantoran. Paradigma seperti demikian harus dilakukan transformasi dalam bentuk paradigm, bahwasanya lulusan perguruan tinggi harus mampu memberikan kontribusi dalam bentuk kreativitas dan inovasi bagi seluruh masyarakat yang ada di desa, (Karim, A. 2019).

Potensi meningkatkan produktivitas semakin tinggi dan Perguruan Tinggi harus mampu menekan beban ketergantungan (*dependency burden*) sampai tingkat terendah, Indonesia diprediksi akan memperoleh bonus demografi. Dimana, penduduk Indonesia akan didominasi oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun). Peningkatan penduduk usia produktif muncul sejak tahun 2010, namun diprediksi puncaknya terletak pada kurun waktu pada Tahun 2030, jumlah penduduk Indonesia diprediksi meningkat menjadi 305 Juta Jiwa dan sebanyak 195 Juta Jiwa (64%) merupakan penduduk usia produktif. Meningkatkan pengangguran akibat proporsi tidak seimbang

antara jumlah angkatan kerja dengan tingkat partisipasi angkatan kerja.

Dengan pertumbuhan ekonomi riil rata-rata 5 - 6 % per tahun, didukung oleh peningkatan teknologi dan tingginya jumlah penduduk yang mencapai 310 Juta Jiwa pada Tahun PDB Indonesia diperkirakan mencapai US\$ 9,1 Triliun pada tahun 2045 (terbesar ke-4 di dunia). PDB per kapita diperkirakan mencapai U\$ (setara dengan Korea Selatan, Italia dan Spanyol saat ini). Indonesia memiliki 4.300 lebih perguruan tinggi. Seandainya 100.000 saja mahasiswa yang dikirim ke desa setiap tahun. Jika setiap perguruan tinggi mendelegasikan mahasiswanya masuk desa sebanyak 5 orang mahasiswa, maka akan ada 20 ribuan desa yang diintervensi dalam peningkatan SDM pada sektor ekonomi yang produktif selama lima tahun. (deticom. 2019).

Sejarah mengajarkan bahwa pemuda selalu berperan dalam menentukan arah masa depan bangsa di saat mengalami kritis. Dewasa ini sekalipun pemuda berada dalam kungkungan masalah yang kompleks, namun masih berpotensi memecahkan masalahnya sendiri. Termasuk memiliki kapasitas dalam membantu perbaikan kesejahteraan warga, khususnya di pedesaan yang mengalami tantangan globalisasi dan perubahan lingkungan. Tingginya persentase penganggur terdidik dan rendahnya sumberdaya manusia dari para aktor pembangunan pedesaan serta masih belum optimalnya pengelolaan

sumberdaya, baik alam maupun pemerintah desa, membutuhkan pemuda terdidik untuk meretas situasi ini. Pertumbuhan pembangunan di wilayah pedesaan sejauh ini nampak lambat dan bersifat alami. Investasi pembangunan yang dicerminkan melalui aktivitas proyek – proyek, baik pemerintahan maupun swasta nyaris kurang memberikan dampak signifikan terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat. (Kemenpora, 2011: 8-11).

Pembangunan kawasan pedesaan semestinya tak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah setempat. Perlu kerjasama dan dukungan dari banyak pihak agar pembangunan desa lebih maksimal. Mahasiswa calon sarjana merupakan bibit potensial yang berperan sebagai penggerak/pelopor dalam mengakselerasi proses pembangunan bangsa terutama pembangunan kawasan pedesaan, yang sudah menjadi dasar kewajiban mahasiswa pada Tri Darma Perguruan Tinggi, baik dari segi pendidikan, penelitian, dan pengabdian yang harusnya diimplementasikan oleh mahasiswa kepada desa-desa yang ada di daerahnya.

Perguruan Tinggi Sebagai Lokomotif Peradaban

Pendidikan merupakan salah satu jalan yang sangat efektif untuk mensejahterakan masyarakat. Dimana dengan pendidikan diharapkan akan lahir teknologi dan inovasi baru yang akan membuat hidup lebih mudah dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Dengan kalimat lain output dari pendidikan terciptanya berbagai teknologi yang dulunya tidak mungkin

dikerjakan sehingga dapat dilaksanakan dengan baik. Apa yang dulunya belum mampu diketahui atau diprediksi dengan adanya teknologi mudah untuk diketahui serta diprediksi.

Teknologi yang ada semakin hari semakin berkembang mulai dari *Industri one point zero* samapai sekarang menjadi 4.0 (*fourth point zero*) dengan penguasaan big data, internet of thing sampai kepada printer tiga dimensi. Sehingga berbagai pekerjaan dapat dikerjakan dengan mudah dalam waktu yang sangat singkat. (tribunnews, 2019).

Perkembangan teknologi membuat orientasi serta perilaku dan budaya masyarakat berubah secara signifikan. Perubahan yang terjadi begitu cepat membuat masyarakat dalam bertindak diharuskan untuk berubah pula sebagaimana perubahan zaman yang terjadi. Bagi yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, maka dipastikan akan tertinggal dan tersisihkan dari pergerakan peradaban dunia.

Suka atau tidak, lembaga pendidikan dituntut untuk melakukan perubahan secara bertahap dan pasti agar tidak dijauhan oleh masyarakat. Kalangan muda sekarang yang diistilahkan sebagai kelompok milenial mempunyai kebiasaan yang berubah secara drastis. Dimana mereka tidak pernah jauh dari gejetnya yang selalu terkoneksi dengan internet. Sehingga pola hidup dan berbagai transaksi cenderung dilakukan dengan peralatan teknologi tersebut. Perkembangan teknologi yang begitu cepat, perlu diimbangi dengan pelaksanaan pendidikan tinggi

khususnya yang dapat mengikuti perkembangan zaman. Perubahan yang terjadi dengan sangat luar biasa tersebut, harus dapat diimbangi dengan metode pembelajaran yang sejalan dengan perkembangan zaman. Seharusnya perguruan tinggi juga menjadi pelopor utama dalam pembangunan teknologi khususnya pada aktivitas elektronik komersial yang sedang marak-maraknya.

Indonesia yang luas wilayahnya 5.455.675 km² dan 3.544.744 km² dimana dua pertiga wilayahnya adalah laut, dipisahkan oleh ribuan pulau sangat penting untuk menyiapkan infrastruktur teknologi informasi. Sehingga diperlukan kerjasama yang baik, terutama pendidikan tinggi dengan telkom yang notabnya badan usaha milik pemerintah. Kerjasama saling menguatkan dalam peran masing-masing sangat dibutuhkan untuk kemajuan bangsa yang lebih hakiki. Bonus demografi yang terjadi dalam masyarakat kita mesti dapat dimanfaatkan sebagai momentum yang baik untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Apabila ini tidak diarahkan pada kegiatan yang positif serta produktif dikhawatirkan akan menjadi beban masyarakat yang sangat luar biasa. Hal tersebut dikarenakan bagaikan dua mata pisau yang saling mengancam. Apabila bonus demografi tersebut tidak dapat diciptakan peluang kerja yang cukup akan menyumbang pengangguran yang merupakan cikal bakal tumbuh berkembangnya penyakit masyarakat. Namun dengan sumber

daya manusia yang sudah dipersiapkan secara baik dan benar oleh lembaga pendidikan tinggi khususnya, tentu akan mampu mengolah sumberdaya alam yang ada dikelola dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat. (Karim, A. 2019).

Perguruan tinggi di Indonesia yang sangat variatif dan SDM yang umumnya sangat terbatas mengharuskan lembaga tersebut berkolaborasi antara perguruan tinggi yang berada di kota besar dengan perguruan tinggi yang berada di daerah terpencil. Dengan adanya kolaborasi diharapkan hambatan serta persoalan SDM yang terbatas dapat diminimalisir. Begitu juga terhadap dunia usaha serta pihak pemerintah. Sinergisitas suatu keharusan dalam mengoptimalkan output untuk kesejahteraan masyarakat.

Indonesia yang memiliki jumlah penduduk 267 juta lebih merupakan salah satu persoalan yang mesti dilakukan dengan perencanaan yang baik. Apalagi sekarang ini kita sedang dihadapi pada situasi bonus demografi yang sangat menguntungkan dikarenakan memiliki penduduk yang dominan dengan umur produktif. Apabila salah langkah dalam kebijakan yang dilakukan ditakutkan justru akan menjadi beban sosial pengangguran. Potensi ini sangat perlu diarahkan pada kegiatan yang produktif, sehingga akan membuat pertumbuhan ekonomi semakin nyata. Lembaga pendidikan hendaknya lebih banyak diarahkan kepada pendidikan vokasi terutama yang menyangkut *e-comer*. Banyak sekali potensi berbagai bidang yang belum termanfaatkan

semestinya dapat diarahkan pada elektronik komersial. Untuk itu pendidikan pada bidang tersebut mestinya lebih diprioritaskan.

Lembaga pendidikan terutama pendidikan tinggi semestinya menjadi inisiator utama dalam menciptakan inovasi. Dari lembaga tersebut, diharapkan sebagai motor utama perkembangan teknologi di dalam masyarakat supaya hidup lebih mudah. Tindakan nyata yang mesti dilakukan oleh lembaga pendidikan tinggi adalah penguatan terhadap lembaga penelitian yang merupakan harapan masyarakat terhadap lahirnya inovasi untuk pembangunan peradaban bangsa. Penelitian yang dilakukan secara kolaborasi dengan berbagai disiplin ilmu serta lembaga pendidikan yang berfariatif perlu diberikan apresiasi yang positif. Apalagi kolaborasi tersebut dapat melibatkan dunia usaha. Sehingga outputnya menjadi karya nyata yang akan dinikmati oleh masyarakat secara umum.

Pengembangan pendidikan tinggi merupakan suatu keharusan agar dapat mengangkat peradaban manusia lebih nyata. Perguruan tinggi semestinya menjadi penyeimbang dalam keragaman masyarakat serta peningkatan ke arah yang lebih baik untuk mempercepat kesejahteraan yang lebih optimal. Perkembangan teknologi hasil temuan dari sivitas akademika seharusnya lebih menonjol dibandingkan sumbangsuhnya dalam koreksi sosial terhadap kebijakan pemerintahan. (tribunnews, 2019).

Pasar Desa Sebagai Sarana Penggerak Ekonomi Desa

Posisi desa saat ini diproyeksikan akan menjadi *icon* pembangunan bangsa yang bisa dikonsepsi warna dan coraknya disesuaikan dengan potensi baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia juga termasuk etnik kulturalnya yang unik dan spesifik. Kekuatan inilah yang akan menjadi stimulator bagi pembangunan dan daya tarik di desa. Gaung slogan yang mengatakan "Desa Membangun Ekonomi Bangsa" dimaknai sebagai suatu kekuatan yang harus bisa diberdayakan dengan menggali potensi yang dimiliki oleh suatu desa. Arah dan pelarian pola pikir masyarakat dari desa ke perkotaan makin lama bisa bergeser dari kota kembali ke desa. Dengan kekuatan investasi pembangunan melalui dana desa yang diguyurkan oleh pemerintah akan membawa arah angin segar dalam mendorong peningkatan rancang pembangunan desa. Hasrat dan spirit dalam membangun infrastruktur desa harus ada sesuatu yang bisa menjembatani kebangkitan perekonomian desa. Kebangkitan ekonomi dari desa untuk bangsa yang merupakan landasan pacu dan lokomotif dalam pembangunan desa adalah dengan adanya pasar desa. (Karim, A. 2019)

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sudah menyiapkan sejumlah program unggulan guna mendorong peningkatan aktifitas perekonomian masyarakat desa, salah satunya adalah pembentukan Pasar. Ada tiga hal penting peran pasar desa dalam

proses kehidupan dan pembangunan masyarakat pedesaan yaitu: Pertama, berfungsi sebagai entitas ekonomi. Hal ini dimaknai pasar desa berperansn sebagai penggerak roda perekonomian pedesaan baik dari sektor perdagangan, sektor industri ataupun sektor jasa. Kedua, berfungsi sebagai entitas sosial. Maknanya pasar desa sangat kuat dalam mempertahankan budaya lokal, yaitu budaya gotong royong, kebersamaan dan budaya kekeluargaan. Bertemunya antara penjual dan pembeli, tidak hanya sekedar untuk melakukan transaksi ekonomi, tetapi lebih dari itu sekaligus menjadi media interaksi sosial. Ketiga, berfungsi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa (PADes). Hal ini mencerminkan Pasar Desa bisa menjadi ladang penerimaan dana desa yang berasal dari retribusi para pedagang dan penjual jasa yang beraktivitas didalam dan sekitar pasar desa. (timesindonesia, 2017).

Dengan peran pasar desa tersebut bisa dipandang sebagai stimulator dan dinamisator dalam menggerakkan bagi roda perekonomian di wilayah perdesaan tersebut.

Pengelolaan pasar desa nantinya harus ditangani dan dikendalikan secara profesional dan terprogram dengan baik. Bila di desa sudah terbangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maka pengelolaan pasar desa akan bisa dijalankan oleh BUMDes. Potensi yang dimiliki oleh desa yang berupa hasil-hasil alam yang berupa hasil produk pertanian serta hasil produk-produk yang

sudah diolah oleh masyarakat desa, akan mampu di linkkan ke berbagai lini konsumen pengguna.

Disamping itu juga akan digunakan untuk memasarkan produk-produk yang juga dibutuhkan oleh masyarakat desa. Dan diharapkan bisa menjadi sumber pendapatan bagi Pemerintahan Desa. Dalam kementerian Desa PDTT juga sudah dicanangkan dan dilakukan konsep *Village Industrial and Rest Area* (VIRA) di pasar-pasar desa dimana hal ini diharapkan bisa terbentuk pasar yang lengkap tidak hanya lapak-lapak pedagang, tetapi juga ada kantor pengelola pasar, gudang, warung kuliner, dan ruang untuk galeri dan fasilitas umum. Dengan didirikannya pasar desa yang dikelola dengan lembaga BUMDes yang baik, maka produk-produk masyarakat desa akan bisa dikembangkan dan ditingkatkan kualitas dan jenisnya sehingga menjadi produk yang kompetitif dan juga sekaligus bisa diperjualbelikan sebagai produk-produk unggulan maupun produk etnik di kawasan desa setempat.

Kedepan, konsep pengembangan dan pemberdayaan pasar desa tidak sekedar pasar lokal atau pasar tradisional tapi lebih jauh akan dikembangkan menjadi pasar modern dengan memanfaatkan kemajuan informasi dan teknologi yaitu pasar on line, bahasa kerennya *e-commerce market village*. BUMDes akan menjadi operator utama pengembangan pasar desa dan sudah pasti harus didukung dengan kemampuan sumberdaya manusia yang terlatih, handal dan profesional. (timesindonesia, 2017).

Pemafaatan Potensi Desa Sebagai Sarana Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pemerintah menargetkan 5.000 Desa tertinggal akan menjadi berkembang dan 2.000 desa berkembang menjadi Desa Mandiri. Kemendes PDTT optimis, program dana desa yang digulirkan sejak 2015 bisa memberikan perubahan nyata kepada seluruh Desa di Indonesia. Menurut data Kemendes RI, realisasi dana desa terus mengalami peningkatan, Tahun 2015, dana desa yang terserap sebesar 82 %, tahun 2016 naik menjadi 97 %, dan tahun 2017 kembali meningkat mendekati 99 %. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal pada tahun 2018 ini dana desa dapat terserap sebanyak 100 persen.

Potensi Desa (Podes) merupakan pendataan terhadap ketersediaan infrastruktur, potensi sosial dan ekonomi yang dimiliki oleh setiap wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Selain itu melihat pergeseran status desa, pendataan Podes tahun 2018 juga dilakukan untuk melihat dampak dana desa pada pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Program Podes ini dilakukan dalam kurun waktu sepuluh tahun sebanyak tiga kali, sebagai pendudukan data sensus penduduk. Berdasarkan besaran dana desa yang sudah digelontorkan oleh pemerintah, Kementerian Keuangan RI merekapnya pada triwulan pertama

2018 mencapai 10,3 triliun atau 17,1 persen dari total anggaran Rp. 60 triliun. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya hanya sebesar Rp. 7,1 triliun atau 15 persen dari total alokasi (bumdes.id, 2018).

Mengembangkan suatu desa menjadi desa wisata harus menggali dan mengidentifikasi potensi-potensi desa yang dimiliki (alam, budaya, buatan manusia) yang kelak menarik dilihat dan dikunjungi oleh wisatawan yang memang memiliki keunikan tidak ada duanya di tempat lain. Setiap desa wisata pasti memiliki keunikan yang tiada duanya di desa lain, menarik dikemas menjadi paket wisata dan ditawarkan kepada wisatawan, baik melalui sebuah brosur yang ditawarkan kepada biro perjalanan, maupun dipromosikan melalui media *on-line* yang dikenal dengan *website*. Setiap potensi desa harus dikembangkan dalam bentuk penguatan potensi desa. Penguatan potensi setiap desa harus dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu (1) penyadaran; (2) pelatihan dan (3) pendampingan. (Nur, Indrayani, dkk. 2018).

Pengembangan desa pada dasarnya adalah proses bagaimana sebuah desa dapat berkembang dan sebagai pusat yang memiliki unsur ekonomi dan pendidikan. Pembangunan sektor desa sangat potensial sekali untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaannya. Hal-hal yang dapat dicapai dalam proses partisipasi dan terbentuknya pengembangan desa

adalah meningkatkan kemampuan (*capacity building*) dan penguatan kelembagaan (*institutional strengthening*) komunitas lokal melalui proses belajar pengalaman (*experience based learning process*) dengan cara melibatkan masyarakat dalam berbagai aspek dari proses pemberdayaan. (Mahardika, 2001, hal. 25).

Pengembangan masyarakat dalam berbagai aspek memerlukan memerlukan berbagai sumber daya yang menjadi tumpuan dan modal penting dalam mengembangkan kapasitas masyarakat untuk secara mandiri membentuk masa depan diri dan kelompok/komunitasnya. Potensi dan *Resource* yang tersedia, baik dalam wujud sumberdaya manusia (SDM), sumberdaya alam (SDA), maupun sumberdaya sosial. Untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat pada tingkat ideal, diperlukan pemanfaatan segala sumberdaya yang ada secara optimal. Potensi dan *Resource* yang tersedia harus diaktualisasikan, sehingga tidak tertinggal hanya semata sebagai potensi yang mubazir. Sumberdaya utama yang ada dan tersedia, yang bisa dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan dan pengembangan kesejahteraan masyarakat salah satunya adalah potensi sumberdaya manusia (SDM).

Dalam proses pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, sumberdaya manusia tidak hanya dilihat peranannya dari aspek ekonomi, tetapi juga dari aspek non-ekonomi. Jika dilihat dari sisi ekonomi yang sempit, sumberdaya manusia hanya

semata-semata dilihat dan diposisikan sebagai faktor produksi, sehingga diperlakukan sebagai objek (material). Padahal dalam perspektif perubahan faktor manusia merupakan faktor yang utama, sehingga sejatinya manusia merupakan subjek pembangunan. Kontribusi dan peranan yang dimainkannya tidak hanya ditentukan oleh faktor kuantitas, tetapi juga oleh kualitasnya baik sebagai objek maupun subjek pembangunan. (Soetomo, 2012).

Peta Potensi Desa Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat

potensi desa merupakan sebagai penggerak perekonomian rakyat yang memiliki pengertian bahwa tumbuh dan berkembangnya perekonomian desa akan mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal yang tersedia. hal ini menunjukkan bahwa potensi desa harus lebih diutamakan pada optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal, baik sumber daya alam maupun potensi yang ada. pencapaian pembangunan optimalisasi tersebut bermuara pada pengelolaan potensi desa sebagai basis penggerak ekonomi kerakyatan dalam suatu sistem yang sinergis. pembangunan desa dan kawasan perdesaan berdasarkan potensi lokal secara komprehensif merupakan faktor penting bagi pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antarwilayah (kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, 2018).

implikasi pengembangan potensi lokal terhadap kondisi suatu negara (dan kota) dapat ditinjau dari beberapa aspek diantaranya 1) aspek sosial: peningkatan kualitas hidup, pemerataan kesejahteraan dan peningkatan toleransi sosial; 2) kontribusi ekonomi: memberikan peningkatan signifikan terhadap pdb suatu negara (kota), menciptakan lapangan kerja, mendorong pengembangan produk berorientasi ekspor; 3) iklim bisnis: mendorong penciptaan lapangan pekerjaan, membuka peluang pasar untuk produk kreatif baik domestik maupun internasional; 4) citra dan identitas bangsa: meningkatkan kunjungan wisatawan asing, menjadikan budaya bangsa sebagai ikon nasional, menjaga dan melastarikan warisan nilai budaya; 5) sumber daya terbarukan: transformasi ekonomi berbasis kreativitas dan inovasi sangat membutuhkan sdm kreatif yang diperoleh melalui pengetahuan, menciptakan *sustainable community*; 6) inovasi dan kreativitas: pemberian nilai tambah dalam setiap produksi melalui ide dan gagasan. (simatupang *et al.*, 2012: 174).

percepatan desentralisasi dan otonomi daerah menghadapi berbagai kendala antara lain masih terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia yang baik dan profesional, masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan daerah itu sendiri maupun sumber dana dari luar daerah, belum tersusunnya kelembagaan yang efektif, belum terbangunnya system dan regulasi yang jelas

dan tegas, kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional.

pembangunan masyarakat dengan pendekatan pemberdayaan (masyarakat, ekonomi dan lingkungan) diharapkan dapat menyentuh langsung secara komprehensif baik fisik kawasan maupun masyarakat yang tinggal di dalamnya. kegiatan dalam proses pembangunan masyarakat diharapkan adanya data dan informasi dari hasil identifikasi di desa yang dapat menggambarkan kondisi/profil potensi dan permasalahan secara rinci, sehingga data tersebut dapat ditampilkan dalam pengambilan kebijakan pemerintah dalam urutan prioritas yang mengutamakan kawasan yang perlu segera ditangani melalui pendekatan dan batasan daerah pada hirarki kabupaten.

Penutup

Untuk memberdayakan masyarakat, mutlak diperlukan untuk memerhatikan kondisi setempat. Masing-masing desa sampel memiliki kebutuhan dan potensi yang berbeda. Tentang bagaimana mengelola potensi dalam mengatasi masalah yang ada, masyarakat sudah mengetahui caranya. Dengan demikian dukungan dari pihak luar adalah memfasilitasi dan membimbing bagaimana agar cara yang ditetapkan oleh masyarakat setempat dapat mencapai tujuan yang ada. Pihak kaum akademis membimbing bagaimana merencanakan dan menyusun langkah yang perlu dirancang. Kemudian pihak pemerintah memberikan

stimulans dan memfasilitasi agar rencana yang ditetapkan oleh masyarakat melalui musyawarah perencanaan desa dapat terwujud. Kemudian perlu dilibatkan pihak dunia usaha untuk memberikan dukungannya.

Masyarakat setempat dapat dipandang sebagai suatu sistem sosial lokal (*local social system*). Pandangan ini dicakup oleh konsep sosiologis mengenai lokal (*locale*) yang dikemukakan oleh Giddens artinya suatu masyarakat setempat selain menempati ruang (*space*) juga mempunyai sistem nilai, jaringan sosial serta dinamika aktifitas sehari-hari (*everyday life*). Masyarakat setempat inilah yang menjadi basis penempatan sosialisasi individu sebagai anggota komunitas, ajang pembentukan ciri keluarga, dan terbentuknya ras kebersamaan di antara para anggotanya. Sebagai suatu entitas sosial yang solid, warga komunitas mempunyai harapan, pandangan serta pengertian yang relatif sama tentang suatu hal. Demikian halnya mengenai partisipasi masyarakat. Masyarakat setempat mempunyai pengertian, pandangan dan aspirasi-aspirasi mengenai partisipasi mereka dalam proyek pembangunan.

Perguruan Tinggi tidak hanya mencetak lulusan yang siap jadi karyawan, memperbanyak wisuda mahasiswa yang siap berkompetisi di kota, tapi tidak mau kembali ke desa. Karena itu masyarakat kampus, baik yang bersifat akademik maupun non akademik, harus berdampak pada kebangkitan dan kesejahteraan masyarakat desa. Kampus masa depan adalah kampus yang

menyelipkan rasa cinta kampung halaman kepada mahasiswanya. Ini harus menjadi kampus pemberdayaan, yaitu kampus yang memberi ruang lahirnya calon aparatur desa yang kreatif, inovatif, serta memiliki karakter kepemimpinan yang kuat. Kampus yang masyhur adalah kampus yang selalu hadir untuk desa dalam pencapaian kesejahteraan ekonomi masyarakat desa dalam Perencanaan dan Musyawarah Desa, *Good Village Government*, Keuangan dan Akuntansi Desa, Kepemimpinan Desa, Kewirausahaan Desa, Strategi Pertumbuhan Usaha Desa, dan Teknologi Tepat Guna Desa.

Ekologi Dalam Cengkraman Kapitalisme Global

Natsar Desi

Universitas Megarezky, Makassar

Email: desinatsar@yahoo.com

Pendahuluan

Sistem ekonomi Kapitalis tanpa diragukan telah merevolusi berbagai macam bidang kehidupan. Produk-produk dari industri dan telekomunikasi yang dihasilkan secara nyata mampu mengubah pola-pola peradaban. Ruang-ruang era globalisasi disesaki dengan teknologi baru, struktur sosial, sistem ekonomi dan kebudayaan baru yang pada era sebelumnya belum begitu akrab bagi manusia. Satu sisi kapitalisme memberi kontribusi dalam peradaban manusia. Akan tetapi, fakta negatif yang tidak bisa ditolak adalah, kapitalisme global menciptakan situasi sosial yang tidak kondusif. Mengubah hubungan antara modal dan tenaga kerja, terjadi peminggiran sosial (*social exclusion*) dan percepatan perusakan lingkungan global. Problem ekologi meluas seiring berkembangnya ekspansi ekonomi kapitalis di negara-negara berkembang. Menurut laporan WHO tahun 2003, pencemaran udara yang bersumber dari pabrik dan produk-produk modern telah menimbulkan penipisan lapisan ozon dan pemanasan global. Indonesia dalam hal ini, tidak bisa

melepaskan dari efek krisis ekologis tersebut. Kerusakan hutan, menurut pemberitaan media, Indonesia adalah perusak hutan tercepat di dunia, sebesar 2 persen/tahun (1,87 juta hektar), atau 51 km/hari. Itu berarti, seluas 300 lapangan sepak bola. Semua akibat ambisi konsumerisme tak terkontrol dari pemilik modal (Harian Kompas 21 Maret 2007). Kerusakan lingkungan ternyata tidak lepas budaya konsumeristik, materialistik, individualistik dan kebebasan. Budaya-budaya yang demikian merupakan kandungan dari *worldview* ekonomi kapitalis yang ternyata juga mengusung doktrin sekularisme.

Perlombaan untuk menjadi Negara dengan tingkat pendapatan tinggi sejatinya punya tujuan mulia, yaitu untuk kesejahteraan masyarakatnya. Namun, sayangnya aspek kesejahteraan tak jarang diletakkan secara sektoral yang mengorbankan alam. Akibatnya, ongkos yang harus dikeluarkan manusia terlalu mahal bila dibandingkan dengan keuntungan ekonomis yang diterimanya.

Egoisme dan antroposentrisme yang terbangun dari altar agung modernisme mencabik harmoni hukum alam. Manusia yang sesungguhnya sebagai bagian inheren dari alam menjelma menjadi raja yang menguasai, bukan mengayomi alam. Pemanjaan yang dihadirkan oleh modernisme bagi kehidupan manusia ternyata memunculkan nestapa bagi alam. Bencana yang belakangan terjadi dan menguras banyak kerugian material

bahkan nyawa seakan memvisualisasi bahwa alam sedang menagih keuntungan yang selama ini diraup oleh manusia.

Kerusakan lingkungan ternyata tidak lepas dari budaya konsumeristik, materialistik, individualistik dan kebebasan. Budaya-budaya yang demikian merupakan kandungan dari *worldview* ekonomi kapitalis yang ternyata juga mengusung doktrin sekularisme. Mencermati ideologi dan sistem berpikir kapitalisme seperti tersebut di atas, maka dalam sistem ini tidak dikenal konsep etika dan kepatuhan kepada kekuasaan PenciptaNya. Otomatis, hal ini memudahkan spiritualitas agama, sehingga mengakibatkan kosongnya spiritualitas dalam mental kapitalis, maka secara otomatis mereka kehilangan etika.

Ketika pemahaman kebudayaan tanpa menyertakan tafsir ekologi, maka sesungguhnya kebudayaan tersebut telah teramputasi secara ideologis. Sebab bagaimana mungkin kebudayaan akan mampu mentransformasikan nilai-nilai fungsionalnya jika infrastruktur yang menyangganya tidak diterjemahkan secara cermat. Dalam kasus kebudayaan Indonesia, yang ciri-ciri strategisnya ditentukan oleh pola ekonomi masyarakatnya, mestinya kebudayaannya juga dibentuk oleh pola-pola masyarakat agraris dan bangsa bahari. Oleh karena itu, kebaharian Indonesia hanya bisa jaya apabila ditopang oleh kekuatan masyarakat agraris sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tradisi yang panjang.

Jika masyarakat agraris merupakan infrastruktur pola ekonomi yang jelas-jelas menyediakan kebutuhan bahan pokok, maka ekonomi bahari merupakan substitusi yang menguatkan ekonomi Negara. Keduanya tak bisa dipisahkan karena justru merupakan simbiose yang saling menguntungkan. Keduanya menciptakan ekologi yang tidak hanya sarat dengan keragaman hayati tetapi juga keragaman religi. Ketika religi menjadi kesatuan yang utuh dengan sifat alam dan pola ekonomi penghuninya, maka ekologi semacam ini merupakan ekologi supra-natural yang tidak dimiliki bangsa manapun. Sayangnya budaya dalam ekologi tersebut mengalami penyingkiran manakala kolonialisme memasukkan sistem kultur penguasaan dan dilanjutkan dengan industrialisasi.

Pra-syarat yang perlu dilakukan dalam pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan adalah adanya kebutuhan melakukan pendekatan bioregion untuk keberlanjutan dan keselamatan manusia. Undang-undang Pengelolaan Sumberdaya Alam telah disetujui dan diimplementasikan untuk mengakhiri pengelolaan sektoral dan administratif. Kebutuhan mendasar umat manusia akan sumber pangan, kesehatan, dan pendidikan perlu dikedepankan dengan tetap mengakui kearifan lokal masyarakat yang selama ini eksis di berbagai tempat di Indonesia.

Ekologi Dalam Cengkraman Kapitalisme Global

Pengelolaan sumberdaya alam yang lestari mengacu pada landasan konsitusional Pasal 33 ayat (2) UUD 1945: *Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara* serta ayat (3): *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*. Dengan demikian, setiap kebijakan dan kegiatan pengelolaan sumber ekonomi dan konservasi sumberdaya alam harus didasari semangat yang terkandung dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945. Kenyataannya negara hanya menjalankan sebagian pasal 33 yakni penguasaan negara atas sumberdaya alam, namun mengabaikan kesejahteraan masyarakat sekitar pengelolaan sumberdaya alam. Padahal, semangat pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan agar penguasaan negara atas sumberdaya alam secara bersama-sama juga harus mengakomodir berbagai kelompok kepentingan, tidak hanya kepentingan ekonomis tetapi juga kepentingan ekologis dan sosial.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan bahwa siapa yang menimbulkan kerusakan atau yang mencemari lingkungan diwajibkan membayar ganti rugi atau denda Inilah yang dikenal dengan prinsip pencemar yang membayar (*polluter pays principle*). Tampaknya untuk kasus kerusakan (*degradasi*)

lingkungan hidup, prinsip atau pendekatan berdasarkan manfaat lebih tepat diterapkan sesuai dengan prinsip pencemar yang membayar. Berdasarkan prinsip ini tentunya pemrakarsa akan dikenai pungutan sesuai dengan nilai manfaat yang diperolehnya ditambah dengan nilai kerusakan yang diciptakannya. Kalau pengambilan kayu di hutan tidak menimbulkan kerusakan, maka ia harus mengganti sebesar nilai rente ekonominya saja (*economic rent*).

Kemudian jika dengan beroperasinya penebangan hutan misalnya ternyata juga menimbulkan kerusakan lingkungan, maka pemrakarsa diwajibkan untuk mengembalikan kondisi lingkungan menjadi seperti semula. Jadi dengan kata lain besarnya pungutan sebagai instrument fiskal akan terdiri dari nilai deplisi (*economic rent*) ditambah dengan nilai degradasi. Dengan membagi nilai rente ekonomi total dan nilai degradasi total dengan volume penbangan kayu, akan dapat diperoleh nilai pungutan per unit.

Nilai degradasi lingkungan yang dikurangkan adalah nilai biaya yang sebagai akibat dari adanya biaya perbaikan, biaya pengobatan dan sebagainya (*replacement cost*) dan biaya pencegahan kerusakan atau degradasi (*prevention costs*). Sampai dengan saat ini *replacement cost* dan *prevention cost* yang muncul sebagai akibat terjadinya degradasi sumber daya alam dan seharusnya menjadi faktor pengurang dalam PDRB masih terbatas pada nilai kerugian “potensial” dan belum dimasukkan

dalam nilai PDRB actual. Diperlukan adanya instrument regulasi yang mengatur mekanisme *reward* dan *punishment* dalam pengelolaan sumber daya alam. Artinya, daerah tidak hanya berhak memperoleh keuntungan finansial (bagi hasil) dari eksploitasi sumber daya alam tetapi juga berkewajiban untuk menjaga kelestarian sumber daya alam di wilayahnya. Dalam hal ini harus ada instrumen regulasi yang mengatur kewajiban biaya kompensasi bagi daerah yang melakukan eksploitasi berlebihan (*over exploitation*) untuk mencegah degradasi sumber daya alam yang semakin parah.

Pada saat yang sama, instrumen regulasi harus memberikan *reward* kepada daerah yang menjaga sumber daya alamnya secara baik, terutama bagi daerah-daerah yang karena kondisi kewilayahannya memiliki keterbatasan pilihan dalam melakukan kegiatan ekonomi eksploitatif terhadap kekayaan sumber daya alam yang dimilikinya (misalnya daerah yang sebagian besar wilayahnya adalah kawasan konservasi).

Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini sangat tidak sesuai bahkan bertentangan dengan prinsip pengelolaan sumber daya alam yang lestari. Sistem pembagian keuangan antara pusat dan daerah sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 terutama yang menyangkut dana bagi hasil sumber daya alam (dana perimbangan), semata-mata hanya mempertimbangkan hasil

produksi tanpa melihat performa daerah dalam mengelola sumber daya alamnya. Hal ini mengakibatkan daerah berlombalomba melakukan eksploitasi sumber daya alam besar-besaran semata-mata karena pertimbangan ekonomi jangka pendek. Akibatnya, terjadi over eksploitasi yang mengakibatkan sumber daya alam terdegradasi hebat.

Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang 33 tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya terutama yang berkaitan dengan system pembagian keuangan dari pemanfaatan sumber daya alam. Besar kecilnya pembagian dana dari pemanfaatan sumber daya alam seharusnya tidak hanya berdasarkan pada hasil produksi tetapi juga harus mempertimbangkan kelestarian ekologi (dan ekonomi jangka panjang). *Reward* dan *punishment (incentive and disincentive mechanism)* harus diatur secara seimbang dan terintegrasi agar diperoleh keadilan yang sebenarnya bagi daerah yang menghasilkan produk dari sumber daya alam (produksi) maupun daerah yang berkewajiban memelihara sumber daya alam (konservasi). Nilai keadilan bagi daerah pemanfaat dan penjaga sumberdaya dapat terefleksikan secara (lebih) baik pada angka-angka yang tertera di PDRB Hijau. Di sinilah perlunya peran Negara dalam mengawal eksistensi alam yang selama ini sudah begitu besar jasanya bagi eksistensi negara itu sendiri. Kalau tidak, alam yang semakin terancam akan balik mengancam manusia.

Karena itu, dalam pengelolaan sumber daya alam (PSDA) pemerintah hendaknya memperhatikan beberapa pilar. *Pertama*, pertimbangan ekologi hendaknya menjadi poros kebijakan lingkungan yang bercita-cita mengurangi dampak buruk aktivitas manusia. Bukan sekadar menyelamatkan kehidupan manusia melainkan mengubah pola pikir antroposentrik yang mendudukan manusia sebagai pusat segalanya dan segala potensi pun dipersembahkan baginya. *Kedua*, keadilan sosial (social equality dan economic justice) hendaknya dicerminkan sebagai penolakan terhadap berbagai diskriminasi yang dilahirkan misalnya: perjuangan kelas, gender, etnisitas. Dan ketidakadilan sosial menjadi sumber perusakan lingkungan hidup. *Ketiga*, kerakyatan. Artinya pengelolaan sumberdaya alam hendaknya memposisikan rakyat sebagai penikmat, tidak dipinggirkan dari proses-proses kebijakan terutama yang berkorelasi dengan akses dan kontrol. *Keempat*, pengelolaan sumberdaya alam hendaknya mengaktifkan dan menyeimbangkan feeling, acting, dan thinking. Setiap individu bisa merasakan nilai keagungan inisiasinya. Secara konseptual ini didorong untuk melahirkan visi bersama dengan memahami apa yang menjadi penting (definisi) serta menemukan dan mengapresiasi apa yang telah ada dan tentunya itu terbaik (discovery), menemukan apa yang semestinya ada (dream), menstrukturkan apa yang ada (design) dan merawatnya hingga menjadi ada (destiny) sehingga hasilnya akan melampaui dari apa

yang diinginkan dan sangat sinergi dengan konteks realitas dalam kehidupan.

Pemerintah saat ini tidak mempunyai kepedulian akan masa depan pengelolaan sumberdaya alam dan kehidupan masyarakat yang semakin miskin dan tertinggal. Sikap pembiaraan pemerintah terhadap pelaku kejahatan lingkungan makin sering terjadi. Pencemaran limbah industri dan daerah tambang terus terjadi secara masif dan tidak pernah ditanggulangi secara serius. Di sinilah perlunya peran Negara dalam mengawal eksistensi alam yang selama ini sudah begitu besar jasanya bagi eksistensi negara itu sendiri. Kalau tidak, alam yang semakin terancam akan balik mengancam.

Politik balas budi atau *corporate social responsibilite* sama sekali tak bisa mensejahterakan rakyat di sekitar wilayah pertambangan atau sekitar wilayah industri karena merupakan cara untuk melanggengkan neoliberalisme, dengan cara cara seolah-olah manusiawi. Era liberalisasi di zaman kolonial Belanda dan neoliberalisasi yang didanai perusahaan asing merupakan mata rantai yang tak terputus untuk memiskinkan bangsa ini. Perusahaan pertambangan asing sama saja kebuasannya untuk mengeksploitasi alam Indonesia. Penjajahan yang terus berlanjut serialnya hingga sampai kapan berakhirnya.

Masyarakat adat atau rakyat di sekitar area perusahaan, semakin menyempit lahannya akibat diserobot secara legal oleh hukum yang melindungi neoliberalisme pertambangan ini.

Penguasaan lahan yang berlebihan tersebut, secara realitas memiliki daya rusak lingkungan yang tak terkirakan dampaknya di seluruh Indonesia.

Tali neolib ini, juga ikut mencekik hati, jiwa dan pemikiran pihak Dewan Perwakilan Rakyat, karena belum pernah mengeluarkan undang-undang yang bisa melindungi ekologi, masyarakat adat dan negeri ini dari imperialisme perusahaan tambang. UU tentang Pertambangan dan Mineral nomor 4 tahun 2009 jauh panggang dari api. Tak ada satupun pasal atau ayat dalam UU tersebut berkemungkinan agar perusahaan tambang asing melakukan tanggungjawabnya terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi. Undang-undang itu juga sama sekali tak bisa berkekuatan penuh untuk memaksa perusahaan tambang mengurangi penguasaan lahan yang berlebihan maupun pengrusakan ekologi.

Penutup

Kerusakan lingkungan makin dipahami sebagai akibat krisis-krisis sosial yang diproduksi oleh sistim kapitalisme global. Hal ini sejalan pula dengan kecenderungan perubahan gerakan lingkungan hidup kearah gerakan yang membongkar sistem dan pandangan dunia yang menindas dan tidak adil. Kapitalisme global dengan tujuannya dominan menghasilkan uang maka mereka berusaha melenyapkan peraturan-peraturan lingkungan hidup dalam kedok apapun untuk tujuan pragmatis. Bisa

dikatakan pula, bahwa sistem ekonomi kapitalis tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan saja, akan tetapi operasi kapitalisme global juga mengelimir undang-undang lingkungan di Negara-negara. Atau dengan kata lain, perusakan lingkungan tidak hanya efek samping, tetapi juga bagian integral dari rancangan kapitalisme global. Dengan pemahaman semacam itu mudah-mudahan cara pandang kita terhadap pembangunan menjadi lebih manusiawi dan melahirkan indikator-indikator yang berpihak pada rakyat. Namun jika ideologi pembangunan tetap tidak memperhatikan tipe ekologi manusia Indonesia yang jauh dari spiritualitas lingkungan, bisa dipastikan bangsa ini akan semakin terseret ke dalam kesenjangan dan kekerdilan hubungan manusia dengan alam semesta.

Alih Fungsi Lahan, Bencana Banjir, Dan Adaptasi Lingkungan Masyarakat Pinggiran Kota Makassar

Zakir Sabara

Makassar Universitas Muslim Indonesia

Email: zakir.sabara@umi.ac.id

Pendahuluan

Kota Makassar sebagai kota terbesar di wilayah timur Indonesia merupakan kota tujuan banyak manusia dengan berbagai kepentingan. Mereka umumnya adalah para pencari kerja, para pelajar mahasiswa yang setiap tahun berdatangan, dan para pebisnis yang ingin memiliki tempat tinggal di Kota Makassar.

Meningkatnya keberadaan para urban tersebut berkonsekuensi pada makin padatnya kehidupan dan ruang sosial serta ruang fisik kota Makassar. Secara sosial situasi tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan aktifitas penduduk sehingga berpotensi memicu pertentangan sosial, sedangkan secara fisik mempersempit lahan di perkotaan. Menyempitnya lahan perkotaan tersebut berkonsekuensi pada munculnya upaya manusia dalam menemukan lahan baru untuk dijadikan tempat

tinggal. Maka terjadilah perluasan wilayah kota melalui pembangunan kawasan pertokoan, dan kawasan perumahan.

Pada saat yang sama, perkembangan pembangunan ‘memaksa’ pemerintah Kota Makassar turut melegalisasi para pengembang perumahan yang melakukan pembangunan di wilayah pinggiran. Situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh para pengembang dengan “kurang” memperhatikan RTRW dan dampak lingkungan yang bakal terjadi. Kawasan pinggiran yang tidak berpenghuni menjadi sasaran empuk karena memiliki nilai komoditas tinggi. Lahan yang dulunya adalah rawa, dan persawahan telah disulap menjadi lahan berpenghuni, dan melahirkan kota baru.

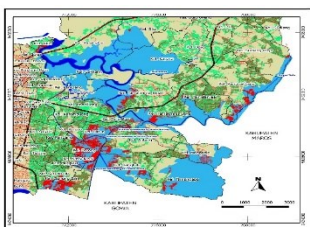
Kondisi yang sama bukan hanya terjadi di wilayah pinggiran kota, tetapi juga di daerah tengah kota. Beberapa wilayah yang dimaksud juga mengalami alihfungsi lahan menjadi kawasan perumahan dan kawasan perbelanjaan.

Belakangan ini, konsekuensi dari pembangunan kawasan pemukiman dan perumahan tersebut makin terasa dampaknya bagi masyarakat dan lingkungan. Hampir sebagian wilayah kota Makassar tergenang air bila musim hujan tiba. Bahkan genangan dan banjir terjadi justru pada sejumlah area penting dimana kebanyakan masyarakat melakukan aktifitas seperti di jalan raya, di perkantoran pemerintah, di kawasan perbelanjaan, di pasar, kawasan pendidikan, dan keagamaan. Terkait dengan masalah banjir ini, menarik untuk mencermati hasil penelitian

Hidayansyah[1] beberapa tahun lalu bahwa meningkatnya jumlah dan aktifitas penduduk menjadi sebab terjadinya penurunan kualitas udara di kota Makassar. Apabila dikalkulasi, maka dari aktifitas tersebut menghasilkan beban pencemar 71.440,51 gram/hari atau 198.445.861,1 ton/tahun dan CO₂ sebesar 383.156,7641 ton/tahun yang kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2005 sebesar 279.046.694,4 ton/tahun Pb dan 502.254,3426 ton/tahun CO₂ sehingga dibutuhkan luas RTH 8.621,2673 ha dengan jumlah pepohonan 862.127 batang pohon untuk dapat menyerap zat pencemar di udara. Adapun banjir / genangan yang terjadi dikarenakan rusaknya lahan di daerah hulu dimana 12.040,63 ha dari total lahan 143.196,37 ha telah menjadi lahan kritis. Hal ini menghasilkan material longsoran sebesar 235-300 juta m³, yang berdampak pada terjadinya pendangkalan sungai sehingga daya tampung sungai berkurang. Selain itu pembangunan permukiman, kawasan industri pada daerah resapan air memberikan kontribusi terhadap terjadinya banjir/genangan di kota Makassar, termasuk sistem drainase yang kurang baik, dan letak kota Makasaar yang berada pada daerah dataran rendah.

Uraian hasil penelitian di atas mempertegas bahwa apa yang dialami oleh masyarakat kota Makassar terutama pada beberapa perumahan di kawasan pinggiran merupakan konsekuensi dari alihfungsi lahan yang tidak terkontrol. Fakta memperlihatkan dalam beberapa tahun terakhir, warga sejumlah

perumahan mencari tempat pengungsian saat banjir terjadi di musim hujan.



(a) Daerah rawan banjir di wilayah timur Kota Makassar
<http://berita-sulsel.com/wp-content/uploads/>

(b) Banjir di salah satu perumahan
<http://foto.metrotvnews.com/view/2019/01/24/980344/banjir-masih-genangi-rumah-warga-makassar>

Gambar 1. Peta wilayah rawan banjir dan kondisi banjir Kota Makassar.

Bila musim hujan menjelang terutama pada bulan Nopember hingga Maret setiap tahun, warga masyarakat berada dalam situasi prihatin. Mereka mulai mengencangkan ikat pinggang dan bersiap siaga dalam menghadapi banjir dan dampak-dampaknya. Dalam kondisi tersebut, berbagai persiapan dilakukan oleh warga baik individu maupun kolektif sebagai bentuk antisipasi dampak banjir yang dinamakan mitigasi pra-bencana. Tulisan ini mengungkapkan langkah-langkah antisipasi masyarakat terhadap banjir terutama dampak yang tidak diinginkan sebagai konteks pengurangan resiko bencana.

Metode

Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif terkait tindakan masyarakat dalam melakukan adaptasi lingkungan akibat banjir di wilayah pinggiran Kota Makassar. Wawancara dilakukan terhadap 10 orang informan yang terpapar banjir di wilayah timur pinggiran Kota Makassar. Selain wawancara, peneliti juga melakukan kajian literatur terkait masalah penelitian ini. Hasil wawancara tersebut dianalisis secara deskriptif.

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dan penelusuran literatur terkait, maka diperoleh hasil-hasil penelitian tentang bentuk adaptasi lingkungan masyarakat setempat menghadapi bencana banjir, sebagai berikut.

1.1. Membersihkan got, kanal, dan sungai

Saluran air dalam berbagai bentuk meliputi got, kemudian kanal, dan sungai. Ketiga jenis saluran air ini diklasifikasi berdasarkan tingkatannya sekaligus merupakan rangkaian perjalanan air hingga terbuang di bagian hilir sungai. Hampir semua perumahan di bagian timur wilayah kota Makassar yang dibangun pada bekas timbunan rawa dan persawahan dapat dipastikan mengalami banjir di musim hujan dengan level siaga. Situasi ini sudah dipahami oleh masyarakat setempat terutama terkait langkah antisipasi sebagai bentuk adaptasi mereka.



(a) Sungai BTP saat banjir
<https://www.youtube.com/watch?v=8t08bsll3lE>



(b) pembersihan saluran air
https://newskartumerah.com/wp-content/uploads/2018/10/IMG_20181023_163030-

Gambar 2. Keadaan sungai BTP dan suasana warga saat pembersihan saluran air.

Salah satu bentuk adaptasi lingkungan yang warga lakukan adalah membersihkan saluran air seperti got, kanal, dan sungai. Kegiatan tersebut dilakukan oleh warga perumahan hampir bulan, tergantung situasi sosial warga yang hendak kerja bakti. Selain itu, kegiatan ini juga dikoordinir oleh masing-masing ketua RT dibantu oleh pengurus masjid setempat. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh ketua RT A di blok AF yaitu Bapak XX (inisial) bahwa “Perumahan yang ditempatinya khususnya bagian belakang memang telah berlangganan dengan banjir setiap tahun. Bila banjir datang, blok AF ini dipastikan tenggelam sehingga warga sudah banyak yang mengungsi lebih dulu. Untuk mengantisipasi hal tersebut, dia meminta kepada warganya untuk melakukan sesuatu sesuai kemampuan demi kepentingan bersama. Tindakan yang paling mudah dan paling ringan yang

mereka bisa lakukan adalah melakukan pembersihan pada saluran air seperti got, kanal air, dan sungai”.

Uraian ketua RT tersebut juga diakui oleh seorang warganya yaitu RHM (43 Tahun) bahwa lokasi belakang perumahannya memang rawan banjir dan sifat genangannya bisa berlangsung hingga 24 jam lamanya. Sebagai langkah adaptasi warga secara bersama adalah melakukan pembersihan saluran air khususnya got depan rumah mereka. Kegiatan kerja bakti tersebut mereka upayakan diadakan sekali sebulan secara formal melalui program kerja RT.

1.2.Menaikkan dinding beton saluran air

Kegiatan lain warga perumahan di wilayah timur pinggiran kota Makassar terkait dengan adaptasi lingkungan adalah menaikkan dinding beton saluran air yang ada. Ini dimaksudkan untuk menahan runtuhnya atau longsohnya sisi saluran air atau kanal akibat arus air yang deras dan meningkatkan daya tampung air di kanal.

Dalam kegiatan ini, masyarakat setempat tidak melakukannya sendiri melainkan diinisiasi oleh pemerintah kota melalui mekanisme langsung secara struktural. Masyarakat hanyalah berstatus sukarelawan terutama dalam mengawasi kegiatan. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh seorang warga yaitu AMR (51 Tahun) bahwa pekerjaan menaikkan dinding beton melalui penambahan dan pemancangan baru murni

pekerjaan pemerintah melalui mekanisme struktural. Artinya pemerintah-lah yang bertanggungjawab penuh dalam penyelesaian kegiatan termasuk penyediaan materialnya. Masyarakat hanya menginisiasi dan mengawasi serta mensupport secara sukarela kegiatan tersebut demi kepentingan bersama.

Seorang warga lainnya yang terlibat dalam kegiatan tersebut (SMS, 55 Tahun) menyebutkan bahwa penanganan saluran air tersebut dipercepat penyelesaiannya karena terjadinya banjir bukan hanya di musim hujan melainkan di luar itu. Penyebabnya adalah banjir kiriman dari wilayah kabupaten Maros. Hal tersebut juga diperparah oleh terjadinya pendangkalan pada bagian hilir sungai BTP sehingga air tidak mengalir ke sungai Tallo yang merupakan saluran pembuangan menuju ke laut.



(a) Situasi perbaikan kanal

<http://berita-sulsei.com/wp-content/uploads/2017/04/foto-8.jpg>



(b) penanganan got oleh aparat

https://statik.tempo.co/data/2015/12/15/id_463982/463982_620.jpg

Gambar 3. Situasi saat perbaikan kanal di Kota Makassar.

1.3.Menaikkan pondasi rumah

Upaya lain yang dilakukan warga terpapar banjir adalah menaikkan pondasi atau lantai dasar rumah tinggal mereka. Hal ini mereka harus lakukan karena hal-hal berikut: (1) perumahan tersebut berlokasi di atas tanah bekas rawa, (2) kualitas rumah tinggal mereka terutama bagian lantai tidak terlalu bagus dan air mudah muncul dari bawah. Situasi ini diakui oleh seorang warga sebagai bentuk penegasan bila lingkungan perumahannya kurang aman dan cenderung menimbulkan perasaan khawatir terutama menjelang musim hujan. KMR (50 Tahun) menceritakan bahwa “Lokasi perumahannya secara strategi cukup menarik dan menjanjikan tetapi itu 15 tahun lalu saat membeli rumah. Namun saat ini, perkembangan perluasan kota membuat semuanya berubah melalui pembangunan perumahan di sekitar kompleksnya yang mengalami peningkatan. Terjadi penimbunan rawa di perumahan sebelahnya. Hal tersebut menyebabkan hilangnya tempat resapan air hujan khususnya di musim hujan. Pembangunan tersebut juga menyebabkan terjadinya pendangkalan kanal dan sungai sehingga air menjadi lebih lama mengendap dan menggenangi perumahan.”

1.4.Menata Lingkungan Perumahan

Kegiatan paling umum masyarakat bisa lakukan sebagai langkah mitigasi awal adalah perbaikan lingkungan di sekitar kompleks perumahan mereka. Beberapa kegiatan yang warga

lakukan antara lain perbaikan jalanan perumahan melalui pemasangan paving block, pembersihan sampah dan pemotongan rumput serta semak, dan menghias jalan paving block dengan dekorasi, dan sebagainya.



(a) Memperindah lingkungan

<https://www.iuwashplus.or.id/arsip/1478>

(b) Pembersihan lingkungan di salah satu perumahan

<https://polrestabesmakassar.com/blog/tag/polsek-biringkanaya/page/2..tata>

Gambar 4. Kegiatan warga perumahan menata lingkungan di Kota Makassar.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebagaimana uraian di atas memperlihatkan upaya dan bentuk pertanggungjawaban warga terhadap lingkungannya. Hal tersebut sebagaimana diceritakan oleh beberapa warga sekaligus informan, misalnya RSD (60 Tahun) yang juga sebagai tokoh masyarakat di salah satu perumahan di wilayah Biringkanaya bahwa “ada berbagai cara yang dilakukan warga perumahannya untuk mengantisipasi atau beradaptasi dengan banjir, salah satunya membersihkan got yang

berada di sekitar perumahan. Got tersebut letaknya di luar perumahan tetapi bila tertutup sampah atau rumput dan semak maka airnya akan luber dan mengganggu warga perumahan”.

Situasi yang sama juga diceritakan oleh MHM (53 Tahun) seorang informan lainnya di salah satu kompleks perumahan di Tamalanrea bahwa “banyaknya sampah yang bertebaran di kompleksnya berkontribusi terhadap terjadinya genangan air yang bisa berlangsung hingga 24 jam. Hal tersebut terjadi karena sampah tersebut menyumbat got tiap rumah. Kebetulan, rata-rata warga perumahannya kebanyakan pegawai yang akhir pekannya baru libur sementara sampah hampir setiap hari bertambah. Oleh karenanya, pihak RT di wilayahnya memungut dana kebersihan lingkungan dan dana sampah yang ditangani oleh petugas khusus.

Berdasarkan uraian wawancara di atas dapat paparkan bahwa kondisi lingkungan fisik dan lingkungan sosial merupakan faktor yang berkontribusi terhadap tindakan adaptasi yang dilakukan warga.

Pembahasan

Dalam wilayah perkotaan pinggiran yang kemudian disebut ‘urban’, kondisi lingkungan fisik umumnya memiliki karakteristik tanah yang terdiri dari rawa, dan persawahan. Hal yang tidak dapat dihindari adalah saat terjadi perluasan kota dan harus dibangun pemukiman di wilayah tersebut, maka akan berdampak kurang bagus dalam jangka panjang bagi kehidupan

warga bermukim. Dampak buruk yang kemungkinan terjadi secara umum antara lain: air tanah kurang higienis, rawan banjir, berpotensi tanah tenggelam dan rumah bergerak bila pondasi tidak kokoh, kesehatan warga berpotensi terganggu, dan sebagainya.

Situasi yang tidak dapat dipungkiri adalah terjadinya alihfungsi lahan dari ekosistem rawa dan ekosistem persawahan menjadi perumahan dan pemukiman otomatis menimbulkan kerusakan ekosistem sebelumnya. Salah satu gangguan yang dimaksud adalah gangguan kesehatan selain dampak banjir.

Terkait kerawanan banjir dan adaptasi lingkungan masyarakat setempat, berbagai tindakan dapat ditempuh sebagaimana hasil penelitian ini. Tindakan paling dasar adalah membersihkan saluran air sekitar perumahan. Tindakan ini pun juga dilakukan oleh masyarakat di tempat lain berdasarkan situasi lingkungannya sebagaimana penelitian Ikhsyan, dkk[2] tentang adaptasi masyarakat terhadap banjir Rob di Kota Semarang dimana warga meninggikan rumah, membuat penghalang di pintu, dan sebagainya. Penelitian Fahlevi[3] tentang adaptasi masyarakat di Kota Samarinda dalam menghadapi banjir dengan cara memperkuat dan meninggikan rumah. Penelitian Syah[4] tentang strategi adaptasi masyarakat pesisir di Bangkalan terhadap banjir Rob dengan cara membangun tanggul sederhana, membangun tembok, dan meninggikan lantai.

Mencermati hasil penelitian di atas, pada dasarnya dapat dijelaskan bahwa masyarakat sebenarnya memiliki sistem adaptasi lokal baik secara individu maupun kolektif komunal berdasarkan karakteristik komunal yang bersangkutan. Sistem komunal itulah yang membuat masyarakat dapat bertahan dalam kondisi apapun dalam menghadapi bencana banjir khususnya di Kota Makassar. Hal ini juga dijelaskan dalam penelitian Dianti dkk[5], penelitian Sagala dkk[6], dan penelitian Ajami, dkk[7], Asti[8], Halim, dkk [9][10] bahwa masyarakat dapat menjadi tangguh menghadapi bencana karena memiliki sistem sosial yang bersifat adaptif dalam berbagai situasi.

Penutup

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap terjadi pergeseran atau alihfungsi lahan dari lahan rawa, dan lahan persawahan selalu menimbulkan dampak lingkungan. Ini dimungkinkan karena pada dasarnya yang bergeser adalah fungsi ekosistem baru yang merusak dan membongkar serta mengganti fungsi ekosistem lama. Untuk itulah masyarakat yang memasuki ekosistem baru tersebut melalui pembangunan perumahan berupaya melakukan adaptasi atau penyesuaian lingkungan dalam berbagai cara agar dapat terus *survive* dengan kondisi yang eksis tersebut.

Pada saat yang sama, individu memiliki kapabilitas yang disebut daya adaptabilitas untuk dapat melakukan berbagai hal

dasar. Karakteristik dasar individu inilah yang memungkinkannya memiliki kreativitas untuk keluar dari berbagai kondisi yang mengancam kehidupannya termasuk ancaman bencana banjir.

Perilaku Beragama Dan Fungsi Masjid Kampus Sebagai Sarana Ibadah Dan Laboratorium Intelektual di Universitas Muhammadiyah Makassar

Abdul Aziz Muslimin
Universitas Muhammadiyah Makassar
abdazizm@unismuh.ac.id

Pendahuluan

Dalam kehidupan sosial, kita senantiasa berinteraksi dengan orang lain dan akan terbentuk dengan sistem sosial di daerah tersebut. Pola hidup dan kebiasaan-kebiasaan yang telah menjadi sistem sosial di masyarakat tentunya akan berbeda dengan daerah lain, termasuk dalam perilaku beragama. Agama yang diyakini, merupakan sumber motivasi tindakan individu dalam hubungan sosialnya, dan kembali pada konsep hubungan agama dengan masyarakat, di mana pengalaman keagamaan akan terefleksikan pada tindakan sosial dan individu dengan masyarakat.

Fenomena sosial kehidupan bergama di Indonesia menjadi menarik seiring dengan luasnya wilayah Indonesia dan hal ini berimplikasi pada keragamann pemikiran dalam memahami perbedaan yang terjadi di masyarakat. Kebudayaan sebagai hasil dari sebuah produk masyarakat tentunya

menjadikan ke-khasan sebuah wilayah, apalagi disentuh dengan perilaku hidup beragama dan inilah yang menarik sehingga menimbulkan multitafsir. Nurcholis Madjid (xviii)), mendeskripsikan bahwa sekalipun nilai-nilai ajaran Islam bersifat universal, pelaksanaan ajarannya itu sendiri menuntut lingkungan sosial kultural masyarakat Indonesia keseluruhan, termasuk di dalamnya lingkungan politik dalam kerangka konsep Negara bangsa (*nation-state*). Kenyataan bahwa bangsa Indonesia merupakan suatu bangsa yang mempunyai heterogenitas tinggi secara fisik (Negara kepulauan), keragaman suku, bahasa, adat istiadat dan bahkan agama. Melihat kenyataan ini ia berijtihad dengan mengatakan bahwa "setiap langkah melaksanakan ajaran Islam di Indonesia harus memperhitungkan kondisi sosial budaya yang ciri utamanya adalah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajemukan. Kemudian terkait dengan ide untuk perkembangan dan pertumbuhan masa depan Indonesia, umat Islam sebagai mayoritas diharapkan memberikan kontribusi dan tanggung jawabnya sesuai dengan posisi dan jumlahnya. Untuk memenuhi harapan seperti itu ia mengharapkan agar umat Islam mempunyai kesadaran historis, yaitu kesadaran bahwa segala sesuatu mengenai tatanan hidup manusia ada sangkut pautnya dengan perbedaan zaman dan tempat.

Agama merupakan pegangan bagi manusia dalam menjalani fitrahnya sebagai manusia di bumi ini, dan bagi yang meyakini maka dia beragama. Setiap orang mempunyai

kebebasan memeluk suatu agama dan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan yang diyakininya. Kita tidak dibenarkan memaksakan suatu agama kepada orang untuk memeluk atau meyakinkannya. Seseorang memutuskan untuk memeluk suatu agama atas dasar kemerdekaan pribadi yang dijamin dengan undang-undang. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 29 ayat 2 tentang agama dinyatakan sebagai berikut :

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Lebih jauh Kahmad (2006:119) menegaskan bahwa agama-agama lahir pada babak sejarah pramodern, sebelum masyarakat dan dunia diwarnai perkembangan pesat ilmu dan teknik. Peter L Berger melukiskan agama sebagai suatu kebutuhan dasar manusia, karena agama merupakan sarana untuk membela diri terhadap segala kekacauan yang mengancam hidup manusia. Bahkan Malinowski menyatakan “tidak ada bangsa, bagaimanapun primitifnya yang tidak memiliki agama dan magi” . Agama dapat dipandang sebagai kepercayaan dan pola perilaku yang diusahakan oleh suatu masyarakat untuk menangani masalah penting yang tidak dapat dipecahkan oleh teknologi dan teknik organisasi yang diketahuinya.

Aplikasi dari konsep di atas adalah bagaimana menjalankan syariat dan norma-norma sosial dalam beragama, seperti beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing dan merefleksikan norma-norma sosial dalam kehidupan di masyarakat seperti bersedekah ke fakir miskin ataupun orang-orang di sekitar kita yang secara fisik tidak mampu bekerja.

Aktivitas manusia senantiasa bergerak seiring langkah dan detak jam mengiringi aktivitasnya sesuai dengan profesi yang digelutinya. Rutinitas tersebut pada waktu-waktu tertentu akan berhenti sejenak untuk digunakan istirahat, shalat dan makan. Bagi yang merasa capek, maka akan beristirahat dan yang merasa lapar, maka akan mencari makanan. Adapun yang menjalankan syariat agama Islam dengan baik, maka akan bergegas ke mushallah ataupun masjid.

Dari masjid kampus, khususnya di Perguruan Tinggi Umum dirancang khusus untuk mendidik kader-kader bangsa. Masjid kampus, sebagaimana masjid-masjid lainnya yang berada di tengah-tengah masyarakat, dinilai strategis dalam penciptaan suasana religius di kampus. Sekurang-kurangnya masjid kampus ini dapat mewadahi sivitas akademika yang berlatar belakang religius dan memiliki keinginan kuat untuk tegaknya syi'ar Islam. Menciptakan kader bangsa yang religius akan sangat efektif dan efisien dengan menyentuhkan nilai-nilai keislamann pada masyarakat kampus, khususnya penyediaan Masjid yang representatif bagi dosen dan mahasiswa untuk melakukan

aktivitas ibadah dan pendalaman studi keislaman secara komprehensif sehingga hadir kaum terpelajar yang bukan sekedar berilmu pengetahuan, tapi juga perilaku beragamanya baik dan sempurna.

Namun jika masjid kampus hanya digunakan sebagai sarana ibadah berarti hanya menyentuh aspek ibadah, padahal yang diharapkan adalah lahirnya ilmuan-ilmuan yang berkaliber “besar” dengan latar belakang banyak berinteraksi di masjid. Sadar dan yakin mereka yang melalui penggodokan di masjid-masjid kampus diyakini memiliki sikap yang agak bisa mensinergikan ilmu dan agama.

Jika hanya berinteraksi dengan masjid tanpa berupaya melakukan pengkajian-pengkajian keilmuan ataupun mahasiswa dan dosen yang tidak memaksimalkan potensi dirinya. McClelland dalam Suwarso (1991) menegaskan bahwa fenomena tersebut menunjukkan motivasi berprestasi yang sangat rendah untuk bagaimana melihat kehidupan sebagai tantangan. Setiap manusia memiliki waktu luang, jika seseorang menggunakan waktu luangnya untuk kenikmatan hidup, seperti tidur dan bersenang-senang, maka orang tersebut memiliki motivasi berprestasi yang amat rendah. Namun jika seseorang menghabiskan waktunya untuk lebih banyak mengenang teman-temannya, keluarganya ataupun kegiatan sosial, berpesta dan lain-lain, maka orang tersebut memiliki kebutuhan berprestasi yang sangat rendah.

Namun, jika seseorang berpikir bagaimana meningkatkan situasi sekarang ke arah yang lebih baik, dan hendak melaksanakan tugas-tugas yang dihadapinya dengan cara yang lebih baik, maka orang tersebut dikategorikan memiliki kebutuhan berprestasi yang amat kuat. Inilah yang ditekankan dalam teori motivasi berprestasi terkait dengan historis kapitalisme yang diuraikan oleh Weber, bahwa orang protestan bekerja lebih keras dan lama, menabung untuk masa depan, dan berlomba untuk mencapai kesuksesan. Ajaran *Calvinisme* telah menginspirasi penganut Protestan untuk hidup hemat, sebaliknya mereka tidak merasa rasional jika tidak mengerjakan sebuah pekerjaan dengan baik dan inilah substansi dari ide motivasi berprestasi.

Perilaku seperti itu yang bisa diadopsi dari interaksi mahasiswa dengan masjid tentunya melahirkan ilmuan yang selalu sadar bahwa ada “kekuasaan” yang Maha Besar, sehingga sikap individualis akan tergerus dengan sikap Tawadhu’. Mahasiswa dan dosen yang sadar sebagai insan akademis akan selalu menundukkan kepala kepada sang Khalik sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan berupa ilmu pengetahuan dan kesehatan. Namun bagi yang tidak demikian tentunya, biasanya akan menjadi orang yang sombong, selalu merasa lebih jago/ pintar dan melihat orang lain sebagai saingan ataupun lawan.

Dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah yang tertuang di dalam perundang-undangan itu, aspek religi dan nilai-nilai moral

masih terpinggirkan. Unsur pendidikannya terlepas dari unsur pengajaran ilmu dan teknologi. Mungkin masih dapat ditoleransi jika terjadi keseimbangan antara unsur pendidikan dengan unsur pengajaran. Akan tetapi dengan melihat jumlah SKS mata kuliah agama dan moralitas dengan jumlah SKS mata kuliah disiplin ilmu terjadi kesenjangan yang sangat lebar. Di PTU mata kuliah agama, moralitas, dan kebangsaan hanya 6-8 SKS (atau sekitar 5%) dari total SKS S1 yang 144-160 SKS. Pendidikan agama diberikan 2 SKS setiap semesternya ataupun satu pertemuan perpekan yang tentu saja tidak dapat menutupi kebutuhan spiritual civitas akademika, khususnya mahasiswa

Jika mengacu ke Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, pendidikan nasional kita seharusnya sarat dengan pembelajaran yang berdimensi religius dan moralitas. Untuk itu perlu dicari solusi bagaimanakah mendekatkan praktik pendidikan dengan perundang-undangan, jangan sampai praktik pendidikan itu mengkhianati amanat perundang-undangan. Memang, cukup berat tugas dan tantangan pendidikan agama dan dosen agama di Indonesia. Islam diyakini sebagai sebuah agama yang memiliki ajaran yang lengkap dan sempurna. Tapi pendidikan formal kita tidak mungkin mampu menjelaskan "kelengkapan" dan "kesempurnaan" agama Islam karena bobot SKS pendidikan agama dalam kurikulum nasional kita sangat terbatas (SD s.d. SMA hanya 2 jam perminggu, sementara di universitas hanya 2-4 SKS dari total SKS).

Bandingkan dengan di negara muslim lainnya. Tidaklah aneh jika Tilaar menyebut pendidikan agama dalam kurikulum nasional kita hanya sebagai "penggembira" saja, sekadar tidak dikritik pendidikan sekuler oleh kalangan ulama. Praktik pendidikan di Indonesia sebenarnya tidak jauh berbeda dengan di Barat yang mengejar ilmu dengan asumsi bahwa ilmu itu bebas nilai (*value free*).

Memahami masjid secara universal berarti juga memahaminya sebagai sebuah instrumen sosial masyarakat Islam yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Islam itu sendiri. Secara khusus, masjid terutama di kampus-kampus jika dimaknai secara luas bukanlah hanya sebagai tempat ibadah saja, melainkan beragam aktivitas yang dapat dilakukan untuk pengembangan keilmuan dari pengajaran yang masih sangat dominan dengan sistem selama ini, lalu mengoptimalkan fungsi masjid sebagai sarana ibadah, laboratorium intelektual dan beragam kegiatan-kegiatan berdimensi sosial.

Pengelolaan masjid membutuhkan keahlian (*skill*) yang tidak sekedar cukup saja, tetapi mesti dilaksanakan secara maksimal sebagai implementasi dari *dakwah bi ahsan al-'amal* (melakukan perubahan dengan mengerahkan segenap kemampuan). Dengan pemahaman semacam ini, masjid dapat dimaknai sebagai instrumen atau sarana ibadah universal. Tidak hanya ibadah *mahdhoh* (*mikro*) saja, tetapi juga ibadah *ghayr mahdhah* (*makro*). Sehingga, masjid kembali lagi pada fungsinya

sebagaimana zaman Nabi Muhammad Saw. dahulu yakni, sebagai pusat pendidikan Islam yang berupaya menjadikan agama Islam atau ajaran Islam menjadi *way of life* (pandangan dan sikap hidup) seseorang.

Kenyataannya miris dengan tingkat pembangunan masjid yang cukup banyak, namun berbading terbalik dengan volume jamaah yang hadir. Namun bagi masjid di kampus-kampus tertentu dengan kegiatan-kegiatan aktivitas mahasiswanya selain ibadah diharapkan tetap semangat dengan beragam kegiatan-kegiatan yang dapat mengarah peningkatan kapasitas diri sebagai calon-calon pemimpin masa depan.

Defenisi Masjid

Secara umum berdasarkan kategori besar kecilnya tempat shalat di Indonesia diklasifikasikan sebagai berikut:

1. *Masjid*, bangunan cukup besar dan kapasitasnya dapat menampung ratusan bahkan ribuan jamaah yang bisa dipakai untuk melaksanakan shalat jumat atau kegiatan Agama Islam.
2. *Mushalla*, sebuah bangunan tempat ibadah yang bangunannya tidak terlalu besar, dapat menampung jamaah maskimal seratus jamaah, bangunan dilengkapi atribut kubah, hiasan-hiasan kaligrafi dan lain-lain. Mushalla ini

sering dibangun di tempat-tempat umum seperti di pasar, terminal dan tempat strategis lainnya.

3. *Langgar*, sebuah bangunan tempat ibadah, bangunan cukup besar, kapasitas jamaah menampung maksimal lima puluh jamaah, namun tidak bisa dipakai untuk melaksanakan shalat jumat, namun untuk kegiatan peringatan hari besar Islam dapat dilaksanakan di langgar ini.

Defenisi terakhir ini umumnya dipakai di Pulau Jawa, sehingga penyebutan Langgar khususnya di Sulawesi Selatan hanya disamakan dengan Mushallah, yaitu rumah ibadah yang agak kecil namun digunakan untuk aktivitas keagamaan.

M. Quraish Shihab (1996:459) mengemukakan bahwa:

“pengertian sehari-hari, masjid merupakan bangunan tempat shalat kaum muslimin. Tetapi karena akar katanya mengandung makna tunduk dan patuh, hakekat masjid adalah tempat melakukan segala aktivitas yang mengandung kepatuhan kepada Allah semata”. Mengacu kepada Alquran surah Al-Jin (72:18).

Kata “Masjid” berasal dari akar kata bahasa Arab yang berarti membungkuk dengan hormat dalam posisi sujud pada waktu sholat” (Kamus Al-Munawwir, 1984:650). Dari akar kata tersebut berubah menjadi “Masjid” yang merupakan kata benda yang menunjukkan arti tempat sujud (*isim “Makan” dari Fi’il “Sajada”*). Masjid berarti tempat untuk bersujud. Secara terminologis diartikan sebagai tempat beribadah umat Islam,

khususnya dalam menegakkan shalat. Masjid sering disebut Baitullah (rumah Allah), yaitu bangunan yang didirikan sebagai sarana mengabdikan kepada Allah.

Sujud adalah merupakan perbuatan shalat yang paling mulia, yaitu agar seorang hamba mendekatkan diri kepada Tuhannya, maka isim “makan: (kata benda yang menunjukkan tempat untuk shalat) pun diambil dari kata sujud yang kemudian berubah bentuknya menjadi masjid. Masjid tidak dikatakan dengan “marka” (tempat ruku’) atau kata lain dari bagian penting dalam kegiatan sholat. Seringkali di beberapa areal kampus dijadikan sebagai tempat shalat (mushallah) oleh beberapa komunitas pencinta Mushallah sebagai alternatif jauh atau tidak adanya sarana ibadah di sebuah kampus.

Masjid sebagai areal pembinaan dua kepribadian, intelektual (aqidah) dan hati (qalbu) keduanya harus seimbang dalam pembinaannya. Jika tidak manusia akan terjerembab ke nestapa kedomodoraan (bergelimang materi tetapi gersang spiritual) keseimbangan itu diandaikan berbasis masjid. Masjid sebagai pusat pendidikan, sebab ia merupakan corak pertama dari sekolah Islam, tempat kaum muslimin belajar, membaca dan menulis berbagai disiplin ilmu pengetahuan di dalamnya.

Namun, apapun jenis dari ketiga kategori tempat ibadah di atas, substansinya adalah bagaimana sarana tersebut dapat dijadikan sebuah sarana untuk berinteraksi dengan Tuhan/ sang Khalik, dan sarana tersebut dimanfaatkan untuk mengisi bathin

dan rohani dalam aktivitas sehari-hari di luar rumah. Dampak yang diharapkan adalah bagaimana menjadi orang lebih baik dari orang lain sebagai buah dari interaksi dengan Tuhan/ sang Khalik.

Masjid Subulussalam AlKhoori Sarana Ibadah dan Laboratorium intelektual

Intensitas pemanfaatan masjid sangat terasa selain fungsi utama sebagai tempat ibadah seperti kultum setiap habis shalat Dhuhur dan terkadang Ashar oleh para dosen tertentu yang dijadwal oleh pengurus masjid. Substansinya menekankan hidup berdasarsarkan Muhammadiyaah, kajian Tarjih, fiqhi dan ceramah umum lainnya dari para dosen tamu yang berkunjung ke Universitas Muhammadiyah Makassar.

Seiring dengan perkembangan kampus yang begitu pesaat, sehingga masjid lama tidak dapat lagi menampung secara keseluruhan jamaah, khususnya shalat Dhuhur dan Ashar saat aktivitas perkuliahan berjalan normal. Bahkan shalat seringkali dilaksanakan dua kali, begitupun saat perpindahan sementara waktu ke Auditorium kampus. Fenomena tersebut terbaca daan menjadi kegelisahan hati Syekh Al Khoory saat berkunjung ke Ma'had Al Birr Makassar dan melaksanakan Shalat Dhuhur lalu menghibahkan dana 3 M untuk pembangunan masjid tiga lantai yang representatif.

Interaksi sosial keagamaan dan sosial pendidikan sangat terasa dengan semakin ramainya aktivitas kajian-kaajian keilmuan dan keintelektualan dari berbagai pihak, banyaknya mahasiswa mengaji dan menghafalkan Alquran, diskusi lintas angkatan ataupun aktivitas belajar mandiri ataupun kelompok yang didukung dengan fasilitas *Air Conditioner* (AC) yang sejuk sehingga memungkinkan para mahasiswa dan dosen berlama-lama pasca beribadah. Kehadiran dan Intergrasi Ma'had Al Birr memberikan pengaruh besar kepada volume jamaah masjid, apalagi pasca shalat rata-rata para hafidz berdiam diri menghafal ataupun tadarrusan

Pengembangan masjid kampus yang semakin representatif memungkinkan banyak mahasiswa untuk beraktivitas pasca beribadah, yang kalau masjid lama sangat tidak memungkinkan berlama-lama karena jamaah lain akan memanfaatkannya, sehingga aktivitas ibadah berjalan dan pemanfaatan masjid kampus cukup dirasakan sebagai sebuah upaya memacu diri untuk mendapatkan ilmu di luar kelas.

Namun hadir pula pragmatisme berpikir sebagian pengajar untuk mengalihkan tempat mengajarnya dari lantai (3,4,5,6,7, 8 dan 9 gedung menara Iqra) ke areal masjid. Namun fenomena ini tidak sering karena cukup mengganggu jadwal sesudahnya. Seringkali dimanfaatkan oleh para aktivis lembaga terutama organisasi atau lembaga kampus dijadikan sebagai

tempat kegiatan besar seperti diadakan dialog kader dan kebangsaan, seminar, dan debat islam.

Namun yang menjadi catatan terhadap eksistensi masjid kampus Universitas Muhammadiyah Makassar secara khusus dan masjid kampus lainnya secara umum, yaitu design masjid hanya untuk ibadah, sehingga aktivitas diskusi dan kajian-kajian keilmuan terkadang terkesan mengganggu., sehingga teras masjid menjadi sebuah kebutuhan untuk aktivitas keintelektualan ataupun untuk reheat sejenak para mahasiswa dan dosen sebelum melanjutkan aktivitas lainnya.

Bandingkandengan ketersediaan gazebo-gasebo di seputaran masjid kampus Universitas Indonesia yang banyak dimanfaatkan mahasiswa untuk bercengkerama dan belajar karena dilengkapi pula dengan colokan listrik yang sudah menjadi kebutuhan standar di era milenial saat ini untuk mengisi daya handphone ataupun lap top. Perlunya penambahan whiteboard di areal-areal yang sering di jadikan “kelas pengganti” ataupun diskusi kelompok-kelompok kajian.

Problematika Komunikasi Bencana Di Indonesia: Covid 19 Dari *Agenda Setting* Media Ke Resepsi Khalayak

Nahrul Hayat

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Email: nahrulhayat11@gmail.com

Pendahuluan

Tulisan ini bermaksud untuk mengaji perspektif ilmu komunikasi terhadap arus informasi mengenai Virus Corona (Covid 19) di Indonesia. Memasuki bulan Februari 2020 masyarakat dunia digemparkan dengan pemberitaan wabah Corona yang berawal dari Wuhan, Tiongkok. Sejak pada 13 Maret 2020, organisasi kesehatan dunia WHO telah menetapkan status *Corona Virus Disease 19*, Covid-19 sebagai Pandemi Global. Dengan sendirinya, penyakit Virus yang mematikan ini menjadi topik pemberitaan utama pada media mainstream di seluruh dunia. Di Indonesia, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa terdapat dua warga Indonesia asal Bogor yang positif terinfeksi Virus Corona dan mengidap Covid-19 pada tanggal 2 Maret 2020. Pengumuman ini menjadi penanda pertama masuknya virus tersebut di nusantara. Sontak semua awak media berbondong-bondong menyorot isu ini, terus-menerus hingga tulisan ini dibuat pada 25 Maret 2020.

Selain analisis dampak kesehatan dan ekonomi yang menjadi koncern publik, ada hal lain yang menarik ditelaah dari pemberitaan Virus Corona di media massa. Kajian komunikasi massa melihat media massa seperti televisi, radio, dan surat kabar adalah saluran komunikasi yang paling efektif menyebarkan informasi ke masyarakat luas. Tulisan ini membatasi kajian pemberitaan Virus Corona pada media televisi. Nawiroh Vera (2010: 76-79) menerangkan bahwa televisi berasal dari kata *tele* yang berarti “jarak” dan visi yang berarti “citra atau gambar”. Vera juga mengatakan bahwa televisi merupakan media yang paling berpengaruh terhadap manusia. Hal ini sejalan dengan hasil temuan Studi Nielsen Media Research pada tahun 2018 bahwa durasi menonton televisi (TV) masyarakat Indonesia masih tertinggi dibanding konsumsi media lainnya, yaitu rata-rata 4 jam 53 menit setiap harinya, adapun diposisi kedua adalah durasi mengakses Internet dengan rata-rata 3 jam 14 menit per harinya. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan informasi masyarakat Indonesia terhadap media TV masih tinggi.

Pemberitaan isu Corona menjadi isu yang memiliki nilai berita tinggi (*high news value*) semenjak Corona telah masuk di Indonesia. Buktinya, beberapa topik Corona silih berganti mengisi konten berita di media massa seperti: *social distancing*, *lockdown*, harga masker, hoax Corona, hingga perkembangan terbaru jumlah korban. Sepintas hal ini adalah sesuatu yang lazim mengingat

kebutuhan informasi masyarakat terkait perkembangan informasi Virus Corona cukup tinggi. Tapi benarkah pemberitaan massif tersebut telah sesuai dengan kaidah penyiaran?

Di sisi lain, di tengah semakin mengganasnya penularan Virus Corona, sebagian masyarakat belum disiplin dalam menarapkan pembatasan sosial atau *social distancing* yang digalakkan oleh pemerintah. Bahkan ketidakpatuhan sosial ini masih terjadi di wilayah atau kota dimana telah ada korban meninggal akibat Virus Corona. Sebagai informasi, Per 25 Maret jumlah kasus positif Corona telah mencapai 790 dengan total korban meninggal sebanyak 58 orang (Sumber: worldometers.info/coronavirus). Beberapa ahli memprediksi angka ini akan terus bertambah hingga pertengahan April 2020. Bahkan Indonesia menyandang negara dengan tingkat kematian (*mortality rate*) tertinggi di Asia Tenggara. Data tersebut harusnya menjadi *warning* bagi masyarakat Indonesia. Lantas, apa yang salah dari kampanye “jaga jarak” pemerintah ini? Mengapa masyarakat seolah acuh dengan himbauan tersebut? Apakah ini bentuk dari kegagalan komunikasi?

Dari latar belakang di atas maka tujuan dari tulisan ini dimaksudkan untuk menemukan jawaban tentang: 1). Bagaimana deskripsi *agenda setting* media TV nasional terhadap isu Corona? Bagaimana bentuk gangguan komunikasi dan resepsi khalayak terhadap kampanye *social distancing*?

Sebelum artikel ini ditulis, penulis telah menyebarkan kuesioner online terhadap mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) IAIN Parepare terkait *trend* pemberitaan media TV Nasional selama bulan Maret 2020 sejak pengumuman Presiden RI tentang 2 warga Indonesia yang terpapar Virus Corona. Teknik *sampling* yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan jumlah sampel 18 mahasiswa. Sampel dibatasi dengan memperhatikan kejenuhan hasil data dari respondent. Kuesioner didistribusikan melalui online dengan angka *completion rate* 100 %. Berikut ini adalah beberapa kesimpulan hasil survey yang relevan dengan tulisan ini.

Pertama, informasi Corona paling banyak diperoleh oleh mahasiswa dari media sosial dengan persentasi 72,22%, disusul media TV sebanyak 61,11%. *Kedua*, media yang paling dipercaya oleh mahasiswa adalah televisi (88,89%), sedangkan pada urutan kedua adalah media oneline dengan keterpercayaan hanya 5,56%. Yang menarik, tidak ada satu pun mahasiswa yang memilih sosial media sebagai media yang terpercaya meskipun sosial media menempati urutan pertama sebagai sumber informasi Corona. *Ketiga*, Sebanyak 66% mahasiswa berpendapat bahwa media TV nasional seharusnya tetap memberikan slot berita terhadap isu korupsi di tengah pemberitaan Virus Corona.

Peran Media dan Agenda Setting

Terminologi media dalam tulisan ini digunakan untuk menyederhakan frase “media komunikasi massa”. Media adalah komponen komunikasi yang berfungsi sebagai saluran untuk meneruskan pesan dari komunikator ke khalayak massa. Massa dalam hal ini merujuk pada sifat khalayak yang berjumlah banyak, heterogen, dan anonim. Dannis McQuail dalam bukunya *Teori Komuniiasi Massa* (2010;92) menggambarkan tujuh peranan media dalam hubungannya dengan masyarakat sebagai berikut:

1. *Window of reality*, media diandaikan sebagai sebuah jendela untuk melihat peristiwa apa yang sedang terjadi.
2. *Mirror of reality*, media merefleksikan realitas eksternal kepada khalayak.
3. *Gatekepper*, media menjalankan fungsi palang pintu untuk menyeleksi informasi apa yang akan diteruskan ke khalayak.
4. Sebagai penyaring, pemandu, dan penerjemah makna dari peristiwa.
5. Sebagai forum komunikasi yang memungkinkan adanya respon dari masyarakat dalam bentuk umpan balik terbatas
6. Sebagai kontributor yang mampu meneruskan dan dan membuat informasi tida tersedia bagi khalayak
7. Sebagai komunikator atau mitra komunikasi yang memungkinkan adanya interaksi semu (*psudo interactive*)

Selanjutnya, McQuail menerangkan beberapa kekuatan media seperti; menarik dan mengarahkan perhatian publik; mempersuasi opini dan keyakinan; menarik dan mengarahkan perhatian publik: mempengaruhi perilaku; memberi definisi realitas; dan memberikan status dan pengesahan. Dengan kata lain, bagi McQuail, media menjadi faktor determinan dalam perkembangan kognisi sosial dan perilaku masyarakat. Pemaknaan ini sejalan dengan pikiran pendahulunya Wilbur Schramm (1972) yang meyakini bahwa media memiliki kekuatan membentuk opini publik. Pendapat ini tidak berlebihan jika melihat hasil survey pada bagian sebelumnya bahwa nyaris 90% responden lebih percaya terhadap media massa televisi dalam pemberitaan Corona dibanding media baru (*new media*). Fakta pengaruh media inilah yang mendasari pembahasan pertama dalam tulisan ini.

Salah satu teori yang bisa menjelaskan bagaimana pengaruh media massa terhadap khalayak adalah teori agenda setting. *Agenda setting* memiliki asumsi bahwa media memiliki kemampuan untuk menentukan apa yang dianggap penting oleh publik. Rogers dan Dearing dalam Littlejohn (1996:361) menjelaskan bahwa *agenda setting* merupakan proses linear yang terdiri dari tiga tahap. Pertama, agenda media itu sendiri berupa kebijakan redaksi dari awak media. Kedua, agenda media dalam beberapa hal mempengaruhi sikap mental publik terhadap pentingnya suatu isu disebut agenda publik, yang nantinya

mempengaruhi agenda kebijakan. Ketiga, agenda kebijakan (*policy*) adalah apa yang dipikirkan para pembuat kebijakan publik yang dianggap bersesuaian dengan apa yang dianggap penting oleh publik. Dengan kata lain, agenda media dapat menentukan agenda publik dan kebijakan pemerintah.

Diantara penelitian terdahulu yang menggunakan *agenda setting* sebagai kerangka teoritis adalah penelitian Melita Natalia yang menganalisis pengaruh *agenda setting* pemberitaan Pedofilia di Samarinda Pos. Natalia menemukan bahwa strategi *agenda setting* Samarinda Pos berhasil menyadarkan para orangtua korban pedofil untuk berani melaporkan kasus anaknya ke pihak berwenang. (Natalia, 2017:287). Berikutnya tahun 2011 Anzor melakukan penelitian tentang relevansi teori *agenda setting* dan citra pemerintah. Anzor dalam penelitiannya menegaskan tesis bahwa cara media menyampaikan realitas berpengaruh terhadap bagaimana masyarakat mempersepsikan realitas tersebut (Anzor, 2011; 145-156).

Berita Corona dan “Crying Baby Effect”

Penulis mengajak pembaca untuk sejenak melihat beberapa waktu ke belakang praCorona. Sebelum “hantu” Corona “bergentayangan” di ruang publik masyarakat Indonesia, sederet isu menjadi topik pemberitaan media. Sebut saja, drama pencarian Harun Masiku, kasus korupsi BUMN Jiwasraya dan

Asabri, hingga yang masih hangat adalah kontroversi Omnibus Law. Tiga contoh isu ini ketika dibandingkan dengan isu Corona memiliki persamaan dalam hal menyangkut kepentingan publik. Harun Masiku misalnya, sosok yang menjadi kunci penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi, bahkan peliputan kasusnya memiliki nilai berita (*news value*) yang tinggi karena menyeret nama partai penguasa dan penyelenggara pemilu di Indonesia. Korupsi BUMN Jiwasraya dan Asabri, dua kasus mega korupsi yang ditaksir merugikan keuangan negara belasan trilliun Rupiah. Bisa dibayangkan jika uang korupsi tersebut dimanfaatkan untuk “melawan” Virus Corona. Bukankah Kementerian Kesehatan masih mengeluhkan banyaknya rumah sakit di beberapa kota besar Indonesia yang masih kekurangan peralatan uji coba dan laboratorium untuk penanganan Virus Corona.

Selanjutnya, isu Program Prioritas Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Cilaka) yang diklaim oleh pemerintah sebagai Undang-Undang sapu jagat untuk memudahkan prosedur investasi dan dianggap menjadi salah satu strategi di bidang ekonomi. Meski demikian tidak sedikit elit dan pakar yang menolak RUU ini karena dianggap merugikan rakyat kecil terutama kaum buruh. Belum lagi agenda pemindahan ibu kota yang menelan anggaran lebih dari 400 juta Trilliun. Anggaran sebanyak ini sangat ironi dihabiskan untuk pembangunan infrastruktur -yang keterdesakannya masih pro kontra- di tengah kesulitan kebutuhan hidup dasar masyarakat

akibat perlambatan ekonomi efek Corona. Kenyataan hari ini, agenda pemberitaan isu-isu tersebut seolah teralihkan oleh “kekhawatiran” Virus Corona. Walhasil diskusi publik dan agenda kebijakan hanya fokus pada Covid 19..

Istilah “*crying baby*” mungkin masih asing bagi publik, sementara makna denotatifnya adalah “bayi yang menangis”, *crying baby* sebenarnya adalah sebuah metafora teoritik digunakan penulis untuk menggambarkan fenomena sosial politik dari perspektif ilmu komunikasi (Hayat, 2019:176). Makna konotatifnya merujuk pada *agenda setting* media yang memprioritaskan isu Virus Corona dengan mengesampingkan isu publik lain yang tidak kalah penting. Ibarat bayi yang sedang menangis, masyarakat Indonesia di tengah kesulitan ekonomi harus menunda tangisannya karena “ditakuti-takuti” oleh Virus Corona. Bukankah bayi yang sedang menangis meminta air susu pada “ ibunya yang telah pergi” dapat ditenangkan oleh sang ayah dengan “menakut-nakuti” sang bayi. Rakyat itu seperti bayi, menahan rasa lapar dan menunggu air susu dari Ibu Pertiwi. Pemaknaan simbolik inilah yang bisa menjadi perspektif kritis atas perilaku media yang kurang proporsional dalam pemilihan isu (*priming*) serta pembingkaiian fakta (*framing*). Publik sadar betul akan kebutuhan informasi tentang Virus Corona, tapi publik juga berhak menerima informasi yang berkualitas.

Media Antara Perilaku dan Norma

Kualitas pemberitaan Virus Corona tidak diukur dari sejauh mana media mampu memberikan rasa takut dan kepanikan bagi publik, tapi lebih dari itu informasi Corona harusnya juga menonjolkan fakta-fakta “menenangkan” dari Virus Corona. Pemberitaan tentang jumlah kesembuhan dari Virus Corona belum sebanyak dengan peliputan harga masker yang melonjak. Surplus berita masker ini justru berpotensi menambah rasa panik warga. Seringkali kita lebih banyak menyimak berita kematian dari pada informasi kasus kesembuhan yang bisa dijadikan referensi bagi publik. Berikutnya informasi strategi penindakan dan sosialisasi pencegahan masih lebih kurang dibanding berita penyebaran dan jumlah kasus *suspect* baru. Di luar itu semua, harusnya media tetap meyisakan *space* yang cukup untuk isu publik lain seperti yang dicontohkan sebelumnya. Publik juga butuh untuk mengawasi proses hukum yang menyangkut uang rakyat sebagaimana fungsi pengawasan media (*surveillance*) dalam buku *Media Effect and Society* yang ditulis oleh Elizabeth M. Perse (2001).

Sudah selayaknya media kembali pada fungsi sosialnya sesuai norma etika dan regulasi yang ada. Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 telah menegaskan bahwa selain sebagai sarana penyebaran informasi, media juga berfungsi sebagai sarana pendidikan. Pemberitaan media terkait Virus Corona mestinya mengutamakan dimensi edukasi kesehatan bukan

publikasi kepanikan. Dapur redaksi media harus kembali merujuk kepada “resep” jurnalistik yang sudah tertuang dalam Kode Etik Jurnalistik. Khusus media Televisi berita, hendaknya senantiasa beroperasi dengan berdasar pada rambu-rambu dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang ditentukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Demikian juga asas dari Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 yang bertujuan untuk melayani hak masyarakat untuk mengetahui, “*People’s Right To Know*”. Di sisi lain publik juga harus mampu menerjemahkan informasi dengan bijak sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Peter Drucker, “*The Most Important Thing In Communication is Hearing What Isn’t Said*”. Peter seolah memberikan petunjuk bahwa hal penting dalam menerima informasi dari media (massa) adalah mendengarkan apa yang tidak diberitakan.

Tantangan Kebijakan *Social Distancing*

Pada bagian sebelumnya telah diulas terkait problem komunikasi dari sudut teori media. Berikutnya adalah persoalan penerimaan khalayak atau teori resepsi. Menurut McQuail (2010:80), inti dari pendekatan resepsi adalah pemahaman dan pembentukan makna oleh penerima. McQuail juga menggambarkan bahwa teori ini berakar dari tradisi kajian teori kritis, semiotika dan analisis wacana. Pada konteks kampanye pembatasan sosial,

atau pembatasan jarak fisik versi WHO, ada persoalan pada pola resepsi masyarakat yang terkesan kurang peduli terhadap himbauan tersebut.

Telah singung sebelumnya bahwa di tengah semakin mengganasnya penularan Virus Corona, sebagian masyarakat belum disiplin dalam menarapkan pembatasan sosial atau *social distancing*. Bahkan ketidakpatuhan sosial ini masih terjadi di wilayah atau kota dimana telah ada korban meninggal akibat Virus Corona. Sepanjang pekan ke-empat Maret 2020, sejumlah media memberitakan pembubaran kerumunan warga oleh aparat disejumlah wilayah di Indonesia.]Telah diketahui pula bahwa per 25 Maret 2020 jumlah kasus positif Corona telah mencapai 790 dengan total korban meninggal sebanyak 58 orang (Sumber: worldometers.info/coronavirus). Bahkan Indonesia menyandang negara dengan tingkat kematian (*mortality rate*) tertinggi di Asia Tenggara. Lantas, apa yang melatari kegagalan komunikasi tersebut?

Komunikasi sebagai ilmu adalah studi terhadap produksi, proses, dan pengaruh pesan. Unsur komunikasi menurut Lasswell adalah pengirim (komunikator), pesan, media, penerima (komunikan) dan efek (Effendy, 2016:10). Formulasi ini oleh pakar pemasaran dunia, Philip Kotler ditambahkan unsur *noise* (Effendy, 2016:18). Setiap unsur akan menentukan efektifitas komunikasi. Pada kesempatan ini yang akan dibahas adalah unsur *noise* atau gangguan. *Noise* sangat menentukan status penerimaan

sebuah pesan. Jika pesan diterima secara positif maka komunikasi dianggap berhasil (*effective*), dan sebaliknya. Gangguan komunikasi yang akan digambarkan kali ini adalah gangguan fisik, gangguan teknis, gangguan semantik, dan gangguan psikologis (West dan Turner, 2008:12). Meskipun masih ada gangguan lain yang disebut gangguan kultural, namun hemat penulis memutuskan tidak memasukkan (*excluding*) aspek kultural dalam artikel pendek ini dengan pertimbangan bahwa dibutuhkan kajian tersendiri untuk mengulas aspek budaya (*discourse analysis*).

Noise dan Resepsi Khalayak

Pertama, gangguan fisik yang disebabkan oleh adanya kendala biologis dalam memproduksi pesan. Misal, seorang reporter karena kelelahan sehingga kurang fokus dalam merunut sistematika laporan berita atau tanpa sengaja salah sebut (*slip of tongue*). *Kedua*, gangguan teknis, bisa terjadi jika ada komponen teknis yang menghambat penyaluran informasi. Contoh, jika sebagian masyarakat belum memiliki perangkat media (TV, *smarphone* plus kuota-nya) untuk memantau *utpdate* berita Corona. Demikian juga ketika sudah memiliki TV atau *smarphone* tapi visual pada layar kaca rusak atau suara tidak jernih.

Ketiga, gangguan semantik, gangguan ini disebabkan oleh adanya kendala kebahasaan (*linguistic obstacle*) dalam mengirim dan menerima informasi. Telah banyak narasumber ahli

berkomentar di TV dan keterangan dokter spesialis di berbagai media online untuk menjelaskan Virus Corona, akan tetapi tidak sedikit bahasa yang digunakan sulit untuk dipahami oleh orang awam. Diantara istilah yang cukup populer misalnya adalah *lockdown*, *social distancing*, *hand sanitaiser*, *mortality rate*, ODP dan PDP, bahkan frase “penutupan tempat ibadah”. Pemilihan simbol bahasa tersebut sah saja jika ditujukan kepada khalayak sasaran (*targeted audience*) yang sifatnya umum.

Persoalan kemudian adalah bagaimana agar pesan tersebut sampai dan dimengerti oleh kelompok sasaran (*targeted groups*). Tiap kelompok target memiliki karekateristik dan kompetensi bahasa yang beragam; sebut saja misalnya ‘emak-emak’ di pasar, remaja yang nongkrong di kafe, atau kelompok bermain anak-anak. Lazarfeld dkk. memperkenalkan istilah komunikasi *two step flow*, atau dua tahap komunikasi, dimana terdapat *opinion leader* yang menjembatani pesan dari media ke masyarakat luas. Seorang pemuka pendapat bisa berasal dari kalangan pejabat, pemuka agama, guru, tokoh masyarakat atau kepala keluarga. Diksi “*social distancing*” misalnya oleh guru terhadap muridnya dapat diganti dengan kalimat “kita jaga jarak dari orang lain supaya kita aman dari virus jahat Corona; atau “penutupan tempat ibadah” yang oleh ustad ke jamaahnya dapat diperhalus dengan “penundaan jumat berjamaah untuk menjaga keselamatan jiwa umat”, dan disertai dengan penjelasan dalil agama yang mendasari pertimbangan Fatwa MUI.

Gangguan berikutnya adalah dimensi psikologis. Untuk bagian ini, salah satu “bapak komunikasi” moderen, Wilbur Schram (1972) memperkenalkan konsep “*frame of reference*” dalam keberhasilan komunikasi. *Frame of reference* (kerangka acuan) merupakan keseluruhan pengalaman, nilai-nilai, harapan, status sosial ekonomi, hingga preferensi politik individu. Semakin luas jurang perbedaan *frame of reference* antara komunikator dengan komunikan maka semakin besar gangguan komunikasi. Terlepas dari normativitas alasan ekonomi, fenomena ketidakpatuhan masyarakat terhadap himbauan pembatasan sosial juga dapat disebabkan adanya *political prajudice* (prasangka politis) yang negatif dari masyarakat terhadap pemerintah dan media(nya). Hal ini dilatarbelakangi adanya memori historis publik terhadap citra pemerintah. Tidak bisa dipungkiri, pengaruh polarisasi politik di Indonesia masih terasa. Implikasinya sebagian publik memiliki argumentasi negatif terhadap pemerintah. Sebagaimana yang digambarkan oleh J. Michael Sproule, “*Ketika orang ditipu, mereka tidak mempercayai sumber yang telah menipunya. Jika mayoritas dari sumber informasi yang ada di masyarakat bertindak tanpa mempertimbangkan kejujuran dalam berkomunikasi, maka semua komunikasi menjadi lemah*” (1980:282).

Sejalan dengan Sproule, Fiske (1987:126) dalam bukunya *Television Culture* menjelasanya terkait resepsi khalayak bahwa masyarakat kelas bawah memiliki kekuatan semiotika untuk

membentuk makna sesuai keinginan mereka sendiri. Bahkan makna baik dapat dapat diinterpretasi buruk oleh *decoder*-nya. Kampanye “Darurat Corona” dan “*social distancing*” dapat dimaknai oleh kalangan tertentu sebagai bagian dari teater politik penguasa untuk mempertahankan pengaruhnya. Penerapan pemaknaan opisisi seperti ini oleh Stuart Hall disebut sebagai *differential decoding* (McQuail, 2010), yakni pemaknaan yang (dengan sengaja) menginkari maksud sumbernya.

Lantas pelajaran apa yang harus dipetik dari fenomena komunikasi di atas? *Pertama*, komunikasi adalah subsistem dari sistem politik atau negara. Ibarat manusia, negara adalah tubuh dan komunikasi adalah darahnya. Sehatnya sebuah kehidupan bernegara sangat bergantung pada kualitas dan kuantitas peredaran darah pada setiap organnya. *Kedua*, dalam situasi adanya darurat bencana, baik itu alam dan non alam, seharusnya setiap jenjang otoritas hendaknya memiliki strategi dan perencanaan komunikasi yang komprehensif dan terkoordinasi. Tentu kebijakan komunikasi harus pula mempertimbangkan aspek keterbukaan informasi publik. Negara harus memastikan tidak ada warganya yang harus menanggung resiko maut akibat kebuntuan komunikasi. Sebagai saran, kebutuhan khusus komunikasi kebencanaan seperti ini, dapat mengacu pada metode ilmiah kebijakan komunikasi yang relevan. Diantaranya adalah Model KAP (*knowledge, attitude, dan practice*) dan model

komunikasi Difusi Inovasi karya ahli sosiologi pedesaan Everet M. Rogers (Cangara, 2014: 90-96).

Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja

Andi Irwan

Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lembaga Pendidikan
Indonesia Makassar

(STIM-LPI Makassar)

Email: andiirwan261@gmail.com

Pendahuluan

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi. Unsur manajemen SDM adalah manusia yang merupakan tenaga kerja pada suatu organisasi. Suwatno dan Priansa (2018:16).

Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi, karena manusia menjadi perencana, pelaku, dan penentu terwujudnya tujuan organisasi. Tujuan tersebut tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif pegawai, bagaimanapun canggihnya alat-alat yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Alat-alat canggih yang dimiliki organisasi atau perusahaan tidak ada manfaatnya bagi perusahaan/ organisasi, jika peran aktif karyawan/ pegawai tidak diikutsertakan. Mengatur pegawai adalah sulit dan kompleks, karena yang heterogen yang dibawa ke organisasi sehingga

tidak dapat sepenuhnya diatur dan dikuasai seperti mengatur mesin-mesin, jodal, gedung dan lain-lain tetapi harus diatur oleh teori-teori manajemen yang menfokuskan mengenai peraturan peran manusia dalam mewujudkan tujuan yang optimal. Suwatno dan Priansa (2018:16).

Manajemen sumber daya manusia (MSDM) adalah manajemen yang menfokuskan diri memaksimalkan kemampuan karyawan atau anggotanya melalui berbagai langkah strategis dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai menuju pengoptimalan tujuan organisasi. Manajemen sumber daya manusia sebagai proses mengelola, memotivasi dan membangun sumber daya manusia untuk dapat menunjang aktivitas organisasi secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan organisasi, Edison, dkk. (2016:10).

Untuk lebih jelasnya berikut ini disajikan pengertian manajemen sumber daya manusia menurut Sunyoto (2015:1) bahwa manajemen sumber daya manusia adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan atas pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan secara terpadu.

Kemudian Lubis, dkk. (2018:5) bahwa manajemen sumber daya manusia (MSDM) adalah usaha untuk memanfaatkan sebaik mungkin individu untuk mencapai tujuan organisasi. Bidang ilmu ini terfokus kepada manusia,

dan manusia dipandang sebagai asset (dalam perspektif lain dipandang sebagai *human capital*) bukan sebagai biaya operasional (*operating expense*). Oleh karena itu MSDM sangat penting, karena MSDM adalah strategi mengelola manusia untuk tujuan-tujuan organisasi ke depan yang lebih efektif dan efisien.

Dewasa ini sumber daya manusia yaitu suatu sumber daya yang sangat dibutuhkan oleh suatu organisasi, karena sumber daya manusia merupakan sumber yang berperan aktif terhadap jalannya suatu organisasi dari proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan terbaik yang dihasilkan menunjukkan kinerja seseorang dan kemampuannya untuk menganalisis suatu masalah dalam lingkup kerja dan jabatannya (Sutrisno, 2016:2) .

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu pendekatan dalam mengelola masalah manusia berdasarkan tiga prinsip menurut Sedarmayanti (2017:4), yaitu :

1. Sumber Daya Manusia adalah aset paling berharga dan penting yang dimiliki organisasi karena keberhasilan suatu organisasi sangat ditentukan oleh unsur manusia.
2. Keberhasilan sangat mungkin dicapai, jika kebijakan prosedur dan peraturan yang berkaitan dengan manusia dari perusahaan saling berhubungan.
3. Budaya dan nilai organisasi perusahaan serta perilaku manajerial yang berasal dari budaya tersebut akan

memberi pengaruh besar terhadap pencapaian hasil terbaik.

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia adalah bagian dari manajemen. Oleh karena itu, teori-teori manajemen umum menjadi dasar pembahasannya. Manajemen Sumber Daya Manusia lebih memfokuskan pembahasannya mengenai pengaturan peranan manusia dalam mewujudkan tujuan yang optimal. Pengaturan itu meliputi masalah perencanaan (*planning human resource*), pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian tenaga kerja untuk membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

Tujuan dan Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia

Dengan memahami fungsi manajemen, maka akan memudahkan pula untuk memahami fungsi manajemen sumber daya manusia yang selanjutnya akan memudahkan dalam mengidentifikasi tujuan manajemen sumber daya manusia. Tujuan yang hendak diklasifikasikan adalah manfaat apa yang akan diperoleh dengan penerapan manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Tujuan manajemen sumber daya manusia ialah meningkatkan kontribusi produktif orang-orang yang ada dalam organisasi

melalui sejumlah cara yang bertanggungjawab secara strategis, etis dan sosial. Tujuan ini menuntun studi dan praktik manajemen. Sunyoto (2015:8).

Tujuan manajemen sumber daya manusia tidak harus mencerminkan kehendak manajemen senior, namun juga harus menyeimbangkan tantangan organisasi, fungsi sumber daya manusia, masyarakat, dan orang-orang yang terpengaruh. Kegagalan melakukan hal itu dapat merusak kinerja, angka laba, dan bahkan kelangsungan hidup suatu perusahaan atau organisasi. Sunyoto (2015:8)

Ada empat tujuan manajemen sumber daya manusia menurut Sunyoto (2015:8) yaitu :

1. Tujuan sosial,
2. Tujuan organisasi,
3. Tujuan fungsional, dan
4. Tujuan pribadi.

Gaya Kepemimpinan

Teori kepemimpinan merupakan penggeneralisasian perilaku pemimpin serta konsep kepemimpinan melalui latar belakang historis, sebab timbulnya kepemimpinan, persyaratan menjadi pemimpin, sifat-sifat utama kepemimpinan, tugas pokok dan fungsinya, serta berbagai aspek lainnya terkait dengan pemimpin dan kepemimpinan.

Menurut Sumardjo dan Priansa (2018:168) bahwa beberapa teori pemimpin dan kepemimpinan antara lain adalah:

a. Teori Genetik

Teori ini memahami bahwa pemimpin itu dilahirkan bukan dibentuk. Bahwa seseorang menjadi pemimpin diakibatkan oleh dirinya merupakan keturunan pemimpin terdahulu atau ia telah dilahirkan dengan membawa bakat sebagai pemimpin. Teori ini sering dipahami melalui adanya kalangan bangsawan atau raja-raja, karena orang tuanya menjadi raja maka seorang anak yang lahir dalam keturunan tersebut akan diangkat menjadi raja, misalnya kepemimpinan dalam kerajaan Inggris.

b. Teori Sosial

Teori ini memahami bahwa seseorang yang menjadi pemimpin disebabkan oleh adanya proses pembentukan sebagai pemimpin. Teori ini bertolak belakang dengan teori genetis. Penganut teori ini berkeyakinan bahwa setiap individu memiliki potensi untuk menjadi seorang pemimpin sehingga faktor situasi dan kondisi serta lingkungan yang ada di sekelilingnya merupakan faktor pendukung untuk mengoptimalkan potensi individu untuk menjadi seorang pemimpin. Setiap individu dapat diberikan pendidikan, pembelajaran, dan pengalaman untuk menjadi seorang pemimpin.

c. Teori Ekologi

Teori ini memahami bahwa seseorang akan menjadi pemimpin yang baik jika ia dilahirkan sebagai pemimpin dan memperoleh pendidikan, pembelajaran, dan pengalaman untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi bakat yang telah dimilikinya secara alamiah akan berkembang seiring dengan proses yang dialaminya dalam pendidikan, pembelajaran, dan pengalaman yang ia peroleh.

d. Teori Kelompok

Teori kelompok dalam kepemimpinan memiliki dasar perkembangan yang berakar pada psikologi sosial. Teori kelompok ini beranggapan bahwa supaya kelompok mampu mencapai tujuannya maka perlu adanya suatu proses pertukaran antara pemimpin dan anggotanya. Ketika anggota tidak mampu melaksanakan pekerjaan secara baik maka pemimpin cenderung menekankan pada struktur pengambil inisiatif (perilaku tugas). Tetapi ketika anggota mampu melaksanakan pekerjaan secara baik maka pemimpin menaikkan penekanannya pada pemberian perhatian (perilaku tata hubungan)..

e. Teori Model Kontijensi

Teori kontijensi merupakan pendekatan kepemimpinan yang mendorong pemimpin memahami perilakunya sendiri. Teori ini menyatakan bahwa keefektifan sebuah kepemimpinan adalah fungsi dari berbagai aspek situasi

kepemimpinan. Lima teori termasuk ke dalam teori kontigensi adalah:

a. Model Teori Kontigensi Fiedler

Tokoh yang populer dalam teori ini antara lain adalah Fiedler (1967). Fiedler memandang bahwa organisasi akan efektif bergantung pada kecocokan antara gaya pemimpin yang berinteraksi dengan subordinatnya (anggotanya) sehingga situasi menjadi pengendali dan berpengaruh terhadap pemimpin. Karena situasi selalu berubah maka tidak ada satu pun pendekatan atau gaya kepemimpinan yang terbaik. Sehingga kepemimpinan yang diterapkan harus disesuaikan dengan kondisi yang terjadi.

b. Teori Situasional Hersey dan Blanchard

Merupakan suatu teori kemungkinan yang memusatkan perhatian pada para pengikut. Kepemimpinan yang berhasil dicapai dengan memilih gaya kepemimpinan yang tepat, yang menurut argumen Hersey dan Blanchard bersifat tergantung pada tingkat kesiapan atau kedewasaan para pengikutnya. Tekanan pada pengikut dalam keefektifan kepemimpinan mencerminkan kenyataan bahwa para pengikutlah yang menerima baik atau menolak pemimpin. Tidak peduli apa yang dilakukan si pemimpin itu, keefektifan bergantung pada tindakan dari pengikutnya. Inilah dimensi penting yang kurang ditekankan dalam kebanyakan teori kepemimpinan.

c. Teori Pertukaran Pemimpin-Anggota

Pandangan penting dari teori ini adalah hubungan antara pemimpin dan anggota yang terlibat dalam proses-proses perundingan bersama dan akhirnya mereka telah menentukan peran yang harus diisi oleh masing-masing pihak serta terus berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Pertukaran pimpinan dan anggota yang berkualitas tinggi biasanya dilihat oleh pemimpin berupa wujud dari kompetensi dan motivasi. Pimpinan akan percaya pada anggotanya untuk menyelesaikan tugas utama dan tambahan.

d. Teori Jalur-Tujuan Robert House

Teori ini disebut juga dengan istilah teori "*path goal*". Tokoh yang terkenal dari teori ini adalah House (1971). Teori ini memandang bahwa tugas pemimpin adalah membantu pengikutnya untuk mencapai tujuan dan memberikan pengarahan, dukungan, maupun motivasi yang perlu guna memastikan tujuan mereka sesuai dengan sasaran keseluruhan dari kelompok atau organisasi. Teori ini menekankan pada berbagai cara pemimpin dalam memfasilitasi kinerja anggota dengan menunjukkan pada anggota bagaimana ia berkinerja serta memperoleh *rewards*.

House mengidentifikasikan empat macam perilaku kepemimpinan, yaitu:

1) Pemimpin Direktif

Pemimpin yang membiarkan pengikutnya tahu apa yang diharapkan dari mereka, menjadwalkan pekerjaan untuk dilakukannya, dan memberi pedoman yang spesifik seperti bagaimana menyelesaikan tugas.

2) Pemimpin Suportif

Pemimpin yang ramah dan menunjukkan perhatian akan kebutuhan para pengikutnya.

3) Pemimpin Partisipatif

Pemimpin yang berkonsultasi dengan anggotanya dan menggunakan saran mereka sebelum mengambil suatu keputusan.

4) Pemimpin Berorientasi-Prestasi

Pemimpin yang menetapkan tujuan menantang dan mengharapkan anggotanya untuk berprestasi pada tingkat tertinggi mereka.

e. Teori Model Partisipasi-Pemimpin Vroom dan Yetton

Merupakan teori kepemimpinan yang memberikan seperangkat aturan untuk menentukan ragam dan banyaknya pengambilan keputusan partisipatif dalam situasi-situasi yang berlainan.

f. Teori Neo-Karismatik

Merupakan teori kepemimpinan yang menekankan pada simbolisme, daya tarik emosional, dan komitmen anggota organisasi sebagai pengikut pemimpin. Teori yang

termasuk dalam teori Neo-Karismatik antara lain adalah sebagai berikut :

- 1). Teori Kepemimpinan Karismatik
- 2). Teori Kepemimpinan Transformasional
- 3). Teori Kepemimpinan Transaksional
- 4). Teori Kepemimpinan Visioner

Kinerja

Kinerja sangat erat kaitannya dengan tugas dan tanggungjawab, dimana banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja adalah kepuasan kerja. Menurut Robbins dan Judge (2015:46) yang mengemukakan bahwa kepuasan kerja (*job satisfaction*) yang menjelaskan suatu perasaan positif tentang pekerjaan yang dihasilkan dari suatu evaluasi pada karakteristik-karakteristiknya. Seseorang dengan tahap kepuasan kerja yang tinggi memiliki perasaan yang positif mengenai pekerjaannya, sedangkan seseorang dengan level yang rendah memiliki perasaan negatif.

Kinerja pegawai pada dasarnya terbentuk setelah pegawai merasa adanya kepuasan, karena kebutuhannya terpenuhi dengan kata lain apabila kebutuhan pegawai belum terpenuhi sebagaimana mestinya maka kepuasan kerja tidak akan tercapai, dan pada hakikatnya kinerja pegawai akan sulit terbentuk. Setiap orang yang bekerja digerakan oleh

suatu motif. Motif pada dasarnya bersumber pertama-tama berbagai kebutuhan dasar individu atau dapat dikatakan bahwa kekuatan yang memotivasi seorang untuk bekerja giat dalam pekerjaannya tergantung dari hubungan timbal balik antar apa yang diinginkan atau dibutuhkan dari hasil pekerjaan tersebut dan seberapa besar keyakinan organisasi akan memberikan kepuasan bagi keinginannya sebagai imbalan atas usaha yang dilakukannya.

Kinerja adalah sejauh mana seseorang telah memainkan baginya dalam melaksanakan strategi organisasi, baik dalam mencapai sasaran khusus yang berhubungan dengan peran perorangan dan atau dengan memperlihatkan kompetensi yang dinyatakan relevan bagi organisasi. Kinerja ada suatu konsep yang multi dimensional mencakup tiga aspek yaitu sikap (*attitude*), kemampuan (*ability*) dan prestasi (*accomplishment*).

Kinerja merupakan aspek penting dalam upaya pencapaian suatu tujuan. Pencapaian tujuan yang maksimal merupakan buah dari kinerja tim atau individu yang baik, begitu pula sebaliknya, kegagalan dalam mencapai sasaran yang telah dirumuskan juga merupakan akibat dari kinerja individu atau tim yang tidak optimal.

Secara etimologi, kinerja berasal dari kata prestasi kerja (*performance*). Istilah kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau

prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang) yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Afandi (2018:85) mengatakan bahwa kinerja adalah sejauh mana seseorang telah memainkan baginya dalam melaksanakan strategi organisasi, baik dalam mencapai sasaran khusus yang berhubungan dengan peran perorangan dan atau dengan memperlihatkan kompetensi yang dinyatakan relevan bagi organisasi.

Kriteria kinerja adalah dimensi-dimensi pengevaluasian kinerja seseorang pemegang jabatan, suatu tim, dan suatu unit kerja. Secara bersama-sama dimensi ini merupakan harapan kinerja yang berusaha dipenuhi individu dan tim guna mencapai strategi organisasi. Menurut Afandi (2018:85) bahwa ada 3 jenis dasar kriteria kinerja yaitu :

- 1) Kriteria berdasarkan sifat memusatkan diri pada karakteristik pribadi seseorang pegawai. Loyalitas, keandalan, kemampuan, ber-komunikasi, dan keterampilan memimpin merupakan sifat-sifat yang sering dinilai selama proses penilaian. Jenis kriteria ini memusatkan diri pada bagaimana seseorang, bukan apa yang dicapai atau tidak dicapai seseorang dalam pekerjaannya.

- 2) Kriteria berdasarkan perilaku terfokus pada bagaimana pekerjaan dilaksanakan. Kriteria semacam ini penting sekali bagi pekerjaan yang membutuhkan hubungan antara personal. Sebagai contoh apakah SDM-nya ramah atau menyenangkan.
- 3) Kriteria berdasarkan hasil, kriteria ini semakin populer dengan makin ditekannya produktivitas dan daya saing internasional. Kriteria ini berfokus pada apa yang telah dicapai atau dihasilkan ketimbang bagaimana sesuatu dicapai atau dihasilkan.

Tingkat keberhasilan seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya disebut dengan istilah "*level of performance*" atau level kinerja. Pegawai yang memiliki level kinerja yang tinggi merupakan pegawai yang produktivitas kerjanya tinggi, begitupun sebaliknya, pegawai yang memiliki kinerja tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, maka pegawai tersebut merupakan pegawai yang tidak produktif.

Penilaian kinerja merupakan salah satu tugas penting bagi perusahaan untuk mengetahui level kinerja pegawai yang dimilikinya. Namun demikian, pelaksanaan penilaian kinerja yang obyektif bukanlah tugas dan proses yang sederhana, mengingat setiap metode yang digunakan dalam penilaian kinerja mengandung bias penilaian. Bias penilaian tersebut, bisa menghasilkan hasil penilaian yang tidak cermat

dan tidak tepat sasaran bagi perusahaan. Sedangkan disisi yang lain, perusahaan harus memperoleh informasi yang memadai terkait dengan kinerja pegawainya, sebagai bahan pertimbangan bagi keputusan-keputusan strategis perusahaan, baik terkait dengan kebijakan umum perusahaan, maupun terkait dengan kebijakan pengembangan SDM.

Penutup

Gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh atasan dapat meningkatkan kinerja, karena gaya kepemimpinan yang baik dapat memberikan petunjuk bagi karyawan mengenai cara atau metode kerja yang baik dalam bekerja yang memberikan dampak terhadap pencapaian hasil kerja yang lebih optimal sehingga mendukung tercapainya pekerjaan sesuai dengan yang ditargetkan.

Gaya kepemimpinan berkaitan dengan cara seseorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan yang bertujuan untuk mendorong gairah dalam bekerja serta produktivitas kerja yang tinggi dalam pencapaian tujuan organisasi. Gaya kepemimpinan sangat mempengaruhi kinerja karyawan.

Sehingga dalam penerapannya dapat kita simpulkan bahwa dengan semakin baiknya pola atau gaya seorang pemimpin dalam memberikan dorongan ataupun metode yang diterapkan seorang pemimpin dalam memberikan contoh

kepada bawahan maka akan semakin tinggi pula capaian karyawan dalam memenuhi target pekerjaan yang diberikan, dalam artian peran seorang pemimpin sangatlah penting dalam mengarahkan pencapaian kinerja seorang pegawai.

Era Industri 4.0 dan Bisnis Star Up

Sofyan Hamid Indar

STIE Nobel Indonesia, Makassar

Email: sofyanhamid.indar@gmail.com

Pendahuluan

Dunia kini telah berada pada era dimana revolusi teknologi secara tidak langsung telah mengubah gaya hidup, seperti cara kita bekerja, bagaimana kita berkomunikasi dan berbagi informasi, serta cara kita membangun relasi. Perubahan tersebut tentunya melibatkan sektor global yang tidak lain merupakan sektor pemerintahan, perusahaan swasta, sektor industri, ekonomi, pasar modal, pelaku politik hingga bisnis, dan tentu saja masyarakat luas. Perubahan tersebut tidak dapat kita negasikan dalam kehidupan di zaman modern seperti sekarang ini. Terutama, dalam dunia usaha yang dimana perubahan ini perlu disikapi dengan cepat dan diperlukan persiapan yang matang serta sikap antisipatif menjadi suatu keharusan untuk segera dilakukan baik dari sisi Proses Bisnis (*Bussiness Process Management*) maupun hubungan dalam perusahaan, agar eksistensi perubahan tetap terjaga. Proses bisnis perlu menyesuaikan perkembangan zaman dan kebutuhan pasar secara efektif dan efisien agar mampu memberikan *added value* yang signifikan bagi perusahaan.

Disisi lain, perkembangan pasar pun bergerak menjadi sangat kompetitif yang menjadikan persaingan bisnis semakin kompleks dan begitu ketat. Namun, hal tersebut menghadirkan tantangan baru bagi perusahaan. Puncak seluruh perubahan besar tersebut sebanding dengan munculnya Revolusi Industri Generasi Pertama, Kedua, Ketiga dan sekarang ini, kita berada di Revolusi Industri Keempat yang diyakini akan mampu meningkatkan produktivitas hingga 30%. Era Industri 4.0 tidak terlepas dengan digitalisasi atau juga dikatakan dengan era digitalisasi. Berbeda dengan revolusi sebelumnya, Revolusi 4.0 diprediksi memiliki efek yang lebih besar karena tidak hanya menyentuh dunia manufaktur, melainkan seluruh aspek bisnis. Namun sebelum membahas lebih jauh mengenai Revolusi 4.0, mari kita menyoroti kembali revolusi industri yang terjadi sejak abad ke-18:

Revolusi Industri Pertama (1750-1850)

Revolusi Industri Pertama ditandai dengan dikembangkannya mesin uap oleh James Watt pada abad ke-18, serta diciptakannya mesin-mesin bertenaga air. Pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan oleh manusia mulai dialihkan menggunakan mesin uap. Sektor industrialisasi berkembang dengan cepat, produksi barang kebutuhan masyarakat bisa diproduksi dengan lebih mudah dan secara massal. Pada era tersebut terjadi perubahan masif di bidang pertanian,

manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Revolusi ini dicatat oleh sejarah berhasil mendongkrak perekonomian, dimana selama dua abad setelah Revolusi Industri Pertama terjadi peningkatan rata-rata pendapatan perkapita Negara-negara di dunia menjadi enam kali lipat. Revolusi Industri 1.0 berakhir pertengahan tahun 1800-an, diselingi oleh perlambatan dalam penemuan makro sebelum Revolusi Industri 2.0 muncul pada tahun 1870.

1. Revolusi Industri Kedua (1870—awal Perang Dunia I)

Revolusi Industri 2.0 juga dikenal sebagai Revolusi Teknologi, sebuah fase pesatnya industrialisasi di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Revolusi ini ditandai dengan terciptanya tenaga listrik sebagai sumber utama dan *Combustion Chamber* (Ruang Pembakaran). Penemuan ini kemudian diikuti dengan kemunculan pesawat telepon, mobil, serta pesawat terbang yang mengubah wajah dunia secara signifikan. Pada era ini, manajemen bisnis pun mengalami perkembangan yang memungkinkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi fasilitas industri. Hal tersebut pun membentuk adanya divisi-divisi pekerjaan dimana setiap pekerja hanya bekerja dalam bagian tertentu dari seluruh proses pekerjaan. Sehingga, *Assembly Lines* atau proses manufaktur dimana setiap bagian disusun berdasarkan urutan untuk menghasilkan produk jadi yang lebih cepat dari metode manufaktur yang biasa dilakukan.

2. Revolusi Industri Ketiga (Akhir abad ke-20)

Revolusi Generasi Ketiga ini ditandai oleh perkembangan semikonduktor dan proses otomatisasi industri. Dengan kata lain, dunia sedang bergerak memasuki era digitalisasi. Kemunculan teknologi digital dan internet menandai dimulainya Revolusi Industri 3.0. Dalam tahap inilah berbagai komponen elektronika ditemukan. Mulai dari transistor, IC chips yang memungkinkan untuk mengembangkan mesin yang tidak memerlukan operator manusia. Pada era ini juga terjadi perkembangan perangkat lunak yang mendukung perangkat keras elektronik. Otomatisasi peralatan industri menggantikan peran manusia dalam prosesnya. Pada satu sisi, perkembangan teknologi digital ini mempermudah pekerjaan manusia karena hanya dalam hitungan jam, banyak produk yang dapat dihasilkan. Proses bisnis semakin berkembang pesat dan lebih terstruktur mulai dari tahap perencanaan oleh manusia, jadwal, dan aliran proses produksi. Pada Revolusi 3.0 inipun dunia bisnis mulai memperhatikan penekanan biaya produksi, sehingga demi mengurangi biaya produksi maka konsep pemindahan pabrik ke Negara dengan biaya rendah mulai dilakukan. Bisnis berbasis teknologi pun mulai muncul yang dikenal dengan istilah Technopreneur. Perkembangan teknologi telekomunikasi selular yang begitu pesat mempercepat proses transformasi menuju Revolusi Industri Keempat.

3. Revolusi Industri Keempat (Abad ke-21)

Dengan ditemukannya internet pada generasi 3.0 menjadi dasar dari terbukanya gerbang menuju Revolusi Industri 4.0. Salah satu *grand design*-nya adalah pemanfaatan *Internet of Thing* (IoT). IoT ini berambisi menginterkoneksi segala perangkat yang ada dengan internet. Seperti *remote control*, yang dapat mengontrol dari kejauhan. Pada tahun 2018 seperti yang dilansir *MIT Technology Review*, para peneliti *Massachusetts Institute of Technology* sukses menciptakan pesawat yang bisa terbang tanpa mengandalkan satupun bagian yang berputar. Pesawat tersebut memanfaatkan *electroaerodynamic propulsion*.

Inovasi terus berkembang dan pada tahun 2019 mulai dari peran robot di bidang industri, *Artificial Intelligence* (kecerdasan buatan), *Drone Operation Centre*, *Self-Powered Data Centre*, hingga rencana pengembangan *Virtual Workers*. Model bisnis pun berubah dengan memanfaatkan teknologi, baik itu untuk jual-beli, manajemen manusia, maupun kebutuhan perusahaan. Begitu besar dampak perkembangan peradaban manusia mengikuti revolusi industri hingga saat ini. Lebih dari itu, pada era Industri Generasi 4.0 ini ukuran besar perusahaan tidak menjadi jaminan, namun kelincahan perusahaan menjadi kunci keberhasilan meraih kesuksesan dengan cepat.

Bisnis startup adalah sebuah perusahaan yang baru saja di bangun atau dalam masa rintisan, namun tidak berlaku untuk

semua bidang usaha, istilah startup ini lebih di kategorikan untuk perusahaan bidang teknologi dan informasi yang berkembang di dunia internet. Jenis bisnisnya bisa beragam, misalnya seperti pengembang aplikasi, sistem pembayaran, jasa, perdagangan dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri karena perkembangan dunia internet yang sedang pesat-pesatnya, membuat bisnis startup ini semakin banyak bermunculan.

Menurut beberapa sumber bahkan jumlah startup lokal saat ini sudah mencapai ribuan, dan tentunya setiap saat masih akan terus bertambah. Sebetulnya istilah bisnis startup ini sudah ada sejak dari akhir tahun 90 an, dan salah satu contoh startup lokal yang sudah dikenal dan sukses salah satunya pasti kita semua kenal yaitu kaskus. Dengan terus berkembangnya dunia internet hingga sekarang ini, maka semakin banyak juga pelaku bisnis lain yang tertarik dan mulai mendirikan startupnya. Dengan begitu, tentunya tidak menutup kemungkinan jika kedepan akan bermunculan juga startup-startup sukses lainnya karena di dorong dengan semakin populernya dunia maya di masyarakat kita sekarang ini.

Siapa yang belum mendengar atau menggunakan Facebook? Facebook ini merupakan salah satu cerita sukses dari sebuah start-up. Dimulai dari Mark Zuckerberg dan kawan-kawannya, Facebook pada awalnya hanya sebuah aplikasi sederhana saja. Ternyata kemudian aplikasi ini menjadi fondasi dari sebuah perusahaan start-up yang berhasil. Mark Zuckerberg menjadi

kaya raya. Selain itu ada juga kesuksesan dari Twitter, YouTube, PayPal, dan masih banyak lainnya. Maka, banyak orang ingin menjadi pendiri perusahaan start-up yang sukses juga. Sebetulnya cerita start-up ini bukan cerita baru.

Sebelum Facebook ada Google ada Netscape, yang memulai boomingnya perusahaan dotcom. Sebelumnya lagi ada Apple Computers, yang berjaya di tahun 80-an dengan personal computers. Atau, Microsoft, yang terkenal dengan software-nya. Sebelumnya lagi ada Intel, yang bergerak di bidang integrated circuits. Dan masih banyak cerita-cerita lainnya. Di luar cerita sukses tersebut, sebetulnya lebih banyak kegagalan yang dialami oleh para start-up. Dikatakan bahwa hanya satu dari sepuluh start-up yang sukses. Sayangnya cerita kegagalan ini jarang dibahas. Padahal justru kita dapat belajar dari kegagalan-kegagalan tersebut. Lantas apa kunci kesuksesan sebuah start-up? Ini merupakan sebuah misteri. Namun ada upaya untuk menelaah kesuksesan tersebut dari kaca mata yang lebih logis sehingga potensi kegagalan start-up dapat dikurangi (atau dideteksi lebih awal). Buku ini merupakan salah satu upaya untuk menjabarkan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan potensi keberhasilan dari start-up.

Tahapan Start-up

Untuk memulai sebuah start-up ada tahapan yang umum dilakukan. Tahapan-tahapan tersebut antara lain:

- a. *Ideation*: Pencetusan ide
- b. *Product Development*: pengembangan produk atau layanan
- c. *Getting User and Marketing*: memasuki pasar
- d. *Rapid Growth*: berkembang dengan pesat
- e. *Maturity*: matang
- f. *Steady Growth or Decay*: tetap berkembang atau menurun.

Semua dimulai dari sebuah ide. Karena ide ini “gratis” maka penghasilan (revenue) atau pengeluaran masih nol. Sesuai dengan berjalannya waktu, maka ide mulai dikembangkan dan mulailah ada pengeluaran. Penghasilan malah menjadi negatif. Investor bisa masuk mulai tahap ini setelah mendengar ide Anda. Bisa juga investor masuk setelah produk mulai terlihat bentuknya dan sudah ada tanda-tanda kesuksesan. Produk atau layanan mulai masuk ke pasar dan mulai mendapat pengguna. Penghasilan boleh jadi masih negatif tapi sudah ada tanda-tanda untuk menaik. Pada suatu saat, penghasilan mulai positif. Tahapan ini diikuti dengan perkembangan yang (sangat) pesat. Rapid growth. Ini dengan asumsi produk atau layanan kita sangat disukai. Biasanya kurva yang ada di sini dikenal dengan istilah hockey stick karena bentuknya seperti stik ice hockey 1 . Pada akhir tahap ini, biasanya investor ingin keluar 1 Foto *hockey stick* dan menukarkan investasinya dengan uang lagi. Di sini, investor untung sangat besar. Investasinya berlipat ganda. Keuntungan investasinya ini menutupi kegagalan investasi di tempat lain. “*Start-up*” identik dengan rapid growth. Perusahaan

yang tidak memiliki rapid growth tidak bisa disebut start-up tetapi perusahaan biasa saja.

Setelah sukses besar dengan meningkatnya pengguna dengan pesat (dan tentunya juga peningkatan penghasilan yang signifikan), kita masuk ke tahap matang. Stabil. Sesungguhnya pada tahap ini, inisiatif kita sudah tidak bisa disebut startup lagi. Bank mulai masuk ke tahap ini menggantikan peran investor sebagai sumber pendanaan. Keuntungan ada tetapi mulai landai. Tahap matang biasanya terpecah menjadi dua jenis; yang tetap bertahan (dengan bertambah keuntungan meskipun tidak sehebat sebelumnya pertumbuhannya) dan yang kemudian mulai menurun sampai akhirnya menjadi mati. Skenario di atas adalah untuk start-up yang sukses. Boleh jadi, start-up kita tidak pernah memasukin tahapan perkembangan yang pesat. Setelah dikembangkan, dia tidak disukai dan akibatnya tidak ada penghasilan. Produk terpaksa dihentikan. Start-up dibubarkan. Tenggang waktu untuk masing-masing tahapan juga berbedabeda. Ada yang pengembangan produknya hanya membutuhkan waktu bulanan atau satu tahun saja. Namun, ada juga yang proses pengembangannya bertahun-tahun sehingga berakibat kehabisan uang dan start-up harus ditutup. *start-up*, yaitu masalah perusahaannya sendiri. Hal-hal yang terkait dengan ini misalnya masalah co-founder, bentuk perusahaan, nilai (valuasi) dari perusahaan, kepemilikan saham, karakter atau nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan, dan seterusnya.

Tahap awal dari sebuah start-up adalah ide 2 . Ide terse- 2 Di sini saya berbeda pendapat dengan banyak orang. Ada orang yang berpendapat bahwa yang mula-mula harus dilihat adalah prospek bisnisnya. Bagi saya, sebuah bisnis yang tidak menjawab masalah - meskipun ada uangnya, dan kemungkinan juga banyak uangnya - tidak terlalu menarik untuk dibahas. but harus menjawab sebuah masalah, yang biasanya adalah masalah yang Anda hadapi. Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab:

1. Apa masalah yang ingin Anda pecahkan?
2. Mengapa masalah itu muncul?
3. Apakah itu masalah Anda?
4. Apa yang sudah dilakukan oleh orang lain tentang masalah tersebut?
5. Apakah Anda kompeten untuk menjawab pertanyaan tersebut?

Salah satu tempat yang banyak juga menjadi alternatif mulainya start-up adalah kampus. Banyak contoh start-up yang bermula dari lab di kampus, misalnya Sun Microsystems, Cisco, dan seterusnya. Kampus merupakan pilihan yang natural karena infrastruktur - tempat (ruangan), listrik, peralatan (yang boleh jadi harganya mahal), dan bahkan kadang bahan-bahan (komponen) - disediakan oleh kampus secara “gratis” 15. Start-15 Ada pemikiran dari pihak kampus untuk mendapatkan pendapatan dari para start-up ini, baik secara langsung maupun

melalui saham. Bahkan sebagian besar kampus terlihat terlalu serakah (greedy) sehingga mematikan upaya start-up ini. Jika tidak mau bayar, keluar! Kalau boleh dianalogikan, situasi ini mirip dengan orang tua yang merasa ikut andil dalam kesuksesan pendidikan anaknya dan kemudian meminta bayaran baik secara langsung misalnya dengan menagih biaya koskosan dan biaya makan ke anaknya, atau meminta "saham". Meskipun mungkin ada yang menerapkan hal ini, tetapi nampaknya ini terlalu berlebihan.

Orang tua seharusnya cukup puas dengan kesuksesan anaknya dan bolehlah membuat klaim ikut turut serta dalam kesuksesan anaknya ini. Demikian pula peran kampus dalam kesuksesan start-up. up bisa lebih fokus kepada pengembangan produknya tanpa perlu pusing dengan infrastruktur. Setelah cukup matang, starting up 23 start-up kemudian keluar dari kampus dan mendirikan perusahaannya secara formal. Kampus dapat dianggap sebagai inkubator dari start-up, yang menyangga start-up ini hingga cukup kuat untuk bertarung di dunia. Sebagian besar kampus tidak memiliki unit khusus untuk mendukung para start-up ini. Bentuk dukungan biasanya dilakukan secara informal. Mekanisme dan peraturan yang memungkinkan dukungan secara formal - apalagi bagi perguruan tinggi milik pemerintah - masih belum ada. Namun hal ini seharusnya tidak boleh menjadi halangan bagi kampus untuk mendukung upaya

pendirian start-up. Ketika start-up ini sudah sukses, nantinya mereka akan memberikan dukungan balik kepada kampusnya.

Model Bisnis Sejalan dengan pengembangan produk atau layanan start-up Anda, perlu dipikirkan model bisnisnya. Model bisnis tidak hanya terkait dengan bagaimana Anda mendapat uang dari pelanggan Anda, tetapi juga terkait dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penjualan produk atau layanan Anda. Misalnya layanan Anda melibatkan pihak lain untuk mengantarkan produk ke tempat pelanggan. Atau ada pihak lain yang memberikan (supply) bahan mentah atau informasi dasar. Dimana peran mereka dalam (supply chain) bisnis Anda? Ini harus dipikirkan. Mendiskusikan model bisnis ternyata tidak mudah. Apa yang disebut “model” juga ternyata bervariasi. Salah satu “tools” yang dapat digunakan untuk mendiskusikan model bisnis adalah Business Canvas. Ini akan kita bahas dengan lebih mendalam. Hal yang perlu dipikirkan adalah bagaimana pelanggan membayar layanan Anda. Ada beberapa model pembayaran:

1. *Pay as you go*. Model ini seperti yang Anda lakukan jika Anda menggunakan layanan jalan tol. Bayar ketika Anda menggunakan jalan tol saja.
2. *Subscription*. Berlangganan seperti halnya Anda berlangganan TV kabel. Mau layanan digunakan atau tidak, Anda membayar bulanan.

3. *Pay by advertisement*. Layanan dibayar oleh iklan. Pengguna tidak membayar.

4. *Free* (gratis). Gratisan juga merupakan model bisnis.

5. *Freemium*.

Tidak ada satu model bisnis yang cocok untuk semua. Mari kita bahas satu persatu. 30 budi rahardjo Pay as You Go Hal yang paling mudah dimengerti adalah orang membayar layanan sesuai dengan apa yang dia gunakan. Semakin sering atau banyak dia menggunakan layanan, semakin mahal dia harus membayar. Ini adalah model pembayaran yang paling mudah dipahami. Contoh dari model ini adalah penggunaan jalan tol, dan akses internet dengan basis jumlah data (KiloBytes atau MegaBytes) yang digunakan. Masalah dengan model pembayaran ini adalah pelanggan tidak tahu di awal (up front) berapa biaya yang dia keluarkan. Ada kekhawatiran bahwa jika penggunaan tidak terkendali maka biaya akan meledak. Sebagai contoh, pembayaran akses internet yang hanya menggunakan jumlah data yang digunakan kurang disukai. Pelanggan khawatir biayanya akan menjadi tidak terkendali (atau jika dibayar dengan pulsa, pulsanya tiba-tiba menjadi habis). Subscription Berlangganan (subscription) merupakan salah satu metoda pembayaran yang menarik bagi pelanggan karena mereka dapat memperkirakan budget.

Sebagai contoh, jika kita in- 22 Memahami target pasar merupakan ilmu dan seni tersendiri. Kadang kita dikagetkan

dengan penerimaan produk atau layanan di komunitas yang bukan menjadi target utama. Jika memasarkan produk sepeda motor maka kita tidak ingin membidik anak-anak SD atau lansia. Boleh saja memperkenalkan diri kepada mereka, tetapi hasilnya akan jauh dari yang diharapkan. Iklan merupakan salah satu yang paling mudah dipahami. Kita memasang iklan di berbagai media yang mainstream, seperti misalnya surat kabar, majalah, televisi, radio, papan billboard, dan seterusnya. Sayangnya memasang iklan di media ini biayanya cukup mahal sehingga perlu berhati-hati dalam memilih media tersebut.

Di jaman konvensional dahulu, kita menentukan target dan kemudian memasang iklan di media yang sesuai dengan target. Di jaman internet ini, kita pasang iklan dimana saja dan berharap orang dari target market kita akan melihat iklan tersebut. Kemudahan yang membuatnya demikian. Tentu saja hasilnya menjadi tidak efektif. Terlalu banyak menyebarkan iklan di internet juga dapat menjadi bumerang. Orang akan menganggap ini sebagai sampah (spam) sehingga efeknya justru malah negatif. Oleh sebab itu menargetkan iklan juga masih relevan di internet. Ada (terlalu) banyak aplikasi media sosial di internet. Untuk Indonesia, Facebook masih mendominasi. (Namun perlu diperhatikan bahwa banyak anak muda sekarang yang mulai meninggalkan Facebook dan lebih banyak menghabiskan waktu di media sosial lainnya.) Selain itu ada Twitter, Instagram, Path, dan yang baru-baru lagi. Itulah

sebabnya ada layanan untuk memantau trend penggunaan media sosial di berbagai negara. Selain media sosial, ada juga media komunikasi di handphone seperti *WhatsApp, Line, KakaoTalk, Wechat, Beetalk, dan Telegram*.

Ini berisi *closed* usergroup seperti “mailing list” di jaman internet lama. Memungkinkan juga memasang iklan di sana tetapi harus dilakukan dengan lebih berhati-hati karena pengguna lebih sensitif terhadap upaya pengiklanan. Search Engine Optimization (SEO) Ketika internet mulai dibuka untuk publik, ada banyak sumber informasi di internet tetapi tidak ada daftarnya (direktori). Maka lahirlah Yahoo! Direktori di Yahoo! mulai bertambah banyak sehingga diperlukan sebuah mekanisme pencarian (search). Maka muncullah search engine (mesin pencari). Trend ini kemudian diteruskan dengan lahirnya berbagai search engine lainnya, yang notabene sekarang didominasi oleh Google. Pengguna memulai aktivitas di internet dengan mencari informasi berbasis kata kunci (keyword). Kata kunci ini dimasukkan ke search engine dan akan ditampilkan daftar web starting up 35 (dalam bentuk link yang mungkin memberikan informasi yang dicari pengguna. Seringkali daftar ini memiliki jumlah link yang banyak sehingga tampilan dibagi menjadi beberapa halaman. Bagi penyediaan layanan, dia ingin halaman webnya ditampilkan di halaman terdepan - atau bahkan nomor satu. Maka mulai muncullah teknik-teknik untuk mengakali (“mengoptimisasi”) search

engine agar dia muncul terdepan. Lahirlah Search Engine Optimization (SEO).

Memahami bahwa mereka ditargetkan menjadi tempat akalakalan dengan SEO, para search engine (terlebih lagi Google) mulai menerapkan algoritma untuk menetralkan trik-trik yang dilakukan para internet marketer dengan SEO-nya itu. Itulah sebabnya ini masih menjadi ajang yang menarik. Pirate Metric Adakah ukuran keberhasilan kita dalam mendapatkan pelanggan? Atau dengan kata lain, apakah karakteristik dari usaha kita? Misalnya, kalau kita beriklan dan mendapatkan 1000 orang, berapa kira penjualan (sales) kita? Salah satu ukuran (metric) yang dapat kita gunakan adalah “pirate metric”. Disebut pirate metric karena singkatannya - AARRR - mirip dengan seruan (atau makian) dari seorang bajak laut. *Pirate metric* terdiri dari *Acquisition*, *Activation*, *Retention*, *Referral*, dan *Revenue*.

Mari kita bahas satu persatu. *Acquisition* Pada tahap ini kita berusaha agar orang mengenal produk (service) kita. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan agar orang tahu akan produk kita, antara lain:

1. Beriklan (advertising); ini dapat dilakukan dengan menggunakan media konvensional seperti surat kabar, radio, baliho, televisi, sampai ke menyebarkan selebaran di pinggir jalan, atau beriklan di internet (dengan menggunakan fitur iklan di Facebook, Instagram); item membuat situs web.

2. Ikut pameran, menyelenggarakan talk show, datang ke kampus-kampus, dan melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Pada saat buku ini ditulis ada kecenderungan untuk menggandalkan internet dan media sosial dalam beriklan.

Banyak orang yang merasa bahwa beriklan di internet itu sudah cukup, 36 budi rahardjo padahal ada penelitian yang mengatakan bahwa beriklan di internet belum seefektif beriklan di media konvensional (dengan menggunakan baliho, misalnya). Setiap channel akan memiliki conversion rate yang berbeda-beda. Yang perlu diperhatikan adalah seberapa besar budget yang kita keluarkan dan seberapa banyak orang yang akan mengenal produk kita. Berapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk memperkenalkan produk kita ke 1000 orang? Ini kemudian dikonversikan menjadi customer acquisition rate (CAR), yaitu seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan satu orang (calon) pelanggan. Setiap industri memiliki CAR yang berbeda. Bagaimana mengukur acquisition ini? Ada banyak cara untuk mengukur hal ini. Sebagai contoh, kita dapat membuat alamat email khusus untuk menerima calon pelanggan ini. Pada iklan yang kita buat dapat kita tambahkan alamat email atau nomor telepon.

Referral Ukuran keberhasilan selanjutnya adalah seberapa banyak orang yang bukan hanya menggunakan produk kita saja tetapi dia juga menganjurkan orang lain untuk menggunakannya. Hal ini dapat disebabkan karena dia

menyukali produk kita, atau mungkin ada bonus-bonus yang membuat dia akan memperkenalkan produk kita ke orang lain. Ini juga dapat dikaitkan dengan acquisition secara “gratis”. Ukuran keberhasilan ini lebih sedikit lagi dari sebelumnya. Jika tadinya ada 10 orang yang tetap menggunakan produk kita, dan jika hanya ada 10 persen yang memperkenalkan produk kita ke orang lain, maka ada 1 orang yang melakukan tersebut. Revenue Pada akhirnya semua itu akan menjadi pendapatan bagi kita.

Revenue. Pada akhirnya seberapa besar pemasukan kita atas upaya-upaya kita tersebut di atas. Jika kita mengeluarkan uang sebesar Rp. 10 juta untuk beriklan, maka seberapa besar penjualan yang kita peroleh. (Nantinya akan diturunkan lagi ke seberapa besar keuntungan kita, tetapi itu akan menjadi bahasan yang lebih kompleks. Untuk kali ini, kita berhenti sampai di pemasukan dari penjualan itu dulu saja.) Setiap bidang usaha (bidang industri) dan bahkan produk memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Pada contoh di atas, saya menggunakan asumsi penurunan sebesar 10 persen dari satu tahap (ukuran) ke tahap selanjutnya. Boleh jadi di bidang Anda hal itu dapat lebih kecil.

Pendanaan Salah satu aspek yang penting dalam pengembangan sebuah usaha adalah pendanaan. Bahkan, ada orang yang beranggapan bahwa pendanaan adalah aspek yang terpenting. Pada kenyataannya dana memang penting, tetapi boleh jadi dia bukanlah yang terpenting. Bagaimana mendanai start-up Anda?

Sumber dana dari mana? Ada banyak sumber pendanaan. Masing-masing memiliki pro dan kontra. Sendiri Salah satu cara yang paling umum dilakukan adalah mendanai sendiri. Masalahnya, orang belum tentu percaya dengan usaha yang kita mulai. Boleh jadi mereka tidak percaya pada bentuk usahanya, atau bahkan tidak percaya kepada orangnya (kita). Jalan keluarnya adalah dengan mendanai sendiri usaha kita.

Cara ini selalu dapat kita lakukan, meskipun umumnya ada masalah besar yaitu uang kita sangat terbatas (bahkan hampir tidak ada). Dana yang terlalu kecil ini membuat usaha kita berjalan lambat. Misal, setelah kita hitung-hitung, kita membutuhkan 10 orang pekerja tetapi uang yang kita miliki hanya cukup untuk membiayai kita sendiri. Akibatnya kecepatan pengembangan usaha menjadi 1/10 nya. Angel Investor Mulailah kita mencari pihak lain yang mau ikut mendanai start-up kita, investor. Lagi-lagi masalahnya adalah kita belum dikenal. Atau, walaupun kita sudah dikenal, ide bisnis kita tidak dikenal atau tidak dimengerti. Maka hanya investorinvestor yang baik hati yang mungkin mau mendanai ide bisnis kita. Investor jenis begini disebut angel investor, malaikat. Apakah ada orang yang mau menjadi angel investor kita? 40 budi rahardjo Ada. Sebagai contoh, ada orang tua yang merasa kasihan kepada anaknya. Daripada anak tidak jelas kerjanya (atau ngganggur atau malah terlibat narkoba), maka lebih baik

dia diberi uang saja untuk memulai usaha. Mungkin aspek kasihan yang menjadi motivasi utamanya.

Tidak mengapa, yang penting Anda mendapat pendanaan. Selain orang tua, keluarga atau teman yang dapat dalam posisi ini. Itulah sebabnya seringkali ini disebut juga pendanaan dari friends and family. Tidak banyak aturan terkait dengan angel investor. Namun juga tidak terlalu mudah untuk mendapatkannya. Institutionalized Investor Pendanaan yang lebih serius dapat dilakukan oleh investor yang memang pekerjaan utamanya adalah melakukan investasi. Pada tahap ini usaha Anda sudah dianggap serius. Bagian ini akan dibahas lebih lengkap pada versi berikutnya. Di Indonesia, investor yang seperti ini masih jarang. Kebanyakan yang adalah investor yang perilakunya sebetulnya mirip seperti bank, yaitu memberikan hutang bukan melakukan investasi. Mereka akan mengharapkan keuntungan (return) dalam jangka pendek. Padahal investor lebih sanggup dalam menghadapi risiko. (High risk, high gain.)

Perkembangan penggunaan internet di kalangan anak muda hingga dewasa membuat bisnis startup banyak bermunculan. Tahun ke tahun penggunaan internet di Indonesia selalu mengalami peningkatan dengan pesat. Maka dari itu mendirikan sebuah bisnis startup di Indonesia merupakan langkah yang paling tepat. Indonesia memiliki jenis jenis startup yang sudah dikelompokan, memiliki perkembangan yang cepat dan konsisten. Nah startup sendiri adalah sebuah kata populer yang

menggambarkan sebuah bisnis yang baru saja dirintis atau sedang dirintis.

1. Startup di bidang pencipta game, akhir-akhir ini banyak sekali anak muda cenderung lebih sering memainkan gadgetnya untuk bermain game. Game yang booming biasanya lebih cepat dikenal dan digunakan oleh anak-anak kecil, muda, hingga dewasa. Banyak game yang kemudian bisa bernilai positif maupun negatif bagi mental dan karakter individu.
2. Startup aplikasi dan edukasi. Startup kedua ini juga banyak sekali digunakan oleh banyak pengguna. Banyak orang saat ini membutuhkan aplikasi yang dapat membantu mereka. Selain itu mereka juga membutuhkan hiburan dari aplikasi tersebut.
3. Startup perdagangan, startup ketiga ini bisa bermanfaat apabila dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Dalam memulai bisnis startup, seseorang harus sadar bahwa di era beberapa tahun ini pertumbuhan bisnis startup sedang sangat pesat. Banyak pesaing-pesaing yang akan membuat bisnis startup serupa dengan milik Anda. Anda harus bersiap untuk mengumpulkan orang-orang genius dengan daya kreatifitas tinggi untuk membantu Anda memajukan bisnis startup yang hendak Anda kelola.

Ada beberapa Bisnis Star Up di Indonesia, yaitu :

1. Buyable Startup

Jenis startup yang pertama kali kita bahas adalah *buyable startup* yang merupakan salah satu jenis *startup* yang harus melibatkan banyak orang. Jenis startup ini harus pintar dan memiliki *skill* dalam mempengaruhi orang untuk bergabung dan melakukan investasi pada bisnis *Buyable Startup*. Yang harus dilakukan untuk memulai bisnis startup ini adalah dengan memaksimalkan rasa percaya diri dalam diri sendiri. Selain itu, Pelaku bisnis juga harus memiliki jiwa yang kuat dan pantang menyerah untuk membesarkan bisnisnya.

Ciri khas dari *buyable startup* sendiri adalah seseorang *founder* tidak mencari modal secara tradisional. Modal diperoleh dari investasi yang diberikan oleh investor. Selain itu hal yang sama juga berlaku pada keuntungan. Keuntungan yang besar pada jenis bisnis *buyable startup* sendiri diperoleh ketika startup yang sudah berjalan berhasil dijual pada pihak ketiga. Disini pelaku bisnis akan memperoleh banyak sekali keuntungan. Bisnis jenis ini sampai saat ini masih berjalan dan mulai berkembang. Namun, diperkirakan bisnis ini akan banyak sekali diminati di masa yang akan datang.

2. Startup Bisnis Kecil

Jenis startup selanjutnya adalah startup bisnis kecil. Sesuai dengan namanya yaitu startup bisnis kecil, jenis startup ini bukanlah sebuah bisnis startup yang ingin dikembangkan

dengan sangat besar oleh si pemiliknya. Sang pemilik hanya ingin memiliki jenis bisnis yang tidak menyusahkan bagi dirinya. Keuntungan yang didapat pada jenis startup ini pastinya cukup minim. Tidak seperti jenis jenis startup yang lain, startup bisnis kecil hanya menghasilkan keuntungan yang minim dan cukup. Bagi orang yang hanya ingin mencoba-coba untuk berbisnis startup, maka jenis startup bisnis kecil boleh lakukan, jadikan startup bisnis kecil ini sebagai batu loncatan, Untuk memulai jenis bisnis startup ini maka orang hanya perlu menyiapkan mental, usaha serius, dan tabungan pribadi . Rajin menabung untuk memperoleh keuntungan dari bisnis yang akan dimula.

3. Social Startup

Jenis starup selanjutnya yang akan kita bahas kali ini adalah *social startup*. Social startup merupakan suatu bisnis *startup* yang dirintis berdasarkan asas sosial. Asas sosial yang dimaksud disini adalah jenis bisnis *startup* yang dirintis untuk menebar manfaat untuk sesama. *Social startup* bergerak pada kegiatan-kegiatan sosial dimana kegiatan tersebut memiliki dampak untuk memecahkan masalah sosial yang ada. Bagi pelaku yang memiliki jiwa sosial sangat tinggi maka jenis bisnis startup satu ini bisa dicoba. Kebanyakan jenis *social startup* tidak digunakan untuk mencari sebuah keuntungan, namun ada juga beberapa jenis bisnis *social startup* yang digunakan untuk mencari keuntungan. Apabila menginginkan untuk menjadi bos dan memperoleh keuntungan besar dan memiliki sifat individualis

yang tinggi maka jenis bisnis *social startup* sangat tidak disarankan. Justru dapat memperoleh bantuan pendanaan untuk mengatasi masalah sosial yang sedang ingin diselesaikan. Pelaku bisnis harus bekerja lebih keras dan bekerja dengan hati yang ikhlas untuk tidak berpikiran pada keuntungannya saja melainkan pada manfaat yang akan dihasilkan. Contoh kitabisa.com, disini orang diminta untuk melakukan donasi dengan membantu sesama atau orang yang sedang kesulitan.

4. *Startup Lifestyle*

Jenis *startup* selanjutnya adalah *startup lifestyle*. Jenis *startup lifestyle* adalah jenis *startup* yang paling banyak digeluti oleh anak muda saat ini. Banyak sekali bermunculan ide-ide segar dari anak muda atau generasi Milenial dalam mengembangkan jenis jenis *startup* ini. Banyak sekali yang berhasil dalam memajukan bisnis *startup lifestyle*. Untuk memulai jenis *startup* ini, maka sebagai seorang founder harus mengetahui terlebih dahulu apa yang benar-benar disukai atau hobby sehingga bisa menjadi bisnis. Sesuai dengan namanya yaitu *startup lifestyle* maka hal ini pasti berkaitan dengan gaya hidup. Dalam memulai jenis bisnis *startup lifestyle* ini, harus bekerja sungguh-sungguh dan mulai meninggalkan aktifitas lain diluar dari bisnis yang telah dirintis.

5. *Scalable Startups*

Jenis *startup* selanjutnya adalah *scalable startup*. Jenis *startup* ini adalah yang akan menghasilkan keuntungan maksimal bagi

bisnis yang menginginkan untuk membuat startup dan menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Bagi pelaku bisnis yang berkeinginan untuk membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya dan memiliki bisnis *startup* yang dikenal maka jenis *startup* ini harus menjadi perhatian untuk diperhitungkan. Disini selain Anda harus dituntut memiliki kreatifitas yang tinggi, Anda juga harus memiliki jiwa yang besar. Keuntungan yang sangat besar dari jenis startup ini juga memberikan dampak bahwa modal yang harus dikeluarkan untuk memulainya juga harus besar.

Harus cukup punya modal, melakukan pinjaman, dan menarik investor untuk berinvestasi pada bisnis *startup* ini. Namun, menarik investor agar percaya pada bisnis yang tengah kembangkan tidaklah mudah. Maka dari itu kreativitas selaku *founder* dituntut sangat tinggi dan kemampuan dalam melobi seseorang investor harus cukup terasah. Harus bisa meyakinkan bahwa bisnis *startup* yang kembangkan akan berhasil dan memberikan timbal balik berupa keuntungan maksimal bagi mereka. Sebagai contoh bisnis *startup* yang saat ini sedang berkembang cukup pesat di Indonesia adalah bisnis *e-commerce*. Bisnis tersebut sangat dapat menarik investor untuk menaruh saham atau investasinya.

Orang tidak lagi membeli barang hanya di sekitar mereka, hal ini membuat persaingan justru semakin ketat. Ditambah akses pengiriman yang sudah sangat mudah. Selain itu aplikasi seperti

Jualo.com, shopee, olx, bukalapak merupakan startup yang sedang berkembang pesat di Indonesia. Masing-masing dari mereka mendapatkan pendanaan dan investasi dari investor dimana penjualan terhadap barang online memang sangat tajam peningkatannya di tahun-tahun ini. Bukan hanya keuntungan atau hasil yang bisa dinikmati oleh foundernya saja namun jenis startup tersebut sudah mampu membantu jutaan penjual, pedagang dari berbagai penjuru untuk memasarkan produknya. Dari hal-hal yang telah dibahas sebelumnya, maka sangat tidak mungkin untuk tidak sukses dalam mencoba jenis *startup* yang ada tersebut. Apabila hendak memulai bisnis *startup* maka yang harus dilakukan adalah berpikir dan melihat kreatifitas apa yang akan tertuang dan menghasilkan ide apakah dari kreativitas tersebut.

Beberapa perusahaan *startup* mulai menunjukkan tren yang positif dan mampu menyabet gelar *unicorn*. Salah satu Bisnis *startup* yaitu OVO masuk dalam jajaran startup Oktober tahun 2019 yang memperoleh gelar unicorn. OVO, penyedia layanan pembayaran elektronik besutan Grup Lippo, ditaksir memiliki valuasi sebesar 2,9 miliar dolar AS atau sekitar Rp41 triliun. OVO sendiri merupakan layanan dompet digital yang menawarkan kemudahan bertransaksi di sejumlah mitra OVO. *Platform* ini juga bisa digunakan untuk pembayaran aplikasi Grab. Namun, pertumbuhan perusahaan *startup* yang positif ini tidak diiringi dengan tingkat keberhasilan yang tinggi.

Pasalnya, dari ribuan startup yang telah didirikan hanya 1 persen yang berkembang menjadi unicorn.

Penutup

Sekitar 90 persen *startup* berakhir gagal, dan gulung tikar. Alasan kegagalannya pun beragam. Alasan yang paling simpel adalah dana. Namun, tidak ada kebutuhan pasar adalah alasan yang paling utama yang menyebabkan kegagalan perusahaan startup. Kegagalan banyak perusahaan startup ini sangat disayangkan. Pasalnya, bisnis *startup* telah menyerap puluhan ribu tenaga kerja dan memberi banyak kemudahan bagi pengguna-penggunanya. *Founder startup* harus mampu membangun keunggulan kompetitif melalui keunikan dan kekhasan bisnis yang didirikannya. Selain itu, *founder startup* juga perlu menerapkan beberapa strategi khusus agar mampu bertahan dan berkembang menjadi perusahaan startup yang menyabet gelar *unicorn*.

Strategi pertama adalah membangun *user/customer engagement*. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk membangun keterikatan dengan *user*. Misalnya melalui promosi besar-besaran seperti yang dilakukan Grab dan Gojek, yang dikenal dengan istilah 'bakar duit'. Namun, untuk perusahaan *startup* kecil hal tersebut mustahil dilakukan, mengingat terbatasnya dana. *Founder startup* bisa mulai menggeser paradigma yang berfokus pada produk menuju

paradigma yang berfokus pada *platform*. *Startup* harus mampu membangun ekosistem bagi *user*.

Ekosistem ini mampu memberikan *user experience* yang lebih relevan dan kenyamanan lebih bagi penggunanya. Sehingga tidak hanya meningkatkan nilai pelanggan, namun mampu menciptakan nilai (*value creation*) yang berbeda anatar satu pengguna dengan pengguna lainnya. *Value creation* ini yang nantinya akan menciptakan *network effect* bagi *user*.

Membangun ekosistem ini memang tidak mudah, founder harus mampu memahami pasar dan usernya dan menciptakan ekosistem yang sesuai. Pembangunan ekosistem bisa dilakukan secara bertahap dan berjenjang seperti yang dilakukan Gojek misalnya. Awalnya Gojek hanya berfokus pada angkutan transportasi saja. Lambat laun Gojek berkembang dan melahirkan go-, go- yang lainnya. Puncaknya Gojek merambah lembaga keuangan dengan munculnya Gopay. Gojek mempunyai ekosistem yang mampu memuaskan berbagai kebutuhan penggunanya. Dengan ekosistem tersebut, Gojek mendapatkan banyak investor dan mampu meningkatkan kapitalisasinya yang mampu menjadikan Gojek salah satu startup dengan gelar *Unicorn* nomor 1 di Indonesia.

Strategi kedua adalah membangun *employee engagement*. Mengapa hal ini perlu dibangun. Alasan yang pertama adalah perusahaan startup membutuhkan tim yang solid. Tak jarang kegagalan bisnis startup disebabkan tim yang kurang solid.

Kedua adalah pegawai dapat dijadikan sebagai 'alat' yang efektif untuk mempromosikan bisnis *startup* kita. Para konsumen/pengguna baru yang tertarik menggunakan *platform* kebanyakan berawal dari teman, kerabat, bahkan keluarga sendiri. Sehingga mampu meningkatkan jumlah pengguna/pelanggan dari bisnis *startup* kita. Ketiga meningkatkan loyalitas anggota tim, sehingga tidak mudah tergiur untuk pindah ke perusahaan lain.

Employee engagement dibangun mulai dari pemimpinya. *Founder* harus mampu menciptakan visi misi dan nilai dasar perusahaan *startup* dan harus mampu mengkomunikasikannya kepada anggota tim. Selain itu, *founder* harus dapat mengetahui kebutuhan anggota timnya dan memberikan mereka ruang untuk mereka tumbuh dan berkembang. *Employee engagement* dapat ditingkatkan melalui *events* pegawai dan membangun budaya kantor yang meningkatkan kebanggaan terhadap bisnis *startup* yang dibangunnya. Budaya organisasi dapat dibangun melalui aksi terus-menerus, budaya organisasi ini nanti akan mencerminkan nilai dasar perusahaan.

Bisnis *startup* memang sedang hits dan menggoda banyak orang apalagi untuk generasi milineal. Generasi milineal memang terkenal dengan terobosan-terobosan yang mampu menciptakan perubahan di kehidupan kita. Namun, tanpa persiapan yang matang, semangat, ide, dan usaha dalam merintis perusahaan bisa jadi sia-sia.

Emansipatoris Akuntansi Sosial Keindonesiaan: Studi Kritis Hegemoni Gramsci

Antong

Universitas Muhammadiyah Palopo

Email: antong.cib@gmail.com

Pendahuluan

Isu akuntansi sosial selalu menjadi gagasan kontemporer karena berkaitan dengan fenomena sosial dan kerusakan lingkungan yang timbul dari aktifitas perusahaan yang tanpa ampun mengeksploitasi sumberdaya yang ada. Dibalik itu semua sebuah sistem kapitalisme dianggap menjadi biang masalah. Apakah ini menyiratkan transendensi kapitalisme yang tak terkendali. Salah satu fungsi utama diperlukannya praktik akuntansi sosial adalah untuk mengungkap konflik yang melekat dalam kegiatan komersial perusahaan yang bukan hanya mementingkan profit semata tetapi juga berkewajiban atas lingkungan sosial dan alam sebagai konsekuensi eksploitasi dan eksplorasi yang dilakukannya. Akuntansi sosial termasuk pelaporan yang diharapkan lebih mencerminkan cinta dan kepedulian terkait dengan proyek-proyek emansipatoris untuk mencapai tujuan sosial dan individu. Akuntansi emansipatoris akan merangkul dan dibentuk oleh holisme interpretatif kritis (Gallhofer dan Haslam, 2011).

Akuntansi sosial dipandang dari perspektif kritis sebagai salah satu elemen dari strategi terintegrasi dengan CSR yang dirancang untuk mengakomodasi tekanan sosial dan politik, yang selalu mempertahankan otonomi ideologis kapitalistik untuk bisnis dan pasar. Akuntansi sosial menjadi justifikasi moral hegemoni perusahaan. Emansipasi akuntansi sosial yang boleh jadi ditentukan oleh basis ekonomi mungkin dan memang telah sedang dilakukan dalam berbagai bentuk. Akuntansi sosial yang dilakukan oleh perusahaan tentu harus mendapat restu pemerintah yang selalu menjadi mitra abadi dalam sebuah kepentingan kapitalis. Dengan demikian melalui emansipatoris, akuntansi sosial memiliki potensi dan niat untuk membuat celah dalam pengaturan struktural saat ini, membuka jalan untuk reorganisasi masyarakat dalam kaidah manusiawi dan ekologis.

Kita akui sebagai suatu fakta yang tak dapat dipungkiri bahwa dari segi moral sekarang akuntansi sedang menghadapi krisis. Dalam periode ini, yang terfokus dari kasus Enron, para pembuat standar akuntansi sibuk membenahi standar pelaporan keuangan beserta hukumnya yang semuanya sebagai keberpihakan terhadap para kapitalis. Akuntan kritis telah membuat beberapa kemajuan dalam mengungkap cara dimana profesi menyekat diri dari kritik pada tujuan, yang intersubjektif, dan tingkat subyektif. Namun demikian, kecenderungan krisis imanen ke kapitalisme sendiri memberikan dorongan, dalam sistem, untuk kritik baru (McKernan dan MacLulich, 2004).

Dalam ajaran sosialisme yang tertindas akan terbentuk kesadarannya untuk melakukan perlawanan terhadap para penindas yang dikenal dengan pemikiran Marx bahwa kapitalisme akan menggali lubang kuburnya sendiri.

Doktrin kapitalisme kenyataannya banyak mempengaruhi perilaku individu dan organisasi swasta maupun pemerintah meskipun kapitalisme itu bukan merupakan bagian dari sebuah ideologi sebuah negara. Kekuasaan pemerintah cenderung kapitalistik meski tidak secara terang-terangan bersifat diktator tetapi dengan menggunakan hegemoni untuk membungkam dengan berbagai pendekatan yang lebih *soft*. Bukan hanya pemerintah, tetapi masyarakat sipil (perusahaan) juga turut andil melakukan eksploitasi atas masyarakat dan alam dengan kekuatan hegemoni yang dimiliki dengan berbagai program yang dikemas dalam "peduli" masyarakat dan lingkungan.

Paradigma Akuntansi Kritis

Ilmu sosial kritis didasarkan pada filsafat teori kritis, sebuah aliran pemikiran yang bertolak pada Idealisme Kant dan Hegel. Dilakukan usaha untuk menggabungkan ortodoks Marxisme dengan ilmu sosial, sehingga memberikan jalan alternatif bagi pembangunan sosial (Dillard, 1991). Lebih lanjut Dillard (1991) menentukan perspektif ontologis, epistemologis dan metodologis ilmu sosial kritis dan membandingkannya dengan yang mendasari pandangan non-fungsionalis akuntansi.

Burrell dan Morgan (1979) menyajikan, meskipun agak sederhana, tipologi komparatif berguna yang disajikan secara singkat. Kuadran yang dibentuk oleh dua dimensi subjektif-objektif dan peraturan-perubahan radikal, mewakili empat kelas paradigma: fungsionalisme, interpretivisme, humanisme radikal dan strukturalisme radikal.

Salah satu tema pokok teori kritis adalah tentang kapitalisme. Dalam menguji kapitalisme, para eksponen teori kritis melampaui perspektif politik-ekonomi Marx. Horkheimer, Adorno and Marcuse mengakui bahwa teori politik-ekonomi Marx mempunyai peranan yang signifikan dalam membentuk teori politik dan sosial. Tetapi menurut mereka teori tersebut belum cukup kuat sebagai basis dalam memahami masyarakat kontemporer. Mereka sepakat dengan Marx bahwa kapitalisme telah menciptakan *internal economic irrationalities*, yaitu adanya konsentrasi kekayaan ekonomi dengan mengorbankan kaum pekerja yang tidak bisa mengkonsumsi komoditas yang mereka hasilkan. Tetapi mereka sadar bahwa kapitalisme telah mengkonsolidasi dan mengembangkan mekanisme efektif yang dapat mencegah revolusi sosial.

Sebaliknya, bentuk kontrol sosial dalam masyarakat industri tidaklah didasarkan pada aspek fisik atau paksaan. Tetapi lebih dengan bentuk-bentuk penindasan yang halus dan canggih sehingga orang tidak sadar bahwa mereka tertindas dan tidak beranggapan bahwa kondisi seperti itu abnormal. Situasi

seperti ini memungkinkan terjadi karena terdegradasinya pemikiran kritis akibat ekspansi yang masif dan teknologi dan media. Dengan alasan inilah para eksponen Mazhab Frankfurt mengalihkan perhatian mereka dari analisis politik ekonomi ke kritik atas penggunaan akal instrumental dalam masyarakat modern. Dalam pandangan mereka, penggunaan akal instrumental inilah yang telah menghasilkan budaya industri yang menghalangi perkembangan individu yang otonom dan independen yang mampu menilai dan memutuskan secara sadar bagi diri mereka.

Habermas setuju dengan para koleganya bahwa analisis Marx hanya relevan untuk periode masyarakat kapitalis liberal di masanya, tapi tidak cukup kuat dipakai untuk menganalisis masyarakat kapitalis fase sekarang ini. Dalam masyarakat kapitalis liberal di sana ada garis pemisah yang tegas antara negara dan masyarakat. Negaralah yang membuat aturan hukum untuk memastikan bahwa ekonomi pasar bebas dapat berjalan secara benar. Akan tetapi peran negara hanya sebatas membuat aturan, ia tidak boleh menginterferensi pasar bebas sepenuhnya dikontrol oleh sistem kapitalis. Sekarang telah terjadi pergeseran dari kapitalisme privat ke kapitalisme negara. Negara, dengan ditopang oleh teknologi, memainkan peranan yang signifikan. Para kapitalis sekarang ini tidak bisa menjalankan roda bisnis tanpa dukungan negara. Dengan demikian, apa yang disebut dengan pasar bebas itu tinggal menjadi kenangan.

Dalam prespektif teori kritis, positivisme adalah bentuk baru yang paling efektif dari ideologi kapitalis dan ia mempunyai investasi dalam apa yang disebut Horkheimer dengan *eclipse of reason*. Friedman mengatakan, “Fungsi *social ideology positivisme* adalah mendegradasikan akal yang kritis. Di bawah kekuasaan positivisme, akal tidak dapat dielakkan menghentikan aktivitas kritiknya. Gagasan tentang obyektivitas dalam tradisi positivisme telah menafikan arti penting kritik atas realitas. Atas nama obyektivitas, fakta harus dipisahkan dari nilai dan penemuan harus diisolasi dari interest manusia, padahal hal tersebut tidak mungkin. Karena manusia ketika memahami dan menafsirkan realitas tidak bisa dipisahkan oleh pandangan, paradigma, keinginan dan harapan tertentu.

Dalam teori kritis, dominasi digolongkan sebagai aspek kapitalisme yang membahayakan. Tapi apakah yang menjadi sumber timbulnya dominasi dalam sebuah masyarakat? Menurut Marcus, sumbernya adalah adanya kesadaran satu dimensi yang berasal dari semacam rasionalitas teknologis (*technological rationality*) yang menekankan pada keberagaman. Sampai sekarang rasionalitas teknologis membutuhkan tindakan yang berakibat pada adanya dominasi, baik di alam maupun di masyarakat, karena ini hanya dapat dikembangkan dalam hubungannya dengan kemungkinan adanya kontrol teknis.

Seperti Marcuse, Habermas berpendapat bahwa dominasi dan alasan teknis yang praktis dan emansipatori terletak pada

inti dari dominasi dalam masyarakat. Dalam bukunya yang terkenal *Knowledge and Human Interest* (1971), Habermas membuat perbedaan yang berarti antara pengetahuan yang didapat melalui refleksi-diri/ komunikasi dan kausalitas/ rasionalitas teknis.

Ilmu sosial kritis ditempatkan pada paradigma humanis radikal di mana akuntansi didasarkan pada realisasi subjektif dari hidup seseorang dan kebutuhan untuk mengatasi keadaan yang tidak manusiawi yang mencegah pemenuhan diri. Dari perspektif objektivis, akuntansi tertanam kuat dalam positivisme dan dengan demikian, melihat pengetahuan tentang dunia fisik dan sosial yang diperoleh melalui akumulasi kegiatan dengan mencari konsistensi dan hubungan kausal. Perspektif Anti-positivisme, epistemologis dari ilmu sosial kritis, memandang dunia sosial relativistik dan tidak mengakui hubungan kausal, pengetahuan berasal dari pengalaman sebagai individu aktif di dunia sosial.

Ilmu sosial kritis berakar pada teori kritis, sehingga fokus pada subjektif, tindakan pemberdayaan sukarela individu sebagai anggota masyarakat dalam mewujudkan individu, dan emansipasi sosial. Ilmu sosial kritis didasarkan pada "humanistik keterasingan diri" dan dirancang untuk menjelaskan kehidupan sosial secara umum atau contoh tertentu dengan cara yang ilmiah, kritis, praktis dan non-idealis".

Penggambaran akuntansi sebagai teknologi ditentukan secara sosial tidak mengecualikan atau membuang dimensi sosial akuntansi. Sebaliknya, secara eksplisit mengakui realitas sering diabaikan bahwa sistem sosial berasal dari sumber kapitalis yang didominasi. Secara teknikal, pada kenyataannya, didominasi oleh sosial, sehingga secara substansial, dan ideologis, membatasi manifestasi teknologi mungkin. Dalam konteks ini, akuntansi pada dasarnya diarahkan untuk melestarikan dan meningkatkan kontrol kapitalis atas alat-alat produksi.

Perjalanan panjang akuntansi yang belum terpetakan untuk mengeksplorasi sejauh mana domain akuntansi dapat dianggap sebagai, atau bisa mendapatkan keuntungan dari ilmu sosial kritis. Asumsi filosofis yang mendasari fungsionalis dan ilmu sosial kritis akuntansi disajikan dan dibandingkan. Kerangka ilmu sosial kritis disajikan, bersama dengan keterbatasan yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, kritik akuntansi dilakukan dalam pandangan sosial-ilmu kritis. Khususnya teori ilmu sosial kritis yang digunakan untuk mengevaluasi dua teori akuntansi yang masih ada.

Studi akuntansi ekonomi politik Indonesia sangat banyak dipengaruhi oleh rezim-rezim yang telah berkuasa. Bahkan skandal akuntansi telah menunjukkan kegagalan sistem ekonomi politik yang berlaku pada saat itu sehingga memaksa pemerintah dan para *standard setter* untuk melakukan reformasi akuntansi. Banyak akademisi menulis bahwa pada sistem akuntansi di

negara-negara berkembang pasti akan menjadi lebih ke karakter Barat. Karena negara-negara berkembang menempati posisi subordinat dalam sistem ekonomi global, mereka akan memiliki sedikit pilihan selain mengadopsi kebijakan akuntansi yang melayani kepentingan pemerintah Barat dan perusahaan multi-nasional daripada kepentingan nasional mereka sendiri (Rosser, 1999).

Posisi Indonesia dalam standar akuntansi yang berkiblat pada Barat menjadikan sistem kita akan terus terhegemoni oleh mereka. Bahkan ketika mereka pun mengalami sebuah krisis maka akan berimbas juga pada perekonomian nasional. Hubungan multi-nasional memang sebuah keniscayaan tetapi bukan berarti harus “membeo” dengan kepentingan asing melainkan menjadi mitra ekonomi dengan tetap teguh dalam kedaulatan bangsa. Membangun sebuah karakter akuntansi sendiri bukanlah sebuah kemustahilan sepanjang komitmen ideologi bangsa betul-betul menjadi *frame* dalam melakukan reformasi akuntansi bukan terjebak dengan isu globalisasi. Atau jangan-jangan karena memang kita sendiri yang awam dengan ideologi bangsa sehingga lebih melek terhadap ideologi asing.

Akuntansi Sosial: Counter Hegemoni perspektif Keindonesiaan

Kontribusi Gramsci yang paling penting adalah bisa dibilang teori hegemoni. Perspektif Gramscian menekankan bahwa stabilisasi masyarakat selalu berada diantara *paksaan* dan *persetujuan*. Supremasi kelompok sosial memanifestasikan dirinya dalam dua cara, sebagai “dominasi” dan sebagai “kepemimpinan intelektual dan moral” (Gramsci, 1971).

Gramsci mengarah ke peran penting bahwa budaya dan ideologi bermain dalam memproduksi dan mereproduksi pengaturan sosial tertentu. Lebih khusus lagi, Gramsci sangat ingin menekankan bahwa masyarakat Barat yang direproduksi melalui persetujuan dari masyarakat sipil:

“In Russia the State was everything, civil society was primordial and gelatinous; in the West, there was a proper relation between State and civil society, and when the State trembled a sturdy structure of civil society was at once revealed. The State was only an outer ditch, behind which there stood a powerful system of fortresses and Earth works” (Gramsci, 1971: 238).

Sistem ini benteng dan *Earth works* membentuk apa yang oleh Gramsci sebut sebagai *Historical Blocs*. Sejarah ditandai oleh serangkaian blok sejarah, atau pengaturan kekuasaan antara masyarakat sipil, ekonomi dan kelompok politik. Sebuah blok historis tidak kurang dari tatanan sosial dalam kurun sejarah tertentu. Levy dan Newell (2002) mencatat bahwa ada dua makna

blok historis Gramsci: pertama, mengacu pada aliansi kelompok-kelompok sosial yang membentuk formasi hegemonik; kedua, mengacu pada keselarasan tertentu dari materi, formasi organisasi dan diskursif yang menstabilkan dan mereproduksi hubungan produksi dan makna. Levy dan Egan (2003) berargumen bahwa strategi perusahaan mengkoordinasikan, sumber daya organisasi dan diskursif. Perspektif ekonomi politik yang dikembangkan di sini berhubungan dengan perjuangan dan strategi tingkat struktur dominasi perusahaan yang lebih luas. Blok sejarah dibentuk oleh *mikro-proses bottom-up* tawar-menawar dan dibatasi oleh *macrostructures* hubungan produksi dan formasi ideologis (Levy dan Newell, 2002).

Hegemoni selalu melibatkan pilihan kelompok antagonis dalam koalisi hegemonik. Hegemoni menjadi lebih terlihat ketika kelompok-kelompok masyarakat sipil yang sebelumnya bertentangan dengan bisnis, karena frustrasi atau mungkin karena tergoda rayuan, mulai berbicara bahasa bisnis. Jadi, misalnya, banyak kampanye “hijau” sekarang mencoba untuk memberikan solusi terhadap krisis ekologi dari dalam kapitalisme. Sebelumnya kasus keberlanjutan bisnis itu dipertanyakan oleh banyak ahli lingkungan. Hal ini sekarang telah secara bertahap digantikan oleh kasus bisnis untuk keberlanjutan (*sustainable development*).

Dapat dipahami bahwa upaya hegemoni dan *counter-hegemoni* merupakan “aktivitas” yang dapat dipahami secara

epistemologis dari “penyadaran” melalui karakter konsensus. Gramsci dengan teori hegemoninya ini mendapat tempat bagi para pemikir kritis dan pejuang anti penindasan di seluruh dunia khususnya bagi negara-negara berkembang yang mencoba mencari alternatif format sistem ekonomi-pembangunannya dengan berkiblat pada sosialisme meskipun tidak secara murni. Sehingga fenomena ini akan dikaji dari perspektif Hegemoni Gramsci. Dimana pusat perhatian Gramsci adalah menciptakan kesadaran kritis dan menciptakan perang budaya dalam lingkup masyarakat dan kekuasaan negara. Gramsci begitu yakin bahwa kesadaran akan muncul dikalangan masyarakat untuk membuat sebuah kehendak kolektif yang akan mampu menandingi kekuasaan yang otoriter. Melalui gagasan tentang peran intelektual organik yang dibutuhkan dengan *counter hegemoni* untuk melihat dan membentuk ideologi yang mampu berjalan secara linear serta mampu untuk melakukan dan mengikuti perubahan.

Sangat menarik sebuah kajian akan dilakukan dalam melakukan penelitian kritis terhadap kenyataan CSR dengan sebuah harapan yang lebih besar bahkan yang seharusnya tetapi dapat diasumsikan masih merupakan sebuah kenyataan hegemoni dari komunitas tertentu yang diduga dilakukan oleh perusahaan dan dibekingi oleh oknum penguasa. Analisis mendalam sangat diperlukan untuk membuktikannya dan penelitian-penelitian dengan penuh harapan dapat menguak

realitas dan mampu membangun sebuah konsep emansipatoris akuntansi sosial.

Sistem akuntansi sangat banyak dipengaruhi oleh ideologi yang melatarinya baik secara eksplisit maupun implisit. Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi harkat manusia sebagaimana dalam ideologi pancasila dan dasar hukum yang kuat serta didukung oleh keanekaragaman budaya yang semuanya mengarah ke sebuah tujuan kemanusiaan, kekeluargaan dan keadilan. Ironis dengan fakta bahwa nilai-nilai yang berlaku dalam perusahaan merupakan nilai “impor” yang sangat asing dengan kearifan budaya lokal bangsa. Dengan demikian, perlu sebuah revitalisasi nilai kebangsaan dalam praktek perusahaan yang mana peranan pemerintah sebagaimana amanah UUD 1945 untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dalam perspektif akuntansi konvensional pandangan laba sebagai *bottom line* telah mengubah pengelolaan perusahaan menjadi “pemangsa” yang menghalalkan berbagai cara untuk kepentingan keuntungan sebesar-besarnya. Pemahaman inilah yang menjadi alasan mengapa terdapat praktek-praktek yang mengarah terhadap eksploitasi manusia maupun lingkungan yang berakhir dengan bencana alam maupun bencana sosial. Laba dalam perspektif ini merupakan konsep dari *political economy of*

accounting neo-klasik termasuk klasik yang merupakan produk kapitalisme yang lebih kepada pemenuhan kepentingan para pemilik modal. Diperlukan sebuah emansipatoris sebagai sebuah aksi *counter hegemoni* dalam rangka merevitalisasi nilai-nilai keindonesiaan (ekonomi politik Indonesia) sesuai amanah dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1-5. Sebuah paradigma kritis terhadap pola akuntansi kapitalisme menuju akuntansi yang sarat dengan nilai keindonesiaan.

Tanggung jawab sosial perusahaan telah digunakan untuk mengatasi masalah sosial, menciptakan citra perusahaan, dan mengembangkan hubungan yang positif dengan konsumen dan stakeholder lainnya. Belajar dari kasus Enron dan beberapa skandal perusahaan, CSR menjadi semakin penting di dunia usaha. Secara khusus, perusahaan dengan reputasi yang buruk (misalnya, perusahaan industri tembakau dan minuman beralkohol) tampaknya tertarik dalam mengubah citra negatif mereka melalui kegiatan CSR. Beberapa perusahaan telah sukses mengubah citra mereka dengan menekankan inisiatif lingkungan dan sosial mereka, meskipun dalam kenyataan lain bahwa strategi yang sama justru menjadi bumerang bagi perusahaan lain (Yoon, Giirhan-Canli dan Schwarz, 2006). Perusahaan yang melakukan paraktek CSR merasa mengalami peningkatan biaya sehingga mengalami penurunan profit. Meskipun upaya penelitian menyelidiki efek CSR telah mengalami peningkatan tentang sikap konsumen, namun hasil penelitian tidak

menjelaskan mengapa konsumen merespon secara berbeda terhadap perusahaan yang beroperasi di industri yang sama dan mendukung kegiatan CSR yang sama.

Kegiatan akuntansi sosial telah diadopsi berdasarkan bukti yang berkembang bahwa konsumen bersedia untuk memberikan insentif kepada perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial. Misalnya, konsumen bersedia membayar harga yang lebih tinggi untuk produk yang dibuat oleh perusahaan yang etis (Creyer & Ross, 1997), konsumen akan beralih merek dalam mendukung perusahaan yang memiliki program sumbangan untuk organisasi nirlaba, dan membeli produk dari perusahaan hanya karena mendukung amal (Smith & Alcorn, 1991).

Mendukung kegiatan CSR akan mempengaruhi tidak hanya motif membeli tetapi juga penilaian dan evaluasi terhadap perusahaan (Sen dan Bhattacharya, 2001). Studi Ellen, Mohr, dan Webb (2000) menemukan konsumen bereaksi secara berbeda dalam upaya pemasaran terhadap perusahaan yang melaksanakan CSR. Menon dan Kahn (2003) menemukan perusahaan yang berpartisipasi sebagai sponsor dan isu sosial, memberikan keuntungan dalam bentuk promosi. Demikian pula, Sen dan Bhattacharya (2001) menyatakan bahwa konsumen mengevaluasi perusahaan yang memiliki kegiatan CSR relevan dengan memilih produk perusahaan yang ada.

Singkatnya, penelitian-penelitian sebelumnya banyak menunjukkan bahwa ketidakpercayaan konsumen dan skeptisisme terhadap perusahaan dan aktivitas CSR sehingga perlu dilakukan evaluasi kritis. Dengan demikian, faktor-faktor dan proses yang menyebabkan konsumen menjadi skeptis tentang motif sejati perusahaan di balik kegiatan CSR mengidentifikasi adalah prioritas penelitian yang penting. Perusahaan yang konsisten mengungkapkan seluruh eksternalitasnya melalui akuntansi pertanggungjawaban sosial akan menjadi kontrol sosial bagi keberadaannya terhadap lingkungan dan sumberdaya yang digunakan sehingga kinerja perusahaan bukan hanya semata diukur dari seberapa besar laba yang dihasilkan tetapi termasuk seberapa besar peranan perusahaan dalam merestorasi lingkungan dan sumberdayanya.

Jadi prinsip yang digunakan agar perusahaan tetap *going concern* adalah dengan tetap mempertanggungjawabkan seluruh aktivitasnya baik yang bersifat moneter maupun non moneter sehingga keseimbangan antara *shareholders* dan *stakeholders* tetap harmonis sebagai *symbiosis mutualisme*. Dengan demikian perusahaan tetap survive menggunakan sumberdaya yang ada tanpa harus mengorbankan sumberdaya masa depan, dengan demikian konsep pembangunan berkelanjutan hanya akan terwujud jika perusahaan-perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan seluruh aktivitas dan dampak-dampaknya melalui akuntansi pertanggungjawaban sosial. Tentu hal ini masih

terkendala oleh standar yang berlaku sekarang dimana belum ada kewajiban dan format yang formal untuk maksud tersebut, tetapi tentu saja optimisme untuk melaksanakannya tetap hidup dalam pikiran kita semua terutama itikad itu sangat diharapkan dari para entitas/perusahaan.

Menurut Prieto-Carron dkk (2013) Kekuasaan dan partisipasi adalah dua isu kunci yang memerlukan eksplorasi lebih lanjut dalam pengembangan dan perdebatan CSR. CSR merupakan arena kontelasi politik yang mendefinisikan hubungan antara pasar dan negara, dan antara aktor yang berbeda dan kelompok sosial, dan dalam kaitannya dengan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Siapa yang memiliki kekuatan untuk membuat keputusan.

Caporaso dan Levine (1992) dalam kajian ekonomi politik mereka dengan pendekatan klasik, Marxian, Keynesian, neo-klasik, basis negara, basis kekuasaan, dan keadilan menjelajahi beberapa kerangka yang lebih penting untuk memahami hubungan antara politik dan ekonomi. Dimana negara diminta untuk memberikan respons sekumpulan keinginan pribadi menjadi beberapa kebijakan yang koheren. Dalam sebuah negara, pemerintah dianggap sebagai pengayom dari seluruh warga negaranya termasuk hubungan antara perusahaan dengan stakeholder.

Penutup

Perdebatan dalam berbagai literatur telah memberikan pengakuan formal bahwa faktor politik dan sosial tidak dapat dikecualikan dari teori harga (Tinker, 1984). Sedangkan diskursus telah mengalami perkembangan bahwa teori ekonomi politik dapat dilakukan dalam berbagai perspektif termasuk dalam kajian akuntansi. Salah satu rerangka teori (*theoretical framework*) dalam ranah akuntansi kritis yang dikenal dengan *Political Economy of Accounting* (PEA) memiliki cara pandang alternatif dalam melihat fenomena laba. Dalam perspektif PEA yang dimodifikasi atau diperluas (*modified PEA* atau *extended PEA*), maka nilai-nilai lokal dapat diadaptasi dan dikembangkan (Irianto, 2006).

Perbedaan “ideologi” atau setidaknya pijakan dasar akuntansi antara ekonomi neo-klasik dan ekonomi politik klasik melahirkan cara pandang yang tidak sama atas laba. PEA didasarkan pada ekonomi-politik klasik. Jika pijakan dasar akuntansi, sebagaimana yang dianut pada saat ini, berdasar pada ekonomi neo-klasik, maka orientasi laba menjadi perhatian utama. Orientasi demikian lebih condong kepada kepentingan pemilik modal. Jika hal ini terjadi maka, eksploitasi sumberdaya (alam, manusia, dll) dapat terus terjadi, yang meniscayakan keadilan dan sustainabilitas. Cara pandang yang berbeda ditawarkan jika akuntansi menggunakan basis ekonomi-politik klasik yang dirujuk *theoretical framework* PEA. Rerangka teori

PEA yang didasarkan pada basis ekonomi politik klasik menawarkan alternatif yang mengedepankan aspek distribusi dan keadilan, dan bukan laba sebagai tujuan utama (Irianto, 2006).

Dari dasar pemikiran inilah, maka menarik untuk menelaah secara kritis fenomena akuntansi di Indonesia perspektif PEA dengan menjadikan nilai-nilai keindonesian sebagai diskursus praktis atas praktik akuntansi sosial sebagai sebuah ideologi Indonesia yang memiliki kandungan nilai sendiri yang bebas dari ideologi dari luar. Indonesia memiliki sistem hukum dan kearifan budaya sendiri yang dapat diinternalisasikan kedalam konsep akuntansi. David dan Brierley (1985) dalam William (1999) mengungkapkan bahwa sistem hukum merupakan bagian dari kerangka kerja kelembagaan di mana sistem akuntansi berinteraksi. Sedangkan Salter dan Douppnik (1992) mengemukakan bahwa efek dari sistem hukum pada praktek akuntansi tidak ditentukan oleh jumlah aturan akuntansi tetapi sejauh aturan akuntansi ditentukan oleh hukum. Sedangkan Wickramasinghe dan Hopper (2003), menyatakan akuntansi dan budaya akan mendapat manfaat dengan mengadopsi ekonomi politik budaya untuk memahami praktik akuntansi sebagai refleksi subjektif dan ideologis dari hubungan sosial kapitalis. Dengan demikian, maka perspektif PEA akan menggunakan pendekatan hukum yakni UUD 1945 serta nilai-nilai budaya setempat sebagai sebuah kearifan lokal yang telah melekat dalam setiap perilaku masyarakat Indonesia.

Negara, Energi, dan Kesejahteraan Rakyat

Burhanuddin

STIH Amsir Parepare

Email: burhanuddinbasir82@gmail.com

Pendahuluan

Indonesia, negara dengan sumber daya alam yang melimpah adalah karunia ALLAH SWT, Tuhan Semesta Alam. Sumber daya alam merupakan potensi dan kekuatan bagi negara untuk membangun kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera bagi rakyatnya. Karenanya, negara mesti mampu mengelola potensi alam tersebut dengan sebaik-baiknya demi menjaga kelangsungan hidup seluruh rakyatnya.

Indonesia melalui konstitusinya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945, pada bagian pembukaan menegaskan arah dan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum. Penegasan arah dan tujuan negara dalam konstitusi tentu membawa konsekuensi bagi negara dalam menyelenggarakan peran dan fungsinya sehingga bertanggung jawab untuk mewujudkannya. Perwujudan tanggung jawab negara itu berkaitan dengan adanya berbagai potensi-potensi alam sebagai karunia ALLAH SWT. sekaligus menjadikan

potensi-potensi tersebut sebagai kekuatan membangun masyarakat yang sejahtera lahir dan bathin.

Dalam pembukaan UUD NRI 1945 di alinea empat tegas dinyatakan bahwa:

“....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,...”.

Jika diurai dari tujuan tersebut, salah satu diantaranya adalah kewajiban negara untuk memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum dapat dimaknai sebagai suatu kondisi dimana rakyat secara keseluruhan benar-benar menikmati kekayaan alamnya. Arti keseluruhan sangat berkaitan dengan bagaimana negara cq. Pemerintah dapat mendistribusikan kekayaan alam itu secara adil kepada rakyatnya. Oleh karena itu, pemerataan terhadap hasil maupun manfaat dari sumber daya alam adalah hal yang pokok untuk memenuhi hajat hidup seluruh rakyat menuju kehidupan yang sejahtera lahir dan batin dan menjadi hak bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi, UUD NRI 1945 Pasal 28H.¹

Berkenaan dengan sumber daya alam yang menjadi hak bagi rakyat untuk menikmati dalam rangka pencapaian kesejahteraan itu salah satu di dalamnya adalah kekayaan alam

¹ Pasal 28H ayat (1) setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

yang merupakan sumber daya energi untuk selanjutnya menjadi energi². Energi sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu negara dan menjadi sumber daya vital selain pangan dan air. Berkaitan dengan keberadaan dan ketersediaan sumber daya tersebut, dalam perkembangan dan pertumbuhan suatu bangsa ternyata menjadi permasalahan tersendiri yang mesti mendapat perhatian serius. Energi menjadi kebutuhan mendasar manusia untuk beraktifitas sehingga pengelolaannya harus semaksimal mungkin agar terjamin ketersediaannya.

Sebuah studi yang dilakukan oleh organisasi di Amerika Utara yang menamakan dirinya *Carrying Capacity Network*, menyimpulkan bahwa sumber daya vital seperti, bahan pangan, air, dan energi, menjadi semakin langka dan mahal dengan mempertimbangkan laju pertumbuhan penduduk miskin perkotaan di banyak negara.³ Energi, pangan, dan air merupakan faktor penentu bagi keberlanjutan hidup suatu negara. Energi menjadi kebutuhan rakyat dalam kehidupannya. Tanpa energi, rakyat dan negara secara keseluruhan akan lumpuh.

Nouril Roubini, pakar ekonomi dunia dari Amerika Serikat, dalam analisisnya yang disampaikan di *Davos* dalam *World Economic Forum*, maret 2011, ancaman permanen terbesar dunia saat ini menurutnya adalah kelangkaan dan tingginya harga

² Energi, dalam UU No. 30 Thn 2007 Tentang Energi, diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia dan elektromagnetika.

³ Oswaldo de Riverro. *Mitos Perkembangan Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008. Hlm.263

energi dan pangan, sehingga mengakibatkan tingginya inflasi di banyak negara. Dampak kelangkaan energi dan pangan adalah potensi kerusuhan sosial yang *massive*, karena membengkaknya jumlah negara miskin. “kerawanan energi dan pangan, akan menuju pada situasi kegagalan negara (*failed state*), bahkan merontokkan negara (*collapsed state*)”.⁴

Energi menjadi faktor penting tidak hanya bagi pembangunan ekonomi tetapi secara keseluruhan bagi ketahanan nasional. Dasar konstitusional sebagaimana termaktub dalam pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan, “ bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, adalah sebuah penegasan yang menghendaki agar segala kekayaan alam yang menjadi sumber energi, sebesar-besarnya dapat dinikmati oleh rakyat khususnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan terhadap energi.

Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 adalah penegasan tentang hak negara dalam menguasai kekayaan alam dalam rangka pencapaian kesejahteraan rakyat. Makna penguasaan negara terhadap kekayaan alam secara implisit juga terhadap sumber daya energi yang dalam pengelolaannya harus diletakkan pada prinsip-prinsip keadilan, berkelanjutan, rasional, optimal dan

⁴ Effendi Sirajuddin. *NATION IN TRAP, Menangkal 'Bunuh Diri' Negara dan Dunia Tahun 2020*. Esir Institute bekerja sama Pustaka Pelajar. 2013. Hal. 62

terpadu, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi (UU Energi).

Tercapainya kemandirian pengelolaan energi untuk menjamin ketersediaan energi dalam negeri adalah bagian dari tujuan pengelolaan energi sebagaimana ditegaskan dalam UU Energi.⁵ Ketersediaan energi dalam negeri tentu dalam rangka pemenuhan kebutuhan energi bagi rakyat, sehingga pengelolaan sumber energi haruslah dioptimalkan sesuai asasnya yakni kemanfaatan, rasionalitas, efisiensi berkeadilan, peningkatan nilai tambah, keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup, ketahanan nasional, dan keterpaduan dengan mengutamakan kemampuan nasional.⁶ Orientasi dari pengelolaan energi adalah terpenuhinya kebutuhan rakyat akan energi untuk menjaga keberlangsungan pembangunan perekonomian dan ketahanan nasional.

Meski demikian, pada kenyataannya Negara Indonesia masih berada dalam ancaman krisis energi yang lebih disebabkan karena kesenjangan antara laju pertumbuhan jumlah penduduk dengan kemampuan dan ketersediaan energi itu sendiri. Hal tersebut juga karena pengelolaan sumber energi yang dilakukan selama ini didominasi pada pengelolaan sumber energi fosil (energi tak terbarukan) dan belum terlihat upaya serius untuk mendorong pengelolaan sumber energi terbarukan. Dalam jangka

⁵ Pasal 3 UU Energi

⁶ Pasal 2 UU Energi

panjang tentu ini menjadi mimpi buruk bagi ketahanan energi sementara dominasi pengelolaan sumber energi tak terbarukan, seiring waktu akan membawa kepada kondisi krisis energi. Krisis energi yang terjadi dan dirasakan oleh masyarakat saat ini dapat dilihat dari masih besarnya jumlah desa yang belum teraliri listrik.

Data yang ada mengungkapkan bahwa kebutuhan akan energi semakin meningkat yang jika tidak segera ditemukan solusi penyediaannya tentu akan berdampak luas bagi pembangunan nasional. Untuk kondisi saat ini saja, masih banyak rakyat kita yang mendiami wilayah-wilayah terpencil belum menikmati energi khususnya energi listrik. Melalui Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), sebanyak 13 ribu desa yang tersebar di daerah transmigrasi, perbatasan, bagian terluar dan tertinggal di Indonesia belum menikmati listrik. Angka ini berasal dari total 82.192 desa yang masuk kategori elektrifikasi dan disebutkan pula bahwa kebutuhan listrik tiap desa sekitar 200 kilowatt.⁷

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang dirumuskan dalam tulisan ini adalah sejauhmana peran dan fungsi negara dalam pengelolaan sumber energi dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. ?.

⁷ Eko Putro Sandjojo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/07/20/otchrk-sebanyak-13-ribu-desa-butuh-listrik>

Fungsi Negara dalam Penyediaan Energi

Negara adalah rakyat yang mendiami suatu wilayah (bagian permukaan bumi tertentu) yang mengorganisasikan diri secara politis dalam suatu badan hukum publik sebagai wahana untuk secara demokratis dalam semangat kebersamaan berikhtiar mewujudkan kesejahteraan berkeadilan bagi seluruh rakyat (Indonesia). Pemerintah berkedudukan sebagai *primus inter pares* (bukan pemilik atau penguasa negara dan rakyat), sebagai *pamong*, yang mengemban tugas memimpin masyarakat dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, khususnya dalam berikhtiar untuk mewujudkan tujuan negara, dan sebagai demikian, berkewajiban untuk berpartisipasi rakyat dalam proses pengambilan putusan rasional untuk mewujudkan masyarakat sejahtera yang adil dan makmur. Pelaksanaan berbagai tugas pemerintah harus dilakukan berdasarkan, bersaranakan dan tunduk pada aturan hukum positif dengan mengacu cita hukum, cita negara dan tujuan bernegara secara kontekstual.⁸

Negara dan pemerintah adalah dua konsep yang berbeda. Konsep Negara adalah untuk menyatakan keseluruhan unsur dimana pemerintah salah satunya selain, wilayah, penduduk dan pengakuan internasional. Konsep Negara adalah untuk menyatakan organisasi atau keseluruhan struktur organisasi

⁸ Bernard Arief Sidharta. Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju. 2009. Hlm. 191

kekuasaan masyarakat. Sedangkan Pemerintah adalah sekelompok orang yang mengisi dan menjalankan struktur organisasi kekuasaan masyarakat, yang berarti dalam hal ini hadir untuk dan atas nama negara. Itulah sebabnya ketika menyangkut kebutuhan dan kepentingan rakyat, pemerintahlah yang memiliki otoritas untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab kepentingan rakyat. Kebutuhan dan kepentingan rakyat tak lain adalah terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan bagi dirinya.

Pemikiran tentang negara sudah dimulai sejak zaman Yunani kuno dalam abad kelima sebelum masehi di Athena. Bentuk negara pada waktu itu dipahami terbatas hanya sebagai suatu "*polis*". Mulai terjadinya dari suatu polis hanya merupakan benteng di sebuah bukit yang makin lama diperkuat dan dikembangkan, sehingga kemudian orang-orang lain ikut menggabungkan diri, bertempat tinggal disekeliling benteng itu dan meminta perlindungan keamanan, dan lama kelamaan, semakin meluas yang akhirnya membentuk suatu kota atau disebut dengan nama "*polis*". Jadi negara pada zaman itu dikenal dalam kepustakaan ilmu politik disebut sebagai "*negara kota*" (*city state*).⁹

⁹ Aminuddin Ilmar. *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*. Jakarta:Kencana. 2012. Hlm. 4

Pemikir Islam *AL Farabi*¹⁰ mengemukakan pandangannya tentang negara yang menitik beratkan kepada adanya tujuan bersama manusia untuk mencapai suatu tujuan hidup. Hal yang menonjol dari pandangan ini adalah bahwa dorongan untuk bekerja sama, berkelompok dan berkumpul merupakan dorongan alamiah. Sehingga kesadaran dan rasionalitasnya menjadi faktor penting dalam membentuk negara. Posisi pemimpin menjadi faktor sentral dalam pencapaian tujuan negara oleh karena pemimpinlah yang memiliki kualitas unggul dalam membimbing warganya. Kalau pemimpin yang dimaksud dimaknai sebagai pemerintah dalam masa modern, maka pemerintahlah yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan warganya.¹¹

Berangkat dari konsep dasar tentang negara yang menempatkan adanya tujuan bersama yang menjadi kebutuhan, kehendak ataupun kepentingan rakyatnya, maka muncul pertanyaan, bagaimana negara bertindak dalam mewujudkan tujuannya tersebut?. Perihal bagaimana negara bertindak dalam mewujudkan atau mencapai tujuannya, menunjukkan keniscayaan adanya aktivitas yang dinamis dari negara. Aktivitas dinamis dalam pelaksanaan kerja-kerja konkrit ini disebut peran atau fungsi negara. Fungsi merupakan suatu pelaksanaan atau aktivitas yang tentunya mengarah kepada pencapaian tujuan.

¹⁰ Al Farabi dikenal sebagai seorang filsuf Islam abad pertengahan yang pemikiran-pemikiran banyak dituangkan dalam karyanya yang salah satunya dalam bidang ilmu politik dan kenegaraan.

¹¹ Lihat dalam Muhammad Hambali. *Peran Negara Di Bidang Ekonomi: Perspektif Kapitalisme, Sosialisme dan Islam*. <https://marx83.wordpress.com/2009/02/03/100/>

Aktivitas negara dalam tindakan-tindakan yang diambilnya, merupakan bentuk dari pelaksanaan peran atau fungsinya dalam upaya mencapai tujuannya. Mengenai peran atau fungsi negara ini, W. Friedmann, mengemukakan empat fungsi negara yaitu:¹²

a. Fungsi Negara Sebagai Provider (penjamin)

Fungsi ini berkenaan dengan negara kesejahteraan (welfare state) yaitu negara bertanggung jawab dan menjamin suatu standar minimum kehidupan secara keseluruhan serta bentuk-bentuk jaminan sosial lainnya.

Provider, dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sebagai pemberi nafkah. Tentunya nafkah disini adalah bagian dari bagaimana upaya agar tetap melangsungkan kehidupan. Dalam konteks fungsi negara, fungsi Provider adalah ketika negara menjalankan aktivitasnya dalam rangka menjamin kesejahteraan warganya. Negara dalam hal ini berupaya memastikan agar kehidupan (yang layak) warganya dapat terus berlangsung.

b. Fungsi Negara Sebagai Regulator (pengatur)

Kekuasaan negara untuk mengatur merupakan wujud dari fungsi sebagai regulator. Bentuknya bermacam-macam, ada yang berupa peraturan perundang-undangan, tetapi juga bersifat peraturan kebijakan. Secara sektoral misalnya pengaturan

¹² W. Friedmann dalam Abrar Saleng. *Hukum Pertambangan*. Jogyakarta: UII Press. 2007. Hlm 49

tentang investasi disektor industri pertambangan, ekspor impor, pengawasan dan lain-lain.

c. Fungsi Negara selaku entrepreneur (melakukan usaha ekonomi)

Fungsi ini sangat penting dan perkembangannya sangat dinamis. Negara dalam kedudukan demikian, menjalankan sektor tertentu dalam bidang ekonomi melalui badan usaha milik negara (*state owned corporation*). Sifat dinamis tersebut berkaitan dengan usaha yang terus menerus dilakukan untuk menciptakan keseimbangan dan hidup berdampingan (*co-existence*) antara peran sektor swasta dan sektor publik.

d. Fungsi Negara sebagai Umpire (wasit, pengawas)

Dalam kedudukan demikian, negara dituntut untuk merumuskan standar-standar yang adil mengenai perusahaan negara. Fungsi terakhir ini diakui sangat sulit, karena disatu pihak negara melalui perusahaan negara selaku pengusaha, tetapi dilain pihak ditentukan untuk menilai secara adil kinerjanya sendiri disbanding dengan sektor swasta yang lainnya.

Menurut Friedmann bahwa apabila ditelusuri secara cermat evolusi perkembangan konsep tentang negara, akan ditemukan bahwa menyejahterakan masyarakat, didalamnya terkandung makna keadilan sosial yang merupakan landasan legitimasi keberadaan negara. Keadilan sosial menjadi prinsipil, karena realitas politik dan hukum disepanjang sejarah jatuh banggunya bangsa-bangsa di dunia, mengajarkan bahwa

kekuatan yang paling dahsyat yang dapat memporak-porandakan bangunan masyarakat sebagai suatu bangsa adalah ketidakadilan sosial.¹³

Peran dan fungsi negara sebagaimana disebutkan Friedmann di atas, kiranya dapatlah dijadikan indikator dalam menilai apakah suatu negara telah menjalankan fungsinya atau belum. Terkhusus dalam penyediaan kebutuhan rakyat akan energi, negara melalui pemerintah mengemban tugas dan kewajiban untuk mengelola sumber daya energi untuk sebesar-besar kesejahteraan bagi rakyat.

Energi dalam bentuknya dapat dikategorikan kedalam energi primer dan energi sekunder (final). Energi primer¹⁴ adalah energi yang langsung dari alam yang mesti diolah terlebih dahulu, misalnya batu bara. Sedangkan energi sekunder atau energi final¹⁵ adalah energi primer yang telah diolah dan siap dimanfaatkan, misalnya energi listrik.

Penyediaan energi adalah bagian dari pengelolaan energi itu sendiri¹⁶. Negara menjalankan fungsinya untuk tiga tantangan pokok yang dihadapi dalam bidang energi. Tiga tantangan itu adalah *pertama*, cadangan energi yang kian menipis, hal ini karena dominasi pengelolaan energi adalah pada sektor energi fosil yang tak terbarukan. *Kedua*, subsidi untuk harga energi

¹³ Abrar Saleng. *Ibid. hlm.50*

¹⁴ Pasal 1 ayat (18) PP No. 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Pengelolaan enegi meliputi penyediaan, pemanfaatan dan pengusahaan. Pengelolaan ini diarahkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Lihat PASal 1 UU Energi.

semakin meningkat. Hal ini menjadi beban bagi perekonomian negara. *Ketiga*, keterbatasan infrastruktur energi sehingga menghambat distribusi energi kepada rakyat.¹⁷

Pada sektor energi minyak dan gas di Indonesia, memang masih menjadi andalan utama perekonomian selain sebagai sumber devisa juga sebagai pemasok kebutuhan energi dalam negeri. Akan tetapi seiring dengan gerak pembangunan yang semakin pesat, menjadikan kebutuhan energi ikut bertumbuh hingga di atas jumlah rata-rata produksi. Hal ini mengharuskan Indonesia untuk menemukan sumber cadangan energi baru untuk peningkatan produksi.¹⁸ Selain itu, dominasi pengelolaan pada sektor sumber daya energi yang tak terbarukan, akan membawa Indonesia pada situasi krisis energi.

Pertumbuhan penduduk Indonesia yang semakin pesat, menuntut adanya peningkatan cadangan energi yang cukup besar pula. Sementara sumber daya energi tak terbarukan, seiring pemanfaatannya akan mencapai titik nadir ketersediaannya. Untuk beralih ke sektor energi terbarukan tentu tidak semudah yang dibayangkan karena selain membutuhkan perencanaan yang matang, pemanfaatan energi terbarukan membutuhkan investasi yang tidak kecil dan teknologi canggih. Sehingga untuk dapat dinikmati membutuhkan waktu yang relatif tidak cepat. Oleh

¹⁷ Lihat AS. Hikam (ed). *Ketahanan Energi Indonesia 2015-2025, Tantangan dan Harapan*. Jakarta: CV. Rumah Buku. 2014. Hlm. 98.

¹⁸ Juajir Sumardi. *Gerakan Akademik Untuk Kedaulatan Migas Indonesia*. Makassar: Arus Timur. 2017. hlm. 33

karena itu, masalah ini membutuhkan keseriusan negara cq. Pemerintah untuk menyelenggarakan pengelolaan sumber daya energi yang optimal karena penyediaan energi adalah hal vital yang bersentuhan dengan pembangunan ekonomi rakyat dan pertahanan negara.

Fungsi provider negara menjadi jaminan bagi upaya untuk mendorong kesejahteraan rakyat. Dengan energi yang tersedia dan cukup dapat menggerakkan perekonomian rakyat sehingga dengan demikian rakyat dapat merasakan hadirnya negara sebagaimana amanah konstitusi UUD NRI 1945, bahwa segala sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal demikian menjadikan energi yang ketersediaannya menjadi tanggung jawab negara, sebagaimana pendapat Jimly Asshiddiqie,¹⁹ bahwa dalam hal ini negara mesti memenuhi 3 (tiga) hal yang menjadi kepentingan rakyat, yaitu: 1) Ketersediaan yang cukup. 2) distribusi yang merata. dan 3) terjangkauunya harga bagi rakyat.

Hadirnya negara dalam penyediaan energi juga dapat dilihat dalam hal ditetapkannya suatu regulasi sebagai bentuk kebijakan sebagaimana kehendak konstitusi. Pengelolaan energi membutuhkan perencanaan yang tepat dan seyogyanya cepat. Itulah sebabnya negara mesti menetapkan sejumlah kebijakan baik berkenaan dengan regulasi hukum maupun kebijakan dasar yang saling mendukung. Tentu kebijakan ini dapat dilihat dalam

¹⁹ Lihat Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi Bernegara*. Setara Press. Malang. 2015. Hlm.303

bentuk kerja-kerja yang memang mesti dilakukan bahkan terhadap hal-hal yang tidak boleh dilakukan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi (UU Energi) menetapkan tujuan pengelolaan energi diantaranya adalah untuk menjamin ketersediaan energi dalam negeri. UU Energi mengatur agar penyediaan energi dapat memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Pemenuhan kebutuhan energi dilakukan dengan pengelolaan yang terpadu dan berkelanjutan. Selain itu, memastikan rakyat dapat mengakses energi dengan harga terjangkau yakni memastikan masyarakat dapat menikmati energi dengan mudah (ada) dan murah.

Kebijakan pengelolaan sumber energi yang ditetapkan pemerintah pada aspek yuridis telah memberikan jalan bagi solusi penyediaan energi secara optimal. Ketersediaan energi menjadi tujuan dari berbagai kebijakan yang ada sehingga kedepannya tentu dibutuhkan komitmen dan konsistensi dalam implementasinya.

Dalam hal pengelolaan sumber energi misalnya, kebijakan pemerintah dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional. PP No. 79/2014 ini dikeluarkan sebagai petunjuk dan perintah dari UU No. 30 Tahun 2007 Tentang Energi (UU Energi), dimana pada Pasal 11 UU Energi menegaskan bahwa Kebijakan energi nasional meliputi : a) Ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional; b) Prioritas pengembangan energi; c) Pemanfaatan sumber daya

energi nasional; dan d) Cadangan penyangga energi nasional. Kebijakan ini disebut sebagai kebijakan utama yang diatur dalam PP No. 79/2014.

Penguasaan dan pengaturan sumber daya energi oleh negara, diselenggarakan pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.²⁰ Wujudnya dapat dilihat misalnya dalam rencana kerja pemerintah (RKP) 2018. Dari sepuluh prioritas nasional yang ditetapkan oleh pemerintah, satu diantaranya adalah Ketahanan Energi. Prioritas Nasional untuk sektor ketahanan energi difokuskan pada 2 (dua) program prioritas yaitu: *Pertama*, Pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dan konservasi energi. *Kedua*, Pemenuhan Kebutuhan Energi.²¹

Selain menetapkan regulasi dan kebijakan dalam pengelolaan energi, negara melalui badan usahanya (BUMN) diberi kewenangan untuk melakukan usaha penyediaan energi. Salah satunya adalah penyediaan energi listrik yang dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Dalam posisi ini pemerintah bertindak sebagai pengusaha dalam rangka pemenuhan kebutuhan energi listrik bagi rakyat. Keberadaan BUMN tidaklah terlepas dari fungsi negara untuk menyelenggarakan tujuan bersama.

Fungsi entrepreneur negara melalui BUMN adalah konsekuensi logis dari perwujudan tujuan negara yakni

²⁰ Lihat Pasal 11 UU Energi

²¹ Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 dalam www.bappenas.go.id di akses tanggal 26 agustus 2017

kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Sehingga kehadiran BUMN tidak melulu untuk kepentingan komersial tetapi juga untuk kemanfaatan publik dengan fungsi sosialnya.²²

Tidak hanya melakukan usaha pengelolaan dan penyediaan energi, negara pun melakukan upaya-upaya pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan energi yang dilakukan oleh pihak swasta. Karena kehadiran swasta dipandang dapat membantu pencapaian tujuan kesejahteraan bagi rakyat. Oleh karena itu, untuk situasi tertentu, swasta diperkenankan berpartisipasi dalam kegiatan perusahaan dalam rangka penyediaan energi bagi rakyat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan. Dalam hal kegiatan inilah pemerintah dapat menjalankan fungsi pengawasan/kontrol negara agar penyediaan energi yang dilakukan melalui badan usaha swasta tidak menyalahi aturan yang ada.²³

Paulus Effendi Lotulung, pengawasan dilakukan untuk menghindari terjadinya kekeliruan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja sebagai upaya preventif dan represif untuk memperbaiki jika ada kekeliruan.²⁴ Fungsi pengawasan sangat penting agar segala kegiatan penyediaan energi dapat terkendali

²² Aminuddin Ilmar. *Op.Cit.* hlm. 76

²³ Lihat Pasal 11, 12 UU No. 30 Thn 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

²⁴ Paulus Effendi Lotulung. *Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Hakim Perdata.* Citra Aditya Bakti. Bandung. 1993. Hlm. xvi

sesuai aturan yang ada, apalagi seringkali kegiatan tersebut bersentuhan dengan kepentingan lingkungan hidup.

Dengan berbagai fungsi yang dijalankan oleh pemerintah, maka seyogyanya penyediaan energi dapat bermuara pada pencapaian tujuan negara yakni sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Karena dengan ketersediaan energi, perekonomian dapat bergerak sinergi dengan program pembangunan pemerintah dan juga menjadi faktor utama dalam menjaga ketahanan nasional.

Ketahanan Energi untuk Kesejahteraan Rakyat.

Ketahanan energi merupakan hal yang mutlak dihadirkan seiring dengan perkembangan kehidupan manusia suatu bangsa. Energi menjadi unsur utama dalam menggerakkan pembangunan nasional yang berorientasi pada peningkatan derajat kesejahteraan rakyat. Melalui kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam PP No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, ketahanan energi didefinisikan sebagai suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi dan akses masyarakat terhadap energi pada harga terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Setidaknya ada 2 (dua) hal yang terkandung dalam definisi ketahanan energi menurut PP 79/2014 yaitu: *Pertama*, adanya jaminan ketersediaan energi. Hal ini menjadi tanggung jawab negara dalam penyediaan energi. Oleh karena itu, jaminan

ketersediaan energi seyogyanya terjawab dengan melekatnya tanggung jawab negara yang diwujudkan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi negara dalam pengelolaan sumber daya energi. *Kedua*, adanya akses masyarakat terhadap energi. Hal ini berkenaan dengan distribusi energi kepada rakyat.

Ketersediaan energi sangat tergantung dari sejauhmana negara mampu menghadirkan kedaulatannya di bidang energi karena pada dasarnya kedaulatan energi (*energy sovereignty*) dapat diartikan sebagai kemampuan dari suatu Negara untuk memiliki kekuasaan dalam mengontrol, mengatur, dan mengelola energi yang dimilikinya. Oleh karena itu, kedaulatan energi ini dapat juga dilihat sebagai bentuk kesadaran individu, masyarakat, dan penduduk untuk dapat melakukan keputusan secara mandiri atas sumber energi, pendistribusiannya, serta pemanfaatannya sesuai dengan lingkungan ekonomi, sosial, budaya, dan kebutuhan mereka. Negara memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan kekuasaan, khususnya dalam bentuk control terhadap setiap aktivitas pengelolaan energinya.²⁵

Ketahanan energi juga dapat ditopang dari sejauhmana negara mampu mengelola potensi cadangan energi yang dimilikinya untuk dipergunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dari sisi potensi pada sektor batubara misalnya, Indonesia adalah negara peringkat 10 sebagai pemilik cadangan batubara terbesar dunia, produsen peringkat ke-3

²⁵ Juajir Sumardi. *Op.Cit.* Hlm.20

tetapi ternyata menjadi eksporter batubara terbesar di dunia.²⁶ Hal ini berkaitan dengan kebijakan dalam menyikapi potensi cadangan energi yang dapat merugikan dalam jangka panjang pada bidang pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri jika tidak segera dilakukan koreksi atas kebijakan tersebut.

Energi harus terjamin ketersediaannya mengingat energi adalah sumber vital bagi kehidupan bangsa. Melalui Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, pada prinsipnya memberi amanah kepada negara untuk melakukan pengelolaan sumber daya energi dengan tujuan pencapaian tujuan kesejahteraan bersama.

Penggarisan konstitusi ini oleh Adnan Jamal dalam penelitian disertasinya menempatkan energi sebagai salah satu hak asasi manusia. Di Indonesia menurutnya, hak manusia atas energi pada prinsipnya telah terkonstitusionalisasi secara implisit pada Pasal 33 UUD NRI 1945. Hanya saja, ketentuan konstitusional ini, tidaklah dapat menjadi solusi konstitusional terhadap permasalahan pengelolaan energi.²⁷ Akses masyarakat terhadap energi dapat dilihat dari sejauhmana energi tersebut terdistribusi secara adil kepada masyarakat. Oleh karena itu, salah satu point penting dalam ketahanan energi nasional adalah distribusi energi kepada masyarakat. Kata distribusi umumnya dikenal dalam kegiatan perekonomian atau bisnis dimana

²⁶ M. Kholid Syeirazi. *Tata Kelola Migas Merah Putih*. Jakarta: LP3ES. 2017. Hlm.23

²⁷ Adnan Jamal. Disertasi, "*Konfigurasi Politik dan Hukum Terhadap Hirarki Tata Hukum Indonesia (Studi Terhadap Rekonstitusionalisasi Hak Manusia atas Akses Energi sebagai Hak Dasar)*". Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin. 2014. Hlm.455

menjadi faktor penting dalam menghubungkan produsen sebagai penghasil barang atau jasa dengan konsumen sebagai pengguna barang atau jasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), distribusi diartikan; **1.** Penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat; **2** pembagian barang keperluan sehari-hari (terutama dalam masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya; **3.** *ark* persebaran benda dalam suatu wilayah geografi tertentu.

Dengan demikian, maksud dari kegiatan distribusi adalah mendekatkan produsen kepada konsumen dalam satu kesatuan sistem produksi. Kegiatan ini ditandai dengan adanya penyaluran hasil produksi kepada pihak lain. Distribusi juga bukan tanpa tujuan, bahwa kegiatan produksi tidaklah semata-mata menghasilkan barang atau jasa kemudian menyalurkan kepada pihak lain, tetapi juga memiliki tujuan yang menjadi hakikat dari distribusi itu sendiri yakni memastikan agar pihak lain (masyarakat) dapat menikmati hasil produksi. Dalam konteks pengelolaan energi, distribusi energi adalah upaya memastikan agar rakyat benar-benar menikmati hasil kekayaan alamnya sebagai anugerah ALLAH SWT yang diperuntukkan bagi kelangsungan hidup umat manusia. Oleh karena itu, prinsip-prinsip keadilan dalam distribusi ini adalah hal yang urgen untuk diwujudkan. Hanya dengan distribusi yang adil oleh negara,

kesejahteraan dapat dirasakan dengan nyata sebagai sebuah tujuan dalam bernegara.

Substansi dari ketahanan energi sebagaimana diuraikan di atas diharapkan dapat menjadi jalan bagi pencapaian derajat kesejahteraan rakyat. Terhadap daerah tertinggal terdapat penelitian perihal korelasi antara terpenuhinya akses energi oleh masyarakat dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Penelitian ini menunjukkan bahwa akses listrik termasuk salah satu indikator yang menunjang kualitas hidup.²⁸ Bahwa terdapat dampak positif dari adanya jaringan listrik masuk desa karena selain untuk penerangan, beberapa rumah tangga memanfaatkan listrik untuk mendukung kegiatan usaha produktif sehingga membuka peluang usaha baru yang dapat meningkatkan pendapatan mereka.²⁹ Ini menandakan bahwa dengan ketersediaan energi dan terdistribusi sehingga dapat terakses oleh masyarakat, menjadi faktor utama dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.

Penutup

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan gagasan kesejahteraan rakyat melalui pemanfaatan sumber daya alam. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar

²⁸ Maxensius Tri Sambodo, Siwage Dharma Negara, & Felix Wisnu Handoyo. Dalam Akses Listrik Dan Kesejahteraan Masyarakat. Jakarta: LIPI Press. 2016. Hlm. 82

²⁹ *Ibid.* hlm. 84

kemakmuran rakyat. Demikian amanah konstitusi yang mesti terjabarkan dalam pengelolaan sumber daya energi dalam rangka pencapaian kesejahteraan rakyat. Energi adalah hal vital yang menjadi kebutuhan dasar bagi rakyat yang karenanya sangat memengaruhi gerak pembangunan nasional. Pencapaian kesejahteraan sebagai tujuan nasional dilakukan melalui peran dan fungsi negara dalam pengelolaan sumber daya energi. Fungsi provider negara memberikan jaminan atas kesejahteraan melalui regulasi dan kebijakan dalam pengelolaan energi dalam rangka terwujudnya ketahanan energi yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan energi dalam negeri dan teraksesnya kepada seluruh lapisan masyarakat. Ketersediaan akan menjawab kebutuhan dan teraksesnya melalui distribusi yang merata akan mendorong perekonomian produktif bagi masyarakat sehingga dengan demikian, ketahanan energi menjadi faktor utama dalam memajukan kesejahteraan rakyat. Ketahanan energi mesti diupayakan melalui komitmen peran dan fungsi negara yang dilakukan dengan menempatkan amanah konstitusi sebagai semangat dari setiap kebijakan pengelolaan energi.

Kearifan Lokal To Wani To Lotang dan Peranannya terhadap Penguatan Nilai-nilai Kebhinnekaan di Indonesia

Rustan Efendy
IAIN Parepare
Email: rustan198304@gmail.com

Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah negeri yang memiliki keragaman baik dari segi budaya, etnis dan keyakinan atau agama. Potensi tersebut dapat dipandang dari dua sudut pandang yang berbeda, di satu sisi potensi tersebut berimplikasi secara positif dalam penguatan nilai majemuk dan pluralitas bangsa dan mendukung falsafah bangsa yaitu kebhinnekaan, mengingat beragamnya bahasa, etnis dan keyakinan. Saat ini tercatat terdapat 655 bahasa pada 34 provinsi di Indonesia, dan 652 bahasa daerah yang tercatat pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bahkan tercatat terdapat 187 penghayat kepercayaan yang terdata pada pemerintah. Artinya, keragaman tersebut sangat potensial untuk kemudian menjadi gerak evolutif untuk mewujudkan kebhinnekaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Namun, pada lain hal keragaman tersebut dapat menjadi sesuatu yang destruktif ketika digunakan sudut pandang bahwa perbedaan yang ada kerap kali menimbulkan potensi konflik. Konflik tersebut bisa saja timbul dari faktor keyakinan, ideologi, ekonomi, sosial dan kepentingan politik. Apalagi isu politik identitas dewasa ini cenderung menguat, apatah lagi ketika dikaitkan dengan pemilu. Isu-isu perbedaan kerap menjadi isu paling strategis yang paling aktif dalam meraih suara dan simpatisan.

Oleh karena itu, ada yang berpendapat bahwa Indonesia dalam ancaman politik identitas yang juga mengancam nilai kebhinnekaan yang sejak dahulu diperjuangkan oleh *founding fathers* bangsa. Selain itu, isu hegemoni atau dominasi mayoritas atas minoritas pun kerap kali menjadi batu sandungan dalam mewujudkan kebinnekaan. Implikasinya adalah emotif dari kalangan mayoritas membungkam peran serta kaum minoritas. Sehingga peran serta mereka dalam pembentukan nilai-nilai kebangsaan sering kali dikesampingkan. Padahal kontribusi minoritas dalam pembentukan nilai kesadaran akan keragaman dalam konteks berbangsa tak bisa dinegasikan begitu saja.

Kontribusi tersebut bukan hanya dilihat dari sudut pandang kategorial yang dapat diukur dan dipredikasi melalui data-data statistik, namun juga berbicara pada tataran nilai yang berbentuk kearifan lokal masing-masing budaya dan keyakinan

yang sering kali justru mampu menjadi tenaga penggerak peradaban universal terutama menyangkut perdamaian global.

Masyarakat To Wani To Lotang memiliki nilai filosofi yang terangkum dalam falsafah *Perri Nyameng* yang menjadi filosofi hidup mereka yang terejawantahkan dalam beberapa falsafah hidup, diantaranya: relasi terhadap *dewata seuwwae*, relasi terhadap sesama manusia, dan relasi terhadap alam semesta. Penelitian ini akan mengetengahkan bagaimana falsafah hidup mereka dan relevansinya dalam menjaga dan merawat kebhinnekaan yang selama ini luput dari paradigma umum, sebab masyarakat tersebut sering kali dinilai secara negatif dan peyoratif.

Kearifan Lokal Masyarakat To Wani To Lotang

Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai gagasan-gagasan yang bersifat arif, bernilai baik yang diikuti oleh anggota sebuah komunitas atau golongan. Menurut Undang-undang nomor 32 tahun 2009 kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Kearifan lokal dapat berwujud nyata (*tangible*) berupa sistem nilai, tata cara dan lainnya, dan dapat pula berupa yang tidak berwujud (*intangible*) berupa petuah yang disampaikan secara verbal dan diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi.¹

¹ Ulfah Fajarini, *Peranan Kearifan Lokal dalam Pendidikan Karakter*, Jurnal Sosio Didaktika, Vol. 1, No. 2 2018, Universitas Islam Negeri Jakarta, h. 123.

Kearifan lokal komunitas To Wani To Lotang dapat tersimpul dalam kata “*perrinyameng*” yang terejawantah dalam beberapa pandangan hidup diantaranya:

Relasi kepada Tuhan

Masyarakat To Lotang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa yang mereka sebut *dewata seuwwae* dengan prinsip *ipogau sininna nassuroangnge nenniya ininiriwi sininna nappesangkangnge puangnge*.² Relasi tersebut dapat dijabarkan pada beberapa aspek, diantaranya:

1. Perintah Tuhan
2. Larangan Tuhan

Altruisme

Altruisme adalah sikap rela berkorban untuk kepentingan orang lain, dengan kata lain mendahulukan kepentingan orang lain di banding dengan kepentingan diri sendiri. Sikap tersebut akan sangat berimplikasi dalam menempatkan diri dan orang lain sebagai entitas yang egaliter, kondisi dimana saat ini fenomena yang mengemuka adalah mengedepankan kepentingan pribadi, golongan, ideologi, dan keyakinan sendiri dan mengabaikan kepentingan bersama yang lebih besar.

Sikap altruisme komunitas To Lotang tercermin dalam “*siloreng madeceng tessiloreng maja*”. Artinya mendahulukan

² Muh. Rusli, *Kearifan Lokal Masyarakat To Wani To Lotang di Kabupaten Sidenreng Rappang*, Jurnal Al Ulum, Vol. 12, No. 2, 2015, Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, h. 480.

orang lain dibanding dengan diri sendiri. Oleh karena itu, doktrin tersebut membawa kasadaran bagi masyarakat komunitas To Lotang untuk berkorban demi kebaikan orang lain walaupun harus meminggirkan kepentingan pribadi, yang ada hanyalah kepentingan bersama yang mengatasi kepentingan pribadi dan golongan.

Rela berkorban demi orang lain

Prinsip rela berkorban untuk orang lain tercermin dalam filosofi "*patujui taue*". Yang secara leksikal berarti benarkan orang lain. Secara filosofi, falsafah tersebut bermakna kepada kesediaan untuk menerima peluang kebenaran dari pihak lain.

Taroi Masolang Taue Na Aja Mua Idi' Nassabari

Secara bahasa falsafah tersebut bermakna biarlah orang lain rusak, asalkan jangan kita yang menjadi penyebabnya. Namun, dalam falsafah ini, tidak berarti bahwa komunitas To Wani To Lotang, abai terhadap realitas masyarakat. Filosofi hidup ini dimaksudkan sebagai kehati-hatian masyarakat To Wani to Lotang dalam berbuat, jangan menjadi pemicu *asolangenna tauwwe*.

Filosofi tersebut bermakna secara etis untuk introspeksi diri sebelum menilai kejelekan orang lain, sebab tidak menutup kemungkinan dalam diri seseorang ada kekurangan, kekhilafan, kesalahan bahkan sifat jelek, namun kadang kala sifat tersebut kurang disadari oleh seseorang disebabkan karena lebih fokus

pada kekurangan orang lain. Dalam falsafah orang Bugis “*isseng ngale*” lebih tepat untuk menyepadankan falsafah komunitas To Lotang tersebut.

Menarik untuk dijadikan perbandingan dengan pepatah مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ , siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Artinya, secara filosofis bagi yang mengenal kelebihan dan kekurangannya sebelum menilai kelebihan dan kekurangan orang lain, akan lebih bersikap bijaksana dan arif baik bagi dirinya maupun orang lain.

1. Prinsip Keselamatan Bersama
2. Berpegang Teguh Pada Prinsip Universalitas Kebajikan

Historitas Konsep Bhinneka Tunggal Ika

Bhinneka tunggal ika merupakan bagian dari empat pilar kebangsaan selain Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indonesia memiliki kemajemukan suku dan budaya. Oleh karena itu, keragaman tersebut harus tetap dijaga dan dilestarikan sebagai warisan budaya bangsa.³ Nilai kebhinnekaan dalam konteks berbangsa dan bernegara tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa

³ MPR RI, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012, h. 169.

Indonesia itu sendri dan sejarah lahirnya Bhinneka Tunggal Ika yang dapat ditemukan dalam kitab *Sutasoma*.⁴

Secara harfiah ungkapan Bhinneka Tunggal Ika berarti bhinneka (beragam), tunggal (satu) dan ika (itu) yaitu beragam satu itu. Secara historis, doktrin teologi tersebut mulanya dari proses rekonsiliasi antara Budha dan Hindu yang dapat hidup berdampingan. Sebab hakikat kebenaran adalah satu. Mpu Tantular adalah penganut Budha, namun tetap merasa aman dalam kerajaan Majapahit yang berafiliasi dengan Hindu.

Gelar *Mpu Tantular* sendiri sebagai pencipta istilah Bhinneka Tunggal Ika terdiri dari kata *tan* (tidak) dan *tular* (terpengaruh). Dengan demikian, *Mpu Tantular* adalah seorang cendekiawan dan pemikir yang berpendirian teguh, dan tidak mudah terpengaruh oleh siapa pun.

Sejarah penggunaan istilah *Bhinneka Tunggal Ika* ditemukan dalam *Kitab Sutasoma* yang ditulis oleh Mpu Tantular pada abad XIV. Didalamnya tertulis “*Rwaneka dhatu winuwus Buddha Wiswa, Bhinnêki rakwa ring apan kena parwanosen, Mangka ng Jinatwa kalawan Siwatatwa tunggal, Bhinnêka tunggal ika tan hana dharma mangrwa*”. Secara bahasa berarti bahwa agama Buddha dan Hindu merupakan zat yang berbeda, tetapi nilai-nilai kebenaran Buddha dan Siwa adalah tunggal. Terpecah belah, tetapi satu jua, artinya tak ada dharma yang mendua.

⁴ Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018, h. 97.

Walaupun berasal dari teologi Hindu dan Budha, namun pengaruhnya secara luas dalam masyarakat majemuk Indonesia begitu signifikan. Walaupun mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam (muslim). Semboyan Bhinneka Tunggal Ika sendiri menjadi pembicaraan dalam sidang-sidang BPUPKI antara Muhammad Yamin dan Soekarno, bahkan menurut Bung Hatta Bhinneka Tunggal Ika adalah hasil imajinasi kreatif Bung Karno.

Bhinneka Tunggal Ika, yang secara leksikal bermakna berbeda-beda namun tetap satu jua, bermuatan filosofis sangat mendalam, bahkan dalam pandangan Yudi Latif Pancasila adalah ideologi terbaik dunia sampai saat ini. Falsafah berbeda namun tetap satu jua adalah realitas sejak negeri ini masih berbentuk nusantara, sebagai ideologi pemersatu semboyan Bhinneka Tunggal Ika ampuh dalam merawat dan menjaga keutuhan walaupun secara etnis, budaya dan agama berbeda, bahkan sebelum munculnya filsafat multikulturalisme di Barat.

Keanekaragaman Bangsa Indonesia sebagai Wujud dari Nilai Bhinneka Tunggal Ika

Bangsa Indonesia adalah satu bangsa yang besar dengan keanekaragaman suku, etnis, bahasa, budaya dan kepercayaan lokal. Konsekuensi dari pluralitas masyarakat Indonesia adalah sikap lapang dada menerima fakta keragaman tersebut dalam

kehidupan yang lebih luas. Saat ini, tercatat lebih dari 300 etnik atau 1.340 suku bangsa yang memiliki karakteristik sesuai dengan filosofi kehidupan mereka masing-masing.

Nilai kebhinnekaan, jika diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diejawantahkan dalam 3 nilai universal, yaitu:

Toleransi

Dalam perspektif sosiologi, manusia dipandang sebagai organisme hidup yang tidak bisa tanpa kehadiran yang lain bahkan entitas di luar manusia itu sendiri. Dalam konteks tersebut, relevansi nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terletak pada nilai toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah masyarakat yang kerap kali karena ideologi primordialisme dan sekat keyakinan tertentu menjadi penghalang perwujudan nilai toleransi. Toleransi yang dimaksudkan di sini adalah kesediaan untuk menerima fakta perbedaan sebagai konsekuensi pluralitas masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, harus ada kesadaran kolektif bahwa Indonesia sebagai sebuah negara dan bangsa memiliki keragaman suku, budaya, etnis, bahasa bahkan keyakinan beragama tanpa mempersoalkannya pada tataran dan kategori benar dan salahnya berdasarkan kategori dan penilaian dari perspektif masing-masing.

Bhinneka Tunggal Ika adalah filosofi bangsa Indonesia yang seharusnya mengilhami dan menjadi landasan filosofis dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain semua aspek kehidupan, mulai dari sosial, politik, ekonomi, hukum, pendidikan dan seluruh kebijakan-kebijakan strategis nasional lainnya mampu menjadikan semangat bhinneka tunggal ika dalam merancang dan mengarahkan langkah Indonesia menjadi bangsa yang besar.

Historitas dan Perkembangan To Wani To Lotang

Di Kabupaten Sidenreng Rappang (disingkat menjadi Kabupaten Sidrap) Sulawesi Selatan terdapat satu komunitas yang masih mempertahankan kepercayaan atau keyakinan atau agama lokal yang disebut sebagai To Wani To Lotang. To Wani sendiri berarti orang yang berasal dari daerah Wani, sementara To Lotang adalah orang yang berasal dari daerah Selatan. Mereka sebenarnya sudah mengenal Tuhan terlebih dahulu dari agama pendatang, bahwa merekalah yang memperkenalkan konsep Tuhan kepada Masyarakat Bugis secara umum, sementara agama-agama import (yang datang belakangan) justru menyudutkan keyakinan To Lotang sebagai animisme dan juga mungkin dinamisme.

Tuhan dalam pandangan To Lotang disebut *Dewata Seuwwae* atau *Dewatae* (Tuhan Yang Maha Esa) yang memiliki gelar *Patoto'e* (Yang Menentukan Takdir) yang secara esensi

sesungguhnya merupakan penekanan pada makna Yang Maha Segala-galanya. Istilah To Lotang atau To Wani merupakan istilah yang pertama kali diucapkan oleh La Patiroi, Addatuang Sidenreng VII, untuk menyebut pendatang yang berasal dari arah Selatan, yaitu Wajo. Dimana To Lotang terdiri atas 2 (dua) kata yaitu kata To (dalam bahasa Bugis yang berarti orang), dan kata Lotang (dalam bahasa Bugis Sidrap, dengan ucapan Lautang, yakni berarti Selatan – dari arah Lautan).

Masyarakat To Lotang percaya bahwa manusia pertama dibumi ini sudah musnah (Tenggelamnya Atlantis). Adapun manusia yang hidup sekarang adalah manusia periode kedua (Setelah Tenggelamnya Atlantis). Di Kelurahan Amparita lama, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebuah komunitas bernama Towani Tolotang, bermukim sejak ratusan tahun lalu. Komunitas ini, terjaga secara turun-temurun dan terus berkembang hingga sekarang.

Jarak Amparita yang merupakan daerah konsentrasi komunitas To Lotang hanya berjarak 8 km dari ibukota kabupaten Sidenreng Rappang yaitu Pangkajene. Jarak tempuh dengan kendaraan roda dua ataupun empat paling lama ditempuh 30 menit. Sementara dari kota Makassar, daerah Amparita berjarak 231 km. Dari segi spesifikasi atau ciri khas berpakaian, tak ada ciri khusus yang begitu membedakan komunitas ini dengan masyarakat sekitar yang mayoritas suku Bugis dan beragama Islam. Bahkan, mereka juga tetap menegaskan identitas

dirinya selaku orang Bugis. Hanya saja, mereka tetap mempertahankan keyakinan mereka (to riolota).

Awalnya eksistensinya, komunitas To Lotang adalah satu aliran kepercayaan. Namun karena kebijakan pemerintah memaksa mereka pada tahun 1996 harus memeluk salah satu agama resmi pemerintah. Mereka akhirnya harus menanggalkan originalitas aliran kepercayaannya yang sudah dianut sejak ratusan tahun bahkan sebelum kedatangan agama Islam.

Berikut penuturan Wa Eja:

“Pemerintah saat itu tidak mengakui jika terdapat aliran kepercayaan di luar agama resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Saat itu, dipanggillah tokoh komunitas kami untuk memilih agama yang telah ada. Pemerintah menawari tiga agama yaitu Islam, Kristen, dan Hindu. Komunitas kami harus memilih salah satunya, maka dipilihlah Hindu. Saat itu, kita resmi beragama bernaung di bawah Hindu. Namun adat istiadat sebagai komunitas Tolotang tetap terjaga,”⁵

“Sejak saat itu, jika ada acara Hindu di luar Sulawesi Selatan, seperti Jakarta dan Masyarakat To Wani To Lotang, kami selalu diundang khusus,”⁶ ungkap Wa Eja.

Wa Sunarto Ngate, salah seorang tokoh Towani Tolotang yang ditemui di rumahnya di Amparita, juga mengatakan hal

⁵ Hasil wawancara dengan Wa Eja, Tokoh Adat komunitas To Wani To Lotang di Amparita, tanggal 2 September 2019.

⁶ Hasil wawancara dengan Wa Eja, Tokoh Adat komunitas To Wani To Lotang di Amparita, tanggal 2 September 2019.

senada. Menurutnya, Towani Tolotang resmi berafiliasi dengan Hindu pada tahun 1966. “Kita ini sudah sebagai mazhab Hinduisme sejak tahun 1966. Pengakuan eksistensi tersebut didasarkan pada surat keputusan Dirjen Bimas Hindu nomor dua dan nomor enam tahun 1966.”⁷

Mengapa memilih memeluk Hindu? Menurut Wa Sunarto, alasannya sederhana. Di antara semua agama yang ditawarkan pemerintah, Hindulah yang memiliki kesamaan dan kemiripan, termasuk soal prinsip. “Hindu bisa memahami kami dan begitu juga Masyarakat To Wani To Lotang,” katanya. Terkait sejarah komunitas, Wa Sunarto menambahkan pernyataan Wa Eja. Menurutnya, Tolotang berasal dari Wajo. Komunitas ini ada di sana jauh sebelum Islam masuk. Waktunya sekira abad ke-16. Hanya saja tidak berkembang seperti sekarang. “Jadi kalau dikatakan Tolotang ini baru, itu pendapat keliru. Sebab menurut kami jauh sebelum abad ke-16 sudah ada,” jelasnya.

Namun menurutnya, karena sebuah proses sejarah, Tolotang kemudian harus berpindah. Masuknya Islam di Wajo rupanya tidak bisa memberi ruang yang bebas untuk berkembangnya ajaran Tolotang. “Makanya beralih ke Amparita. Hal tersebut terjadi sekitar abad 17,” beber Wa Sunarto. Sejak saat itu, Tolotang berkembang dan diayomi pemerintahan Sidenreng. Terjadi hubungan yang baik antara warga Tolotang

⁷ Hasil wawancara dengan Wa Sunarto Ngate, Tokoh Adat komunitas To Wani To Lotang di Amparita, tanggal 29 Agustus 2019.

dengan warga komunitas lain. Hingga saat ini, di semua kecamatan di Sidrap anggota komunitas ini pasti ada.

“Bukan di Amparita saja. Komunitas Tolotang juga ada di Maritengngae, Tellu Limpoe, Wattangpulu, Sidenreng, Dua Pitue, serta Pitu Riase. Hanya saja, basis utamanya memang di Tellu Limpoe. Tokoh adatnya juga banyak dan menyebar di seluruh kecamatan,” kata Wa Eja.

Kearifan Lokal Dan Penguatan Nilai Kebhinnekaan

Kearifan lokal merupakan suatu istilah yang mencuat ke permukaan dengan mengadopsi prinsip, nasehat, tatanan, norma dan perilaku leluhur kita masa lampau yang masih sangat urgen untuk diaplikasikan dalam menyelesaikan berbagai fenomena atau masalah yang ada. Kearifan lokal merupakan bagian dari konstruksi budaya. Dalam pandangan John Haba dalam Irwan Abdullah, kearifan lokal “mengacu pada berbagai kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah masyarakat dikenal, dipercayai, dan diakui sebagai elemen-elemen penting yang mampu mempertebal kohesi sosial di antara warga masyarakat”.⁸

Eksistensi kearifan lokal dewasa ini, dianggap sebagai salah satu alternatif dalam memecahkan berbagai macam kebuntuan dalam penyelesaian konflik, baik dalam skala lokal

⁸ Irwan Abdullah, dkk, *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global*, (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 10.

maupun nasional. Kearifan lokal seperti apa yang dapat menjadi solusi konflik, yaitu kearifan yang ditengarai mampu menciptakan suasana sejuk bagi pola dan interaksi antar umat beragama. Kearifan lokal sebagai alat perekat bagi sebuah masyarakat yang majemuk.

Menurut sebagian analisis diantara penyebab lahrynya konflik di Indonesia adalah munculnya "*nasionalisme lokal*" atau sentimen separatisme yang kuat, konflik yang bernuansa SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan), juga terdapat kecenderungan konflik disebabkan produk penyeragaman agama yang dilakukan oleh negara terhadap kelompok minoritas atau lokal, yang kemudian memancing kelompok-kelompok mayoritas melakukan perbuatan anarkis terhadap kelompok minoritas. Disamping itu, adanya kecenderungan melihat kepercayaan atau keyakinan lokal sebagai masyarakat yang primitif, terbelakang, bodoh, kumuh, eksotik, mistik, atheis, musyrik, kafir, irrasional, dan stagnan.

Maka melalui narasi struktural tersebut, pemerintah membuat proyek "pemberdayaan" kepada mereka dengan "menggusur" tanah dan menggeser identitas mereka. Meskipun sebagian agama lokal tersebut akhirnya menerima agama Islam sebagai agama mereka namun tidak berarti mereka menghilangkan identitas kelokalan mereka. Sebagaimana yang terjadi pada komunitas Amma Towa yang tetap berpegang pada *Paseng ri Kajang*. Hal yang sama terjadi pada masyarakat Towani

Tolotang, meskipun secara administratif mereka menganut agama Hindu guna menerima keputusan negara, namun mereka tidak meninggalkan identitasnya dan melaksanakan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya dan berpegang teguh pada "*Lontara' Appongenna Tolotang*". Komunitas Towani Tolotang dikenal memiliki tradisi dan keyakinan yang banyak berbeda dengan ajaran agama resmi. Alih-alih eksistensi adat, tradisi dan kepercayaan mereka diakui melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Beragama Hindu Masyarakat To Wani To Lotang dan Buddha No. 2 Tahun 1966.

Kecenderungan tentang adanya kemampuan lokal atau cara- cara "dari dalam" untuk memecahkan persoalan sangat dibutuhkan saat rasionalitas tidak lagi memedulikan harkat kemanusiaan. Hal ini nampak misalnya, dalam respons berbagai pihak atas konflik yang terjadi di berbagai tempat yang cenderung menampilkan adanya kekuatan lokal. Kerangka kultur lokal harus dipahami sebagai basis sosial yang memiliki kekuatan penggerak dalam berbagai hal, termasuk dinamika konflik yang tidak pernah usai, mengoptimalkan potensi kearifan lokal sebagai alternatif solusi merupakan bagian dari pendekatan budaya dalam mengatasi konflik. Selain itu, tentunya terdapat juga pendekatan politik, ekonomi, dan sosial yang masing- masing memiliki titik tekan pola penyelesaian tersendiri atas konflik. Namun, kesemuanya merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Terlepas dari berbagai catatan kritis yang menyertainya,

pendekatan budaya memiliki peran yang penting. Mengacu pada teori *social learning*-nya Bandura, bahwa sesungguhnya budaya merupakan pola perilaku yang dipelajari, artinya bahwa masyarakat pun dapat “tidak belajar untuk keras”, alias berbudaya damai.⁹

Setidaknya ada enam signifikasi serta fungsi sebuah kearifan lokal jika hendak dimanfaatkan sebagai salah satu bentuk pendekatan dalam menyelesaikan sebuah konflik. *Pertama*, sebagai penanda identitas sebuah komunitas; *kedua*, elemen perekat (aspek kohesif) lintas warga, lintas agama, dan kepercayaan; *ketiga*, kearifan lokal tidak bersifat memaksa atau dari atas (*top down*), tetapi sebuah unsur kultural yang ada dan hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, daya ikatnya lebih mengena dan bertahan; *Keempat*, kearifan lokal memberi warna kebersamaan bagi sebuah komunitas; *Kelima*, *local wisdom* akan mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok, dengan melekatkannya di atas *common ground/* kebudayaan yang dimiliki; *Keenam*, kearifan lokal dapat berfungsi mendorong terbangunnya kebersamaan, apresiasi sekaligus sebagai sebuah mekanisme bersama untuk menepis berbagai kemungkinan yang meredusir, bahkan merusak, solidaritas komunal, yang dipercayai berasal dan tumbuh di atas kesadaran bersama, dari sebuah komunitas terintegrasi.

⁹ Albert Bandura, *World Heritage Encyclopedia Edition*, Columbia: University of British, 2008, h. 76.

Keenam fungsi kearifan lokal yang diurai di atas menegaskan pentingnya pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai atau kearifan lokal (*local wisdom*), di mana sumber-sumber budaya menjadi penanda identitas bagi kelangsungan hidup kelompok maupun aliran kepercayaan. Konflik yang menyertainyapun juga akan mampu dikelola secara arif dan tidak selalu melibatkan politik kekuasaan sebagaimana selama ini dipraktekkan melalui hubungan agama dan negara di Indonesia.

Kearifan-kearifan lokal Towani Tolotang tentunya sangat berpengaruh pada kehidupan keseharian mereka, mengingat setiap kearifan memiliki nilai tersendiri bagi pemiliknya. Namun terkadang, nilai-nilai tersebut tidak lahir dari komunitas mereka sendiri, sehingga eksistensinya hilang. Pengungkapan nilai-nilai dan implikasinya berdasarkan perspektif masyarakat Towani Tolotang sangat penting sehingga pendekatan yang harus digunakan adalah pendekatan fenomenologi agama.

Pendekatan fenomenologis dirintis oleh Edmund Husserl (1859-1938) dengan semboyan: *zuruck zu den sachen selbst* (kembali kepada hal-hal itu sendiri). Maksudnya, kalau kita ingin memahami sebuah fenomena misalnya konversi agama, konflik antar kelompok agama dan sebagainya, jangan hanya puas mempelajari pendapat orang tentang hal itu atau memahaminya berdasarkan teori-teori, tetapi kembali kepada subyek yang melakukan konversi agama dan konflik itu secara langsung. Dalam memahami sesuatu, fenomenologi menghendaki keaslian

(*dasariyah*), bukan kesemuan dan kepalsuan.

Fenomenologi berusaha memahami budaya lewat pandangan pemilik budaya atau pelakunya. Menurut paham fenomenologi, ilmu bukanlah *value free*, bebas nilai dari apapun, melainkan *values bound*, memiliki hubungan dengan nilai. Fenomenolog Edmund Husserl menyatakan bahwa obyek ilmu itu tidak terbatas pada empirik (sensual), melainkan mencakup fenomena yang tidak lain terdiri dari persepsi, pemikiran, kemauan, dan keyakinan subyek yang menuntut pendekatan holistik, mendudukan obyek penelitian dalam suatu konstruksi peneliti, melihat obyeknya dalam suatu konteks natural, dan bukan parsial.

Relasi dengan *Dewata Sewwae*

Penganut Towani Tolotang mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa yang disebut *Dewata Sewwae* Pada prinsipnya, *Ipogau'i Sininna Nassurangnge nenniya Ininiriwi Sininna Nappesangkangnge Puangnge*. Artinya melaksanakan seluruh perintah dan meninggalkan seluruh larangan-Nya. Hubungan kepada *Dewata Sewwae*, dapat dibagi dalam dua hal, yakni:

Passuroang/Perintah

Passuroang disebut juga *Mola Laleng* berarti perintah/kewajiban yang harus dijalankan sebagai bentuk pengabdian kepada *Dewata Sewwae*. Kewajiban-kewajiban tersebut meliputi: a). *Mappenre' Inanre* (menaikkan nasi). Ada

empat macam *Mappenre' Inanre*, yaitu: *Mappenre' Inanre* pada waktu kelahiran, perkawinan, kematian dan untuk hari kemudian. b) *Tudang Sipulung* (duduk berkumpul). Maksudnya, duduk berkumpul untuk melakukan musyawarah, c) *Sipulung* artinya juga berkumpul, maksudnya berkumpul bersama setahun sekali untuk melaksanakan ritus tertentu di atas kuburan *I Pabbere*, d) Melaporkan segala kegiatan kepada *Uwwa'ta* (pemimpin/orang yang dituakan).

Pappesangka/Larangan

Pappesangka adalah larangan bagi masyarakat Towani Tolotang, di antaranya dilarang makan babi, berzina, membunuh dan lain sebagainya. Pada dasarnya, larangan bagi masyarakat Towani Tolotang memiliki beberapa kesamaan dengan larangan dalam Islam.

Adapun nilai yang terkandung pada kewajiban tersebut adalah nilai ketaatan kepada *Dewata Sewwae* dan penghormatan kepada *Wa'* selaku pemimpin dan orang yang dituakan. Selain itu, ada nilai musyarah dalam acara tudang sipulung, ada nilai penghormatan kepada leluhur dan *appasikua* (kesyukuran) serta hari raya pada acara sipulung.

Relasi Kepada Sesama Manusia

Relasi atau hubungan kepada sesama manusia, baik antara sesama anggota komunitas maupun di luarnya dapat ditelusuri dari filosofi hidup komunitas To Wani To Lotang berikut ini

sekaligus merefleksikan bagaimana penghargaan mereka terhadap entitas di luar dirinya:

1. *Namo tongekki' narekko maelo tongeng tuae patongengngi.*
2. *Narekko siduppako taue lesseko.*
3. *Butapi' matarupi*
4. *Siloreng madeceng tessiloreng maja.*
5. *Patujui Taue*
6. *Taroi masolang taue na aja mua idi' nassabari*
7. *Tempedding ipau jana seddie tau masagenani narekkko jata' mo riisseng*
8. *Madecekki' namadecetto padatta' rupa tau*
9. *Aja' tasisolangi padatta' rupa tau*
10. *Makkatenniki' ri decengnge*
11. *De' naparellu yisseng ja'na seddie tau, genne'ni rekkojata'yisseng. Nasaba' nattiang ipau jana taue. Aja'na jana taue yala deceng.*
12. *De'siseng gaga laleng riaseng aleta'tongeng. Nabasa' Puangngemi tongeng.*

Relasi Kepada Alam

Masyarakat To Wani Tolotang sangat menghargai kelestarian alam. Adapun pesan-pesan atau ajaran yang mendukung hal tersebut adalah: *Narekko itempai batue, leppakki' capu-capui natomakkeda taniyya idi' salah, iya'mi salah.* Secara bahasa dapat diartikan jika kita menendang batu, maka kita

singgah dan mengelus-elusnya sambil berkata, bukan kamu yang salah melainkan aku. Secara filosofis, mengandung makna yang luas. Jika batu saja ditendang harus minta maaf, apalagi kepada sesama manusia. Batu adalah bagian dari alam, dan alam adalah sumber kehidupan yang wajib kita pelihara. Salah satu bukti pelestarian alam oleh masyarakat To Wani To Lotang adalah menjadikan alam sebagai *Perri Nyameng* sebagai wilayah hijau, membiarkannya ditumbuhi rumput dan sebagainya, meskipun pemerintah pernah meminta untuk merenovasi tempat tersebut, akan tetapi mereka tetap berupaya mempertahankan sebagaimana aslinya.

Bagi mereka alam adalah bagian kehidupan yang tidak bisa dinafikan kontribusinya dalam menyelaraskan harmoni antara manusia dan alam. Alam adalah tempat kehidupan, masyarakat To Wani To Lotang banyak mengandalkan alam sebagai sumber kehidupan mereka. Mereka belajar tentang kesederhanaan, penghargaan, nilai gotong royong dari filosofi alam terutama sawah yang menjadi simbol begi kehidupan masyarakat To Wani To Lotang.

Penguatan Nilai Kebhinnekaan Komunitas To Wani To Lotang

Untuk melihat secara spesifik integrasi antara kearifan lokal dan nilai kebhinnekaan yang diinternalisasikan dalam nilai kehidupan masyarakat To Wani To Lotang, berikut indikator nilai

kebhinnekaan yang dijadikan fokus penelitian.

No	Nilai kebhinnekaan	Indikator
1	Toleransi	<p>Menghargai perbedaan (suku, ras, agama)</p> <p>Menghargai pendapat</p> <p>Memberikan kebebasan beribadah kepada setiap orang sesuai dengan keyakinannya</p> <p>Berbuat baik tanpa memandang perbedaan suku, ras dan agama</p> <p>Memberi kesempatan yang sama kepada setiap orang</p>
2	Keadilan	<p>Meyakini persamaan derajat serta hak dan kewajiban warga negara</p> <p>Saling mengasihi antar sesama warga</p> <p>Memiliki sikap saling tenggang rasa</p> <p>Tidak bertindak/berperilaku sewenang-wenang</p> <p>Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan</p> <p>Saling menghargai</p>
3	Gotong royong	<p>Kebersamaan</p> <p>Saling membantu</p> <p>Memiliki tujuan bersama</p>

Toleransi yang Dikembangkan Komunitas To Wani To Lotang

Untuk mengukur nilai toleransi yang merupakan wujud dari nilai kebhinnekaan, maka indikatornya adalah: menghargai perbedaan (suku, ras dan agama), menghargai pendapat, memberikan kebebasan beribadah kepada setiap orang sesuai dengan keyakinannya, berbuat baik tanpa memandang perbedaan suku, ras dan agama dan memberi kesempatan yang sama kepada setiap orang.

1. *Menghargai perbedaan pendapat*
2. *Menghargai perbedaan keyakinan*

Penghargaan Terhadap Sesama

Penghargaan terhadap sesama menjadi filosofi hidup masyarakat To Wani To Lotang. Filosofi tersebut tergambar dalam filsafat hidup "*narekko maelo tongeng taue, patongengngi*". Jika ditransliterasi dalam bahasa Indonesia artinya kurang lebih jika seseorang ingin merasa benar dalam pendapatnya, maka hargai hal tersebut, walaupun anda juga merasa benar.

Penghargaan terhadap pendapat bahkan keyakinan yang berbeda kadang kala dalam kehidupan sehari-hari menimbulkan satu potensi destruktif dalam skala lebih luas terutama dalam konteks ke Indonesiaan, jika diasumsikan terdapat ribuan suku, bahasa, etnis, ideologi, keyakinan dan agama dalam konteks Indonesia, dan masing-masing berkuat pada kebenaran versi mereka, maka dapat dibayangkan potensi konflik baik horizontal

maupun vertikal akan mudah terjadi.

Dapat dibayangkan jika eksklusifisme kebenaran tersebut masing-masing bertahan dan tidak dapat berinteraksi dan didialogkan dengan kebenaran versi lainnya, maka akan menimbulkan eksklusifisme modern yang dapat mengancam nilai keragaman. Relevansi dan implikasi filosofi, *narekko maelo tongeng taue*, *patongengngi* adalah satu filsafat hidup yang mendalam akan kesadaran keragaman tafsir kebenaran yang tidak tunggal.

Filosofi berikutnya yang terkait dengan penghargaan terhadap sesama manusia adalah *narekko siduppa taue lessekko*, yang secara harfiah berarti jika anda berpapasan dengan orang lain di tengah jalan, menghindarlah/menepilah. Filosofi kearifan tersebut mengajarkan pentingnya mendahulukan kepentingan di luar diri atau *altruisme*. Altruisme mengajarkan rela berkorban demi kepentingan orang lain, rela berkorban demi kepentingan yang lebih banyak.

Sikap *altruisme* secara aplikatif dalam kehidupan masyarakat To Wani To Lotang terejawantah dalam prinsip hidup mereka melalui filosofi "*patujui taue*". Dahulukan orang lain. Dalam penuturan Wa Jare, tidak ditemukan dalam sejarah To Wani to Lotang adanya konflik dalam komunitas mereka karena adanya pemimpin kharismatik yang dipatuhi yang disebut dengan *Uwwatta*.

Harmoni Dalam Perbedaan

Akhir-akhir ini banyak konflik yang terjadi di Indonesia. Baik lokal maupun nasional. Kasus 23 September 2019 di Wamena misalnya yang dipicu berita hoaks tentang rasisme, sehingga menimbulkan kericuhan. Politisasi dari kasus ini adalah isu tentang pendatang dan penduduk lokal. Sulitnya menemukan harmoni dalam perbedaan saat ini masih dirasakan, masyarakat mudah terprovokasi dan diadu domba sehingga menimbulkan gesekan-gesekan dalam masyarakat yang berimbas pada tatanan sosial kemasyarakatan.

Konflik terkait agama dan etnis sesungguhnya bukanlah hal baru di negeri ini. Kita tentu tidak mudah melupakan konflik etnis Dayak dan Madura di Sampit, konflik agama di Ambon dan banyak lagi gesekan-gesekan antara pendatang dan masyarakat asli yang tidak terekspose media. Orang-orang Indonesia terlalu mudah diadu domba hanya karena masalah suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Kebhinekaan Indonesia jika tidak dijaga dengan baik tentu akan menjadi potensi konflik yang luar biasa.

Beralih dari fenomena konflik yang seringkali mengganggu kestabilan negara Indonesia, Masyarakat To Lotang adalah potret nyata bahwa perbedaan mampu hidup damai dalam masyarakat ini. Penduduk Masyarakat To Lotang membuktikan bahwa perbedaan agama dan etnis tidaklah menjadi persoalan dalam masyarakat.

Penduduk Masyarakat To Lotang mayoritas memilih

berafiliasi dengan Hindu walaupun secara kultural terdapat perbedaan dan banyak memiliki kesamaan dengan Islam seperti memakai kopiah, sarung dan identitas muslim lainnya. Mereka hidup berdampingan dengan kaum muslim di kabupaten SIDRAP dan Parepare. Meskipun begitu, perbedaan agama antara Islam dan to Lotang tidak terlalu mencolok karena harmoni di dalam masyarakat Masyarakat To Lotang telah meniadakan perbedaan yang mendasar tersebut. Mereka mampu hidup berdampingan tanpa ada konflik dan interset di dalamnya.

Masyarakat To Wani to Lotang meyakini ada satu kekuatan di alam semesta yang disebut *Dewata Sewwae'* (Tuhan yang Maha Esa) yang dalam pandangan kaum beragama disebut sebagai Tuhan. Konsepsi *Dewata Sewwae* menjadi kesadaran moral bagi mereka dalam bergaul dengan komunitas lain yang berbeda.

Konsepsi kerukunan komunitas To Lotang sesungguhnya dapat dilacak dari berbagai teorisasi tentang kerukunan. Kerukunan mereka maknai merasakan harmoni dan tiadanya permusuhan antar sesama yang menggambarkan hubungan antara kelompok yang berbeda karakter dengan tetap menjunjung tinggi sikap saling menghormati, keadilan, dan kehendak baik. Kerukunan mereka pahami dengan kehangatan, ketenangan, dan kesunyian tanpa kegaduhan dan perselisihan yang mengganggu keharmonisan hidup. Konsep kerukunan mereka kaitkan dengan harmoni atau keselarasan dalam kehidupan manusia. Jika manusia merasakan harmonisasi dalam hidupnya, berarti ia bisa

dikatakan hidup dengan rukun tanpa pertikaian dan tanpa kekerasan. Kehidupan yang rukun berarti menunjukkan suatu keharmonisan dalam sebuah masyarakat ataupun negara sehingga dapat berinteraksi dengan baik tanpa merasa ada gangguan dan ancaman yang datang dari siapa pun.

Dengan suasana kerukunan, diharapkan akan tercipta dinamika yang sehat, harmonis dan humanis dalam setiap interaksi antar sesama, tanpa ada rasa takut dan tekanan-tekanan dari pihak lain. Tak seorang pun yang berpikiran sehat akan memilih konflik sekiranya kerukunan masih dapat diusahakan. Akan tetapi juga tak seseorang pun dari masing-masing orang yang mendambakan kemajuan, akan memilih kerukunan dan ketenteraman yang pasif dan statis. Dalam pandangan Masyarakat To Lotang, secara objektif syarat untuk membina kerukunan hidup bersama telah tersedia dan sasaran yang akan dituju sudah jelas. Masalahnya hanyalah kesadaran, kemauan, usaha dan kerja keras dari masing-masing individu untuk mengendalikan egosentrisme dan fanatisme yang berlebihan.

Kesadaran Kebhinekaan

Dalam sejarah bangsa, sejak zaman kerajaan, kebhinekaan itu sudah disadari adanya sebagai kekayaan bagi bangsa. Semboyan *Bhineka Tunggal Ika* sebagai filosofi negarapun, kita pahami diangkat dari penggalan kakawin Sutasoma karya besar Mpu Tantular pada zaman keprabonan Majapahit pada abad 14.

Mpu Tantular melukiskan kehidupan beragama dalam kalimat “*Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrua*” yang berarti “walaupun berbeda, satu adanya, tidak ada agama yang tujuannya berbeda.”

Masyarakat To Wani To Lotang menyadari betul bahwa kemajemukan merupakan realitas yang tidak mungkin untuk ditolak atau dihindari. Ia telah hadir dan menjadi bagian yang tidak terpisah dari kehidupan sehari-hari. Sebagai bagian erat dari kehidupan, kemajemukan seharusnya dipahami, diterima, dan diapresiasi secara konstruktif. Sikap semacam ini dapat memberikan kontribusi bagi terciptanya kerukunan.

Menurut penuturan salah seorang tokoh To Wani To Lotang, bahkan secara geneologi antara keturunan dari generasi ke generasi bersumber dari satu sumber, sebagai contoh Ajare Mallo yang merupakan narasumber peneliti berasal dari keturunan *I Bode* sementara yang lain berasal dari keturunan *I Bolong*. Antara keduanya adalah bersaudara (*I Bode* dan *I Bolong*), namun keturunan keduanya memilih keyakinan atau agama yang berbeda, keturunan *I Bolong* lebih memilih Islam sebagai agama, sementara keturunan *I Bode* lebih memilih mempertahankan ajaran leluhur mereka.

Toleransi menjadi hal yang prinsip dalam kehidupan masyarakat To Wani To Lotang, bahkan secara praktikal, tokoh-tokoh masyarakat To Wani To Lotang sebagai bagian dari implementasi toleransi dan menghargai keragaman sering

dimintai bantuan untuk berpartisipasi dalam menjaga kekhusyuan dalam melaksanakan shalat tarawih dan hal tersebut telah dikelola secara baik yang merupakan modal penting untuk membangun kerukunan nasional. Kerukunan nasional menjadi aspek determinan dalam pembangunan nasional. Sulit melakukan pembangunan nasional jika konflik sering terjadi di masyarakat. Energi akan terforsir hanya untuk mengurus hal-hal yang semacam itu. Adanya toleransi merupakan salah satu prasyarat untuk menjadikan bumi ini sebagai surga dunia yang di dalamnya tidak ada lagi konflik yang dapat merugikan kemanusiaan.

Penutup

Nilai kearifan lokal masyarakat To Wani To Lotang dapat diidentifikasi dalam filosofi hidup mereka yang tercermin dalam filsafat hidup yang berelasi dengan hubungan kepada *Dewata Sewwae*, relasi dengan sesama manusia dan relasi kepada alam semesta. Integrasi nilai kearifan lokal dengan kebhinnekaan dapat diidentifikasi melalui praktek hidup mereka yang berupa gotong royong, musyawarah dalam pengambilan keputusan, menghargai, menghormati, toleransi baik yang sesama To Lotang maupun toleransi selain warga To Lotang.

Secara lebih spesifik, praktek nilai kebhinnekaan, teraplikasikan dalam tradisi *sipulung*. *Sipulung* secara bahasa berarti duduk bersama dan mendiskusikan satu hal. Hal tersebut merupakan bagian dari musyawarah untuk mufakat yang

merupakan nilai dasar dari kebhinnekaan. Untuk meneguhkan kebhinnekaan, kharisma pemimpin dibutuhkan dan dalam konteks *To Wani To Lotang*, fungsi seorang *uwwatta*, bukan hanya sebatas pemimpin komunitas akan tetapi secara lebih jauh sebagai pemimpin dalam masyarakat yang mampu mengendalikan, mengarahkan dan sekaligus meredam jika terjadi konflik sosial.

Lembaga Pendidikan Islam di Minoritas Muslim Kota Sorong

Ismail Suardi Wekke, Siarni, Nuryantika
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sorong
Email: iswekke@gmail.com

Pendahuluan

Lembaga Pendidikan Islam SD IT Al-Izzah Kota Sorong merupakan sekolah yang digagas untuk dijadikan lembaga pendidikan yang tidak sekadar memenuhi ketentuan kurikulum semata. Dalam usia empat belas tahun, sekolah ini mencapai rekognisi. Bukan hanya di tingkat lokal kota sorong, tapi juga di tingkat Nasional. Di tingkat lokal, Lembaga Pendidikan Islam Al-Izzah menjadi langganan juara, baik itu lomba yang berbasis ilmu pengetahuan maupun pemahaman keagamaan. Prestasi demi prestasi diraih, dan pada tahun 2016, kemudian menempatkannya sejajar dengan beberapa sekolah unggulan lainnya yang berada di Kota Sorong. Capaian sebuah lembaga pendidikan dalam mewujudkan misinya tidak terlepas dari peran dan fungsi kepemimpinan yang berjalan sesuai dengan harapan. Demikian halnya perkembangan dan kemajuan pendidikan Islam yang tidak lepas dari peran tim kerja yayasan. Ada tim kerja yang efektif dibalik pengembangan lembaga Pendidikan Islam SD IT Al-Izzah.

Tantangan pendidikan Islam adalah soal kesinambungan dengan periode sebelumnya (Nata, 2013). Selalu saja ada keterputusan spirit sehingga memerlukan energi yang lebih ketika memulai kembali. Sementara itu, sebuah keperluan yang utama adalah hadirnya tenaga pendidik yang memenuhi standar minimal (Usman, 2008). Dinamika kekinian pula yang menuntut hadirnya negara bangsa sehingga pendidikan selalu saja dikaitkan dengan kepentingan nasional (Haidar Putra Haully, 2007). Pada saat yang sama kepentingan keislaman menjadi sebuah keperluan yang lebih utama (Ninik Masruroh dan Umiasro, 2011). Beberapa persoalan itulah yang kerap melingkari wujudnya pendidikan Islam yang ideal. Belum lagi persoalan di minoritas muslim. Tantangan tersendiri dialami dalam rangka mendapatkan pendidikan Islam yang ideal.

Khazanah pendidikan Islam tumbuh seiring dengan kesadaran perlunya kehadiran lembaga keagamaan. Diawali dari keinginan untuk menjadi lembaga reproduksi ulama (Steenbrink, 1986), sampai pada perannya dalam perubahan social (Ziemek, 1986). Bahkan, lembaga pendidikan Islam masih mampu bertahan di era millennium baru (Azyumardi Azra, 2002). Salah satu kunci keberadaan pesantren adalah kemampuan untuk melakukan pembaruan dalam menyikapi dinamisasi lingkungan (Abd. A'la, 2006). Termasuk dalam bagian ini kemampuan untuk melakukan modernisasi (Amin Haedari, 2006). Begitu pula kehadiran kiyai sebagai dinamisator institusi yang mampu

menjaga kesinambungan Lembaga (Horikoshi, 1987). Ciri khas lainnya berkaitan dengan kemampuan untuk tetap mewarisi nilai utama pesantren dari zaman ke zaman (Mastuhu, 1994). Sementara nilai-nilai modernitas juga disemai sebagai bagian dari pembaruan (Lukens_Bull, 2001).

Hanya saja, kajian pendidikan Islam selalu dalam nuansa mayoritas muslim. Sementara pendidikan Islam Indonesia tersebar menjangkau setiap sudut tanah air (Burhanuddin dan Dina Afrianty, 2006). Dalam kaitan dengan minoritas muslim sebatas pada interaksi etnis (Mujahidah, 2010), pembelajaran (Wekke, 2015), konstruksi kurikulum (Wekke, 2014). Berkaitan dengan lingkungan minoritas muslim sebatas pada pemberdayaan (Wekke, 2013), dan identitas (Wekke, 2012). Dengan demikian, diperlukan sebuah penelitian untuk mengeksplorasi potret pendidikan Islam Indonesia secara utuh. Ini akan menjadi gambaran bagaimana dinamika pendidikan secara lengkap baik di kalangan masyarakat mayoritas muslim, demikian pula di masyarakat minoritas muslim. Kesemuanya, akan melengkapi mozaik khazanah pendidikan Islam kita.

Pendidikan Islam Indonesia menampakkan ciri khas di dunia muslim. Mulai dari madrasah sampai pada pesantren. Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa sekolah Islam, salah satunya hadir dalam bentuk sekolah Islam terpadu. Makalah ini akan mengidentifikasi program yang dikelola Sekolah Dasar

Islam Terpadu Al-Izzah. Selanjutnya, menganalisis manajemen kepemimpinan dalam pengelolaan lembaga.

Selayang Pandang SD IT Al-Izzah Sorong

SD IT Al-Izzah Sorong berdiri sejak tahun 2006. Adapun Visinya adalah “Mewujudkan siswa cerdas, berakhlak, berprestasi maksimal dan mandiri. Misinya adalah menjadi lembaga pendidikan berbasis dakwah. Lembaga pendidikan yang berbasis dakwah, dalam artian semua pendidikan sifatnya sebagai pendidikan karakter dan syiar (Penanaman nilai-nilai agama berbasis pendidikan), mengajak orang kepada kebaikan, dunia maupun akhirat. Visi dan misi ini dicetuskan sesuai dengan kondisi, dimana keterbatasan lembaga pendidikan yang kadang tidak memberi pilihan kepada keluarga muslim tempat bagi menyekolahkan anaknya. Sementara tuntutan mutakhir, dimana pendidikan menjadi salah satu tolok ukur dalam kemampuan individu. Keterbatasan pilihan ini, sehingga beberapa keluarga muslim harus menyekolahkan anak-anak mereka di lembaga yang tidak seiman. Kondisi ini sangat rentan untuk mendapatkan paparan informasi yang tidak sejalan dengan aqidah Islam.

Memasuki pekarangan SD IT Al-Izzah, langsung disuguhi dengan pemandangan halaman yang rapi, bersih, hijau dan asri, dikelilingi oleh deretan taman bunga dan kolam-kolam ikan. Infrastruktur gedungnya berbeda tiga tahun lalu, dimana bangunan sekolah semua masih semi permanen. Meskipun ada

tambahan infrastuktur gedung yang megah namun gedung lama yang semi permanen tetap berfungsi. Guru-guru segera menyambut tamu yang berkunjung. Upaya ini menunjukkan bahwa pengembangan baik sarana maupun prasarana dilakukan secara berkesinambungan. Demikian pula, lembaga berusaha tidak hanya sekedar membangun fisik tetapi pada saat yang sama, menjadikan sekolah sebagai lingkungan yang bersahabat bagi siapapun.

SD IT Al-Izzah Kota sorong tergabung dalam Jaringan JSIT (Jaringan Sekolah Islam Terpadu) yang tersebar di seluruh Indonesia. Semua Pelajaran berbasis Al-Qur'an baik itu pelajaran keIslaman maupun pelajaran umum. Salah satu program SD IT Al-Izzah adalah *Qur'anic Green School* (sekolah Hijau berbasis Quran). Quran dijadikan sebagai landasan dalam menjabarkan program-program yang dilaksanakan. Semata-mata untuk menjadi pelajaran bahwa hukum tertinggi yang menjadi pedoman hanyalah Alquran.

Pengelolaan Sekolah

Pada saat jam belajar, siswa tidak dibolehkan berada di halaman sekolah. Bila ingin bertemu murid, maka harus menunggu sampai jam istirahat siang, sekitar jam setengah 12. Begitu jam Istirahat, murid langsung menuju ruang makan. Pola kegiatan ini disosialisasikan kepada setiap murid begitu dinyatakan diterima sebagai warga belajar. Demikian pula dengan

orang tua dan masyarakat. Sehingga kedatangan orang tua maupun masyarakat tidak lagi mengganggu kegiatan yang sementara terlaksana.

Ada satu ruang gedung yang didesain untuk ruang makan siswa dan guru. Pada saat makan, Guru dan siswa duduk melantai satu meja untuk makan bersama. Kegiatan ini untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan nuansa kekeluargaan antara antara guru dan murid. Sekaligus tetap mempertahankan penghargaan kepada Guru. Murid dan orangtuanya berusaha untuk terus berkomunikasi. Pada hari sabtu dilaksanakan pertemuan antara guru dengan orang tua murid. Disamping melaksanakan pengajian juga sebagai wadah silaturahmi antara guru dan orang tua murid sehingga terbangun komunikasi dalam pengelolaan pembelajaran sepanjang pekan yang berlangsung. Dengan demikian, ada hubungan emosional antara guru dan murid, sehingga pembelajaran menjadi tanggungjawab bersama antara orang tua dengan guru.

Selanjutnya, shalat berjamaah salah satu program yang dilaksanakan secara terstruktur. Selesai makan siang, dilanjutkan dengan sholat berjamaah yang di dahului dengan *murojo'ah* (pengulangan hafalan juz 29 dan 30). Kegiatan ini berlangsung selama hari efektif belajar di sekolah. Selama satu pekan interval 2 Juz. Kegiatan disasarkan agar hafalan siswa tetap terjaga. Pengulangan demi pengulangan dilaksanakan secara terprogram. Dikhawatirkan jika tidak diulangi kembali, hafalan yang sudah

dikuasai murid akan lenyap begitu saja. Apalagi ketika sudah kembali ke rumah, murid memerlukan istirahat dan bersosialisasi dengan lingkungan. Sehingga kesempatan untuk pengulangan hafalan ditempatkan secara khusus dalam program di sekolah.

Program jaminan mutu di SD IT Al-Izzah adalah setiap tamatannya mampu menghafal minimal dua Juz A-Qur'an. Untuk itu, pemantauan berkala disetiap akhir semester selalu diadakan uji publik. Tim pengujinya adalah mereka yang punya kompeten dalam hafalan Qur'an. Diantaranya adalah imam masjid, hafidz, bahkan orang tua murid dilibatkan menjadi tim penguji. Setiap murid wajib menguasai hafalan Qur'an minimal dua juz dan sebagai target minimal. Sementara ada pula murid yang menghafal 5 juz, bahkan ada yang hafiz Qur'an 30 Juz. Teknik hafalan bekerja sama dengan Wafa foundation dari Surabaya.

Keuangan SD IT Al-Izzah sampai saat ini dikelola melalui satu pintu, yaitu oleh manajemen keuangan LPI (Lembaga pendidikan Islam) untuk mempermudah pelayanan keuangan terhadap guru dan warganya. Kejujuran dan tanggung jawab merupakan prinsip yang diusahakan sebagai budaya kerja pada guru demi kehormatan dan nama baik lembaga. Jika kejujuran diwujudkan, akan melahirkan kepercayaan, penghargaan dan rasa hormat. Untuk menjaga agar prinsip ini tetap terwujud, maka dilakukan pencatatan dengan menggunakan standar akuntansi dan pembukuan modern, termasuk menyimpan dana lembaga di institusi perbankan.

Adapun kurikulum yang dilaksanakan di sekolah ini adalah mengintegrasikan kurikulum yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan mata pelajaran keislaman. Secara khusus tidak dibuat kurikulum tersendiri. Hanya saja, mata pelajaran keagamaan dimasukkan dan dijadikan sebagai mata pelajaran utama. Sementara itu, kemampuan membaca Quran dan hafalan dua juz dijadikan sebagai program unggulan. SDIT Al-Izzah merupakan sekolah terpilih untuk menjadi pionir dalam implementasi kurikulum 2013. Kecuali untuk pelajaran Quran yang secara khusus menggunakan metode wafa, maka, pelajaran keislaman lainnya menggunakan pola yang dikembangkan dalam kurikulum 2013.

Sekolah Hijau Berbasis Quran

Filosofi dasar LPI AlIzzah adalah sumber utama pengetahuan dan nilai akhlak berasal dari Al-Qur'an. Karena itu, LPI A-Izzah menjadikan Qur'an sebagai pondasi dasar bagi anak agar menjadi sumber inspirasi seluruh aktifitasnya. Dimulai dari membaca, menghafalkan dan menjadikannya sebagai referensi utama dalam beraktifitas. Tema Quranic dirumuskan secara aplikatif dalam beberapa hal yaitu, *pertama*, Cerdas Multiple Intelegent, kecerdasan tidak sebatas intelektual. Hal inipun dipersempit menjadi sekedar hanya sekedar pintar matematika dan IPA. Pandangan yang digunakan bahwa ada 10 jenis kecerdasan (multiple intelegent) yang dimiliki anak sejak sejak

lahir. Setiap anak memiliki satu atau lebih kecerdasan/ bakat yang menonjol yang dapat dijadikan keunggulan. Oleh karena itu, pengelola SD IT Al-Izzah berusaha memaksimalkan potensi kecedasan siswa melalui; ekstrakurikuler bakat dan minat, English Camp, pembelajaran yang berkualitas antara lain dengan metode quantum learning, quantum teaching, pembelajaran proyek, bakti sosial.

Kedua, Berakhlak didefinisikan sebagai pembiasaan perilaku dalam lingkungan sosial. Beberapa program untuk pembiasaan akhlak; Sholat dhuha dan zuhur berjamaah, penyambutan dan pemulangan, MABIT (Malam bina iman dan taqwa, perkemahan dan bakti sosial. *Ketiga*, Mandiri sejak dini, murid dibiasakan untuk berdisiplin, senang membaca/ belajar, percaya diri, antri. Kegusaran akan perilaku masyarakat yang tidak menjadikan lingkungan sebagai bagian dari kepedulian mendorong LPI Al-Izzah menprogramkan pengenalan lingkungan hidup sebagai program utama. Program pembelajaran melatih murid melalui berbagai kegiatan seperti: pendidikan lingkungan yang terintegrasi dalam program siswa, *one student one three*, zero sampah, bersih 1 meter kiri, kanan, depan belakang, lingkungan sekolah hijau dan asri dengan program: mati/rusak satu ganti satu. Program ini diharapkan siswa dapat membuang sampah pada tempatnya dan mencintai lingkungan hidup.

Capaian SD IT Al-Izzah Sorong

Diantara prestasi yang pernah diraih adalah: Juara Lomba Hafiz Qur'an, lomba MTQ tingkat propinsi, dan lolos ke tingkat nasional. Di tingkat lokal, dua kali meraih juara 1 lomba kebersihan antar sekolah dasar se-kota sorong, yaitu sebagai sekolah berbasis lingkungan dan penghijauan. Juara I lomba cerdas cermat Bahasa Inggris tahun 2014 dan tahun 2015, Juara II lomba pidato berbahasa Indonesia (FLS2N) tahun 2015 se-Papua Barat, Juara I Ajang competition NSC, Juara I dan juara II lomba cerdas cermat dalam rangka HUT ke-19 SMP YPPKK Moria. Selanjutnya, Piala bergilir lomba cerdas cermat tingkat Gugus, piala bergilir Walikota Sorong, Juara I lomba cerdas cermat tingkat SD (Gugus) yang dilaksanakan oleh Penerbit Erlangga. Juara 1 dan juara II lomba sekolah terbersih berbasis penghijauan dua kali berturut-turut dari Badan lingkungan hidup (BLH) Kota Sorong. Selain itu, menjadi juara III aritmatika, lomba mata pelajaran matematika dan MIPA yang diselenggarakan di Malaysia, mewakili Propinsi Papua Barat.

Prestasi ini menunjukkan bahwa kemampuan murid-murid sudah diasah dalam pelbaai keterampilan. Sehingga mereka menekuni kegiatan ekstra kurikuler sesuai dengan pilihan masing-masing. Saat sudah memilih bidang minat yang akan ditekuni, kemudian mereka dimotivasi untuk berprestasi dan dapat bersaing dengan murid-murid yang ada di kota Sorong dan provinsi Papua Barat. Ini dilakukan untuk menumbuhkan percaya

diri diantara murid sekaligus menjadi ajang untuk bersosialisasi dengan murid-murid dari sekolah lain. Sesungguhnya, prestasi bukanlah tujuan utama. Ini bagian untuk memotivasi sehingga murid-murid menekuni apa yang mereka lakukan. Sekaligus diusahakan untuk senantiasa berbuat terbaik dalam beraktivitas.

Kepemimpinan dan Tim Kerja

Salah satu kekuatan SDIT Al-Izzah adalah soliditas tim kerja. Ketua Yayasan merangkap Direktur SDIT Al-Izzah, Daeng Risabang. Pendirian Lembaga Pendidikan Islam (LPI) mengungkapkan bahwa salah satu yang mendorong pendirian LPI adalah kerinduan terhadap lembaga pendidikan ideal. Sebagaimana salah satu bentuk pendidikan Islam dengan memakai pola keikhlasan, pola kekeluargaan, pola kesederajatan dan *uswah al-hasanah*. itulah yang mendorong beberapa orang untuk berkumpul dan mengelola lembaga. Jikalau saja, lembaga pendidikan ini secara lokal bisa berkembang, maka akan menjadi salah satu asset pendidikan nasional. Sehingga, SDIT Al-Izzah dibentuk untuk mampu memenuhi tantangan zaman dalam artian merespon nilai-nilai kebaruan dari semua aspek pendidikan, baik dalam hal metode, pola pendidikan, pola kepemimpinan, orientasi, dengan tetap mempertahankan kultur dan budaya pendidikan Islam.

SD IT Al-Izzah, sejak awal pembentukan, mulai mengadaptasi beberapa hal yang mutakhir antara lain, kurikulum,

pola pendidikan, kepemimpinan, dan juga orientasi dengan sistem terpadu. Dinyatakan terpadu karena sekolah ini mengintegrasikan materi pendidikan Islam dengan kurikulum pendidikan. Daeng Risabang menyatakan bahwa “pelajaran bukan tujuan, tapi sarana untuk mencapai tujuan, maka sikap optimisme perlu senantiasa tertanam dalam setiap pribadi yang bergelut dalam dunia pendidikan Islam, khususnya SD IT Al-Izzah Sorong. Ada dua alasan yang dikemukakan yaitu pertama, dengan mengintegrasikan pendidikan Islam dengan pendidikan umum, maka pendidikan Islam bukan saja akan mampu menjawab tantangan zaman atau mampu bersaing ditengah derasnya arus modernisasi, tapi juga mampu melahirkan cendekiawan-cendekiawan muslim. Kedua, dari sisi kesejarahan, pendidikan Islam pernah mengalami masa keemasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Di abad pertengahan pernah menjadi pionir ilmu pengetahuan.

Hal ini jelas di dukung oleh adanya kekuatan sistem pendidikan yang integral dan dinamis. Sehingga mampu menghasilkan cendekiawan-cendekiawan besar pada masanya yang ahli di segala bidang keilmuan (Nizar, 2011). Sehingga Daeng Risabang bersama seluruh pengurus Yayasan Sekaligus dan guru SD IT Al-Izzah tetap memiliki harapan dan optimisme yang tinggi dalam mengembangkan SDIT Al-Izzah sebagai Lembaga pendidikan Islam yang mampu menjawab kekhawatiran dan keperluan umat Islam di kota Sorong dan Papua Barat.

Sekaligus sebagai mitra pemerintah daerah mewujudkan generasi muda melalui pola pendidikan yang menyeluruh.¹ Harapan ini selalu dijaga dengan kesatuan tim kerja dan usaha yang berkesinambungan melalui program-program pengembangan dan unggulan yang terencana.

Prestasi demi prestasi yang diraih SD IT Al-Izzah bukan sesuatu yang lahir secara instant, Selain Guru, pihak yayasan, komite sekolah, serta orangtua murid juga ada peran dan berkontribusinya. Partisipasi komite sekolah diantaranya adalah dengan selalu memfasilitasi setiap kegiatan sekolah. Demikian halnya dengan dukungan dan kerjasama orangtua murid memegang peranan penting, misalnya, Kesadaran orangtua murid dalam melunasi kewajiban anaknya di sekolah ini serta partisipasinya dalam setiap kegiatan SD IT Al-Ikhlash adalah beberapa bentuk dukungan. Bahkan lingkungan masyarakat sekitar sekolah pun berperan khususnya dalam hal memberikan informasi-informasi yang positif tentang perkembangan dan kemajuan SD IT Al-Izzah, yang disampaikan secara riil sesuai dengan kondisi sekolah ini di lapangan tanpa ada unsur melebih-lebihkan.

Daeng Risabang berusaha bersama-sama dengan guru untuk menjalankan program yang menyangkut kemajuan sekolah sesuai program dan keputusan bersama. Dalam hal pelaksanaan

¹ Wawancara dengan Daeng Risabang, Ketua Yayasan SD IT, pada tanggal 11 juni tahun. 20016

sholat lima waktu, guru-guru berusaha untuk selalu tepat waktu mendahului murid-murid. Termasuk gagasan-gagasan guru yang diformulasi menjadi tindakan. Pimpinan berusaha pula untuk menggugah guru bahwa tiada keberhasilan yang diraih tanpa kerja keras. Begitu juga, tidak kerja keras yang menuai keberhasilan tanpa kerjasama, kebersamaan, dan partipasi semua pihak. Pimpinan juga menjadi model, memberi motivasi, dan spirit untuk memberi yang terbaik bagi kemajuan sekolah.

Tim kerja SDIT Al-Izzah berusaha untuk bekerja. Salah satu capaian kinerja adalah kepala sekolah, hingga sebagai Direktur dan Ketua Yayasan, berusaha untuk berprestasi secara signifikan. Sementara itu, perkembangan infrastruktur gedung sekolah untuk memenuhi keperluan belajar. Kemudian, peningkatan jenjang pendidikan yang awalnya hanya di tingkat pendidikan dasar, sekarang telah meningkat ke jenjang yang lebih tinggi, SMP IT Al-Izzah yang beberapa bulan lalu berhasil meraih penghargaan sebagai sekolah unggulan dan terintegrasi, dari Kementerian Pendidikan Nasional, dan SMA IT Al-Izzah yang memiliki gedung yang memenuhi prasyarat.

Pimpinan SD IT Al-Izzah dalam hal pemberdayaan guru terlihat dari adanya pembagian tugas dan kewenangan kepada semua guru yang terkordinir. Semua guru mendapat tugas dan tanggung jawab, diluat tanggung Jawab mengajar. Dengan pembagian distribusi kerja maka dapat meminimalisir tumpang tindih kewenangan antara guru yang satu dengan guru lain.

Pekerjaan di sekolah pun dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan tepat guna. Dalam hal pembagian kerja selain tugas mengajar, ada pendampingan. Setiap jenjang punya koordinator dalam hal: membina dan membimbing guru-gurunya terkait; pelajaran, budi pekerti, pembinaan, evaluasi yang diadakan setiap pekan sekali untuk melihat sejauh mana keberhasilah kegiatan belajar mengajar selama seminggu, dan mempersiapkan kegiatan yang akan di lakukan minggu berikutnya. Evaluasi harian juga ada untuk menilai sejauh mana keberhasilan pembelajaran hari ini, apa kendala hari ini dan besok apa yang perlu di perbaiki oleh masing-masing tim dan jenjang (Daeng Risbang, 2016).

Penanaman aspek spiritual dilakukan dalam bentuk kegiatan, seperti pelaksanaan sholat sunah dhuha. Untuk menanamkan kesadaran mereka tentang pentingnya mendekatkan diri dengan yang maha kuasa; kewajiban puasa 3 hari dalam sebulan kepada dewan guru, agenda mabit siswa yang rutin dilakukan sebulan sekali Adapula *i'tikaf*, sebuah kegiatan rutin bagi para guru yang diadakan setiap Ramadhan. *I'tikaf* dilaksanakan untuk memperdalam pemahaman agama Islam. Selain itu, sekolah ini Rutin per semester mengadakan kegiatan dan pelatihan yang bermanfaat bagi orangtua dan siswa yaitu pelatihan pengasuhan dengan menghadirkan pemateri dari skala nasional. Pengasuhan ini merupakan pola pelibatan orang tua murid sebagai bagian dalam pengelolaan kegiatan-kegiatan sekolah. Implikasinya, orang tua murid terlibat secara intensif, terwujud hubungan

emosional antara orangtua murid dan guru, termasuk komunikasi berkesinambungan antara orangtua murid kepada dewan Guru.

Penutup

SDIT Al-Izzah Sorong berusaha untuk merespon setiap perubahan dengan menerima nilai-nilai kebaruan. Termasuk tetap berusaha untuk mempertahankan tradisi kelembagaan pendidikan Islam. Pengelolaan ini diharapkan untuk memenuhi harapan pendirian lembaga. Lembaga Pendidikan Islam Al-Izzah diharapkan mampu menjadi bagian dari pengembangan lembaga di kota Sorong. Sekaligus memberi energi positif untuk memberdayakan potensi murid-murid dari masyarakat di lingkungan masyarakat kota Sorong.

SDIT Al-Izzah menumbuhkan semangat serta optimisme masyarakat kota Sorong untuk menyekolahkan anaknya di institusi pendidikan Islam. Harapan ini terus tumbuh dalam bersamaan dengan ide-ide untuk melakukan inovasi dan prakarsa. Selama ini, pendidikan Islam di kota Sorong hanya dalam bentuk pendidikan di masjid. Sementara pendidikan yang dianggap berkualitas hanya dikelola oleh organisasi dari pemeluk agama lain. Kehadiran SDIT Al-Izzah merupakan alternatif pendidikan keagamaan sehingga keperluan umat Islam dapat terwadahi sesuai dengan kondisi sekitar.

Keywords Memahami Filsafat, Matematika Dan Komputer Adalah Logika

Ilham Djufri

Dosen Akademi Ilmu Komputer (AIKOM) Ternate

Email: ilhamdjufri@rocketmail.com

Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini akan dijelaskan tentang pengertian filsafat, matematika, komputer dan logika, relasi filsafat, matematika, komputer dan logika dalam kajian dan diterapkan pada Komputer. Logika disebut juga "*the calculus of computer science*" karena logika memegang peranan yang sangat penting di bidang ilmu filsafat, matematika dan komputer, disamping komputasi numerik, dan matematika diskrit semuanya berperan dalam pemrograman. Logika merupakan dasar-dasar matematika suatu perangkat lunak, digunakan untuk memformalkan semantik bahasa pemrograman dan spesifikasi program, serta menguji ketepatan suatu program. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya logika dan matematika karena banyak ilmu, khususnya dalam bidang ilmu komputer, yang memerlukan logika untuk berkembang.

Logika dan matematika sendiri juga terus berkembang, mulai dari logika proposional, logika predikat, logika matematika, logika informatika, logika algoritma, pemrograman logika, dan sebagainya. Perkembangan terakhir ilmu logika adalah logika *fuzzy*, atau di Indonesia disebut logika kabur atau logika samar. Implementasi logika fuzzy dapat ditemui pada pengatur suhu udara (AC), mesin pencuci, kulkas, lainnya.

Pengertian filsafat

Kata filsafat populer di Yunani sekitar abad ke-19 sebelum Masehi dengan sebutan *Philosophia* yang terdiri dari dua kata yaitu *Philos* yang berarti cinta dan *Shopia* berarti kebijaksanaan. Jadi, secara etimologis filsafat berarti cinta kebijaksanaan atau kebenaran ketika kebijaksanaan yang artinya kebenaran sejati dan kebenaran yang sesungguhnya bisa juga berarti hasrat atau keinginan yang sungguh-sungguh akan kebenaran sejati.

Kata filosofi kemungkinan pertama kali diungkapkan oleh Pythagoras (570 – 495 SM). Metode yang digunakan antara lain mengajukan pertanyaan, diskusi kritis, dialektika dan presentasi sistematik. Secara historis, filsafat mencakup inti dari semua pengetahuan. Dari zaman filsuf Yunani Kuno seperti Aristoteles hingga abad ke 19, seperti filsafat alam yang melingkupi astronomi, kedokteran, dan fisika. Sebagai contoh, Prinsip matematika filosofi alam karya Newton pada tahun 1687 dikemudian hari diklasifikasikan sebagai buku fisika.

Secara terminologi (istilah) sangat beragam kita temukan pendefinisian tentang filsafat seperti Aristoteles (384 - 322 SM) yang merupakan tokoh Sentral filosof klasik yang menyatakan bahwa filsafat menyelidiki sebab asas segala perwujudan. dan kadang-kadang disamakan dengan pengetahuan tentang wujud atau (*ontology*). Kemudian, Plato (427-347 SM) menyatakan bahwa obyek penemuan kenyataan atau kebenaran absolute (kebenaran mutlak) melalui dialektika (metode pencapaian definisi bagi sebuah konsep dengan cara menguji ciri-ciri umum yang ditemukan).

Pengertian Matematika

Kata “matematika” berasal dari bahasa Yunani yang diartikan sebagai “sains yang bersifat pasti (eksakta), ilmu pengetahuan, atau belajar” juga matematika diartikan sebagai “suka belajar”. Disiplin utama dalam matematika didasarkan pada kebutuhan perhitungan dalam perdagangan, pengukuran tanah dan memprediksi peristiwa dalam astronomi. Ketiga kebutuhan ini secara umum berkaitan dengan ketiga pembagian umum bidang matematika: studi tentang struktur, ruang dan perubahan.

Pelajaran tentang struktur dimulai dengan bilangan, yang sangat umum adalah bilangan natural dan bilangan bulat dan operasi aritmatikanya, yang semuanya itu dijabarkan dalam aljabar. Sifat bilangan bulat yang lebih mendalam dipelajari dalam teori bilangan. Investigasi metode-metode untuk memecahkan

persamaan matematika dipelajari dalam aljabar abstrak, yang antara lain, mempelajari tentang ring dan field, struktur yang menggeneralisasi sifat-sifat yang umumnya dimiliki bilangan. Konsep vektor, digeneralisasi menjadi vektor ruang dipelajari dalam aljabar linier, yang termasuk dalam dua cabang: struktur dan ruang. Dari bukti yang didapat ternyata pendapat bahwa filsafat merupakan ayah atau ibu dari matematik adalah keliru. Matematik itu tidak pernah lahir dari filsafat melainkan berkembang bersama-sama dengan saling memberikan persoalan-persoalan sebagai bahan untuk masuk dan umpan balik.

Landasan matematik kadang-kadang disamakan pengertiannya dengan filsafat matematika. Tetapi sesungguhnya landasan matematik merupakan bidang pengetahuan yang lebih sempit daripada filsafat matematik. Landasan matematik khususnya bersangkutan paut dengan konsep-konsep dan asas-asas fundamental yang digunakan dalam matematik. Dari konsep pokok dan prinsip dasar landasan matematik meneruskan penelaahannya sehingga sampai pada sifat alami dari matematik dan bahkan juga tentang metode matematik. Dengan adanya perluasan pokok soal dan permasalahan yang ditelaah itu dapatlah dimengerti bilamana landasan matematik seolah-olah identik dengan filsafat matematik. Tetapi telah dinyatakan bahwa landasan matematik kalah luas dengan filsafat matematik. Dalam abad 20 ini studi

mengenai sifat alami dari matematik yang terkenal dengan nama logisisme, formalism, dan intuitionisme.

Mazhab logisisme dipelopori oleh Bertrand Arthur William Russell dari Inggris. Dalam 1903 terbitlah buku beliau yang berjudul "The Principles of Mathematics" yang berpegang pada pendapat bahwa matematik murni semata-mata terdiri atas deduksi-deduksi dengan prinsip-prinsip logika dari prinsip-prinsip logika. Menurutnya logika telah mejadi lebih bersifat matematis dan matematik sehingga lebih logis. Akibatnya ialah bahwa kini menjadi sepenuhnya tak mungkin untuk menarik suatu garis diantara keduanya. Sesungguhnya kedua hal itu adalah satu. Mereka berbeda seperti anak dan orang dewasa. Logika merupakan masa muda dari matematika dan matematika merupakan masa dewasa dari logika.

Mazhab landasan matematik formalisme dipelopori oleh ahli matematik besar dari Jerman David Hilbert. Menurut mazhab ini sifat alami dari matematik ialah sebagai sistem lambang yang formal. Matematik bersangkut paut dengan sifat-sifat structural dari simbol-simbol dan proses pengolahan terhadap lambing-lambang. Simbol-simbol dianggap sebagai sasaran yang menjadi objek matematik. Bilangan- bilangan misalnya dipandang sebagai sifat-sifat struktural yang paling sederhana dari benda-benda. Dengan simbolisme abstrak yang dilepaskan dari sesuatu arti tertentu dan hanya menunjukkan bentuknya saja mazhab formalism berusaha menyelidiki struktur dari berbagai system.

Berdasarkan landasan pemikiran itu seorang pendukung mazhab tersebut merumuskan matematik ilmu tentang sistem-sistem formal.

Matematika merupakan pengetahuan yang bersifat sintetik apriori dimana eksistensi matematika tergantung dari pancaindera adalah pendapat dari Immanuel kant. Akhir-akhir ini filsafat kant tentang matematika ini mendapat momentum baru dalam aliran yang disebut intuisisionis dengan eksponen utamanya adalah seorang ahli matematika berkebangsaan belanda bernama Jan Brouwer (1881-1966). Namun dalam aliran ke tiga yang dipelopori oleh David Hilbert (1862-1943) terkenal dengan sebutan kaum formalis. Tesis utama kaum logistik adalah bahwa matematika murni merupakan cabang dari logika. Kaum formalis menolak anggapan kaum logistik ini yang menyatakan bahwa konsep matematika dapat direduksikan menjadi konsep logika. Mereka berpendapat bahwa banyak masalah-masalah dalam bidang logika yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan matematika. Bagi kaum formalis matematika adalah pengetahuan tentang struktur formal dari lambang. Pengetahuan kita tentang bilangan merupakan pengertian rasional yang bersifat apriori yang kita pahami lewat mata penalaran yang memandang jauh kedalam struktur hakikat bilangan namun kaum intuisisionis menentang lewat brouwer bahwa intuisi murni dari berhitung merupakan titik tolak tentang matematika bilangan. Hakikat

sebuah bilangan harus dapat dibentuk melalui kegiatan intuitif dalam berhitung dan menghitung.

Berlawanan dengan mazhab formalisme berkembanglah mazhab landasan matematik intuitionisme yang dipelopori oleh ahli matematik belanda Luitzen Egbertus Jan Brouwer. Beliau berpendirian bahwa matematik adalah sama dengan bagian yang eksak dari pemikiran manusia. Ketepatan dalil-dalil matematik terletak dalam akal manusia dan tidak pada simbol-simbol diatas kertas sebagaimana diyakini oleh mazhab formalisme. Dalam pemikiran mazhab intuitionisme matematik berlandaskan suatu ilham dasar mengenai kemungkinan untuk membangun sebuah seri bilangan yang tak terbatas. Ilham ini pada hakekatnya merupakan suatu aktivita berfikir yang tak tergantung pada pengalaman, bebas dari bahasa dan simbolisme, serta bersifat obyektif.

Kiranya dari pembahasan diatas. Nampak jelas bahwa tidak satupu dari ketiga aliran dalam filsafat matematika ini sepeuhnya berhasil dalam usahanya. Walaupun demikian perbedaan pandangan ini tidak melemahkan perkembangan matematika malah justru sebaliknya dimana satu aliran memberi inspirasi kepada aliran-aliran lainnya dalam titik-titik pertemuan yang disebut Black sebagai kompromi yang bersifat elektik. Kaum logistik mempergunakan system simbol yang diperkembangkan oleh kaum formalis dalam kegiatan analisisnya. Kaum intuisionis memberikan titik tolak dalam mempelajari matematika dalam

perspektif kebudayaan suatu masyarakat tertentu yang memungkinkan diperkembangkannya filsafat pendidikan matematika yang sesuai. Ketiga pendekatan landasan matematika ini, lewat pemahamannya masing-masing, memperkuat matematika sebagai sarana kegiatan berpikir deduktif.

Istilah landasan dalam bidang keilmuan mempunyai makna-makna berlainan. Oleh karena itu untuk kejelasan maknanya kadang-kadang dibubuhi cirinya yang dimaksud. Dalam kaitannya dengan matematik orang menegaskannya dengan istilah “logical foundations of mathematics” (landasan logis matematik). Istilah landasan logis matematik dapat disamakan dengan landasan filsafati seperti misalnya dilakukan oleh filsuf Rudolf Carnap (1891-1970). Dengan landasan logis atau filsafati itu para ahli sesuatu bidang ilmu disadarkan terhadap kemungkinan keterbatasan dan kesalahan dari patokan pikir-patokan pikir yang dipergunakannya sebagai pangkal dari ilmunya.

Phytagoras percaya bahwa angka bukan unsur seperti udara dan air yang banyak dipercaya sebagai unsur semua benda. Pandangan Phytagoras mengungkapkan bahwa harmoni terjadi berkat angka. Bila segala hal adalah angka, maka hal ini tidak saja berarti bahwa segalanya bisa dihitung, dinilai dan diukur dengan angka dalam hubungan yang teratur, melainkan berkat angka-angka itu segala sesuatu menjadi harmonis, seimbang. dengan kata lain tata tertib terjadi melalui angka-angka.

Alam semesta diatur secara teratur (Phytagoras). Hal yang mengagumkan dari alam adalah disiplinnya yang patuh mengikuti hukum-hukum matematis. Misalnya saja bumi mengelilingi matahari selama 365 hari, bulan mengelilingi bumi selama 30 hari, bumi berotasi pada sumbunya selama 24 jam setiap harinya. Angka-angka ini tidak pernah berubah seaneh hati bulan dan bumi. semuanya teratur mengikuti ukuran yang telah ditentukan. dan kesadaran akan keteraturan inilah yang merupakan hakekat mengapa perlu belajar matematika. Matematika itu bukan hanya menyampaikan informasi secara jelas namun juga singkat.

Pengertian Komputer

Komputer berasal dari kata *Computare* yang artinya menghitung. Secara bahasa komputer didefinisikan sebagai alat yang melakukan proses perhitungan aritmatika. Secara umum, Komputer didefinisikan sebagai seperangkat alat elektronik yang menghubungkan komponen satu dengan yang lainnya sehingga menghasilkan informasi yang sebelumnya telah diolah terlebih dahulu.

Komputer terdiri dari tiga elemen yakni: **Hardware** (perangkat keras) seperti Processor, Harddisk, RAM, CPU, Motherboard. **Software** (perangkat lunak) seperti aplikasi-aplikasi dan juga Sistem Operasi yang akan bekerja sesuai perintah yang diberikan oleh **Brainware** (pengguna).

Pengertian Komputer Menurut Para Ahli

- **Robert H Blissmer**, Komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi.
- **V.C Hamacher**, Komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output berupa informasi.
- **Donald H. Sanders**, Komputer adalah system elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya dan menghasilkan output dibawah pengawasan suatu langkah-langkah, instruksi-instruksi program yang tersimpan dimemori
- **Gordon B. Darvis**, Komputer adalah tipe khusus alat penghitung yang mempunyai sifat tertentu yang pasti.
- Dari pengertian-pengertian menurut para ahli tersebut dapat disimpulkan Komputer adalah perangkat elektronik yang dapat menerima input data, mengolah data dan

menghasilkan output dalam bentuk informasi, berupa gambar, teks, suara ataupun video.

Perkembangan Komputer

Secara umum, perkembangan komputer dibagi menjadi 5 generasi yaitu:

1. *Komputer Generasi Pertama (1937 - 1946)*

Komputer generasi pertama diawali oleh Dr. John V. Atanasoff dan Clifford Berry yang bernama komputer Atanasoff-Berry (ABC). Kemudian tahun 1943, perkembangan komputer di Inggris dituntut oleh kepentingan perang dunia II (*World Wide War II*) bernama komputer Colossus. Komputer ini digunakan untuk memecah kode mesin cipher Lorenz SZ-40, merupakan mesin yang digunakan Jerman untuk berkomunikasi jarak jauh menggunakan sinyal telegraf. Tahun 1943, dibuat komputer digital pertama dengan tujuan umum yaitu ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer). Komputer ini beratnya 30 ton, dan memiliki 18.000 tabung vakum sebagai unit pemrosesan. Ketika komputer ini dinyalakan untuk pertama kalinya, seluruh lampu di bagian Philadelphia meredup. Komputer generasi pertama adalah komputer yang dapat melakukan satu tugas, dan tidak memiliki sistem operasi.

2. *Komputer Generasi Kedua (1947 - 1965)*

Perkembangan komputer generasi kedua ditandai dengan penemuan transistor yang menggantikan tabung vakum sebagai

unit pemrosesan. Transistor pertama kali ditemukan oleh Dr. John bardeen, Dr. walte H.Brattain, dan Dr william Scockley pada tahun 1947. Hal ini menyebabkan ukuran komputer menjadi jauh lebih kecil, lebih ringan, dan lebih hemat daya. Pada tahun 1951, komputer pertama yang menggunakan transistor dipublikasi untuk tujuan komersial yang bernama UNIVAC 1 (Universal Automatic Computer 1). Kemudian tahun 1953, perusahaan teknologi IBM, membuat jejak komputer secara komersial dengan seri 650 dan 700 di pasaran. Komputer generasi kedua adalah perkembangan komputer yang pesat mulai dari penggunaan transistor, penemuan memori komputer, sistem operasi, dan penciptaan lebih dari 100 bahasa pemrograman.

3. *Komputer Generasi Ketiga (1965 - 1971)*

Penemuan sirkuit terintegrasi (IC) merupakan cikal bakal dari perkembangan komputer generasi ketiga. Hal ini menyebabkan ukuran komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, lebih kuat, dan dapat menjalankan beberapa tugas sekaligus (*multitasking*).

4. *Komputer Generasi Keempat (1971 - 1980)*

Perkembangan komputer generasi keempat dimulai tahun 1971 yang ditandai dengan penggunaan Very Large Scale Integrated (VLSI) pada perangkat komputer. Hal ini dikenal dengan sebutan mikroprosesor, yang merupakan sebuah chip kecil terdiri dari ribuan transistor. Hal ini, diawali oleh perusahaan circuit yaitu INTEL, yang meluncurkan chip

mikroprosesor pertamanya. Sehingga ukuran komputer bisa menjadi sangat kecil, dapat menempati sebuah meja kecil.

Pada tahun 1980, perusahaan Microsoft memperkenalkan sistem operasi komputer yang dalam media penyimpanan disket yang disebut MS-DOS (Microsoft Disk Operating System). Penggunaan komputer pada saat ini hanya terbatas untuk lingkungan perusahaan dan lembaga pemerintahan. Kemudian tahun 1981, perusahaan IBM memperkenalkan komputer untuk penggunaan pribadi. Hal ini menyebabkan penggunaan komputer semakin luas, karena semua orang dapat menggunakan komputer secara pribadi.

Hubungan Filsafat dengan Matematika

Matematika dan filsafat mempunyai sejarah keterikatan satu dengan yang lain sejak jaman Yunani Kuno. Matematika di samping merupakan sumber dan inspirasi bagi para filsuf, metodenya juga banyak diadopsi untuk mendeskripsikan pemikiran filsafat. Kita bahkan mengenal beberapa matematikawan yang sekaligus sebagai filsuf, misalnya Descartes, Leibniz, Bolzano, Dedekind, Frege, Brouwer, Hilbert, Gödel, and Weyl. Salah satu titik krusial yang menjadi masalah bersama oleh matematika maupun filsafat misalnya persoalan pondasi matematika. Baik matematikawan maupun para filsuf bersama-sama berkepentingan untuk menelaah apakah ada pondasi matematika ? Jika ada apakah pondasi itu bersifat tunggal atau

jamak ? Pada abad 20, Cantor diteruskan oleh Sir Bertrand Russell, mengembangkan teori himpunan dan teori tipe, dengan maksud untuk menggunakannya sebagai pondasi matematika. Namun kajian filsafat telah mendapatkan bahwa di sini terdapat paradoks atau inkonsistensi yang kemudian membangkitkan kembali motivasi matematikawan di dalam menemukan hakekat dari sistem matematika.

Berdasarkan perspektif epistemologi, kebenaran matematika terbagi dalam dua kategori, yaitu pandangan absolut dan pandangan fallibilis. Absolutis memandang kebenaran matematika secara absolut, bahwa „mathematics is the one and perhaps the only realm of certain, unquestionable and objective knowledge“, sedangkan menurut fallibilis mathematicak truth is corrigible, and can never regarded as being above revision and correction“ (Ernest, 1991).

Menurut Woozley (dalam Ernest, 1991), pengetahuan terbagi dalam dua kategori, yaitu pengetahuan a priori dan pengetahuan a posteriori (empirical). Pengetahuan a priori memuat proposisi yang didasarkan atas, tanpa dibantu dengan observasi terhadap dunia. Penalaran di sini memuat penggunaan logika deduktif dan makna dari istilah-istilah, secara tipikal dapat ditemukan dalam definisi. Secara kontras pengetahuan posteriori memuat proposi yang didasarkan atas pengalaman, yaitu berdasarkan observasi dunia.

Absolutis memandang pengetahuan matematika didasarkan atas dua jenis asumsi; matematika ini berkaitan dengan asumsi dari aksioma dan definisi, dan logika yang berkaitan dengan asumsi aksioma, aturan menarik kesimpulan dan bahasa formal serta sintak. Ada lokal (micro) dan ada global (macro) asumsi, seperti deduksi logika cukup untuk menetapkan kebenaran matematika.

Menurut Wilder (dalam Ernest, 1991), pandangan absolutis menemui masalah pada permulaan permulaan abad 20, ketika sejumlah antinomis dan kontradiksi yang diturunkan dalam matematika. Russel telah menunjukkan bahwa sistem yang dipublikasikan Gottlob Frege tahun 1879 dan 1893 tidak konsisten. Kontradiksi lainnya muncul dalam teori himpunan dan teori fungsi. Penemuan ini berakibat terkuburnya pandangan absolutis tentang matematika. Jika matematika itu pasti dan semua semua teoremanya pasti, bagaimana dapat terjadi kontradiksi di antara teorema-teorema itu ?

Tesis dari fallibilis memiliki dua bentuk yang ekuivalen, satu positif dan satu negatif. Bentuk negatif berkaitan dengan penolakan terhadap absolutis; pengetahuan matematika bukan kebenaran yang mutlak dan tidak memiliki validitas yang absolut. Bentuk positifnya adalah pengetahuan matematika dapat dikoreksi dan terbuka untuk direvisi terus menerus.

Plato (427-349 SM) merupakan seorang realis, dia mempercayai bahwa realitas itu ada dan tidak terikat pikiran

manusia. Suatu sistem dikatakan benar jika suatu pernyataan menjelaskan keadaan sesungguhnya dari realitas yang terbebas dari pikiran. Pernyataan Plato yang terkenal adalah “ Sesuatu adalah saya sebagaimana hal itu terjadi pada saya, dan sesuatu itu adalah kamu sebagaimana hal itu terjadi pada kamu.

Plato meyakini bahwa benda-benda di alam semesta terbagi ke dalam dua kelas, yaitu yang berbentuk materi dan non materi. Benda-benda seperti matahari, pohon, binatang berbentuk materi, sementara kebaikan, keburukan, jiwa seorang manusia termasuk kaategori non materi. Suatu gambar empat persegi panjang termasuk kategori materi, tetapi persegi panjang itu sendiri termasuk ke dalam kategori non materi.

Aristoteles (384-322 SM) seorang murid dari Plato selama duapuluh tahun, tetapi ia sendiri tidak setuju dengan Plato mengenai hakekat matematika. Bagi dia kata “ dua” bukan suatu kata benda untuk suatu obyek abstrak yang bebas dari obyek fisik, tetapi suatu keterangan merumuskan suatu obyek fisik, misal panjangnya dua meter (Anglin, 1994).

Aristoteles meletakkan ketakberhinggaan pada tempatnya begitu kokoh, sehingga hampir setiap orang tidak bisa mempertimbangkan secara langsung hingga abad ke IX. Pendekatan yang digunakan adalah fragmatik, dengan menyatakan bahwa ketakhinggaan pasditi ada, sebab waktu muncul tanpa awal dan tanpa akhir, demikian juga dengan bilangan. Andaikata ada ada bilangan yang paling besar disebut

dengan „maximal" (max), kemudian bagaimana dengan $\max+1$ atau $\max + 2$? tetapi sebaliknya ketakhinggaan tidak ada di dunia nyata, andaika ada, contohnya tubuh manusia juga tak berhingga, itu tak terbatas pada sebuah tubuh.

Hubungan Logika dan Matematika

Dalam berbagai referensi dikatakan bahwa logika lahir bersama-sama dengan lahirnya filsafat di Yunani. Logika sebagai cabang filsafat adalah cabang filsafat tentang berpikir. Logika membicarakan tentang aturan-aturan berpikir agar dengan aturan-aturan tersebut dapat mengambil kesimpulan yang benar. Dengan mengetahui cara atau aturan-aturan tersebut dapat menghindarkan diri dari kesalahan dalam mengambil keputusan. Menurut Louis O. Kattsoff, logika membicarakan teknik-teknik untuk memperoleh kesimpulan dari suatu perangkat bahan tertentu dan kadang-kadang logika didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan tentang penarikan kesimpulan.

Logika disebut juga *“the calculus of computer science”* karena logika memegang peranan yang sangat penting di bidang ilmu filsafat, matematika dan komputer, disamping komputasi numerik, dan matematika diskrit semuanya berperan dalam pemrograman. Logika merupakan dasar-dasar matematika suatu perangkat lunak, digunakan untuk memformalkan semantik bahasa pemrograman dan spesifikasi program, serta menguji ketepatan suatu program. Hal ini menunjukkan betapa

pentingnya logika dan matematika karena banyak ilmu, khususnya dalam bidang ilmu komputer, yang memerlukan logika untuk berkembang.

Logika dan matematika sendiri juga terus berkembang, mulai dari logika proposional, logika predikat, pemrograman logika, dan sebagainya. Perkembangan terakhir ilmu logika adalah logika *fuzzy*, atau di Indonesia disebut logika kabur atau logika samar. Implementasi logika fuzzy dapat ditemui pada pengatur suhu udara (AC), mesin pencuci, kulkas, lainnya.

Menurut BETRAND RUSSEL matematika adalah ilmu yang menyangkut deduksi logis tentang akibat-akibat dari pangkal fikir umum semua penalaran atau Logika adalah masa muda matematika dan matematika adalah masa dewasa logika. Konsep matematika dapat diturunkan dari konsep - konsep logika dengan melalui batasan - batasan yang jelas. Dalil - dalil matematika dapat diturunkan dari aksioma-aksioma logika dengan perantara deduksi logis secara murni. Ini berkaitan dengan konsepsi matematika sebagai ilmu formal, ilmu tentang bilangan dan ruang, ilmu tentang besaran dan keluasan, ilmu tentang hubungan, pola bentuk, dan rakitan juga sebagai ilmu yang bersifat abstrak dan deduktif.

Hubungan Logika, Filsafat, Matematika dan Komputer

Logika, filsafat dan matematika sama-sama memiliki peranan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan karena

ketiganya memiliki sinergi dalam objek maupun kajiannya masing-masing. Dalam filsafat banyak digunakan penalaran-penalaran logika matematika untuk menemukan suatu kebenaran. Sedangkan epistemologi yang dihasilkan dari proses filsafat akan dikembangkan dengan pemikiran matematika. Sinergi ini akan selalu membawa kemajuan bagi ilmu pengetahuan di masa yang akan datang. Yang perlu dilakukan adalah lebih mengembangkan imajinasi dan daya kreasi yang akan berujung pada penemuan-penemuan baru.

Dalam dunia pendidikan, logika, filsafat dan matematika (logika matematika), matematika diskrit dan numerik telah menjadi materi pembelajaran wajib sebagai perangkat dasar analisis untuk memahami komputer. Apalagi dizaman modern sekarang ini ilmu teknologi semakin merajai ilmu-ilmu dan penemuan baru di dunia. Teknologi sangat berperan penting bagi masyarakat modern saat ini. Akhir dari tulisan ini saya akan berikan sedikit gambaran tentang kaitan logika sebagai **“Keywords”** untuk memahami Filsafat, matematika dan Komputer. Bila kita berbicara tentang matematika, kita akan banyak berfikir secara logika. Sehingga dalam ilmu matematikapun ada pembelajaran khusus tentang logika yang disebut dengan logika matematika. Dahulu logika dipelajari sebagai salah satu cabang filosofi atau ilmu filsafat. Akan tetapi, sejak tahun 1800an logika dipelajari di bidang matematika dan sekarang ini juga dibidang ilmu komputer. Karena logika

mempengaruhi ilmu komputer dibidang perangkat keras maupun perangkat lunaknya. Logika secara umum berhubungan dengan penalaran deduktif (deductive reasoning) yang hanya secara umum mengambil kesimpulan dari premis-premisnya. Berbeda dengan penalaran induktif (inductive reasoning), yakni studi tentang pengambilan kesimpulan umum yang diperoleh dari suatu penelitian atau observasi.

Istilah logika matematika diperkenalkan kali pertama oleh Giuseppe Peano (1858-1932), seorang ahli matematika dari Italia yang memublikasikan bukunya di tahun 1887 yang membahas tentang logika matematika. Dalam buku tersebut ia juga memperkenalkan symbol-simbol modern union dan intersection untuk kali pertama. Boleh dikatakan Peano adalah penemu logika matematika dan teori himpunan. Hubungan logika matematika dengan ilmu komputer adalah, logika matematika merupakan dasar-dasar yang penting bagi seseorang jika ingin belajar algoritma, teknik-teknik pemrograman berstruktur, dan teknik pemrograman berorientasi obyek yang dalam penulisan programnya sangat erat kaitannya dengan logika.

Logika dan matematika dalam ilmu komputer digunakan sebagai dasar dalam belajar bahasa pemrograman, struktur data, kecerdasan buatan, teknik/sistem digital, basis data, teori komputasi, rekayasa perangkat lunak, sistem pakar, jaringan syaraf tiruan, dan lain-lainnya. Salah satu contoh yang populer adalah sistem digital, yaitu bidang ilmu yang didasari oleh logika

untuk membuat gerbang logika (*logic gates*) dan arsitektur komputer sebagai inti mikroprosesor, otak komputer atau CPU (*central processing unit*). Arsitektur sistem komputer tersusun atas rangkaian logika 1 (true) dan 0 (false) yang dikombinasikan dengan sejumlah gerbang logika AND, OR, NOT, XOR, dan NAND. Program komputer berjalan diatas struktur penalaran yang baik dari suatu solusi terhadap suatu permasalahan dengan bantuan komponen program If.. Then.. Else, For..To..do, While, Case...Of.

Penerapan Logika Biner Pada Komputer

Logika biner berurusan dengan Variabel-variabel biner yang mempunyai dua nilai diskrit dan dengan operasi-operasi logika matematika yang diterapkan pada variabel-variabel tersebut. Dua nilai diskrit yang dimaksud mungkin disebut dengan nama-nama yang berbeda, namun untuk maksud dan tujuan ini akan lebih mudah untuk berfikir tentang istilah-istilah nilai biner dan memasang 1 atau 0 ke masing-masing variabel. Variabel-variabel ditandai dengan huruf-huruf alvabet seperti A, B, C, X, Y dan Z. Selanjutnya notasi akan diperluas dan bisa meliputi string dan huruf-huruf, bilangan- bilangan, dan karakter-karakter khusus. Terhadap variabel-variabel biner terhubung dengan operasi logik pada gerbang logika.

Gerbang Logika (Logic Gates) adalah sebuah entitas untuk melakukan pengolahan input-input yang berupa bilangan biner

(hanya terdapat 2 kode bilangan biner yaitu, angka 1 dan 0) dengan menggunakan Teori Matematika Boolean sehingga dihasilkan sebuah sinyal output yang dapat digunakan untuk proses berikutnya.

Gerbang logika atau gerbang logik adalah suatu entitas dalam elektronika dan matematika Boolean yang mengubah satu atau beberapa masukan logik menjadi sebuah sinyal keluaran logik. Gerbang logika terutama diimplementasikan secara elektronik menggunakan diode atau transistor, akan tetapi dapat pula dibangun menggunakan susunan komponen-komponen yang memanfaatkan sifat-sifat elektromagnetik (relay), cairan, optik dan bahkan mekanik."

Jenis-Jenis Gerbang Logika (Logic Gates)

Ada 7 jenis gerbang logika diantaranya adalah :

1. Gerbang AND : Apabila semua / salah satu input merupakan bilangan biner (berlogika) 0, maka output akan menjadi 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner (berlogika) 1, maka output akan berlogika 1.



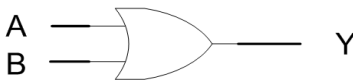
$$Y = A . B$$

Gambar 1. Simbol dan Persamaan Gerbang Logika AND

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Tabel 1 Tabel Kebenaran Gerbang Logika AND

2. Gerbang OR : Apabila semua / salah satu input merupakan bilangan biner (berlogika) 1, maka output akan menjadi 1. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner (berlogika) 0, maka output akan berlogika 0.



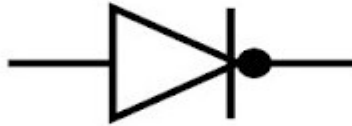
$$Y = A + B$$

Gambar 2. Simbol dan Persamaan Gerbang Logika OR

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Tabel 2. Tabel Kebenaran Logika OR

3. Gerbang NOT : Fungsi Gerbang NOT adalah sebagai Inverter (pembalik). Nilai output akan berlawanan dengan inputnya.



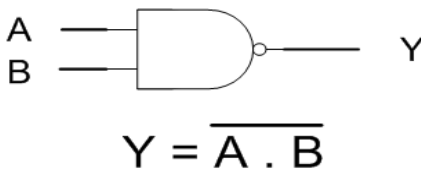
Gambar. Lambang Gerbang Logika NOT

Masukan A	Keluaran F
0	1
1	0

Tabel Kebenaran Gerbang **NOT**

Tabel 3. Tabel Kebenaran Logika NOT

4. Gerbang NAND : Apabila semua / salah satu input bilangan biner (berlogika) 0, maka outputnya akan berlogika 1. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner (berlogika) 1, maka output akan berlogika 0.

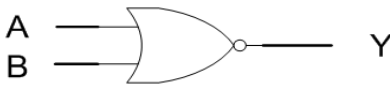


Gambar 4. Simbol dan Persamaan Gerbang Logika NAND

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Tabel 4. Tabel Kebenaran Gerbang Logika NAND

5. Gerbang NOR : Apabila semua / salah satu input bilangan biner (berlogika) 1, maka outputnya akan berlogika 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner (berlogika) 0, maka output akan berlogika 1.



$$Y = \overline{A + B}$$

Gambar 5. Simbol dan Persamaan Gerbang Logika NOR

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Tabel 5. Tabel Kebenaran Gerbang Logika NOR

6. Gerbang XOR : Apabila input berbeda (contoh : input A=1, input B=0) maka output akan berlogika 1. Sedangkan jika input adalah sama, maka output akan berlogika 0.



$$Y = A \oplus B$$

Gambar 6. Simbol dan Persamaan Gerbang Logika XOR

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Tabel 6. Tabel Kebenaran Gerbang Logika XOR

7. Gerbang XNOR : Apabila input berbeda (contoh : input A=1, input B=0) maka output akan berlogika 0. Sedangkan jika input adalah sama, maka output akan berlogika 1.



$$Y = A \oplus B$$

Gambar 7. Simbol dan Persamaan Gerbang Logika XNOR

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Tabel 7. Tabel Kebenaran Gerbang Logika XNOR

Untuk masing-masing kombinasi nilai-nilai dari variabel biner seperti A dan B, ada nilai Y yang ditentukan dengan definisi operasi logik. Definisi pada daftar dalam format yang kompak pada tabel kebenaran (*truth table*). Satu tabel kebenaran untuk satu tabel operasi adalah satu tabel kombinasi variabel-variabel biner yang memperlihatkan antara hubungan antara nilai-nilai yang diambil variabel dan nilai-nilai hasil operasi. Tabel-tabel kebenaran yang diperlihatkan semua kombinasi dari nilai-nilai untuk dua variabel dan hasil-hasil operasi, seperti pada tabel kebenaran mendemonstrasikan secara jelas definisi dari setiap operasi.

Pengembangan Kawasan Pertanian Pedesaan Berbasis Potensi Ekonomi Lokal

Abdul Karim

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMKOP, Makassar

Email: abdul.karim8284@gmail.com

Pendahuluan

Pengembangan daerah yang mayoritas penduduknya tergantung pada sektor pertanian merupakan suatu kebijakan pembangunan pedesaan yang diadakan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan industri berdasarkan potensi ekonomi lokal pedesaan. Sasaran utama yang ingin dicapai melalui penerapan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja dan kebutuhan yang tidak terpenuhi untuk pakaian dan makanan untuk nilai produksi berbasis konsumsi dan potensi sektor basis daerah pedesaan, serta realisasi keharmonisan. pembangunan ekonomi antar daerah, antara kota dan daerah pedesaan di berbagai daerah diseluruh penjuru tanah air.

Kerangka kerja konsep pertumbuhan ekonomi lokal diarahkan untuk meningkatkan fungsi kelembagaan dan peran serta organisasi ekonomi masyarakat pedesaan. Hal ini dapat

dikatakan bahwa pembangunan pedesaan hanya dapat berkelanjutan jika fasilitas dan infrastruktur yang diberikan mampu menjadi pemicu dalam mendorong kegiatan produksi dan pasar di daerah pedesaan. Daerah pedesaan diidentifikasi sebagai pemasok utama produk pertanian dalam bentuk produk primer pada seluruh penduduk yang ada di kota secara mayoritas. (Kedaulatanpangan.org, 2020).

Dengan demikian potensi daerah pedesaan, khususnya keberadaan desa-desa potensial mutlak untuk dikembangkan untuk mendukung kebutuhan bahan baku industri. Pengembangan potensi daerah pedesaan sebagai sumber daya utama produksi pertanian akan mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan ekonomi lokal. Pengembangan pertanian adalah sistem yang menunjuk solusi yang saling terkait dan efektif dalam cara menetapkan opsi faktor penghambat yang paling menentukan untuk melakukan upaya terbatas dan memberikan hasil yang optimal. Pengembangan daerah pertanian merupakan bagian dari implementasi kebijakan pembangunan nasional yang diterjemahkan hingga tingkat kabupaten.

Memasuki Maret 2016 penduduk miskin tercatat 28,01 juta atau 10,86%. Kemudian Maret 2017 penduduk miskin tercatat 27,77 juta atau 10,64%. Terakhir pada Maret 2018 jumlah penduduk miskin tercatat 25,95 juta orang atau 9,82%. Dari data juga disebutkan jumlah orang miskin di daerah perkotaan periode 2018 tercatat 10,14 juta turun 128,2 ribu

orang dibandingkan periode September 2017 sebesar 10,27 juta. Sementara itu di daerah perdesaan turun sebanyak 505 ribu orang (dari 16,31 juta orang pada September 2017 menjadi 15,81 juta orang pada Maret 2018). (BPS, 2018).

Sedangkan dari segi persentase penduduk miskin di daerah perkotaan tercatat 7,02% lebih rendah dibanding periode September 2017 sebesar 7,26%. Sementara itu, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2017 sebesar 13,47%, turun menjadi 13,20% pada Maret 2018. Sumber data BPS untuk mengukur data kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran. Dengan pendekatan ini dapat dihitung Headcount Index, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. (deticom, 28 Juli 2018).

Pembangunan Desa Melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia

Pemerintah desa sebagai ujung tombak pemerintah pusat dalam sistem pemerintahan mempunyai peran penting dalam meningkatkan pembangunan nasional. Berbagai persoalan pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam meningkatkan pembangunan secara merata dan sistematis. Banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah pusat dalam

peningkatan ekonomi, karena semakin ketatnya persaingan ekonomi global dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya, inflasi masih menghantui perekonomian nasional, penurunan nilai mata uang terus merangkak dan problematika lainnya yang saling bergesekan, sehingga berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Untuk meningkatkan pembangunan nasional harus dimulai dari bawah, yaitu pembangunan secara *bottom up*. Pembangunan nasional bisa berhasil jika dilakukan dengan mengintegrasikan pembangunan pedesaan sebagai ujung tombak pemerintah pusat. Melalui UU Desa tahun 2014, pemerintah sudah menyiapkan berbagai program pendampingan dan pembangunan desa secara menyeluruh. Melalui dana Rp. 1 Miliar yang dicanangkan pemerintah untuk pembangunan desa menjadi angin segar bagi pemerintah desa dalam mengoptimalkan pembangunan desanya.

Diharapkan dengan munculnya UU 6/2014 dapat memberikan suntikan semangat dalam meningkatkan ekonomi desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Tidak hanya itu, pemerintah pusat juga sudah menyiapkan berbagai instrument lain yang mendukung pembangunan desa secara komprehensif dan totaliter. Pendampingan terhadap pemerintah desa, pengelolaan dana desa, reformasi birokrasi desa, dan peningkatan infrastruktur desa juga menjadi rencana jangka panjang dalam pembangunan desa. Sejatinya, pembangunan desa menjadi motor penggerak bagi pembangunan nasional. Menghadapi MEA

(Masyarakat Ekonomi ASEAN) dan AFTA (ASEAN Free Trade Area) Indonesia dituntut harus siap dengan berbagai konsekuensinya. (Word Bank. 2004).

Serban sumber daya manusia asing dan perdagangan semakin ketat melalui kompetensinya. Membutuhkan kematangan dan kesiapsiagaan dengan membangun pondasi pembangunan secara maksimal. Desa mempunyai peran utama dalam menghadapi MEA dan AFTA. Pembangunan desa yang meningkat dan perekonomian desa yang semakin baik memberikan implikasi terhadap kemandirian desa. Kemandirian desa sebagai target penting dalam pembangunan desa, sehingga dengan desa yang mandiri memberikan dampak positif terhadap pembangunan sumber daya manusia desa. Peningkatan sumber daya manusia desa mempunyai feed back bagi pembangunan desa yang semakin baik dan berkualitas. Desa yang mandiri yang dikelola oleh sumber daya manusia yang berkualitas memberikan dampak kualitas pada pembangunan desa, meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, meminimalisir migrasi dari desa ke kota, penguatan terhadap kesehatan masyarakat, dan dampak yang diharapkan, yaitu terhadap pembangunan secara nasional. Word Bank (2004) menyatakan bahwa rendahnya investasi dipengaruhi oleh rendahnya infrastruktur dan sarana dan prasarana publik, sehingga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan integrasi ekonomi tidak berjalan dengan baik, (Karim, A. 2019).

Oleh karena itu, untuk meningkatkan pembangunan desa sesuai dengan UU Desa salah satunya adalah dengan melakukan terobosan melalui pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes dirancang untuk meningkatkan ekonomi desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. BUMDes sebagai lumbung ekonomi desa harus dilakukan secara integrasi antara pemerintah pusat, pemerintah desa dan masyarakat desa. BUMDes bisa saja menjadi sentral ekonomi pedesaan, sehingga dapat menghasilkan produk unggulan desa yang dapat dipasarkan ke dunia internasional. Banyak potensi dan sumber daya desa yang tidak teridentifikasi secara baik dan tidak terpetakan secara optimal, sehingga potensi desa hanya menjadi konsumsi penduduk desa tanpa ada nilai yang dapat dikembangkan menjadi sumber peningkatan ekonomi desa. Oleh karena itu, Program kerja pemerintah dengan Nawacita dan Kabinet Kerja, Kerja, dan Kerja dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sehingga kemandirian desa, peningkatan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat desa sudah dapat dinikmati. Pembangunan nasional dikatakan berhasil jika pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat tercapai dengan baik (Zulkarnaen, Reza M. 2016).

Kerjasama Potensi Ekonomi Berdasarkan Sektor Kerjasama Ekonomi

Sektor-sektor Ekonomi memiliki peranan besar karena saling terkait untuk memecahkan permasalahan yang ada. Beberapa potensi pengembangan ekonomi di wilayah pedesaan, diantaranya: **Pertama**, perekonomian masyarakat pertanian, peternakan dan perkebunan, sektor pertanian menjadi sektor yang memiliki kontribusi besar seiring dengan program pemerintah dalam pertanian ada program padi, jagung dan kedelai, dalam peternakan ada program Sapi Betina Wajib Bunting dan perkebunan. **Kedua**, perekonomian masyarakat, sektor industri dan jasa menjadi sektor yang memiliki kontribusi besar di pengembangan usaha produktif masyarakat. **Ketiga**, kelestarian lingkungan juga tidak lepas dari peran serta dan keterlibatan sektor industri dimana biasanya limbah industri dibuang ke perairan. (Zulkarnaen, Reza M. 2016).

Perlunya infrastruktur pendukung juga menjadi hal penting untuk dapat mengembangkan wilayah dan menjaga kelestarian lingkungan. Untuk itu, kerjasama lintas sektor sangat perlu diperhatikan karena masing-masing sektor memiliki kepentingannya sendiri-sendiri. Masing-masing sektor harus saling mendukung. Peran BUMDes dalam hal ini sangat besar agar terjadi sinergi yang baik pada pengembangan setiap sektor, sehingga akan terbentuk lembaga bisnis yang optimal dengan menciptakan keuntungan yang maksimal.

1. Kerjasama Antar wilayah

Setiap kabupaten yang ada terbagi menjadi dua kawasan besar, yakni pesisir dan daratan. Berkaitan dengan hal ini, maka wilayah yang termasuk dalam suatu kawasan (adanya homogenitas baik secara ekologis maupun ekonomis) haruslah saling bekerjasama untuk meminimalisir permasalahan yang terjadi. Kerjasama antar wilayah dapat digalang melalui pembentukan forum kerjasama atau forum komunikasi antar pemerintah desa yang memiliki kawasan pesisir dan laut dengan kawasan daratan tentang pemanfaatan sumberdaya lokal sesuai dengan semangat otonomi daerah.

2. Kerjasama Antar Aktor (*Stakeholders*)

Upaya pengurangan kesenjangan sektoral dan daerah jelas memerlukan strategi khusus bagi penanganan secara komprehensif dan berkesinambungan. Untuk itu, diperlukan adanya kebijakan dari pemerintah desa untuk menghubungkan persoalan kemiskinan dan kesenjangan sektoral dan daerah tersebut, melalui mekanisme kerjasama antar stakehokders yang melibatkan unsur-unsur masyarakat, pihak swasta, dan pemerintah. Terobosan pemikiran bagi percepatan pembangunan dan pengembangan ekonomi lokal yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses dan pelaksanaan pengelolaan.

Upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sektoral di daerah tersebut yang berintikan suatu paradigma

baru, dimana inisiatif pembangunan desa tidak lagi digulirkan dari pusat, namun merupakan inisiatif lokal untuk memutuskan langkah yang terbaik dalam mengimplementasikan rencana pengelolaan kawasan dan rencana aksi yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas yang dimiliki. Dengan adanya badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan mampu mengembangkan potensi ekonomi yang ada di desa wilayah setiap kabupaten. (BUMDes.id, 2019).

Salah satu aktor kunci dalam kerangka pembangunan kawasan perdesaan adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan lembaga ekonomi lokal lainnya seperti lumbung pangan. Secara kolektif, BUMDes antar desa, seharusnya menjadi lokomotif bagi implementasi dan pengawalan pembangunan di tingkat desa dan kawasan. Sayangnya, hingga saat ini, upaya membangun kemandirian ekonomi melalui pengembangan kawasan perdesaan dengan BUMDes dan lembaga ekonomi lokal sebagai lokomotifnya, belum berjalan secara optimal.

Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar,

akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian. Berdasarkan asumsi itulah maka sudah seharusnya eksistensi desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat, (Karim, A. 2019).

BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDES adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Dari total desa yang ada sebanyak 74.910 jumlah desa baru sekitar 247 desa atau sekitar 0.42 % yang berjalan secara maksimal BUMDes nya di seluruh Indonesia. Jika dilihat dari potensinya, hampir semua desa yang ada memiliki potensi besar untuk mengekskiskan BUMDes sebagai

penampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dan lembaga pelayanan publik masyarakat. (Karim, Abdul. 2019).

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan setiap tahun mengucurkan anggaran yang begitu besar kepada seluruh desa tanpa terkecuali. Akan tetapi masih begitu dominan desa yang belum mampu menjalankan keuangannya secara maksimal dan masih tergolong kategori desa yang belum efektif dalam pengembangan seluruh potensi ekonomi pada setiap desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Keberadaan BUMDes untuk mewujudkan perekonomian desa yang Mandiri sangat diperlukan.

Melalui BUMDes diharapkan antar lembaga yang ada di masyarakat saling bersinergi untuk lebih maksimal menciptakan kesejahteraan masyarakat yang setara. Bagi pemerintah desa dan lembaga pedesaan dalam membentuk pengelolaan BUMDes supaya segera lebih efektif dalam menghimpun unit-unit usaha dari masyarakat dan pengelolaan aset-aset desa agar tujuan dari BUMDES untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang merata. Bagi pemerintah pusat supaya terus menjalankan kebijakan BUMDes ini, kemudian member pengawasan serta pelatihan bagi desa-desa dan tetap mengacu pada kesejahteraan masyarakat desa. Karena kebijakan seperti inilah yang lebih efektif diterapkan di tingkat desa, suatu lembaga usaha ekonomi yang berbadan hukum yang dikelola seluruhnya oleh masyarakat desa dan hasilnya untuk masyarakat itu sendiri.

Penerapan Model Umkm Digital BUMDes

BUMDes terdapat dimasing-masing desa dalam suatu kabupaten, sebelumnya sudah dijabarkan pembentukan BUMDes dalam bentuk hukum dan diharapkan bentuk ini bisa meluas keseluruhan desa-desa yang ada di seluruh kabupaten. Jika BUMDes primer terbentuk dan berjalan dimasing-masing Desa, maka akan mudah untuk mensinergikan pembentukan BUMDes yang sekunder berbasis Kabupaten. Dengan pola BUMDes pada dasarnya seluruh kegiatan yang diperlukan untuk mendukung pengembangan BUMDes dilakukan secara berjenjang dari tingkat daerah, wilayah, nasional dan bahkan internasional.

Fungsi-fungsi kegiatan pemusatan pengembangan UMKM diantaranya: **Pertama**, bidang pembiayaan meliputi bidang keuangan yang terdiri atas penghimpunan dan penyaluran dana melalui silang pinjam dan pengelolaan resiko. **Kedua**, bidang non jasa keuangan yang terdiri atas konsultasi manajemen simpan pinjam, pendidikan dan pelatihan, akuntansi dan audit, pengadaan sarana usaha dan audit. **Ketiga**, pengembangan usaha lainnya seperti pengembangan unit bisnis seperti jasa transportasi, komunikasi dan lainnya. (Deticom, 2020).

Keunggulan BUMDes sebagai model pemusatan pengembangan ekonomi adalah: (1) Struktur dan sistemnya telah tersedia, baik secara lokal, nasional maupun internasional sehingga tinggal masalah penerapan. (2) Penerapan BUMDes sebagai model pemusatan lebih menjamin penerapan nilai-nilai

dan prinsip-prinsip ekonomi masyarakat pada tingkat desa, sehingga lebih menjamin terwujudnya cita-cita peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi anggota BUMDes. Kedepan harapan bahwa BUMDes mempunyai peran yang lebih dalam pengembangan lembaga berbasis teknologi, yang dikembangkan adalah berbasis *Financial Technology* atau dikenal dengan *Fintech*.

Pengembangan *Fintech* untuk BUMDes berdasarkan dua pendekatan yakni, *pertama* dari sisi pasiva pendekatan dilakukan lebih kepada pihak eksternal seperti lembaga atau individu dengan pendekatan *Financial Technology* lembaga BUMDes bisa berpeluang mendapatkan suntikan dana dari lembaga atau individu. Pendekatan *kedua*, dari sisi aktiva model *Financial Technology* diterapkan kepada para anggota atau BUMDes dan kemudian BUMDes melanjutkan atau mengucurkan dari yang bersumber dari induk kepada sektor riil atau Usaha Mikro dan Kecil. Karena langsung ke sektor riil maka mitigasi risiko diperlukan, agar perlindungan dana pengguna sangat perlu diperhatikan terhadap potensi kehilangan maupun penurunan kemampuan finansial baik akibat penyalahgunaan, penipuan, maupun *force majeure*.

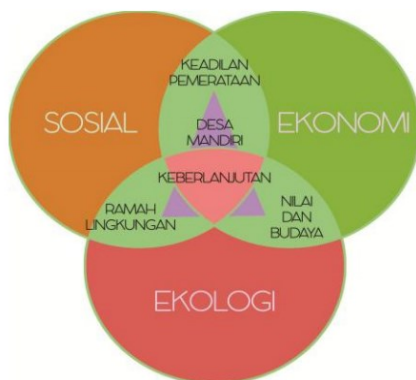
Pendekatan yang dilakukan bahwa dari segi pasiva bisa permodalan dan pembiayaan, dari segi pembiayaan, *Financial Technology* yang dibangun berasal dari dana BUMDes ke Usaha Mikro dan Kecil pemberian dana dalam bentuk pembiayaan

bahkan UMK bisa mendapatkan permodalan dari *crowdfunding* yang dikembangkan oleh UMK. Dan jika usaha ini berjalan lancar dan menghasilkan laba maka yang harus dilakukan UMK adalah mengalokasikan asset usaha ke asset yang produktif seperti tabungan, surat berharga atau model investasi lainnya.

Klasifikasi Dan Status Desa

Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa menjadi lima status yakni Desa sangat tertinggal, Tertinggal, Berkembang, Maju, dan Mandiri. Klasifikasi dalam lima status itu untuk mempertajam penetapan status perkembangan desa sekaligus sebagai rujukan intervensi kebijakan. Status Desa Tertinggal misalnya dibagi menjadi dua status yakni Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal. Asumsi yang ingin dibangun, afirmasi kebijakan untuk Desa Sangat Tertinggal tentu berbeda dengan Desa Tertinggal. Berikut Skema Gambar dimensi Indeks Desa Membangun. (Bappenas, 2019).

Skema Gambar 1. Dimensi Indeks Desa Membangun



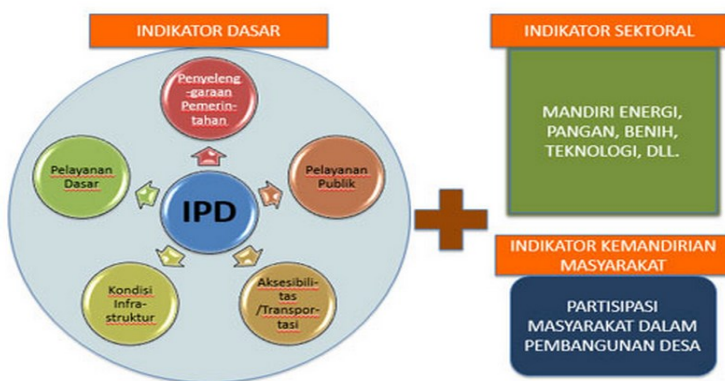
Sumber: Bappenas, 2019

Desa berkembang terkait dengan situasi dan kondisi dalam status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dijelaskan dengan faktor kerentanan. Apabila ada tekanan faktor kerentanan seperti guncangan ekonomi, bencana alam, atau konflik sosial maka dapat memengaruhi status Desa Berkembang turun menjadi Desa Tertinggal. Sementara, apabila Desa Berkembang mempunyai kemampuan dalam mengelola potensi, informasi / nilai, inovasi/prakarsa, dan kewirausahaan akan mendukung gerak kemajuan Desa Berkembang menjadi Desa Maju. Indeks Desa Membangun merupakan komposit dari ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

Status IDM berbeda dengan Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang dikeluarkan oleh Bappenas. Bappenas membagi perkembangan status desa dalam tiga klasifikasi yakni Desa Tertinggal, Berkembang, dan Mandiri. Masing-masing status

terbagi lagi menjadi tiga perkembangan, mula, madya dan lanjut. Terdapat lima dimensi dalam IPD antara lain: pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas / transportasi, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan. Berikut ini skema gambar indeks pembangunan desa. (Bappenas, 2019).

Skema Gambar 2. **Indeks Pembangunan Desa**



Sumber: Bappenas, 2019

Dengan menggunakan data sensus Potensi Desa (Posdes) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terakhir pada April 2018, kita lihat perbandingan antara Indeks Desa Membangun dengan Indeks Pembangunan Desa.

Tabel 1. Perbandingan Status Desa IDM dan IPD

Perbandingan Status Desa antara IDM dan IPD

Status Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks Pembangunan Desa
Sangat Tertinggal	13.453 Desa (18,25 %)	-
Tertinggal	33.592 Desa (45,57 %)	19.944 Desa (26,92 %)
Berkembang	22.882 Desa (31,04 %)	51.127 Desa (69 %)
Maju	3.608 Desa (4,89 %)	-
Mandiri	174 Desa (0,24 %)	3.022 Desa (4,08 %)

Sumber: BPS RI, 2019.

Alokasi Dana Desa untuk desa didasarkan pada alokasi Dana Desa untuk kabupaten. Bupati kemudian menghitung dan menetapkan rincian Dana Desa untuk Desa. Selain itu, bupati.walikota harus menyediakan beberapa peraturan sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat 2, antara lain:

1. Tata cara penghitungan rincian Dana Desa;
2. Penetapan rincian Dana Desa;
3. Mekanisme dan tahap penyaluran Dana Desa;
4. Prioritas penggunaan Dana Desa;
5. Penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa;
6. Sanksi berupa penundaan penyaluran dan pemotongan Dana Desa;

Pada Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 pasal 9 ayat 1 perhitungan pengalokasian Dana Desa untuk Desa menggunakan perhitungan sebagai berikut:

1. 25% untuk jumlah penduduk;

2. 35% untuk angka kemiskinan desa;
3. 10% untuk luas wilayah desa;
4. 30% untuk tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota;

Kemudian, pada pasal 9 ayat 3 diterangkan perhitungan rincian Dana Desa setiap Desa menggunakan formulasi : $W = (0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa.

$Z1$ = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan.

$Z2$ = Rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan.

$Z3$ = Rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkutan.

$Z4$ = Rasio Indeks Kesulitan Geografis (IKG) setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota yang bersangkutan.

BUMDes menjadi hak desa untuk memanfaatkan aturan UU Desa yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan desa, terutama dalam hal peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. BUMDes diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa masyarakat yang dikelola secara baik dan professional. Keberadaan BUMDes menjadi harapan masyarakat desa untuk meningkatkan ekonomi desa melalui

pengelolaan keuangan desa yang di dasarkan pada Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa (APBDes) (Karim, A. 2019).

Penutup

BUMDes yang merupakan proyek yang di drop (dibentuk) pemerintah daerah lebih banyak membuahkan kegagalan dibandingkan dengan BUMDes yang di prakarsai desa dan di dukung oleh pemerintah. Oleh karena itu prinsip dasarnya BUMDes bukan proyek pemeritah di desa tetapi sebagai bentuk prakarsa dan gerakan desa. BUMDes yang tidak dilandasi bekerja dalam konteks gerakan ekonomi lokal tidak akan bermakna banyak dan tidak tumbuh kuat.

Modal yang serta merta di drop dari pemerintah sementara belum terbangun dengan baik cenderung mendatangkan kegagalan dari pada keberhasilan dana hibah dari pemeritah kepada BUMDes akan menimbulkan kredit macet diakibatkan masyarakat mempunyai persepsi bahwa hibah itu tidak perlu di kembalikan. Kombinasi antara fasilitasi dan super visi dari atas serta eman sipasi lokal menjadikan pengembangan BUMDes lebih baik.

Sebanyak 60 ton beras untuk ASIAN GAMES ternyata dipasok oleh desa. Jelas sekali ini sangat berpengaruh pada pertumbuhan desa secara langsung. Diharapkan hal ini bisa membuat petani semakin bersemangat untuk menanam padi dan selalu menjaga kualitas padi yang mereka tanam. Bukan tidak

mungkin juga gabungan BUMDes lainnya bersinergi jika mempunyai potensi yang sama. Pada intinya, setiap desa punya potensi. Hanya saja, selama ini potensi tersebut tidak dikelola secara maksimal sehingga desa memiliki konotasi daerah yang tertinggal dan tidak maju. Dengan adanya BUMDes di setiap desa, diharapkan tidak ada kesenjangan yang begitu curam antara desa dan kota. Lebih dari itu, ini bisa menjadi solusi masalah sosial dan ekonomi yang ada di kota. Pasalnya, tidak ada lagi gelombang orang desa yang mencari pekerjaan di kota. Mereka tidak perlu ke kota untuk mencari uang dan di desa, mereka sudah berdaya. Dan inilah yang menjadi tujuan BUMDes.

Rancangan Model Percepatan Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan Berbasis Dana Desa

Amrullah

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMKOP, Makassar

Email: ahamrullah5@gmail.com

Pendahuluan

Desa hingga saat ini masih menjadi tempat yang menggambarkan kompleksitas masalah yang terkait dengan sosial, politik, dan ekonomi di negeri ini. Desa menjadi tempat yang identik dengan masyarakat yang miskin dan tidak berdaya. Hal tersebut merupakan kontradiksi yang sangat ironis karena pada dasarnya desa adalah kawasan yang sangat kaya dengan berbagai sumber daya produktif terutama yang telah disediakan oleh alam. Akan tetapi sering kali kekayaan tersebut sangat sulit diakses oleh masyarakat terdekat dengan sumber daya tersebut berada. (Ansell, Chris dan Alison Gash, 2007).

Hal tersebut disebabkan karena masyarakat dijauhkan dari proses pengambilan keputusan tentang pengelolaan berbagai sumber daya produktif yang ada. Masyarakat menjadi pihak yang terpaksa menerima kebijakan yang bersifat sepihak dan pada akhirnya masyarakat menjadi kelompok yang akses terhadap sumber daya produktif menjadi sangat tergantung pada pihak-

pihak yang lebih kuat, yaitu pemerintah dan swasta. Sifat pengelolaan pemerintahan tersebut membuat hubungan sosial, ekonomi, dan politik yang timpang di berbagai lapisan baik antar lembaga pemerintah dan antarpemangku kepentingan yang salah satunya adalah masyarakat. (Sujiono. P. 2006).

Ketidakterdayaan masyarakat dalam hal keterbatasan akses terhadap sumber daya produktif dan ketergantungan terhadap pihak-pihak yang lebih berkuasa, memunculkan upaya model demokratisasi sumber daya melalui inkubator ekonomi kerakyatan yang mengacu pada amanat negara yang tercantum dalam pasal 33, UUD 1945. Model inkubator tersebut menempatkan kolektivitas di tingkat masyarakat untuk menguasai dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada di sekitar wilayah mereka secara demokratis dan pemerintah ataupun swasta menjadi mitra yang memiliki posisi setara dengan masyarakat.

Kebutuhan akan adanya rancangan integrasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan dalam model pemerintahan didorong oleh kenyataan bahwa segala upaya yang bersifat sentralistis dan *top-down* yang telah diuji coba puluhan tahun ternyata tidak bisa membantu mengurai berbagai kompleksitas di desa terutama hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antarlembaga pemerintah dan antara pemerintah dengan masyarakat. Kegagalan tersebut mendorong makin kuatnya upaya demokratisasi dan integrasi antara pemerintah

dengan para pemangku kebijakan di kawasan desa. Salah satu bentuk pengelolaan pemerintahan atau proses pengambilan kebijakan yang saat ini semakin populer adalah *collaborative governance* (pemerintahan kolaboratif). (Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan, 2018).

Model pemerintahan ini bersifat demokratis dan dapat memberikan jaminan lebih besar akan kedudukan masyarakat, terutama ketika kekuatan kelembagaan atau kolektif masyarakat sudah terbentuk. Terdapat beberapa pengertian dari pemerintahan kolaboratif, antara lain:

1. Pemerintahan yang menempatkan berbagai pemangku kepentingan terkait dalam forum bersama untuk menyusun kebijakan yang berorientasi pada konsensus.
2. Susunan pemerintahan di mana pihak non-pemerintah memiliki kedudukan formal dalam proses pengambilan keputusan untuk kebijakan yang bersifat publik.
3. Pihak publik dan swasta bekerja sama dalam kerja kolektif dalam kedudukannya masing-masing untuk menyusun kebijakan publik.
4. Tuntutan proses pengambilan keputusan secara kolektif yang dikendalikan oleh sekelompok individu yang tergabung dalam beberapa organisasi.

Bentuk pemerintahan ini dapat terwujud jika suatu wilayah dapat menanggulangi beberapa tantangan yang ada. Ada 3 kondisi utama yang pada umumnya terjadi sebelum adanya

pemerintahan kolektif dan proses inisiasi harus berangkat dari upaya untuk keluar dari kondisi tersebut. (Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan, 2018).

1. Ketimpangan Kuasa dan Pengetahuan (*Power-Resource Knowledge Asymetris*). Keadaan ketika para pemangku kepentingan/masyarakat tidak memiliki kekuatan, modal, dan pengetahuan apa pun untuk benar-benar terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Keberadaan mereka dalam sistem pada dasarnya hanya seremonial dan bersifat pasif dalam menerima kebijakan yang sudah disusun, walaupun pada kenyataannya mereka adalah pihak yang paling terpengaruh oleh kebijakan tersebut.
2. Jejak Kerja Sama dan Konflik Masa Lalu (*Pre-history of Cooperation and Conflict*). Jenis relasi yang terjadi antara pemerintah dan pemangku kepentingan tentu menjadi pengaruh paling besar dalam menentukan relasi masa kini dan masa yang akan datang karena memengaruhi besar kecilnya kepercayaan yang dibutuhkan dalam pemerintahan kolaboratif.
3. Timbal Balik dan Kendala dalam Partisipasi (*Incentives for and Constrains on Participation*). Jika partisipasi pemangku kepentingan di luar pemerintah merupakan dasar utama dalam demokrasi dan pemerintahan kolaboratif, maka pemangku kepentingan memerlukan adanya sebuah kepastian atau garansi bahwa mereka memiliki kedudukan

yang nyata dalam susunan pemerintahan. Masyarakat tidak akan berinisiatif untuk terlibat dalam partisipasi nyata jika mengetahui bahwa posisi mereka hanya sekadar pemberi saran dan seremonial.

Ketiga tantangan tersebut atau kondisi yang pada umumnya terjadi di sebuah wilayah sebelum terlaksananya pemerintah kolaboratif dapat diupayakan untuk diatasi melalui dua alat utama yang berperan sebagai amunisi dalam pelaksanaan proses kolaboratif yaitu peta jalan inisiasi pemerintahan kolaboratif. Dua alat utama dalam inisiasi pemerintahan kolaboratif antara lain:

1. Kepemimpinan Fasilitatif (*Facilitative Leadership*). Kepemimpinan ini memiliki beberapa tugas kewajiban, yaitu mempromosikan serta memastikan terjadinya partisipasi yang luas dan aktif. Kepemimpinan ini juga diharuskan memiliki prioritas dalam upaya untuk memajukan/ memberdayakan kelompok dan atau pemangku kepentingan yang lebih lemah di suatu wilayah. Pihak-pihak yang terlibat dalam lingkaran kepemimpinan harus yang berasal dari kalangan profesional, jujur, dan diutamakan merupakan tokoh organik (yang muncul dari kalangan masyarakat itu sendiri).
2. Rancangan Kelembagaan (*Institutional Design*). Rancangan kelembagaan harus bersifat inklusif dan transparan. Rancangan ini merupakan protokol dasar dalam proses

kolaborasi yang memberikan gambaran jelas akan posisi sah masing-masing pihak yang akan terlibat di dalam pemerintahan kolaboratif terutama posisi pemangku kepentingan yang berasal dari pihak di luar pemerintah. Pemangku kepentingan akan memiliki inisiatif dan alasan untuk berkomitmen dalam proses kolaborasi jika mereka mengetahui legalitas posisi mereka dalam sebuah sistem.

Kedua alat tersebut bertugas untuk memfasilitasi proses-proses inisiasi pemerintahan kolaboratif, antara lain: Dialog Langsung Personal (*Face to face dialogue*). Tujuan utama dari proses ini adalah menghilangkan berbagai prasangka antar pihak yang sebelumnya telanjur tumbuh karena ketiadaan wadah komunikasi bersama. Proses ini juga berguna untuk mencari kepentingan bersama. (Eko Atmojo, Muhammad, dkk. 2017).

1. Proses Pembangunan Rasa Percaya (*Trust Building Process*). Jika sebelumnya dalam suatu wilayah terdapat rekam jejak konflik antarpihak terutama antara pemerintah dan nonpemerintah, maka dalam proses inisiasi pemerintahan kolaboratif pihak-pihak tersebut harus mengalokasikan dana dan waktu untuk proses pengembalian rasa saling percaya.
2. Komitmen terhadap Proses (*Commitment to the Process*). Para pemangku kepentingan akan berpartisipasi untuk mengamankan jaminan bahwa pandangan mereka tidak akan terpinggirkan serta mengamankan posisi mereka yang telah dilegitimasi. Bentuk pemerintahan kolaboratif menggeser

wewenang penentu kebijakan dari pemerintah ke bentuk kolaborasi kolektif antara pemerintah dengan masyarakat. Akan tetapi, kolaborasi ini bisa terhambat jika ketimpangan relasi masih terjadi di antara pihak.

3. Pengertian Bersama (*Shared Understanding*). Proses ini bertujuan untuk menyepakati pandangan bersama tentang permasalahan, potensi, nilai, visi, dan misi.
4. Hasil Sementara (*Intermediate Outcome*). Pada akhirnya sampai pada proses evaluasi yang merujuk pada temuan bersama antara pemerintah dan masyarakat akan bentuk terbaik pemerintahan kolaboratif. Selanjutnya adalah menyusun rencana strategis pelaksanaan pemerintahan kolaboratif yang mengacu pada prinsip konsensus.

Efektivitas Dana Desa

Otonomi daerah dirasa lebih efektif untuk membangun sebuah daerah, dengan adanya otonomi daerah maka pembangunan suatu daerah dapat berjalan dengan baik, karena pembangunan infrastruktur akan lebih merata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Begitu juga dengan desa, dimana setelah adanya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka desa diberi kewenangan untuk mengurus urusan rumah tangganya, terutama dalam hal pengelolaan dana desa. Tujuan pemberian dana desa adalah untuk pemerataan pembangunan

infrastruktur disetiap desa, sehingga pembangunan bukan dikendalikan pada tingkat kabupaten/kota saja.

Dana desa sangat membantu pemerintah desa untuk mewujudkan kebijakan dan pembangunan infrastruktur serta dapat mensejahterakan masyarakat desa yang masih jauh dari kata sejahtera bagi pemerintah pusat. Masyarakat desa secara khusus perlu diberikan perhatian khusus, terutama pada masalah-masalah yang menghambat proses perubahan masyarakat desa dalam pembangunan nasional. Adanya dana desa bisa memberi harapan yang terbuka bagi masyarakat untuk mengembangkan dan memajukan desa, terutama dalam bidang ekonomi berbasis masyarakat. Dimana dengan adanya dana desa masyarakat bisa bertahan hidup dengan mengikuti perkembangan zaman terutama dalam hal ekonomi berbasis masyarakat. (Syahza, Almasdi dan Suarman. 2013).

Pemanfaatan dana desa untuk pembangunan dan perkembangan desa dapat didukung oleh beberapa faktor. Sujiono menyatakan ada beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat dan arah perkembangan desa adalah faktor lokasi, fasilitas daerah dan infrastruktur diantaranya jalan penghubung. Dengan adanya dana desa maka faktor-faktor yang bisa mempengaruhi perkembangan desa setidaknya bisa diminimalisir, sehingga perkembangan desa bisa berjalan sesuai dengan rencana atau berkembang dengan baik. Sebelum adanya dana desa, perubahan-perubahan yang ada di dalam masyarakat

sangat lambat terutama yang disebabkan oleh pendapatan rendah, pendidikan kurang memadai, dan juga status pekerjaan yang jauh dibatas normal. Setelah adanya pendayagunaan dana desa, prioritas tersebut mengutamakan untuk mendanai program atau kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini telah diatur dalam Permendes yang mana “Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dibidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa”. (Eko Atmojo, Muhammad, dkk. 2017).

Terbukti bahwa pada tahun 2015 setelah adanya dana desa, jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu kini menjadi 523 orang saja dibanding tahun sebelumnya sebanyak 4978 orang, dengan kata lain penduduk yang bekerja tidak tentu turun drastis sebesar 89% atau berkurang 4.455 orang. Bukti kedua, jumlah keluarga prasejahtera yang awalnya sbanyak 3271 keluarga, setelah adanya dana desa turun menjadi 1338 keluarga saja. Dana desa yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa dengan baik maka akan sangat efektif untuk pembangunan desa, terutama dalam hal pengentasan kemiskinan dan pengembangan masyarakat.

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip: *Pertama*, keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan. *Kedua*, kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan

desa yang lebih mendesak. *Ketiga*, tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan

Dalam memacu pertumbuhan ekonomi, kebijaksanaan ekonomi harus menganut paradigma baru dimana pemberdayaan ekonomi rakyat harus menjadi perhatian utama. Karena sebagian besar di daerah pedesaan rakyat hidup pada sektor pertanian dan sektor ini masih memberikan kontribusi yang besar pada perekonomian daerah, maka pemberdayaan ekonomi rakyat juga berarti membangun ekonomi pedesaan dengan lebih baik. Pembangunan industri harus memperhatikan keterkaitan kebelakang (*backward linkage*) dengan sektor pertanian atau sektor primer sedangkan keterkaitan kedepan (*forward linkage*) harus memperhatikan pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah dan pemasaran yang baik sehingga produk yang dihasilkan tidak sia-sia. (Syahza, Almasdi dan Suarman. 2013).

Pengembangan sektor pertanian di pedesaan harus diarahkan kepada sistem agribisnis, karena pendekatan ini akan dapat meningkatkan nilai tambah sektor pertanian. Pada hakekatnya dapat meningkatkan pendapatan bagi pelaku-pelaku agribisnis di daerah. Sektor pertanian (agribisnis) sebagai sektor

ekonomi rakyat di pedesaan memiliki prospek yang cerah untuk dikembangkan lebih lanjut, baik untuk memperkuat ekonomi rakyat, maupun sebagai andalan Indonesia dalam perdagangan bebas. Ketimpangan pembangunan pada masa lalu lebih memihak kepada sektor ekonomi perkotaan yaitu industri dan jasa, sementara ekonomi pedesaan yakni pertanian terabaikan. Tidak bisa dipungkiri, sejak krisis ekonomi. Pembangunan ekonomi pedesaan terutama di daerah yang terpencil (tertinggal) tidak terlepas dari pembangunan sektor pertanian.

Kondisi ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat pedesaan (sekitar 80 %) mencari nafkah dari sektor pertanian yakni: perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, tanaman pangan dan hortikultura. Apabila ingin memacu pertumbuhan ekonomi di pedesaan salah satu prioritasnya adalah pengembangan sektor pertanian yang berbasis agribisnis. Untuk jenis agribisnis skala besar seperti perkebunan boleh dikatakan tidak banyak kendala, karena sektor perkebunan yang dikembangkan selama ini berorientasi ekspor yang dikelola oleh perusahaan besar. Namun yang jadi masalah adalah pengembangan ekonomi pedesaan dari usaha tani skala kecil yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat. (Eko Atmojo, Muhammad, dkk. 2017).

Dalam pengembangan sektor pertanian skala kecil tersebut masih ditemui beberapa kendala, terutama dalam pengembangan sistem pertanian yang berbasiskan agribisnis dan

agroindustri. Kendala yang dihadapi dalam pengembangan pertanian khususnya petani skala kecil, antara lain:

Pertama, lemahnya struktur permodalan dan akses terhadap sumber permodalan. Salah satu faktor produksi penting dalam usaha tani adalah modal. Besar-kecilnya skala usaha yang dilakukan tergantung dari pemilikan modal. Secara umum pemilikan modal bagi masyarakat pedesaan masih relatif kecil, karena modal ini biasanya bersumber dari penyisihan pendapatan usaha sebelumnya. Untuk memodali usaha selanjutnya masyarakat desa (petani) terpaksa memilih alternatif lain, yaitu meminjam uang pada orang lain yang lebih mampu (pedagang) atau segala kebutuhan usaha tani diambil dulu dari toko dengan perjanjian pembayarannya setelah panen. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan petani sering terjerat pada sistem pinjaman yang secara ekonomi merugikan pihak petani.

Kedua, ketersediaan lahan dan masalah kesuburan tanah. Kesuburan tanah di pedesaan sebagai faktor produksi utama dalam pertanian makin bermasalah. Permasalahannya bukan saja menyangkut makin terbatasnya lahan yang dapat dimanfaatkan petani, tetapi juga berkaitan dengan perubahan perilaku petani dalam berusaha tani. Dari sisi lain mengakibatkan terjadinya pembagian penggunaan tanah untuk berbagai subsektor pertanian yang dikembangkan oleh petani.

Ketiga, pengadaan dan penyaluran sarana produksi. Sarana produksi sangat diperlukan dalam proses produksi untuk

mendapatkan hasil yang memuaskan. Pengadaan sarana produksi di pedesaan itu bukan hanya menyangkut ketersediaannya dalam jumlah yang cukup, tetapi yang lebih penting adalah jenis dan kualitasnya. Oleh karena itu pengadaan sarana produksi ini perlu direncanakan sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan dipergunakan pada waktu yang tepat.

Keempat, terbatasnya kemampuan dalam penguasaan teknologi. Usaha pertanian di pedesaan merupakan suatu proses yang memerlukan jangka waktu tertentu. Dalam proses tersebut akan terakumulasi berbagai faktor produksi dan sarana produksi yang merupakan faktor masukan produksi yang diperlukan dalam proses tersebut untuk mendapatkan keluaran yang diinginkan. Petani yang bertindak sebagai manajer dan pekerja pada usaha taninya haruslah memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penggunaan berbagai faktor masukan usaha tani, sehingga mampu memberikan pengaruh terhadap peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha yang dilakukan.

Kelima, lemahnya organisasi dan manajemen usaha tani. Organisasi merupakan wadah yang sangat penting dalam masyarakat, terutama kaitannya dengan penyampaian informasi (*top down*) dan panyaluran inspirasi (*bottom up*) para anggotanya. Dalam pertanian organisasi yang tidak kalah pentingnya adalah kelompok tani. Selama ini kelompok tani sudah terbukti menjadi wadah penggerak pengembangan pertanian di pedesaan. Hal ini dapat dilihat dari manfaat

kelompok tani dalam hal memudahkan koordinasi, penyuluhan dan pemberian paket teknologi.

Keenam, kurangnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia untuk sektor agribisnis. Petani merupakan sumberdaya manusia yang memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan usaha tani, karena petani merupakan pekerja dan sekaligus manajer dalam usaha tani itu sendiri. Ada dua hal yang dapat dilihat berkaitan dengan sumberdaya manusia ini, yaitu jumlah yang tersedia dan kualitas sumberdaya manusia itu sendiri. Kedua hal ini sering dijadikan sebagai indikator dalam menilai permasalahan yang ada pada kegiatan pertanian.

Dana Desa Sebagai Pelumas Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa

Alokasi dana yang diberikan harus digunakan secara konsisten dan terkendali. Setiap kegiatan yang menggunakan alokasi dana desa, melalui beberapa tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang jelas dan berdasar prinsip. Segala bentuk laporan yang dibuat harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan dana desa yang disalurkan kepada masyarakat desa antara lain:

1. Membantu mengatasi permasalahan ekonomi di desa, antara lain kemiskinan bisa dikurangi, angka pengangguran bisa diturunkan, laju urbanisasi bisa dihambat dan ketimpangan bisa dipersempit.

2. Membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, membantu pemerataan pembangunan dan hasilnya, membangun infrastruktur dan menciptakan peluang serta lapangan kerja baru.
3. Selain menggunakan untuk pembangunan desa, tetapi juga untuk membangun sumber daya manusia (SDM) di desa seperti melaksanakan pembinaan, bimbingan serta pendampingan, dan pemantauan yang lebih tertata dan saling berhubungan.
4. Memperkuat koordinasi, konsolidasi, dan sinergi terhadap pelaksanaan program yang menjadi prioritas pembangunan desa dari tingkat pemerintah pusat, daerah, kecamatan, hingga desa itu sendiri.
5. Membangun infrastruktur dan layanan fasilitas publik serta memberdayakan dan mengembangkan perekonomian yang ada di desa tersebut. (wartaekonomi, 2020).

Dana desa diprioritaskan manfaatnya untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

1. Pengentasan kemiskinan
2. Dana Desa untuk pemerataan pembangunan
3. Dana Desa untuk menahan laju urbanisasi

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dana desa merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN, diperuntukkan bagi desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar-desa. Adapun arah dan kebijakan dana desa tahun 2019.

Pertama, meningkatkan pagu anggaran dana desa. Diperkirakan dana desa 2019 akan mengalami kenaikan dari Rp75 triliun hingga Rp80 triliun. *Kedua*, menyempurnakan formulasi pengalokasian dana desa dengan tetap memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan. *Ketiga*, mengoptimalkan pemanfaatan dana desa pada beberapa kegiatan prioritas desa, yaitu 3-5 kegiatan. *Keempat*, melanjutkan skema padat karya tunai dalam penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik. *Kelima*, meningkatkan porsi pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat. *Keenam*, meningkatkan perekonomian desa melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), menciptakan produk unggulan desa, dan memberikan kemudahan akses permodalan. *Ketujuh*, meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dana desa melalui kebijakan penyaluran berdasarkan kinerja pelaksanaan.

Kedelapan, sinergi pengembangan desa melalui pola kemitraan dengan dunia usaha. *Kesembilan*, melakukan penguatan atas *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dana desa, kapasitas SDM perangkat desa, serta koordinasi, konsolidasi dan sinergi dari tingkat Pemerintahan Pusat, Pemda, Kecamatan, hingga Desa.

Penghitungan dana desa di 2019 haruslah benar-benar mengacu pada pasal 72 ayat 2 UU Desa, yaitu dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa, dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana Desa 2019 tidak boleh bertentangan dengan amanat dan semangat UU Desa. Ada dua catatan penting lainnya. *Pertama*, soal penyaluran dana desa di tahun 2019 sebaiknya dua tahap saja sehingga memudahkan aparat desa dalam penggunaan, penyerapan, dan pelaporan. *Kedua*, meminta pemerintah jangan mengedepankan fungsi korporasi di dalam BUMDes karena akan mematikan kearifan lokal desa. Sebaliknya, pemerintah harus mendorong asas rekognisi atau pengakuan dan subsidiaritas di dalam pengelolaan BUMDes.

Penutup

Membangun dari desa adalah salah satu komitmen pemerintah untuk menghadirkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Untuk itu, jumlah dana desa terus ditingkatkan setiap

tahunnya. Masyarakat adat juga diberikan akses terhadap kesejahteraan. Untuk mewujudkan pemerataan ekonomi distribusi dana desa, penguatan kelembagaan desa, serta keterbukaan pengelolaan anggarannya perlu dikembangkan untuk disempurnakan. Pemerintah terus memastikan bahwa desa sebagai entitas terkecil mampu menjadi penopang utama pelayanan warga dan sekaligus penggerak perekonomian bangsa. Pengawasan dana desa terus diperluas oleh Kementerian Desa dengan menggandeng berbagai institusi mulai dari Polri, TNI, hingga para pemuka masyarakat dan pemuka agama diajak untuk mengawasi dana desa. Strategi dalam rangka keterbukaan ini diyakini cukup efektif menjadi alat pengontrol perilaku perangkat desa atau elite desa yang selama ini dianggap paling mengkhawatirkan melakukan korupsi dana desa.

Kekhawatiran dana desa bakal disalahgunakan perangkat desa atau orang-orang yang berkaitan dengan aliran dana ini bukanlah berlebihan. Pertama, banyaknya kasus korupsi yang dilakukan para pemimpin wilayah adalah fenomena yang sangat mungkin menular pada struktur di bawah termasuk sampai ke tingkat desa. Terbukti dengan banyaknya kepala desa yang dimejahijaukan karena menyalahgunakan dana desa. Tetapi kemungkinan terjadi penyalahgunaan juga bisa terjadi karena kepala desa atau perangkat desa tidak

memahami mekanisme pelaporan yang dipersyaratkan pemerintah.

Salah satu instrumen yang dilakukan oleh pemerintahan untuk meningkatkan ekonomi di setiap desa adalah dengan alokasi dana desa. Dengan pemberian dana desa ini desa akan lebih berdaya, dan optimisme serta rasa percaya diri menjadi *wong ndeso* semakin tinggi. Dengan dana desa, setidaknya ada dua persoalan yang harus diselesaikan. **Pertama**, membuka lapangan pekerjaan baru karena dana desa ini bersifat pada karya. Artinya, pembangunan dilakukan oleh pihak desa dengan orang-orang desa tersebut sebagai pekerjanya. **Kedua**, dengan adanya pembangunan desa maka kegiatan ekonomi semakin baik. Dan pendapatan setiap kepala rumah tangga di desa meningkat.

Realisasi Pendidikan Menyongsong Revolusi Industri 4.0 dan Bonus Demografi

Muh. Arman
Teknik Kimia FTI-
Pengurus MASIKA ICMI Orwil SULSEL
Email: m.arman@umi.ac.id

Pendahuluan

Manusia bukan terlahir langsung dalam kepribadian modern, bodoh adalah bawaan asli manusia tercipta, bahkan Sang pembebas bernama Muhammad yang menjadi utusan Tuhan sendiri sebelum menerima wahyu adalah ummi (buta huruf), namun dalam prosesnya manusia dituntut untuk mengetahui, hanya dengan pengetahuanlah manusia bisa menjalankan fungsi kemanusiaanya, maka tidak salah kalau utusan Tuhan Nabi Muhammad mewajibkan umatnya berproses dan menceburkan diri dalam kapasitas pendidikan ketika mulai menyatu dalam kandungan sang ibu hingga kuburan mau digali. Indikasi ini mengisyaratkan bahwasanya manusia sendiri tak ada batas dalam berproses dan tak akan menemukan titik penghujung sentral pendidikan selain kematian hingga menggugurkan kewajibannya dalam pendidikan. Disamping itu manusia juga tidak terbelenggu oleh jarak dalam berproses, baik dinegara kelahiran atau pergi

keluar manca negeri, sebagaimana yang digambarkan Rasulullah dalam haditsnya, carilah ilmu sampai kenegeri cina.

Manusia sendiri pada dasarnya adalah makhluk yang merdeka, ia terlahir ke dunia dalam keadaan telanjang, tanpa ada satu ikatanpun yang memasungnya dengan ketelanjangannya itu menandakan bahwa manusia adalah makhluk yang merdeka. dan bebas menentukan takdinya, yang pada akhirnya menuntun manusia itu menjadi diri sendiri sendiri pada subyektifitas bukan obyektifitas yang hanya memasungnya. Manusia dibekali kemampuan untuk merefleksikan dirinya sebagai "ego" dan merefleksikan apa yang ada dihadapannya sebagai "bukan ego". Dengan potensi panca indera dan kelengkapan fisiknya manusia sanggup bergaul dengan dunianya, hingga menghasilkan hubungan dengan sesamanya sebagai subyek dan dunia sebagai obyek sebagai syarat sebuah perjalanan gerak pengetahuan.

Bagi sebagian besar manusia (mahasiswa), pendidikan dimaknai dengan ijazah, prestise, dan kerja, padahal dari itu semua ada yang lebih penting bahwa pendidikan adalah alat perlawanan, karena pada hakekatnya pendidikan adalah *membebaskan*. Membebaskan dari penindasan kebodohan, baik yang ada pada diri manusia atau kebodohan orang lain. Pendidikan tidak menahan mahasiswa untuk mencari ijazah, tapi ijazah sering memaksa mahasiswa untuk bertahan dibangku kuliah, meskipun bangku kuliah tidak jarang memberatkan mahasiswa.

Sebagai mana yang dikatakan Paulo Freire dalam salah satu bukunya tentang pendidikan. "Pada dasarnya manusia terbagi dua golongan, tertindas dan golongan penindas. Sebagai golongan penindas harus dilaksanakan perubahan mendasar, karena kaum penindas sudah barang tentu dan mustahil memberikan pembebasan, dan mereka selalu menyiapkan pembenaran-pembenaran atas status quo. Kaum penindas paling jauh hanya akan memperlunaknya dengan konsensi-konsesi kebebasan sedikit dan karitatif. Karenanya, kaum tertindas harus mengubah diri dari manusia yang berada bagi keuntungan sipenindas (being for others) menjadi subjek-subjek yang bereksistensi bagi diri sendiri (being for themselves)". Oleh karenanya, pendidikan bagi kaum tertindas haruslah dirancang sebagai perlawanan yang membebaskan mereka. Metodologi mengenai hal ini dimaksudkan untuk mengola bagaimana penindasan dapat berpartisipasi langsung dalam pendidikan seperti ini. Metode pendidikannya bersifat aktif dan bersifat pasif dan secara tidak langsung merefleksikan apa yang terjadi dalam dunia nyata. Ini dikarenakan, manusia adalah makhluk eksistensial yang ada dalam dan bersama dunia. Interaksi dengan dunia adalah wadah atau tempat perenungan manusia. ini lah yang oleh Paulo Freire sebagai proses pembebasan. Lalu yang jadi pertanyaan sudahkah pendidikan kita menjadi alat pembebas?

Wajah Pendidikan

Normatif ihwal pendidikan yaitu berupa bimbingan menjadi guru yang benar dan murid yang benar dalam arti tahu posisi dan tanggung jawabnya, cara-cara membaca dan belajar yang proaktif, menyikapi lingkungan sosio-kultural dan sosio-politik secara kritis dan berusaha bermain cantik dalam lingkungan dan sistem dimana ia harus tetap melakukan sebuah perubahan. Transformasi pandangan dunia tentang kehidupan manusia yang begitu kompleks jika ditrasformasikan kedalam dunia pendidikan akan menghasilkan dua model pendidikan yaitu pendidikan yang membelenggu dan pendidikan yang membebaskan.

“Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan hinaan ia belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan ia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh kepercayaan. Jika anak dibesarkan dengan dukungan ia belajar, menyenangkan dirinya. Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baik perlakuan, ia belajar adil. Jika ia dibesarkan dalam dengan kasih sayang dan persahabatan, ia akan menemukan cinta dalam kehidupan. Begitulah anak selalu belajar dalam kehidupan.”

Bukan sekedar seorang pendidik dalam pengertian guru, tukang mengajar yang rajin pergi dan pulang balik dari rumah kesekolah dari sekolah kerumah untuk sekedar menjejalkan teori dari sistem nilai yang dianggap sudah berlaku kedalam otak anak

didiknya dan tidak pernah melibatkan dirinya dalam proses perubahan. Maka, guru adalah pengajar-pengajar mekanis. Pendidik sejati adalah yang terus mencari dan membuat ramuan obat mujarab untuk mengubah wajah sistem pendidikan itu sendiri sekaligus wajah dunianya. Adalah sebuah bentuk pendidikan model bank kemodel pendidikan hadap masalah yang memposisikan pendidik dan peserta didik sebagai subyek-subyek yang mengetahui tugas dan tanggung jawabnya secara benar dan sesuai dengan hakikatnya. Pendidik adalah manusia yang mampu mengembang tugas besar manusiawi dan historis, yaitu membebaskan dan memanusiakan kaum-kaum tertindas. Tugas pendidik bukan seperti guru pada umumnya yang pulang balik untuk mentrasfer pengetahuannya melalui pengajaran dikelas, menghukum dan melakukan tindakan-tindakan kekerasan kepada murid bahkan *drop out* yang dianggap melanggar sistem. Jika memang demikian guru bukan lagi membebaskan tapi melakukan sebuah penindasan. Wadah pendidikan seakan adalah camp militer bagi siswa yang setiap saat siap untuk diledakkan.

Dampak dari ilmu dalam skala pendidikan adalah dikendalikannya dunia pikiran dan penjelajahan kebenaran pikiran manusia oleh sentralisasi monopoli pemikiran dan totaliternya kekuasaan yang digunakan sebagai wadah politik untuk menguasai dunia. Mati bekunya kreativitas bangsa dan masyarakat terjadi bila dunia kreatif pikiran dikendalikan,

dikuasai, dan dipasung oleh sentralisasi kekuasaan dan monopoli kebenaran.

Dengan ditumpasnya pemikiran-pemikiran kritis, maka tidak ada lagi kontrol atas penyalahgunaan model sebuah pendidikan kebenaran ilmiah, sebuah pusat pengetahuan. Setiap kritik merupakan suatu bentuk gerakan dialektika atas dunia akademik bila ia dimonopolikan. Akibatnya, peradaban menjadi mati karena daya kreatifitas dan kebebasan berfikir yang merupakan pijar-pijar pencerahan dan benih-benih tanaman revolusi dan dialektika penemuan kreatif dalam diri manusia ditutup saluran ekspresi keluarnya. Padahal kemajuan berawal dari diberikannya 'ruang' yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya pikiran kritis dan cerdas, meskipun seringkali menentang arus yang sudah mapan.

Konsep sistem pendidikan perguruan tinggi yang mengedepankan sistem pendidikan dogmatis. Pendidik hanya akan melahirkan manusia-manusia mekanik yang cenderung bergelut didunia akademis sekedar memenuhi kurikulum tanpa mempedulikan apakah sistem pendidikan sebagai pendidik telah mencapai tujuannya. Adalah suatu yang betul-betul niscaya bahwa hasil didikan perguruan tinggi telah membawa pelajar sebagai kaum-kaum materialis yang mengedepankan pencapaian keberhasilan sebuah pendidikan dengan nilai-nilai yang masih abstrak. Namun tak dapat dipungkiri kondisi ini telah meracuni pola berfikir manusia dimana pendidikan bukan lagi sebagai

tempat menempa manusia menjadi terdidik tetapi menjadi orang-orang berputus asa. Pelajar dikatakan berhasil dalam pendidikan jika ia memperoleh nilai raport 100 seakan-akan nilailah yang menjadi tolak ukur sebagai pembuktian kecerdasan.

Ilmu pengetahuan lebih dekat dengan mitos dari pada kebenaran ilmu pengetahuan yang siap diakui. Ia adalah satu bentuk pemikiran yang dikembangkan manusia, bukan kepastian utama. Ia begitu kentara, gegap kempita dan brutal, tetapi secara inheren ia superior hanya bagi mereka yang sudah mempunyai pikiran tertentu, atau bagi mereka yang menerimanya tanpa pernah mengkaji manfaat dan kelemahannya.

Tantangan Era Revolusi Industri Dan Bonus Demografi

(Paul Natrop) “..segala kebenaran maunya diketahui dan dinyatakan, dan juga dibenarkan, kebenaran itu sendiri tidak memerlukan hal itu, karena dialah yang menunjukkan apa yang diakui benar harus berlaku”.

Ungkapan diatas sengaja dikutip untuk menunjukkan bahwa esensi perjalanan pemikiran ilmu pada dasarnya hanya untuk mencari kebenaran, sebuah usaha yang selalu membawa klaim-klaim dari para pembawanya untuk menjadi benar dan dipakai setiap zaman. Dari pencarian kebenaran tersebut, tentu akan selalu ada mata rantai ilmu yang pada tataran praksisnya menjadi abadi, yaitu falsafakasi yang terejawantahkan pada dialektika pencarian kebenaran. Sebuah pengetahuan akan diakui

kebenarannya jika ia didukung oleh argumen yang benar. Kebenaran adalah adanya kesesuaian antara ide dengan realitas, jika hal ini tidak terpenuhi sampai kapanpun rasio manusia akan menolak proposisi tersebut.

Pendidikan adalah kunci utama menuju manusia unggul yang dapat bersaing di era revolusi industri 4.0. Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada tahun 2020-2035 dimana jumlah usia produktif (umur 15-65 tahun) jauh melebihi usia tidak produktif (Usia dibawah 14 Tahun dan diatas 65 Tahun). Artinya tahun tersebut rasio kelompok usia produktif dan tidak produktif mencapai lebih dari 50%. Faktor pendidikan sangat penting untuk menghadapi era bonus demografi. Ini diharapkan akan menjadi motor penggerak ekonomi dan kemajuan bangsa dimana pada era tersebut negara-negara maju seperti Kanada, Jepang dan negara-negara Eropa tak lagi produktif. Berdasarkan data BPS 2020 rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun menurut provinsi Tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Rata-Rata Penduduk

Provinsi	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur ≥ 15 Tahun Menurut Provinsi				
	2015	2016	2017	2018	2019
ACEH	9.32	9.36	9.42	9.46	9.59
SUMATERA UTARA	9.34	9.46	9.55	9.61	9.71
SUMATERA BARAT	8.85	8.97	9.02	9.1	9.22
RIAU	8.89	8.97	9.06	9.11	9.35

Provinsi	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur ≥ 15 Tahun Menurut Provinsi				
	2015	2016	2017	2018	2019
JAMBI	8.43	8.55	8.61	8.7	8.86
SUMATERA SELATAN	8.26	8.32	8.41	8.48	8.6
BENGKULU	8.74	8.82	8.91	8.94	9.08
LAMPUNG	8.01	8.1	8.19	8.29	8.36
KEP. BANGKA BELITUNG	7.83	8.04	8.13	8.24	8.35
KEP. RIAU	9.85	9.9	10	10.01	10.13
DKI JAKARTA	10.9	10.92	10.97	11.06	11.11
JAWA BARAT	8.31	8.41	8.46	8.61	8.79
JAWA TENGAH	7.57	7.7	7.77	7.84	8.03
DI YOGYAKARTA	9.59	9.62	9.68	9.73	9.83
JAWA TIMUR	7.71	7.78	7.87	7.93	8.11
BANTEN	8.7	8.79	8.87	8.93	9.07
BALI	8.8	8.84	8.93	9	9.19
NUSA TENGGARA BARAT	7.51	7.57	7.64	7.69	7.98
NUSA TENGGARA TIMUR	7.4	7.54	7.62	7.7	7.98
KALIMANTAN BARAT	7.41	7.49	7.57	7.65	7.8
KALIMANTAN TENGAH	8.4	8.52	8.59	8.66	8.83
KALIMANTAN SELATAN	8.14	8.28	8.37	8.45	8.59
KALIMANTAN TIMUR	9.52	9.55	9.62	9.63	9.88
KALIMANTAN UTARA	8.67	9.01	9.1	9.18	9.24
SULAWESI UTARA	9.19	9.31	9.4	9.51	9.63

Provinsi	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur ≥ 15 Tahun Menurut Provinsi				
	2015	2016	2017	2018	2019
SULAWESI TENGAH	8.35	8.56	8.64	8.74	8.98
SULAWESI SELATAN	8.2	8.31	8.42	8.45	8.73
SULAWESI TENGGARA	8.74	8.86	8.93	9.03	9.25
GORONTALO	7.58	7.71	7.77	7.83	8.11
SULAWESI BARAT	7.49	7.76	7.84	7.94	8.22
MALUKU	9.54	9.69	9.74	9.78	10.03
MALUKU UTARA	8.81	8.96	9	9.07	9.32
PAPUA BARAT	9.47	9.57	9.67	9.73	9.92
PAPUA	6.27	6.48	6.58	6.66	6.85
INDONESIA	8.32	8.42	8.5	8.58	8.75

Sumber: (BPS, 2020)

Dari data tersebut dapat diketahui jika tingkat pendidikan kita masih cukup rendah sehingga hal ini akan menjadi tantangan tersendiri dan akan berakibat pada beban demografi.

Menurut Sri Maryati (2015) Ada syarat yang harus dipenuhi agar Bonus Demografi dapat dimanfaatkan dengan baik dengan mempersiapkannya sejak tahap perencanaan sampai dengan implementasinya di tingkat lapangan. Persiapan ini antara lain melalui:

- a. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
- b. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pendidikan;
- c. Pengendalian Jumlah Penduduk.

- d. Kebijakan Ekonomi yang mendukung fleksibilitas tenaga kerja dan pasar kerja, keterbukaan perdagangan dan peningkatan akses tabungan dan investasi nasional

Tony Wagner (2008) mengidentifikasi ada tujuh skills yang menjadi penentu kesuksesan anak pada abad 21. Tujuh skills tersebut adalah: 1. Critical thinking & problemsolving 2. Collaboration across networks & leading by influence 3. Agility & adaptability 4. Initiative & entrepreneurialism 5. Effective oral & written communication 6. Accessing & analyzing information 7. Curiosity & imagination.

Apakah ketujuh skil diatas sudah diajarkan di sekolah-sekolah kita?

Kondisi dunia akademik hari ini masih jauh dari kata baik, bagaimana tidak Monopoli kebenaran (pengetahuan) tampaknya bersumber dari suatu sumber, yaitu suatu ikhtiar untuk memperoleh pengetahuan atau berpengetahuan yang sayangnya terlalu dipusatkan dan diseragamkan. Kebenaran menjadi bersifat monolitik, cukup satu pintu saja. Tragisnya lagi bila kemudian atas nama kekuasaan keilmiahan akademik, kekuasaan politik untuk kebenaran ideologi, bahkan juga kekuasaan gelar akademik (profesor, doktor, dan sebagainya), lalu dimonopolilah kebenaran itu dalam satu-satunya kebenaran pusat sebagai yang paling benar. Fenomena ini sesungguhnya tampak mengedapan dalam ruang akademis, lebih-lebih dalam otoritarianisme ilmiah, juga agama. Monopoli kebenaran ilmiah seolah menjadi hak sepenuhnya para profesor-profesor dan doktor-doktor kita, yang

selalu menampilkan diri secara feodal sebagai raja bagi sebuah imperium yang namanya dunia ilmiah, dunia pendidikan. Padahal, model monopoli kebenaran seperti ini merupakan cermin pembelengguan kreatifitas dan inovasi yang boleh saja berbeda. Sayangnya, iklim dunia akademik kita masih sering kali disesaki oleh para guru besar yang masih suka membuat klaim kebenaran secara monopolitik. Dunia pendidikan bahkan dengan tegas menolak perbedaan cara pandang, ide dan gagasan apalagi hal itu mengganggu sistem keamanan yang ada.

Selama ini jika terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan pandangan terjebak pada konstruksi pemikiran kesadaran yang salah kaprah, karena hasil pemikiran yang berbeda dengan arus utama yang berkembang saat ini selalu dianggap model pemikiran melawan. Sehingga perlu adanya suatu analitis kritis jangan-jangan setiap yang dianggap mapan sesungguhnya bersembunyi berbagai kepentingan-kepentingan ideologis dan juga manipulasi kebenaran. Keberhasilan pembongkaran ini akan membahayakan sistem karena akan meruntuhkan pilar-pilar yang menyusun sebuah pengetahuan, namun sangat efektif untuk merubah sistem yang bobrok.

Pendidikan hari sibuk mengajarkan anak didik soal menghafal dan mendikte pengetahuan. Apalagi dengan sistem pendidikan yang berorientasi industri, pendidikan secara tersistem membongkai keritisan berfikir, kreativitas dan inovasi. Akhirnya melahirkan sumber daya manusia yang miskin daya

kritis, daya imajinasi dan kreasi yang diharapkan mampu merubah tatanan masyarakat yang lebih baik. Dalam sistem pendidikan, pelajar dan mahasiswa dipisahkan dari persoalan masyarakat yang sebenarnya. Mereka hanya belajar dan belajar, mengejar nilai dan menyelesaikan kurikulum mata kuliah yang diwajibkan. Sehingga menghasilkan mahasiswa yang pragmatis dimana fungsi sebagai social of control dan agen of change telah terlupakan bahkan nyaris punah. Padahal realitas ketidakadilan dalam masyarakat terus berlangsung dan kurang peduli terhadap bencana yang terjadi ditengah-tengah masyarakat adalah bentuk-bentuk output dari sistem pendidikan yang berorientasi pada profit dan industri. Sadar atau tidak sadar itu telah melanda sistem pendidikan yang mengeluarkan doktrin-doktrin apatis dan sikap hedonisme yang memuat mereka hanya mengejar ijazah, sementara rakyat menggap-mengap mencari sesuap nasi. Itukah output dari sebuah lembaga pendidik sebagai bengkel akal manusia hanya menghasilkan manusia-manusia mekanik yang tak peduli lagi dengan realitas sosial bahkan mereka adalah orang-orang yang punya mata tapi tidak melihat penindasan struktur yang terjadi.

Insan Pencipta dan Pengabd

Menyambut bonus demografi adalah peluang untuk bangsa. Ini adalah peluang untuk generasi muda untuk menempa dirinya menjadi generasi pencipta. Merekalah yang menentukan

bangsa dimasa yang akan datang. Perubahan itu harus dimulai dari pimpinan bangsa ini yang tidak lagi membuat aturan-aturan yang justru menghancurkan harapan generasi muda. Perubahan itu juga mesti dimulai dari dunia akademik terkhusus tenaga pendidikan, yang tak lagi melakukan monopoli-monopoli kebenaran yang mematikan kreatifitas, inovasi dan pemikiran kritis didalam ruang-ruang kelas. Karena generasi pencipta mesti memiliki empat kualitas personal 4-C: Coriously, Critical Thingking, Colaboration dan Creating. Inilah modal yang dibutuhkan generasi muda yang akan datang untuk menghadapi era rovolusi industri 4.0 dan bonus demografi.

Pertama Coriously, generasi muda mesti memiliki daya imajinasi tanpa batas, tekad yang kuat, rasa ingin tahu yang tinggi dan senantiasa mengeksplere perubahan-perubahan karena ini adalah awal dan munculnya imajinasi yang dapat merubah dan berdaya cipta. Imajinasi merupakan kekuatan dan anugrah Tuhan yang memiliki kekuatan besar jika mampu diaktualkan karena mampu melampaui ruang dan waktu dalam melakukan inovasi. Kedua, critical thingking, generasi muda harus berfikir kritis dalam merespon masalah yang ada disekitarnya dan menemukan solusi untuk menyelesaikan. Berfikir kritis adalah hal yang paling substansial yang mestinya diajarkan dalam matakuliah yang ada dilingkungan pendidikan. Berfikir kritis mampu mebantu dalam pengambilan keputusan, membedakan fakta opini, berfikir kritis mampu mengevaluasi semua ide dan gagasan untuk mencari

solusi terbaik. Ketiga, Collaboration, generasi muda wajib menghargai keberagaman dan senantiasa menyelesaikan masalah dengan kolaborasi dan kerja tim. Dunia akademik mesti mendukung peserta didik untuk terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan sosial dan organisasi kemahasiswaan yang nantinya akan menjadi modal menciptakan Sumber Daya Manusia yang mampu beradaptasi disetiap perubahan. Keempat, Creating, generasi muda mesti memiliki daya cipta dan tekad yang kuat untuk senantiasa berinovasi dan berkreasi.

Bonus Demografi tanpa diikuti pendidikan yang merata dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai akan menjadikan ancaman bagi Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini kementerian pendidikan nasional harus cekatan dalam menempatkan penduduk Indonesia dewasa yang melimpah sebagai kekuatan yang potensial dengan menempatkan program pendidikan nasional sebagai pilar utama pembangunan nasional. Untuk mencapai hal tersebut pemerintah mesti meningkatkan investasi pada penguatan Sumber Daya Manusia khususnya infrastruktur pendidikan, Layanan Kesehatan berupa perbaikan kualitas gizi untuk memperkuat generasi bangsa menghadapi persaingan di era revolusi industri 4.0.

ASEAN dan Prinsip Non-Intervensi

Beche Bt Mamma

Universitas Bosowa, Makassar

Email: bechemamma@gmail.com

Pendahuluan

Prinsip non intervensi merupakan salah satu prinsip dasar didalam The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Prinsip ini di implemetasikan untuk memastikan keamanan dan stabilitas nasional negara ASEAN dengan menghormati kedaulatan dan menumbuhkan saling faham di antara anggota nya. Sejak prinsip ini pertama kali di abadikan di Deklarasi Bangkok pada tahun 1967, prinsip ini membuktikan keberhasilannya. Selain dari cerita keberhasilan, banyak debat yang bermunculan berkaitan tentang apakah prinsip ini mampu menyelesaikan persoalan hak asasi manusia di antara negara anggota ASEAN, terutama apa yang sedang terjadi di Myanmar, dan juga ketidak kosisten nya penerapan prinsip ini. Tulisan ini akan mengevaluasi argumentasi di atas kemudian menjelaskan kenapa prinsip non intervensi masih penting untuk ASEAN sebagai sebuah institusi.

ASEAN di dibentuk pada tahun 1967 dengan lima negara yaitu Indonesia, Malaysia, Philipines, Singapore dan Thailand sebagai anggota pendiri. Kemudian Brunei masuk menjadi anggota pada tahun 1983, Vietnam pada tahun 1995, Laos dan

Burma (Myanmar) pada tahun 1997, dan Cambodia pada tahun 1999. Keanggotaan ASEAN ada 10 negara. Institusi ini memiliki tujuan untuk menjaga stabilitas regional dan memperkuat kerjasama yang berkontribusi lebih jauh terhadap sosial, ekonomi, politik, dan perkembangan keamanan regional. Bertujuan untuk mencapai tujuan tersebut, ASEAN menganut prinsip Non intervensi yang mana mampu memaksa semua anggota untuk mematuhi aturan-aturan dan mekanisme institusi.

Menurut Futson (2012) dalam konteks tradisional, prinsip non-intervention berarti perilaku anggota ASEAN hanya bisa dipengaruhi melalui jalur diplomatic, yang juga berarti bahwa pemerintahan tidak bisa secara langsung mengintervensi masalah domestik negara lain. Futson menambahkan tindakan ini disebabkan oleh pentingnya bagi setiap anggota ASEAN untuk menghormati kedaulatan dari setiap anggota ASEAN dan untuk menjaga kerjasama regional. Sementara Goh (2003) menjelaskan bahwa prinsip non intervensi merupakan sebuah symbol kolektifitas dari ASEAN dan telah menjadi factor penting di dalam menjaga stabilitas dan kedekatan komunitas ASEAN.

Prinsip non-intervensi itu sesuai dengan karakteristik negara-negara ASEAN. Menurut Futson (2012) sejak ASEAN dibentuk pada tahun 1967, perkumpulan ini dikenali sebagai Balkan nya Asia. Ini disebabkan oleh lima anggota pendiri ASEAN yang memiliki sejarah, sosial, budaya, politik, ekonomi, ras, dan

lingkungan agama yang berbeda. Sebagai contoh, penganut agama budha di Thailand sangat berbeda dengan penganut agama islam di Malaysia. Di saat ASEAN di bentuk kondisi politik dan ekonomi berada pada posisi ketidakpastian dan semua negara memiliki hubungan bilateral yang buruk. Prinsip non intervensi memastikan ASEAN mampu bertahan hidup dan menjaga situasi damai. Lebih lanjut Futson megatakan kondisi itu di sebabkan oleh negara-negara ASEAN menahan diri untuk mengkritik secara langsung atau mendukung kelompok-kelompok pemberontak dari anggota negara ASEAN.

Beberapa peneliti sepakat terhadap pandangan ASEAN dan prinsip non intervensi. Sebagai contoh, Drammond (2010) berpendapat bahwa kesuksesan dari prinsip non intervensi di dalam menciptakan stabilitas dan keamanan antara bangsa telah membantu pertumbuhan solidaritas ASEAN. Bentuk solidaritas itu terjewantahkan di dalam berbagai bentuk contoh nya penguatan kerjasama dalam bidang budaya, sosial dan Pendidikan. Selain itu WU Linjun (2000) berpandangan bahwa prinsip non intervensi merupakan sebuah bentuk jaminan politik untuk sebuah hubungan yang terjadi antara negara-negara yang berhubungan dengan batas wilayah negara. Jaminan politik ini membuat setiap negara ASEAN merasa di jamin kemanan nya. Terutama ini menyangkut keamanan external yang berarti dengan prinsip non-intervensi tidak akan ada negara-negara ASEAN yang mengkritik tindakan domestic suatu negara karna

prinsip non-intervensi tidak memberi ruang untuk tindakan tersebut. Nesadurai (2008) mengklaim bahwa prinsip non-intervensi menguatkan kerjasama antarnegara yang tidak menyebabkan berkurangnya otonomi dari negara-negara ASEAN. Selanjut nya sejak 1967, prinsip ini mampu menyelesaikan banyak permasalahan antar negara yang menyangkut politik, sosial, dan ekonomi dan semua pemimpin ASEAN percaya bahwa jika mereka meninggalkan prinsip ini, akan menjadi salah satu penyebab ASEAN terpecah belah. Sebagaimana di katakana oleh Eric Corthay (2015) prinsip non-intervensi ini focus untuk membangun keeratan regional dan mengembangkan saling memahami di antara negara ASEAN.

Prinsip Non-Intervensi ASEAN

Bagaimanapun, prinsip ini bukan tanpa kritik. Sebagai contoh, dalam praktik nya, dengan di implementasikan nya prinsip non-intervensi, Arendshorts (2009) mengklaim bahwa salah satu implikasi dari di terapkan nya prinsip non-intervensi yaitu negara-negara ASEAN berhenti nya mengkritisi persoalan yang menyangkut hak asasi manusia yang terjadi hampir di semua negara ASEAN. Ada beberapa kasus yang berkontribusi terhadap isu hak asasi manusia yaitu sepanjang revolusi 'people power' melawan Marcos regime di Philipina pada 1986. Tidak ada satu negara ASEAN yang mengkritik berkaitan persoalan hak asasi manusia yang di lakukan oleh regim Marcos terhadap orang-

orang yang menentang pemerintahan Markos sepanjang revolusi berlangsung. Sekalipun hukum tentang kebijakan perang telah diumumkan oleh pemerintah dan negara ASEAN juga tidak menrespon tindakan kekerasan pasukan bersenjata Thailand terhadap demonstran pro demokrasi pada May 1992 dan May 2010.

Lebih jauh lagi, Arendshorst (2009) mengatakan terutama untuk junta Militer Myanmar bertanggungjawab terhadap serangkaian kejahatan kemanusiaan dan penahanan dari pemimpin kelompok oposisi (Aung San Suu Kyi) menunjukkan bahwa ada terjadi kejahatan kemanusiaan di beberapa negara ASEAN yang membutuhkan perhatian untuk di selesaikan. Persoalan ini membuat beberapa negara ASEAN, terutama mantan perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim berpendapat agar perubahan prinsip non-intervensi ini lebih fleksible di dalam upaya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hak asasi manusia di antara negara ASEAN tanpa harus menimbulkan ketegangan regional. Selain itu upaya untuk mengubah prinsip ini juga datang dari dalam dan luar ASEAN yang menganggap prinsip non-intervensi ini sudah tidak sesuai di terapkan di ASEAN. Namun, sehingga sekarang prinsip ini masih menjadi prinsip dasar di dalam ASEAN (Tram-Ahn Nguyen, 2016).

Namun ada juga beberapa pandangan yang mendukung prinsip non-intervensi. Pandangan tersebut menyebutkan bahwa dari pada mengubah prinsip non-intervensi tersebut. Ada

beberapa tindakan yang sudah dilakukan dan bisa dilakukan oleh negara-negara ASEAN untuk menyelesaikan persoalan hak asasi manusia di antara anggota ASEAN. Pertama, ASEAN bisa meneruskan kebijakan non-interventionist dari constructive engagement sebagai bagian dari ASEAN intergovernmental commission on human rights (AICHR) yang berfokus kepada kejahatan hak asasi manusia di Myanmar (Drummond, 2010). Constructive engagement ini dibentuk sebagai upaya untuk mempromosikan hak asasi manusia dan untuk menghindari upaya penyelesaian yang konfrontasi terhadap penyelesaian hak asasi manusia di antara anggota negara ASEAN. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghormati bantuan kemanusiaan internasional, kebebasan, demokrasi, dan keadilan sosial setiap negara. Sekalipun pendekatan ini tidak terlalu berhasil di implementasikan di negara-negara ASEAN, terutama di Myanmar, pendekatan ini mampu mengurangi pergeseran yang terjadi di antara negara-negara ASEAN dan Myanmar. Sebagaimana dikatakan Arendshort (2009), kebijakan ini merupakan upaya yang paling sesuai di implementasikan di ASEAN karena mampu mengurangi intensitas kejahatan kemanusiaan di antara negara-negara ASEAN.

Kedua dengan menggunakan konsep the Responsibility to Protect (R2P) yang memberikan tanggungjawab kepada setiap negara untuk mempertahankan warganegara mereka dari perang, genosida, kejahatan kemanusiaan, dan pembunuhan. Selain itu

pendekatan ini juga mengharuskan setiap pemerintahan memiliki tanggungjawab internasional untuk mengambil tindakan yang berhubungan dengan kegagalan negara-negara ASEAN untuk menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (Drummond, 2010). Pendekatan R2P ini menekankan kepada peran organisasi internasional untuk mengambil tindakan ketika tidak ada satu pun dari anggota ASEAN yang mampu menyelesaikan persoalan hak asasi manusia.

Namun, R2P ini mendapatkan penolakan dari negara ASEAN di sebabkan oleh angapan keterlibatan organisasi internasional untuk mencampuri urusan dalam negeri suatu negara yang mana tindakan ini dipandang sebagai wujud merendahkan prinsip kedaulatan yang di miliki oleh negara yang merdeka. Bagaimanapun, Ban Kim Moon mengatakan bahwa intervensi dari organisasi internasional sebagai contoh dewan keamanan bukan berarti tidak menghormati kedaulatan sebuah negara. Tindakan tersebut hanya akan di ambil ketika sebuah negara benar-benar tidak mampu melindungi warganegara nya dari kejahatan kemanusiaan dan tidak mampu meyelesaikan persoalan hak asasi di dalam negara nya. Tindakan ini bearti menguatkan kedaulatan di banding melemahkan kedaulatan sebuah negara.

Disisi yang lain, ASEAN juga dapat mempromosikan hak asasi manusia melalui sanksi ekonomi (Arenshort 2009). Ini dapat di lakukan ketika negara yang bersangkutan dengan

kejahatan kemanusiaan tidak mampu menyelesaikan masalah HAM di negara nya. Sebagai contoh, Sanksi ekonomi bisa di kenakan terhadap Myanmar sebagai upaya meyelamatkan etnis Rohigya. Ini dapat di lakukan melalui R2P sebagai respon oleh masyarakat internasional terhadap pembiaran aksi kejahatan kemanusiaan atau genocide yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar. Ini juga merupakan bentuk respon masyarakat internasional agar kejahatan kemanusiaan tidak terjadi di negara-negara anggota ASEAN. Jika pemerintah Myanmar tidak mengindahkan atau melakukan sesuatu agar tindakan kejahatan kemanusiaan terhadap etnis Rohingya di hentikan, tindakan sanksi ekonomi dapat di lakukan sebagai upaya untuk mempromosikan hak asasi manusia (Nur Aini, 2017). Pendapat senada di lontarkan oleh Hikmahanto Jumawa, bahwa sanksi ekonomi dapat di kenakan kepada pemerintahan Myanmar sehingga pemerintah Myanmar mengubah kebijakan nya yang diskriminatif terhadap etnis Rohingya dan menerima etnis minoritas Myanmar sebagai warganegara Myanmar (Micom, 2017). Di sisi yang lain, ASEAN harus bersikap tegas terhadap pemerintah Myanmar berhubungan dengan kejahatan kemanusiaan ini. Karna jangan sampai ASEAN menjadi powerless di sebabkan oleh karna prinsip non-intervensi dan Myanmar merupakan anggota ASEAN.

Myanmar harus mempertimbangkan secara serius persoalan ini atau penggunaan sanksi ekonomi akan menyebabkan kondisi di Myanmar akan semakin memburuk dan dampak dari

sanksi ekonomi ini menjalar ke persoalan yang lain. Jika ASEAN mengambil pendekatan tersebut, ASEAN akan menciptakan rasa hormat dari masyarakat internasional terhadap persoalan hak asasi manusia di antara anggota ASEAN, terutama tindakan sanksi tersebut mefleksikan komitmen dan tanggungjawab dari negara-negara ASEAN untuk menghentikan praktik kejahatan kemanusiaan.

Namun, prinsip non-intervensi ini tidak terlepas dari kritik. Ini di sebabkan tindakan ASEAN di dalam pengimplementasian prinsip ini di nilai tidak konsisten. Sebagai contoh keterlibatan ASEAN di dalam urusan domestic negara Cambodia pada 1997 dan Myanmar setelah tahun 2003. Keterlibatan ini menunjukkan pola yang tidak konsisten dari prinsip non-intervensi yang tidak memberi ruang terhadap campur tangan negara lain di dalam urusan domestic negara ASEAN. Kedua kasus keterlibatan ASEAN di Cambodia dan Myanmar menunjukkan standar ganda dimana ASEAN menerapkan penggunaan prinsip non-intervensi ketika pihak yang berkonflik merupakan dari negara-negara kuat (Thailand, Malaysia, Indonesia, Philipine, dan Singapore), namun terjadi pengecualian ketika pihak yang berkonflik merupakan negara-negara yang lemah dan miskin. Di dalam kasus Cambodia, ASEAN memutuskan untuk menunda keanggotaan Cambodia pada tahun 1997 di sebabkan oleh konflik internal Cambodia yang mana perdana Menteri ke-2 Cambodia yaitu Hun Sen dari Cambodia

People Party (CPP) mengeser perdana Menteri pertama Cambodia Norodom Ranaridh dari The Royalist Party (FUNCINPEC). Dengan Hun Sen berada di tampuk kekuasaan menyebabkan pecahnya persetujuan kesepakatan yang telah di buat oleh pemilu yang di supervise oleh PBB pada tahun 1993. Keputusan ini di buat pada pertemuan Joint communique yang ke 30 (Tram-Ahn Nguyen, 2016).

Kasus kedua yaitu keterlibatan ASEAN di dalam urusan domestic Myanmar. Tidak seperti Cambodia, ASEAN tetap menerima keanggotaan Myanmar di dalam ASEAN sekalipun mendapat penolakan oleh Amerika dan Eropa. In di sebabkan oleh kasus hak asasi manusia dan rekam jejak demokrasi di Myanmar (Futson, 2012). Alasan ASEAN menerima keanggotaan Myanmar adalah karna Myanmar kaya akan sumber daya alam yang berguna untuk ekonomi ASEAN dan juga untuk menghindari Myanmar mendekat kepada China. Intervensi oleh ASEAN ini terjadi ketika Junta Militer tidak mengakui kemenangan Aung San Syu Kyi dan menempatkan nya sebagai tahanan rumah dalam kurung waktu 1989-2002. Karna tekanan dari Amerika, Uni Eropa dan Inggris yang mengancam akan menboikot pertemuan Pertemuan ASEAN 2006 yang di ketuai oleh Myanmar sampai Aung San Syu Kyi dibebaskan. Tekanan ini membuat ASEAN (terutama negara-negara kuat seperti Malaysia, Singapore dan Indonesia) membentuk 'peer pressure' untuk memaksa Myanmar untuk meNgubah kepemimpinan nya. Alasan yang di pakai ASEAN

untuk mengintervensi yaitu bahwa persoalan internal Myanmar memberi implikasi kepada Kawasan ASEAN (Tram-Ahn Nguyen, 2016).

Bagaimanapun, yang di anggap inconsistencies tidak berarti bahwa ASEAN mengabaikan prinsip non-intervensi. Menurut fulton (2012) non-intervensi bukan berarti tidak ada keterlibatan. Di dalam beberapa kesempatan, Pemimpin ASEAN membantu sesama anggota ASEAN jika kondisi di suatu negara memberi dampak terhadap negara yang lain. Contoh kasus adalah Thailand yang selalu memberi bantuan militer kepada Malaysia dan Philippine untuk mengakhiri konflik yang berkaitan dengan Sabah di tahun-tahun awal ASEAN di bentuk. Di beberapa kesempatan lain ketika persoalan domestic negara ASEAN yang lain memberi dampak terhadap persoalan internal negara yang lain. Bantuan yang di berikan merupakan dapat berupa bantuan politik yang secara diplomatic mendapat persetujuan dari negara ASEAN lain nya.

Moltof (2012) menambahkan sekalipun prinsip ini di kritik, harus di sadari bahwa sampai sekarang ini tidak ada prinsip lain yang mampu menggantikan prinsip non-intervensi di dalam upaya untuk menjaga stabilitas dan solidaritas di antara setiap anggota ASEAN yang memiliki sejarah latar belakang politik, sosial, budaya dan ekonomi yang begitu beragam. Ada dua alasan politik yang menjadi dasar yaitu; (1) berkaitan dengan kelekatan kedaulatan negara di dalam ASEAN yang berasal dari

pengalaman sejarah negara yang berbeda. Pengalaman di jajah, pengalaman perang dingin, dan berbagai upaya China untuk menexport paham komunis yang semuanya menjadi factor pendorong konflik internal dan membuat Asia Tenggara menganggap kedaulatan sebagai faktor penting untuk memastikan stabilitas domestic dan regional, dan (2) skala prioritas untuk menjaga stabilitas domestic sebagai persoalan keamanan internal sebagai persoalan yang sangat penting.

Penutup

Sebagai kesimpulan, Praktik prinsip non-intervensi di ASEAN menarik banyak perhatian tidak hanya dari negara-negara anggota ASEAN tapi juga dari para peneliti yang mengklaim bahwa prinsip ini sudah tidak sesuai lagi di diterapkan oleh ASEAN sebagaimana prinsip ini tidak mampu menyelesaikan persoalan hak asasi manusia di Myanmar dan ketidak kosistenan di dalam penerapannya. Namun, tidak bisa di pungkiri bahwa ada beberapa tindakan yang bisa diambil oleh ASEAN terkait kelemahan dari prinsip non-intervensi yaitu ASEAN tetap mampu 'membantu' urusan dalam negeri negara ASEAN melalui kebijakan non-interventionist dari constructive engagement dan melalui Responsibility to Protect (R2P). Selanjutnya ASEAN dapat memberikan bantuan dan dukungan kepada anggota ASEAN yang lain melalui medium diplomasi. Berdasarkan argumentasi di atas

prinsip non-intervensi masih relevant untuk menjaga keutuhan dalam ASEAN.

***Upgrading* Batubara Peringkat Rendah Melalui Metode *Blending* Dengan Bio-Massa Tempurung Kelapa Hasil Pirolisis**

Al Gazali

Universitas Bosowa, Makassar

Email: manargazali@gmail.com

Pendahuluan

Kebutuhan bahan bakar minyak, gas, dan batubara semakin meningkat dari tahun ke tahun, namun peningkatan kebutuhan ini tidak diimbangi dengan peningkatan ketersediaan bahan bakar fosil tersebut, dalam arti lain bahwa ketersediaan bahan bakar tersebut semakin menurun bahkan habis karena bahan bakar ini tergolong sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Dari berbagai bahan bakar tersebut hanya batubara yang mempunyai potensi menjadi bahan bakar alternatif mengingat cadangan melimpah, menurut Asosiasi Batubara Kanada bahwa cadangan batubara sebagai bahan bakar fosil menempati peringkat pertama di dunia yaitu mencapai 91%, sementara gas hanya 5% dan sisanya minyak sekitar 4%. (<http://www.coal.ca>, 2003; Roesyadi, et al., 2005).

Di Indonesia cadangan batubara mencapai 38,8 milyar ton, namun kualitas batubara Indonesia hanya sebagian kecil

termasuk kategori kualitas sedang-tinggi yaitu berupa sub-bituminus (26,63%) dan bituminus (14,38%), kualitas tinggi berupa antrasit (0,36). Sisanya sebagian besar masih tergolong batubara muda dengan kualitas rendah, yaitu berupa lignit (58,6%) (Suyartono, et al., 2000). Batubara asal Sulawesi terkonsentrasi di provinsi Sulawesi Selatan, termasuk tiga besar daerah yang mengandung cadangan batubara di Indonesia setelah Kalimantan dan Sumatera. Total cadangan batubara di Sulawesi Selatan mencapai 120 juta ton terdiri atas cadangan terukur 21,2 juta ton dan cadangan terunjuk 96,13 juta ton yang tersebar di beberapa daerah kabupaten.

Batubara asal Sulawesi Selatan belum dapat dimanfaatkan untuk keperluan bahan bakar di Industri Semen dan PLTU. Diperkirakan penggunaan batubara pada industri semen di Sulawesi Selatan mencapai 35% dari total biaya operasi pabrik. Tetapi hingga saat ini batubara yang digunakan berasal dari Kalimantan dengan kualitas lebih baik, sementara batubara lokal yang sebetulnya cukup potensial, tidak dapat dimanfaatkan secara langsung mengingat kandungan sulfurnya cukup tinggi berkisar 2 – 4%.

Diperlukan rekayasa agar batubara peringkat rendah; *low calori, high sulphur* dan *high ash* dapat dimanfaatkan secara maksimal dengan menjaga dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan, serta biaya *cost* yang rendah dalam proses rekayasa. Rekayasa tersebut berupa *desulfurisasi* dan *deashing* batubara

secara fisika yaitu *blending*, sehingga batubara peringkat rendah seperti batubara asal daerah Sulawesi dapat dimanfaatkan.

Batubara yang kaya dengan kandungan karbon sangat berpotensi dijadikan sebagai sumber energi, karena jumlah cadangannya yang melimpah di Indonesia, termasuk di Sulawesi. Namun, pembakaran batubara peringkat *high sulphur* dan *high ash* secara massal di industri juga tidak terlepas dari efek pencemaran dan percepatan kerusakan (korosi) alat pembakaran. Di sisi lain tidak sedikit cadangan batubara di Indonesia, khususnya di Sulawesi tergolong batubara peringkat rendah dengan kadar sulfur sekitar 4% sehingga tidak layak dimanfaatkan sebagai bahan bakar kecuali terlebih dahulu dilakukan upaya agar batubara peringkat rendah dapat dimanfaatkan secara maksimal dengan menjaga dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan. Rekayasa tersebut berupa desulfurisasi dan deashing batubara secara fisika dengan metode *blending* untuk memenuhi standar pemakaian bahan bakar batubara di industri yang mencapai 0,8% (pabrik semen) atau 0,4% (di PLTU).

Tinjauan Umum Batubara

Batubara (*coal*) adalah sedimen batuan organik yang mudah terbakar (dengan komposisi utama karbon, hidrogen dan oksigen). Kandungan kimia batubara terdiri atas senyawa organik (sebagai komponen utama) dan senyawa anorganik serta

senyawa sulfur (Larsen, 1987). Senyawa organik dalam batubara, mulai dari struktur sederhana hingga struktur yang sangat kompleks, baik berupa senyawa aromatik maupun non aromatik dalam bentuk antara lain: *selulosa, protein, waxes, resin, terpen, sterol, flavonoid, tannins, lignin* dan *alkaloida*. Senyawa organik sebagai komponen utama batubara tersusun atas unsur-unsur penting seperti C dan H (unsur utama), O dan N serta S (sulfur unsur minor). Komposisi unsur-unsur penting tersebut yang menentukan kualitas batubara.

Sekalipun senyawa sulfur dalam batubara sebagai komponen minor, tetapi sangat menentukan kualitas batubara yang bersangkutan yang berkisar 0,5 – 4% (Kirk, et al., 1979), bahkan batubara Turki mencapai 13% (Demirbas, 2002). Berdasarkan kualitasnya, batubara memiliki kelas (*grade*) yang secara umum diklasifikasi menjadi empat kelas utama menurut standar ASTM yakni antrasit, bituminus, sub-bituminus dan lignit (Kirk, et al., 1979). atau lima kelas jika dimasukkan *peat* atau *gambut* sebagai jenis batubara yang paling muda.

1. Batubara Sebagai Sumber Bahan Bakar dan Energi

Bahan bakar adalah bahan yang jika terbakar, jika kontak dan bereaksi dengan udara (oksigen) akan menimbulkan panas, dengan syarat bahan bakar tersebut mengandung unsur karbon dan hidrogen atau senyawa karbon-hidrogen. Sehingga bahan yang mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan sulfur berpotensi digunakan sebagai bahan bakar (*fuel*) sebab unsur-

unsur tersebut memberikan kontribusi terhadap panas pembakaran, khususnya unsur karbon (Tabel 1). Berdasarkan kriteria ini batubara dengan kandungan utama adalah karbon dan hidrogen dengan sifat mudah terbakar (*combustible*), maka batubara dapat dikategorikan sebagai bahan bakar padat dan sumber energi dengan kandungan kalor sekitar 4000 – 8000 kal/gr (Krevelen, 1993; Razjevic, 1976; Shaha, 1974).

Tabel 1. Kontribusi atom terhadap panas pembakaran (Aladin, 2011)

Atom	Panas Pembakaran (kJ/g.atom)
Karbon (C)	396
Hidrogen Aromatik (H _a)	150
Hidrogen Alifatik (H _s)	130
Oksigen (O)	100
Nitrogen (N)	0
Sulfur (S)	250

Sumber: (Aladin, 2011), Sumber Daya Alam Batubara, hal. 37

Tabel 2 Kriteria batubara sebagai bahan bakar (Aladin, 2011)

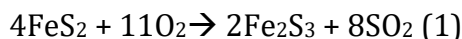
Parameter	Kadar (%) / Nilai kalori (kcal/kg)	
	P. Semen	PLTU
1. Total sulfur (<i>max</i>)	0,8	0,4
2. Zat terbang (<i>max</i>)	36	30,3
3. Kadar abu (<i>max</i>)	6	7,8
4. <i>Moisture (max)</i>	12	13,6
5. <i>Fixed carbon(min)</i>	46	48,3
6. Kalori (<i>min</i>)	6000	7000

Sumber: (Aladin, 2011), Sumber Daya Alam Batubara, hal. 43

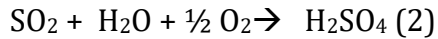
2. Dampak Penggunaan Batubara

2.1. Dampak batubara high sulfur

Seperti telah diuraikan komposisi kimia batubara, diantaranya mengandung unsur sulfur dan komponen *ash* yang berpotensi mencemari dan merusak lingkungan. Dampak pemanfaatan batubara berkadar sulfur tinggi, dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan kerusakan pada alat pembakaran. Pembakaran batubara yang mengandung sulfur pirit tinggi dapat membentuk polutan gas SO_x seperti gas SO_2 yang mencemari udara, berdasarkan reaksi (Hessley, et al., 1986) :



Gas SO₂ tersebut di udara akan mengalami reaksi dengan (uap) air membentuk asam sulfat (H₂SO₄) berdasarkan reaksi :



Selanjutnya akan turun sebagai hujan asam yang bersifat korosif, berbahaya bagi kelangsungan hidup di darat dan di laut. Pembakaran batubara berkadar sulfur tinggi dapat menyebabkan korosi dan penyumbatan pada alat pembakaran (*combustor*) dan pipa saluran pembakaran yang tentu saja sangat merugikan industri, sebab dengan menggunakan batubara berkadar sulfur tinggi akan berdampak mempercepat kerusakan alat atau memperpendek umur alat pembakaran.

2.2. Dampak batubara high ash

Pembakaran batubara akan menghasilkan limbah abu yang terdiri dua jenis, yaitu abu dasar (*bottom ash*) sekitar 20% dan abu terbang (*fly ash*) sekitar 80%.

3. Tinjauan Umum Tempurung Kelapa

Kelapa termasuk golongan kayu keras, yang secara kimiawi memiliki komposisi kimiawi hampir serupa dengan kayu yaitu tersusun dari lignin, cellulose dan hemicelluloses. Dengan komposisi yang berbeda-beda. Cellulose (C₆H₁₀O₅)_n 33,61 %, Hemicellulose (C₅H₈O₄)_n 19,27 % dan lignin [(C₉H₁₀O₃) (CH₃O)]_n 36,51 %. Arang tempurung adalah arang yang dibuat dengan cara karbonisasi dari tempurung atau batok kelapa. Pada proses pembakaran tempurung kelapa yang terdiri dari karbohidrat

yang sangat kompleks, akan menyebabkan suatu rentetan reaksi yaitu peruraian secara termal serta menimbulkan panas sebagai hasil peruraian dari bermacam-macam struktur molekul. Dari komposisi kimia tempurung kelapa itu sendiri yang terdiri dari 74,3% C, 21,9% O, 0,2% Si, 1,4% K, 0,5% S, 1,7%P. (Bledzki, 2010).

Karbonisasi merupakan proses konversi dari suatu zat organik ke dalam karbon atau residu yang mengandung karbon dalam proses pembuatan arang berkarbon, karbonisasi dilakukan dengan membakar tempurung kelapa untuk menghilangkan kandungan air atau moisture content dan material – material lain dalam tempurung kelapa yang tidak di butuhkan oleh arang seperti hydrogen dan oksigen atau material yang menguap. (M. Tirono, 2001).

Menurut Koesoemadinata (1980), nilai kalor bahan bakar adalah jumlah panas yang dihasilkan atau ditimbulkan oleh suatu gram bahan bakar tersebut dengan meningkatkan temperatur 1 gr air dari 3,50 C – 4,50 C, dengan satuan kalori. Dengan kata lain nilai kalor adalah besarnya panas yang diperoleh dari pembakaran suatu jumlah tertentu bahan bakar. Tempurung kelapa memiliki komposisi kimia mirip dengan kayu, mengandung lignin, pentosa, dan selulosa. Tempurung kelapa dalam penggunaan biasanya digunakan sebagai bahan pokok pembuatan arang dan arang aktif. Hal tersebut dikarenakan

tempurung kelapa merupakan bahan yang dapat menghasilkan nilai kalor sekitar 6500 – 7600 Kkal/kg.

4. *Tinjauan Umum Blending*

Blending adalah proses pencampuran antara dua jenis batubara atau lebih dengan proporsi perbandingan dan metode tertentu. Biasanya *blending* dilakukan antara batubara peringkat rendah dan peringkat tinggi, kadar abu tinggi dan abu rendah, kadar sulfur tinggi dan sulfur rendah (Suprpto, 2009). Dalam industri penambangan, pencampuran bertujuan untuk memenuhi standar kualitas yang sesuai dengan permintaan konsumen, serta memenuhi faktor utama dalam pemanfaatan batubara yaitu: layak secara teknis, dimana karakteristik batubara harus sesuai dengan persyaratan teknis yang diinginkan dalam aplikasinya, tidak merusak lingkungan, layak secara ekonomis dan dapat diterima oleh masyarakat (Fajaruddin, 2000).

Prinsip kerja pencampuran adalah mencampur dua jenis batubara atau lebih yang berbeda kualitas dengan proporsi perbandingan yang telah ditentukan, hasil pencampuran harus benar-benar homogen (tercampur rata) agar didapat hasil perhitungan yang akurat (Nukman, 2007). Sehingga proses *blending* yang dilakukan dapat memberikan solusi terhadap daerah penghasil batubara dengan kualitas rendah, yang kemudian dapat di produksi dalam jumlah yang besar dengan harga yang besar pula.

5. Tinjauan Umum Pirolisis

Pirolisis adalah teknologi alternatif sebagai sumber hidrokarbon. Berbagai teknik pirolisis dikembangkan tidak hanya untuk konversi bahan-bahan polimer menjadi hidrokarbon bermanfaat tetapi juga digunakan untuk sintesis hidrokarbon berbahan biomassa/tumbuhan. Teknik yang terakhir disebutkan merupakan salah satu upaya penganeekaragaman sumber hidrokarbon yang memiliki peluang cukup besar. Pirolisis adalah proses penguraian yang tidak teratur dari bahan-bahan organik yang disebabkan oleh adanya pemanasan tanpa berhubungan dengan udara luar. Pada saat pirolisis, energi panas mendorong terjadinya oksidasi sehingga molekul karbon yang kompleks terurai sebagian besar menjadi karbon atau arang (Prananta, 2008).

Arang adalah produk hasil karbonisasi atau dekomposisi kayu pada suhu tinggi dengan keadaan tanpa oksigen atau oksigen terbatas. Proses karbonisasi yang umum dilakukan adalah destilasi kering (Pari, 2009). Destilasi kering atau *destructive distillation* merupakan istilah lain dari pirolisis. Perbedaan pirolisis dengan pembakaran biasa yaitu pada pirolisis keberadaan oksigen dikontrol atau bahkan ditiadakan. Pirolisis merupakan salah satu metode untuk mengubah biomassa menjadi bahan bakar stabil. Keuntungannya adalah bahan bakar yang dihasilkan tidak menimbulkan asap, bernilai kalor tinggi dan

menurunkan biaya transportasi bila dibandingkan dengan biomassa dalam keadaan awalnya.

Karakteristik Batubara

Dari hasil analisis proksimat, ultimat dan nilai kalor batubara, didapatkan hasil karakteristik batubara yang berasal dari Daerah Mallawa pada Tabel 3.

Tabel 3. Karakteristik batubara sub-bituminus yang berasal dari Daerah Mallawa

Parameter	Unit	Metode	Kadar
Analisis kelembaban (<i>moisture analysis</i>)	%	ASTM D-3173-2011	2,92
Kandungan abu (<i>ash content</i>)	%	ASTM D-3174-2011	4,63
Bahan mudah menguap (<i>volatile matter</i>)	%	ISO 562-2010	39,24
Karbon tetap (<i>fixed carbon</i>)	%	ASTM-D-3172-2007	53,21
Sulfur total (<i>total sulfur</i>)	%	ASTM D-4239-2012	1,834
Nilai kotor kalori (<i>gross calorie value</i>)	cal/gr	ASTM D-5865-2011	7.297

Kandungan sulfur total batubara Mallawa sebesar 1,834% termasuk kategori tinggi yang belum memenuhi syarat dipergunakan sebagai bahan bakar di industri (maksimal 1%) sebagaimana kriteria penggunaan batubara sebagai bahan bakar di industri semen dan PLTU. Namun nilai kalor mencapai hampir 7.297 cal/gr maka batubara tersebut memungkinkan digunakan sebagai bahan bakar di Industri (Sukandarrumidi, 1995).

Karakteristik bio-massa tempurung kelapa hasil pirolisis yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 4. Karakteristik bio-massa tempurung kelapa hasil pirolisis

Parameter	Unit	Metode	Kadar
Analisis kelembaban (<i>moisture analysis</i>)	%	ASTM D-3173-2011	2,81
Kandungan abu (<i>ash content</i>)	%	ASTM D-3174-2011	1,48
Bahan mudah menguap (<i>volatile matter</i>)	%	ISO 562-2010	15,39
Karbon tetap (<i>fixed carbon</i>)	%	ASTM-D-3172-2007	80,32
Sulfur total (<i>total sulfur</i>)	%	ASTM D-4239-2012	<0,005
Nilai kotor kalori (<i>gross calorie value</i>)	cal/gr	ASTM D-5865-2011	7.560

Dari karakteristik bio-massa tempurung kelapa hasil pirolisis ini, jika di analogkan dengan karakteristik batubara, maka bio-massa tempurung kelapa termasuk kelas bituminus dan jika dihubungkan dengan kriteria batubara sebagai bahan bakar Industri Semen dan Industri PLTU, maka secara umum bio-massa tempurung kelapa hasil pirolisis telah memenuhi sebagai bahan bakar.

Karakteristik bahan bakar hasil *blending* batubara dengan bio-massa tempurung kelapa hasil pirolisis.

Tabel 5. Perbandingan Karakteristik bahan bakar hasil blending dan syarat kualitas bahan bakar untuk pabrik/industri

Parameter	Unit	Metode	Kadar	Pabrik semen	PLTU
Analisis kelembaban (max)	%	ASTM D-3173-2011	2.72	12	13.6
Kandungan abu (max)	%	ASTM D-3174-2011	3.01	6	7.8
Bahan mudah menguap (max)	%	ISO 562-2010	24.2	36	30.3
Karbon tetap (min)	%	ASTM-D-3172-2007	70.07	46	48.3
Sulfur total (max)	%	ASTM D-4239-2012	0.739	0.8	0.4
Nilai kotor kalori (min)	cal/gr	ASTM D-5865-2011	7.520	6.000	7.000

Dari karakteristik bahan bakar hasil *blending* ini, jika di analogikan dengan karakteristik batubara, maka bahan bakar hasil *blending* termasuk kelas bituminous. Dan jika dihubungkan dengan kriteria batubara sebagai bahan bakar Industri Semen dan Industri PLTU, maka secara umum bahan bakar hasil *blending* telah memenuhi sebagai bahan bakar. Sehingga secara umum, bisa disimpulkan bahwa untuk menghasilkan bahan bakar dari batubara sub-bitumunus dan bio-massa tempurung kelapa hasil pirolisis yang memenuhi kriteria bahan bakar Industri semen dan Industri PLTU dapat dilakukan dengan metode *blending*

Pengaruh variasi ukuran partikel terhadap karakteristik bahan bakar hasil blending.

Tabel 6. Pengaruh variasi ukuran terhadap karakteristik bahan bakar blending

Parameter	Unit	Metode	Ukuran Bahan Bakar <i>Blending</i> (Mesh)		
			20	40	60
Analisis kelembaban	%	ASTM D-3173-2011	2,85	2,88	2,95
Kandungan abu	%	ASTM D-3174-2011	3,3	3,52	4,16
Bahan mudah menguap	%	ISO 562-2010	27	26,8	25,92
Karbon tetap	%	ASTM-D-3172-2007	66,85	66,8	66,97
Sulfur total	%	ASTM D-4239-2012	0,882	0,846	0,936
Nilai kotor kalori	cal/g r	ASTM D-5865-2011	7.434	7.417	7.371

Dari hasil analisa nilai kalor untuk setiap variasi ukuran partikel blending antara batubara sub-bituminus dengan bio-massa tempurung kelapa hasil pirolisis menunjukkan ukuran partikel blending optimum adalah 20 mesh. Semua variasi ukuran partikel blending jika dihubungkan dengan kriteria bahan bakar industri, menunjukkan nilai yang telah memenuhi kriteria bahan bakar Industri Semen dan Industri PLTU.

Pengaruh variasi rasio blending terhadap karakteristik bahan bakar hasil blending

Tabel 7. Pengaruh rasio variasi blending terhadap karakteristik blending

Parameter	Unit	Metode	Rasio <i>Blending</i>				
			100:0	70:30	50:50	30:70	0:100
<i>Moisture</i>	%	ASTM D-3173-2011	2,92	2,94	2,85	2,72	2,85
<i>Ash content</i>	%	ASTM D-3174-2011	4,63	3,62	3,3	3,01	1,35
<i>Volatile matter</i>	%	ISO 562-2010	39,24	31,38	27	24,2	15,67
<i>Fixed carbon</i>	%	ASTM-D-3172-2007	53,21	62,06	66,85	70,07	80,13
<i>Total sulfur</i>	%	ASTM D-4239-2012	1,834	1,314	0,882	0,7387	<0,005
<i>Calorie value</i>	cal/gr	ASTM D-5865-2011	7.297	7.375	7.434	7.520	7.603

Dari hasil analisa parameter proksimat berupa analisis kelembaban, kandungan abu, bahan mudah menguap, Karbon tetap dan parameter ultimat berupa kadar sulfur untuk setiap

variasi ukuran partikel *blending* antara batubara sub-bituminus dengan bio-massa tempurung kelapa hasil pirolisis menunjukkan rasio *blending* optimum adalah 30: 70. Pada rasio *blending* 30 : 70 jika dihubungkan dengan kriteria bahan bakar industri, menunjukkan analisis parameter proksimat dan parameter ultimat telah memenuhi kriteria bahan bakar Industri Semen dan Industri PLTU.

Penutup

Berdasarkan karakteristik proksimat, ultimat dan nilai kalori batubara, maka batubara asal Daerah Mallawa, Kabupaten Maros - Provinsi Sulawesi Selatan termasuk kelas sub-bituminus dan belum memenuhi syarat untuk dimanfaatkan sebagai bahan bakar di industri khususnya di pabrik semen dan PLTU, untuk bio-massa tempurung kelapa hasil pirolisis termasuk bio-massa ketika dianalogkan dengan klasifikasi batubara maka termasuk kelas bituminus. Sehingga keduanya layak dilakukan *blending* untuk memenuhi bahan bakar di Industri khususnya di pabrik semen dan PLTU.

Berdasarkan karakteristik proksimat, ultimat dan nilai kalori batubara atau bio-massa pada setiap variasi ukuran partikel berupa 20, 40 dan 60 mesh, didapatkan ukuran partikel optimum adalah 20 mesh, dengan karakteristik proksimat berupa 2,85% analisis kelembaban; 3,3% kandungan abu; 27% bahan mudah menguap; 66,85% Karbon tetap, serta karakteristik

ultimat dan nilai kotor kalor berupa 0,882% sulfur total; 7.434 cal/gr nilai kotor kalori.

Berdasarkan karakteristik proksimat, ultimat dan nilai kalori batubara atau bio-massa pada setiap variasi rasio blending berupa 100 : 0, 70 : 30, 50 : 50, 30 : 70, 0 : 100 didapatkan rasio blending optimum adalah 30 : 70, dengan karakteristik proksimat berupa 2,72% analisis kelembaban; 3,01% kandungan abu; 24,2% bahan mudah menguap; 70,07% Karbon tetap, serta karakteristik ultimat dan nilai kotor kalor berupa 0,7387% sulfur total; 7.520 cal/gr nilai kotor kalori.

DAFTAR PUSTAKA

- A'la, Abd. (2006). *Pembaruan Pesantren*. (Yogyakarta: Pustaka Pesantren).
- Abdullah, Irwan. 2008. *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global*, Cet. II. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Adnan Jamal, 2014. Disertasi, "Konfigurasi Politik dan Hukum Terhadap Hirarki Tata Hukum Indonesia (Studi Terhadap Rekonstitusionalisasi Hak Manusia atas Akses Energi sebagai Hak Dasar). Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
- Afandi, 2018, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Teori, Konsep dan Indikator*, Penerbit : Zanafa Publishing, Yogyakarta.
- Ahmad Warson Munawir. 1984. *Kamus Al-Munawwir*. Yogyakarta: PP Al-Munawir.
- Ajami, Frans Mitran, Hanny Poli, Cynthia E. V Wuisang. (2016). *Adaptasi Masyarakat Bantaran Sungai Terhadap Bencana Banjir Di Kelurahan Komo Luar Kota Manado*. *Jurnal Spasial*. 3 (3): 75-84.
- Aladin, A. (2011). *Sumber Daya Alam Batubara* (Edisi 1 ed.). Bandung, Indonesia: CV. Lubuk Agung.
- Alfiansyah, Mahmud Tang & Safriadi. 2018. *Perilaku Politik To Wani To Lotang di Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang*. *Etnosia*. Vol. 3. Ed. 2, 184-197.
- Alisah, Evawati dan Eko Prasetyo Dharmawan. (2007). *Filsafat Dunia Matematika: Pengantar untuk Memahami Konsep-Konsep Matematika*. Jakarta: Prestasi Pustaka,
- Alquran dan al-Karim
- Aminuddin Ilmar, 2012. *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*. Jakarta: Kencana.
- Aminullah. (2004). *Berpikir Sistemik untuk Pembuatan Kebijakan Publik, Bisnis dan Ekonomi*. Penerbit PPM, Jakarta.
- Ansell, Chris dan Alison Gash, 2007, *Collaborative Governance in Theory and Practice*, dalam *Journal of Public*

- Administration Research and Theory, Oxford University Press.
- Ansor. 2011. Teori Agenda setting dan Citra Pemerintah: Analisis Pemberitaan Korupsi dan Penurunan Citra Pemerintahan SBY. *Jurnal Komunikasi*, Volume 5 No. 2, April 2011 (145-156).
- Arendshortst, J. (2009). The Dilemma of Non-Interference: Myanmar, Human Rights, and the ASEAN Charter. *Northwestern Journal of International Human Rights*, 8(1).
- AS. Hikam (ed), 2014. *Ketahanan Energi Indonesia 2015-2025, Tantangan dan Harapan*. Jakarta: CV. Rumah Buku.
- Asti, Andi Fajar. (2009). *Bencana Alam Dan Budaya Lokal: Respons Masyarakat Lokal Terhadap Banjir Tahunan Danau Tempe Di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan*. Prosiding AICIS XII.
- Azis, H. A. (2016). Himpunan Mahasiswa Islam dan Kesejahteraan: Konteks Indonesia. *INSANCITA*, 1(1).
- Azra, Azyumardi. (2002). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*, (Jakarta: Logos, 2002).
- Azra, Azyumardi. 2006. *Pancasila dan Identitas Nasional Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik, 2019. *Jakarta Pusat*. Indonesia.
- Bappenas, 2019. *Jakarta*, Indonesia.
- Bernard Arief Sidharta, 2009. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Bledzki, A.K., A.A. Mamun, J. Volk, 2010, Barley husk and coconut shell reinforced polypropylene composites: The effect of fibre physical, chemical and surface properties, *Composites Science and Technology*, Vol. 70, pp. 840-846
- BPS RI, 2020.
- BPS, 2018. *Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Dalam 5 Tahun*. Jakarta.
- BUMDes. id. 2019. *Peta Jalan Pengembangan BUMDes*. Yogyakarta.
- BUMDes.id. 2018.

- Burhanuddin, Jajat dan Afrianty, Dina. (2006). *Mencetak Muslim Modern: Peta Pendidikan Islam Indonesia*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).
- Burrell, G. dan Morgan, G. 1979. *Sociological Paradigms and organisational Analysis*, Heinemann, London.
- Cangara, Hafied. 2014. *Perencanaan dan Strategi Komunikasi (Edisi Revisi)* Jakarta; Rajawali Pers.
- Caporaso, James A. dan Levine, David P. 1992. *Theories of Political Economy*. Cambridge University Press Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, Sao Paulo, Delhi, Dubai, Tokyo, Mexico City.
- Carpenter, A. M. (1995). *Coal Blending for Power Stations (Vol. 81)*. Lexington, KY: IEA Coal Research.
- Chiras, Daniel D. (1991). *Environmental science: Action for a suitable future*. Redwood City, California: Cumming Publishing company Inc.
- Cita, K. I., & Sebagai, A. I. Y. B. I. HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM KOMISARIAT FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI CABANG YOGYAKARTA.
- Danianti, Rizsa Putri, dan Sariffuddin. (2015). *Tingkat Kerentanan Masyarakat Terhadap Bencana Banjir Di Perumnas Tlogosari, Kota Semarang*. *Jurnal Pengembangan Kota* 3 (2): 90-99.
- Daulay, Haidar Putra. (2007). *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, Cet. ke-2. (Jakarta: Predana Media Group).
- Davis, W. T. (2000). *Air Pollution Engineering Manual (Second Edition ed.)*. New York: John Willy & Sons, Inc.
- Demirbas. (2002). *Demineralization and Desulphurization of Coals via Column Froth Flotation and Different Methods*. *Journal of Energy Conversion & Management*, 43, 885-895.
- Dillard, Jesse F. 1991. *Accounting as A Critical Social Science*. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 4, No.1 pp. 8-28, MCB University Press.
- Dinas Pertambangan & Energi, P. S. (2001). *Perencanaan Strategik (RENSTRA) Tahun 2001-2005*. Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar.

- Donalt F. Starat, David F.Mc.Allister. (1977). *Discrete Mathematics in computer Science*, Prentice Hall, Inc., USA.
- Drummond, C. (2010). *The Asean Government Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) and the Responsibility to Protect Development and Potential*.
- Edison, dkk (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Strategis Dan Perubahan Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pegawai Dan Organisasi*. Cetakan Kesatu, Penerbit : Alfabeta Bandung.
- Effendi Sirajuddin. 2013. *NATION IN TRAP, Menangkal 'Bunuh Diri' Negara dan Dunia Tahun 2020*. Esir Institute bekerja sama Pustaka Pelajar.
- Effendy, Onong. Uchjana. 2016. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Eko Atmojo, Muhammad, dkk. 2017. *Efektivitas Dana Desa Untuk Pengembangan Potensi Ekonomi Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Desa Bangunjiwo*. journal.umpo.ac.id/index.php/aristo. Vol. 5. No. 1. Tahun 2017. Hal. 126 – 140.
- Eko Putro Sandjojo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/07/20/otchrk-sebanyak-13-ribu-desa-butuh-listrik>.
- Ellen, P. S., Mohr L. A., & Webb, D. J. 2000. *Charitable programs and the retailer: Do they mix?* *Journal of Retailing*, 76, 393-406.
- Endraswara, Suwardi. 2006. *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan*. Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Widya Tama.
- Eric Corthay. (2015). *The ASEAN doctrine of Non-interference in Light of the Fundamental Principle of Non-Interference*. *Asian-Pacific Law & Policy Journal*, 17(2), 1–41.
- Esmar B., Hadi N., Setia B., Erfan H., Puji S., Rangi S., Sunaryo, 2012. *Kajian Pembentukan Karbon tetap Berbahan Arang Tempurung Kelapa*. Jakarta, Seminar Nasional Fisika.
- Fahlevi, Muhammad Reza. (2019). *Strategi Adaptasi Masyarakat Kelurahan Mugirejo Kota Samarinda Di Dalam Menghadapi Banjir*. *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, 7 (1): 154-168.

- Fajaruddin. (2000). Perancangan Tungku Briket Batubara Untuk Penyulingan Daun Nilam Kapasitas 40 Kilogram. Tugas Akhir, Universitas Sriwijaya, Jurusan Teknik Mesin, Palembang.
- Finance.Detik.Com/Berita-Ekonomi-Bisnis/D-4138150/Ini-Data-Kemiskinan-Ri-5-Tahun-Terakhir-Menurut-Bps diakses pada 06 Februari 2020.
- Fiske, John. 1987. *Television Culture*. London: Routledge.
- Futson, J. (2012). *ASEAN and the Principle of Non-Intervention-Practices and Prospects*. Institute of Southeast Asian Studies, 5. R
- Gallhofer, Sonja dan Haslam, Jim, 2011. Emancipation, the spiritual and accounting. *Critical Perspectives on Accounting* 22 (2011) 500– 509. Journal home page: www.elsevier.com/locate/cpa
- Ghufron, G. (2018, September). Revolusi Industri 4.0: Tantangan, Peluang, dan Solusi bagi Dunia Pendidikan. In *Seminar Nasional dan Diskusi Panel Multidisiplin Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2018 (Vol. 1, No. 1)*.
- Gie, The Liang. (1993). *Filsafat Matematika (Epistemologi Matematika)*. Yogyakarta: Yayasan Studi Ilmu dan Teknologi
- Goh, G. (2003). The ASEAN Way Non-Intervention and ASEAN's Role in Conflic Management. *Standford Journal of East Asian Affairs*, 3(1).
- Goode. William J, 2004, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Gramsci, A. (1971). *Selections From The Prison Notebooks of Antonio Gramsci*. London: Lawrence & Wishart
- H Halim et al (2019). Flood disaster and risk anticipation strategy. *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.* 235 012032.
- Haedari, Amin. (2006). *Masa Depan Pesantren dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleksitas Global*. (Jakarta: IRD Press).
- Halim H. (2016). Rational-Instrumental Action of Local People in Facing Flood. *International Journal Advances in Social Science and Humanities*. 4 (4): 49-53.

- Hartono Jugianto. (1983). *Dasar-dasar Komputer*. Yogyakarta: Andi
- Haryono, Didi. (2014). *Filsafat Matematika (Suatu Tinjauan epistemologi dan Filosofis)*. Bandung: Alfabeta
- Hasse J. 2011. *Diskriminasi Negara Terhadap Agama di Indonesia*. Kawistara. Vol. 1, Yogyakarta: Sekolah Pasca Sarjana UGM.
- Hasse J. 2016. *Dinamika Hubungan Islam dan Agama Lokal di Indonesia: Pengalaman Towani Tolotang di Sulawesi Selatan*. Wawasan. Vol. 1, No. 2, 179-184.
- Hasudungan, A. N., & Kurniawan, Y. (2018, October). Meningkatkan Kesadaran Generasi Emas Indonesia Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 Melalui Inovasi Digital Platform www.indonesia2045.org. In *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin* (Vol. 1, pp. 51-58).
- Hayat, Nahrul. 2019. *Komunikasi Politik*. Makassar: Pilar Nusantara.
- Hessley, R. K., Reasoner, J. W., & Riley, J. T. (1986). *Coal Science* (Tenth Edition ed.). New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Hidayansyah, Rachmat. (2007). *Ruang terbuka hijau (RTH) Kota Makassar*. Perpustakaan Universitas Indonesia UI – Tesis. <http://lib.ui.ac.id/opac/ui/detail.jsp?id=109845&lokasi=lokal./diakses>, 19 Maret 2019.
- Horikoshi, Hiroko. (1987). *Kyai dan Perubahan Sosial*, terj. Umar Basalim dan Andi Muarly Sunrawa. (Jakarta: P3M).
- <http://www.coal.ca>. (2003, March). *About Coal*. Retrieved Juli 11, 2012, from Coal Association of Canada.
- <http://www.wci-coal.com>. (2000, March). *Coal in the Steel Industry*. Retrieved July Saturday, 2012, from Coal: Power for Progress.
- <https://aceh.tribunnews.com/2019/07/11/pendidikan-tinggi-lokomotif-peradaban-bangsa>. Diakses tanggal 09 Februari 2020.
- <https://economy.okezone.com/read/2019/03/05/320/2025987/studi-nielsen-pemirsa-indonesia-habiskan-5-jam-nonton-tv-3-jam-berselancar-di-internet>. Studi Nielsen: Pemirsa Indonesia Habiskan 5 Jam Nonton TV, 3 Jam Berselancar di Internet. Diakses pada hari Rabu, 25 Maret 2020.

- <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4833581/mendes-ajak-kampus-dan-mahasiswa-indonesia-wujudkan-desa-surga>. Diakses tanggal 08 Februari 2020.
- <https://www.worldometers.info/coronavirus/>. Diakses pada hari Rabu, 25 Maret 2020.
- Ikhsyan, Nova, Chatarina Muryani, Peduk Rintayati. (2017). Analisis Sebaran, Dampak dan Adaptasi Masyarakat Terhadap Banjir Rob di Kecamatan Semarang Timur dan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang. *Jurnal GeoEco* 3 (2): 145-156.
- Irianto, Gugus. 2004. A Critical Enquiry into Privatisation of State-owned Enterprises: The Case of PT Semen Gresik (Persero) Tbk., PhD Thesis, Department of Accounting and Finance, University of Wollongong, NSW, Australia.
- Irianto, Gugus. 2006. Dilema “Laba” dan Rerangka Teori Political Economy of Accounting (PEA). *TEMA*, Volume 7, Nomor 2, September 2006.
- Jack, C, Ricards. 2000. *Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics*. Kuala Lumpur: Longman Group.
- Jimly Asshiddiqie, 2015. *Konstitusi Bernegara*. Malang: Setara Press.
- Joseph, Benny. (2005). *Environmental Studies*. New Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing.
- Juajir Sumardi, 2017. *Gerakan Akademik Untuk Kedaulatan Migas Indonesia*. Makassar: Arus Timur.
- Karim, A. (2019). Pengaruh Tagline Iklan Versi “Axis Hits Bonus” Dan Brand Ambassador Terhadap Brand Awareness Kartu Axis (Studi Pada Mahasiswa STIE Amkop Makassar). *Movere Journal*, 1(1), 1-13.
- Karim, A. (2019). Pengaruh Tagline Iklan Versi “Axis Hits Bonus” Dan Brand Ambassador Terhadap Brand Awareness Kartu Axis (Studi Pada Mahasiswa STIE Amkop Makassar). *Movere Journal*, 1(1), 1-13.
- Karim, A. (2019). *Peningkatan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*.

- Karim, A. (2019). Peningkatan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- Karim, A. (2019). Peningkatan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- Karim, A. (2019). Peningkatan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- Karim, A. (2019, March). The Effect of" Axis Hits Bonus" Version Tagline Advertising and Ambassador Brand Against Axis Cards Awareness. In First International Conference on Materials Engineering and Management-Management Section (ICMEMm 2018). Atlantis Press.
- Karim, A. (2019, March). The Effect of" Axis Hits Bonus" Version Tagline Advertising and Ambassador Brand Against Axis Cards Awareness. In First International Conference on Materials Engineering and Management-Management Section (ICMEMm 2018). Atlantis Press.
- Karim, A. (2019, March). The Effect of" Axis Hits Bonus" Version Tagline Advertising and Ambassador Brand Against Axis Cards Awareness. In First International Conference on Materials Engineering and Management-Management Section (ICMEMm 2018). Atlantis Press.
- Karim, A. (2019, March). The Effect of" Axis Hits Bonus" Version Tagline Advertising and Ambassador Brand Against Axis Cards Awareness. In First International Conference on Materials Engineering and Management-Management Section (ICMEMm 2018). Atlantis Press.
- Karim, A. (2019, March). The Effect of" Axis Hits Bonus" Version Tagline Advertising and Ambassador Brand Against Axis Cards Awareness. In First International Conference on Materials Engineering and Management-Management Section (ICMEMm 2018). Atlantis Press.
- Karim, A. (2019, March). The Effect of" Axis Hits Bonus" Version Tagline Advertising and Ambassador Brand Against Axis Cards Awareness. In First International Conference on Materials Engineering and Management-Management Section (ICMEMm 2018). Atlantis Press.
- Karim, A. MANAJEMEN PENGELOLAAN BANTUAN PERALATAN MESIN KEPADA PELAKU USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN ENREKANG.
- Karim, A. PENINGKATAN KAPASITAS PEREMPUAN SECARA KELEMBAGAAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN

KEMISKINAN KELUARGA NELAYAN DI KECAMATAN
GALESONG KABUPATEN TAKALAR.

- Kedaulatanpangan.Org/Mencari-Formulasi-Membangun-
Kawasan-Perdesaan-Inklusif/ diakaes pada 06 Februari
2020.
- Kemendes RI, 2018.
- Kementerian Keuangan RI, 2018.
- Kent L. Gustafson & Robert Maribe Branch. 2002. *Instructional
Development Models*. New York: Eric Clearinghouse on
information & Technology Syracuse University.
- Kirk, R. E., & Othmer, D. F. (1979). *Encyclopedia of Chemical
Technology* (Third Edition ed., Vol. VI). New York: John
Wiley & Sons, Inc.
- Koestoer, R. A., Yulianto, S. N., Iwan, M., Martino, R. S., & Nandy, S.
(1997). *Studi Tentang Batubara: Potensi, Teknologi dan
Prospek Pemanfaatannya*. Depok.
- Krevelen, D. W. (1993). *Coal: Typology Physics Chemistry
Constitution*. Third Edition.
- Kusumohadimodjo. 2000. *Kebhinnekaan Masyarakat Indonesia
Suatu Problematika Filsafat Kebudayaan*. Jakarta: Grasindo.
- Larsen, J. W. (1987). *Organic Chemistry of Coal*. Washington D.C.:
American Chemical Society.
- LittleJohn, Stephen W. 1996. *Theories of Human Communication –
Fifth Edition*. Terjemahan edisi Indonesia 1 (Chapter 1-9),
dan edisi Indonesia 2 (Chapter 10-16). Jakarta: Salemba
Humanika
- Lubis, Yusniar, Bambang Hermanto, dan Emron Edison. 2018.
Manajemen dan Riset Sumber Daya Manusia. Cetakan
Kesatu. Penerbit: Alfabeta, Bandung.
- Lukens-Bull, Ronald A. (2001). *Two Sides of The Same Coin:
Modernityand Tradition in Islamic Education in Indonesia*.
Anthropology and Education Quarterly, Vol. 32, No. 3, 350-
372,
- M. Kholid Syeirazi, 2017. *Tata Kelola Migas Merah Putih*. Jakarta:
LP3ES.
- M.B. Miles &A.M. Huberman. 1995. *Qualitative Data Analysis*.
Beverly Hills. California: Sage Publication Inc.

- Maddatuang, B., & Karim, A. (2019). Faktor Berpengaruh terhadap Etos Kerja Pegawai Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) Provinsi Sulawesi Selatan.
- Maddatuang, B., & Karim, A. Faktor Berpengaruh terhadap Etos Kerja Pegawai Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) Provinsi Sulawesi Selatan.
- Madjid, Nurcholis, 2008, Islam doktrin dan Peradaban, Jakarta: Paramasidina
- Mahardika, T. (2001). Pendidikan Politik Pembangunan Desa. Pustaka Utama Yogyakarta.
- Manna, Z. and Waldinger, R. (1985). The Logikal Basic for Computer programming: Addison-Wesley Publishing Company,
- Margono, S. 2005. Metodologi Penelitian Pendidikan. Cet. III. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marzuki. 2000. Metodologi Riset. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mastuhu. (1994). Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren. (Jakarta: INIS, 1994).
- Maulidah, E. (2019, April). CHARACTER BUILDING DAN KETERAMPILAN ABAD 21 DALAM PEMBELAJARAN DI ERA REVOLUSI INDUTRI 4.0. In Prosiding Seminar Nasional PGSD UST (Vol. 1).
- Maxensius Tri Sambodo, Siwage Dharma Negara, & Felix Wisnu Handoyo, 2016. Dalam Akses Listrik Dan Kesejahteraan Masyarakat. Jakarta: LIPI Press.
- McKernan, John Francis and MacLulich, Katarzyna Kosmala. 2004. Accounting, Love and Justice. Accounting, Auditing & Accountability Journal. Vol. 17 No. 3, pp. 327-360. Emerald Group Publishing Limited.
- McQuail, Dannis. 2010. Teori Komunikasi Massa (Edisi 6). Jakarta: Salemba Humanika.
- Menon, S., & Kahn, B. E. 2003. Corporate sponsorships of philanthropic activities: When do they impact perception of sponsor brand? Journal of Consumer Psychology, 13, 3 16-327.

- Micom. (2017). Sudah Saatnya ASEAN Terapkan Sanksi Ekonomi Terhadap Myanmar. Retrieved August 26, 2019, from Media Indonesia website: <https://mediaindonesia.com/read/detail/132022-sudah-saatnya-asean-terapkan-sanksi-ekonomi-terhadap-myanmar>.
- Moleong, Lexy J. 2003. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Molthof, M. (2012). ASEAN and the Principle of Non-Interference. Retrieved August 27, 2019, from E-International Relations Students website: <https://www.e-ir.info/2012/02/08/asean-and-the-principle-of-non-interference>
- Mozammel, H.M., Masahiro, O., Bhattacharya SC. (2002). Activated charcoal from coconut shell using ZnCl₂ activation. Biomass and Bioenergy, Vol. 22, pp. 397 – 400.
- Muhammad Hambali. Peran Negara Di Bidang Ekonomi : Perspektif Kapitalisme, Sosialisme dan Islam. <https://marx83.wordpress.com/2009/02/03/100/>.
- Muhlis, Febri Hijroh. 2016. Teologi Pancasila: Ideologi Kerukunan Umat Beragama, STAIN Kudus, Fikrah.
- Mujahidah, (2010). Analisis Terhadap Interaksi Sosial Antar Pemeluk Agama dan Etnis di Kota Sorong. (Sorong: Pustaka Rafana).
- Nasikun. 2007. Mensinergikan Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nata, Abuddin. (2013). Sejarah Pendidikan Islam Pada Periode Klasik dan Pertengahan. Cet. ke-4. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Natalia, Melta. 2017. Agenda setting Berita Pedofilia Di Samarinda Pos. eJournal Ilmu Komunikasi.fisip-ummul 2017, 5 (1): 283-295.
- National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS). 2000. Dioxin Research at the NIEHS, <http://www.Niehs.Nih.gov/oc/factsheet/dioxin.htm>.

- Nesadurai, H. E. S. (2008). The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). *New Political Economy*, 13(2), 225–239. <https://doi.org/10.1080/13563460802018588>.
- Nizar, Samsul. (2011). “Sejarah Pendidikan Islam Pada Periode Rasulullah” dalam Menelusuri Jejak Pendidikan Islam era Rasulullah sampai Indonesia” cetakan ke-4 (Jakarta: Kencana Predana Media Group).
- Nuh, Nuhron, 2005. Menelusuri Kearifan Lokal di Bumi Nusantara. Cet. I: Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama.
- Nukman. (2007). Pengaruh Pencampuran Batubara Muda Dari Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan Terhadap Suhu Pembakarannya dengan Menggunakan Fixed Bed Combustor. *Jurnal Sains Materi Indonesia*, 10 (3), 284-287.
- Nukman. (2008). Pengaruh Pencampuran Batubara Semi Antrasit dan Sub-Bituminus Terhadap Nilai Proksimat, Nilai Ultimat, Kadar Sulfur dan Nilai Kalori Serta Karakteristik Pembakarannya dengan Menggunakan Oksigen. *Jurnal Rekayasa Sriwijaya*, 17 (3).
- Nur Aini. (2017). Sanksi bagi Myanmar bisa Ekonomi dan hingga penggunaan kekerasan. Retrieved August 26, 2019, from *Republika* website: <https://www.republika.co.id/berita/internasional/global/17/09/04/ovqhtv382-sanksi-bagi-myanmar-bisa-ekonomi-hingga-penggunaan-kekerasan>.
- Nur, Indrayani, dkk. 2018. Implikasi Pengembangan Desa Wisata Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal (Studi di Desa Pao). Seminar Nasional dan Call for Paper: Manajemen, Akuntansi dan Perbankan 2018. Hal. 1090-1104.
- Odum, Eugene P. (1979). *Fundamentals of Ecology* third Edition. Georgia: Saunders College Publishing.
- Oswaldo de Riverro, 2008. *Mitos Perkembangan Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pari, G., Widayati, D. T dan M. Yoshida. 2009. Mutu arang aktif dari serbuk gergaji jati. *Jurnal Penelitian Hasil Hutan*. 27 (4): 381-398. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan, Bogor

- Paulus Effendi Lotulung, 1993. Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Hakim Perdata. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik desa, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, No 21 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, Pasal 3 dan 4.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional
- PERMEN Desa No 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- PERMEN Desa No 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.
- Perse, Elizabeth M. 2001. Media Effects And Society. England: Routledge
- Perundang-undangan:
- Prananta, Juni. 2008. Pemanfaatan Sabut dan Tempurung kelapa SertaCangkang Sawit Untuk Pembuatan Asap Cair Sebagai Pengawet Alami. (On-Line). <http://www.scrab.com> [13 Oktober 2008]
- Prasetyo, B., & Trisyanti, U. (2018). Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial. IPTEK Journal of Proceedings Series, (5), 22-27.
- Prieto-Carron, M. Lund-thomsen, P. Chan, A. Muro, A dan Bhushan, C. 2013. Critical perspectives on CSR and development: what we know, what we don't know, and what we need to know. Journal Compilation Blackwell Publishing Ltd/ The Royal Institute of International Affairs 82: 5 (2006) 977-987.
- Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan, 2018. Integrasi Antar Lembaga Dalam Percepatan Pengembangan Ekonomi Perdesaan. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Putrawangsa, S., & Hasanah, U. (2018). Integrasi Teknologi Digital Dalam Pembelajaran Di Era Industri 4.0. Jurnal Tatsqif, 16(1), 42-54.

- Qodir, 2013. The Politics of Multiculturalism of the Towani Tolotang Minority in South Sulawesi. Al Albab. Vol. 2, No. 1, 3-17.
- Razjevic, K. (1976). Handbook of Thermodynamic Tabela and Charts. New York: McGraw-Hill Book Company.
- Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 dalam www.bappenas.go.id
- Richard West, Lynn H. Turner. 2008. Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi. (Buku 2) (Edisi 3). Jakarta: Salemba Humanika
- Rivai, Veithzal, 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia, Untuk Perusahaan, Cetakan kedua, Penerbit : Raja Grafindo, Jakarta.
- Robbins, Stephen, P. dan Judge, 2015, Prilaku Organisasi, Edisi Keenambelas, Penerbit : Salemba Empat, Jakarta
- Roesyadi, A., Mahfud, & Aladin, A. (2005). Karakterisasi, Desulfurisasi dan Deashing Batubara Asal Sulawesi Secara Flotasi. Jurnal Terakreditasi Nasional MEDIA TEKNIK UGM, XXVII (1).
- Rosser, Andrew. 1999. The Political Economy of Accounting Reform in Developing Countries: The Case of Indonesia. Asia Research Centre. Murdoch University. Perth, Western Australia. Working Paper No. 93 July 1999
- Sagala, Saut, Dodon Yamin, Ramanditya Wimbardana. (2014). Adaptasi Non Struktural Penduduk Penghuni Permukiman Padat terhadap Bencana Banjir: Studi Kasus Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung. Working Paper 5 (2). Resilience Development Initiative.
- Salter, S.B. and T.S. Douplik. 1992. The Relationship between Legal Systems and Accounting Practices: A Classification Exercise. Advances in International Accounting.
- Scharmm, Wilbur dan Donald F., Roberts. 1973. The Process and Effects of Mass Communication. Revised Edition. Urbana-Chicago-London: University of Illinois Press.
- Sedarmayanti, 2016, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja, Cetakan Kedua, Penerbit: Salemba Empat, Yogyakarta.

- Sen, S., & Bhattacharya, C. B. 2000. Does doing good always lead to doing better? Consumer reactions to corporate social responsibility. *Journal of Marketing Research*, 38, 225-243.
- Shaha, A. K. (1974). *Combustion Engineering and Fuel Technology*. New Delhi: Oxford and Publishing Co.
- Shihab, M. Quraish, 1996, *Wawasan Al-Qur'an*, Jakarta: Mizan
- Simatupang, Togar M et al. 2012. Enhancing the Competitiveness of the Creative Services Sector in Indonesia. Jakarta: ERIA Research Project Report.
- Smith, S. M., & Alcorn, D. S. 1991. Cause marketing: A new direction in the marketing of corporate social responsibility. *Journal of Consumer Marketing*, 8, 19-35.
- Soekanto Soerjono, 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo.
- Soemarwoto, otto. (2001). *Atur Diri sendiri: paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soerjani. (1997). *Environmental Education*. Jakarta. Universitas Indonesia Published
- Soetomo, 2012. *Pembangunan Masyarakat Merangkai Sebuah Kerangka*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal.188.
- Sproule, J.M. 1980. *Argument*. New York: McGraw-Hill.
- Steenbrink, Karel A. (1986). *Pesantren, Madrasah, Sekolah, Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen*. (Jakarta: LP3ES).
- Sudjana, Nana. 2010. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru.
- Sujiono. P. 2006. *Manajemen Pelayanan Publik*. Cendekia. Jakarta hal. 235.
- Sumardjo dan Donni Juni Priansa, 2018. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia Konsep-Konsep Kunci*, Cetakan Pertama, Penerbit : Alfabeta, Bandung
- Sunyoto Danang, 2015. *Teori Prilaku Keorganisasional*, Cetakan Pertama, Penerbit : Caps, Jakarta
- Suprpto, S. (2009). Blending Batubara Untuk Pembangkit Listrik: Studi Kasus PLTU Suralaya Unit 1-4. *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara*, V, 31-39.

- Suprpto. (2003). Logika Informatika (Dasar-dasar Logika untuk Pemrograman Komputer&Perancangan Komputer): Yogyakarta: Gava Media.
- Suriamantri, Jujun. (2001). Ilmu Dalam prespektif (Sebuah Kumpulan karangan tentang hakekat ilmu). Jakarta: yayasan Obor Indonesia
- Sutrisno, Edy, 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia, cetakan kedelapan. Penerbit : Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Suwardana, H. (2018). Revolusi Industri 4. 0 Berbasis Revolusi Mental. JATI UNIK: Jurnal Ilmiah Teknik dan Manajemen Industri, 1(2), 102-110.
- Suwarso dan Alvin Y, 1991, Perubahan Sosial dan Pembagunan di Indonesia: teori-teori Modernisasi, Dependensi dan Sistem Dunia, Jakarta: LP3ES
- Suwatno dan Donni Juni Priansa, 2018. Mananajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi Publik dan Bisnis, Cetakan Keenam, Penerbit : Alfabeta, Bandung
- Suyartono, & Indria, B. (2000). The Future of Coal and its Industry in Indonesia. Indonesian Mining Journal, VI, 78-85.
- Sya'roni, M. (2015). Wajah Pendidikan Islam Indonesia.
- Syah, Achmad Fachruddin. (2012). Strategi Adaptasi Masyarakat Pesisir Bangkalan Terhadap Dampak Banjir Rob Akibat Perubahan Iklim. Jurnal KELAUTAN 5 (2).
- Syahza, Almasdi dan Suarman. 2013. Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan. Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 14 Nomor 1, Juni 2013, hlm. 126-139.
- Syukur, Nur Ahsan. 2015. Kepercayaan To Lotang dalam Perspektif Masyarakat Bugis kabupaten SIDRAP. Jurnal Rihlah.
- Tinggi, P. A. K. P. P. ABDUL KARIM BAHTIAR MADDATUANG H. GUNAWAN BATA ILYAS.
- Tram-Ahn Nguyen. (2016). Norm or Necessity? the Non-intervention principle in ASEAN. Cornell International Affairs Review, 9(1), 2.
- Umiarso, dan Masruroh Ninik. (2011). Modernisasi Pendidikan Islam Ala Azymardi Azra. (Jakarta: Az Ruzz Media).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan
- Usman. (2008). "Karakter pendididik di era Klasik dan Modern (Sebuah upaya menuju Pendidik yang berkualitas), dalam Suwito dan Fauzan "Sejarah Sosial Pendidikan Islam", Cet. ke-2. (Jakarta: Predana Media Group).
- UU desa No. 006 tahun 2014.
- UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- UUD 1945, Pasal 33.
- Vera, Nawiroh. 2010. Komunikasi Massa. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wartaekonomi.Co.Id/Read229990/Dana-Desa-Sebagai-Pelumas-Roda-Pembangunan-Ekonomi-Desa diakses pada 07 Februari 2020.
- Weihong, L. (1998). Market Analysis and Environmental Effect Of Clean. Coal Technology.
- Wekke, Ismail Suardi. (2012). Pembelajaran dan Identitas Muslim Minoritas (Upaya Penguatan lembaga Pendidikan Islam Papua Barat), Jurnal Ilmu Pendidikan Al-Rabwah, Vol. VI, No. 2, November, 75-94.
- Wekke, Ismail Suardi. (2012). Pembelajaran dan Identitas Muslim Minoritas (Upaya Penguatan lembaga Pendidikan Islam Papua Barat), Jurnal Ilmu Pendidikan Al-Rabwah, Vol. VI, No. 2, November, 75-94.
- Wekke, Ismail Suardi. (2013). Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Muslim Minoritas: Pesantren Nurul Yaqin Papua Barat. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar Madrasah, Vol. 5, No. 2, Januari-Juni, 91-116.
- Wekke, Ismail Suardi. (2013). Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Muslim Minoritas: Pesantren Nurul Yaqin Papua Barat. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar Madrasah, Vol. 5, No. 2, Januari-Juni, 91-116.
- Wekke, Ismail Suardi. (2014). Tradisi Pesantren dalam Konstruksi Kurikulum Bahasa Arab di Lembaga Pendidikan Minoritas Muslim Papua Barat. Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman Karsa, Vol. 22, No. 1, Juni, 20-38.

- Wekke, Ismail Suardi. (2015). Antara Tradisionalisme dan Kemodernan : Pembelajaran Bahasa Arab di Minoritas Muslim Papua Barat. *Jurnal Peradaban Islam Tsaqafah*, Vol. 11, No. 2, November, 313-332.
- Wickramasinghe, Danture dan Hopper, Trevor. 2005. A cultural political economy of management accounting controls: a case study of a textile Mill in a traditional Sinhalese village. *Critical Perspectives on Accounting* 16 (2005) 473–503
- Williams, S. Mitchell. 1999. Voluntary Environmental and Social Accounting Disclosure Practices in the Asia-Pacific Region: An International Empirical Test of Political Economy Theory. *The International Journal of Accounting*, Vol. 34, No. 2, pp. 209-238
- Wingart. 2012. *Transformasi Empat Pilar dalam Mengatasi Fenomena Konflik dan Kekerasan*. Bandung: Universitas Indonesia.
- Word Bank. 2004.
- Wu, L. (2000). East Asia and the Principle of Non-Intervention: Policies and Practices. *Maryland Series in Contemporary Asian Studies*, 5(160).
- Yoon, Yeosun. Giirhan-Canli, Zeynep dan Schwarz, Norbert. 2006. The Effect of Corporate Social Responsibility (CSR) Activities on Companies with Bad Reputations. *Journal of Consumer Psychology*, 16(4), 377-390.
- Ziemek, Manfred. (1986). *Pesantren dalam Perubahan Sosial*. (Jakarta: P3M).
- Zubaidah, S. (2018). Mengenal 4C: Learning and Innovation Skills untuk Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. In *2nd Science Education National Conference* (pp. 1-18).
- Zulkarnaen, Reza M. 2016. Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta. *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat* ISSN 1410 – 5675. Vol. 5, No. 1, Mei 2016: 1 – 4.